

## **BAB IV**

### **PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

#### **A. Urusan Wajib yang dilaksanakan**

##### **1. Pendidikan**

Urusan Pendidikan pada Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD yaitu Dinas Pendidikan serta Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan. Untuk Dinas Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp.759.625.753.959,- dan realisasi Rp.703.429.163.335,- (92,60%), sementara Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan dengan anggaran Rp.2.721.631.250,- dan realisasi Rp.2.673.715.935,- (98,24%) untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

##### **a. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- 6) Program Peningkatan Akses, Perluasan dan Mutu Pendidikan SMA, dengan kegiatan:
  - Pengadaan Moubiler SMA.
  - Pembinaan dan Pelaksanaan OSN SMA Tingkat Provinsi Sumatera Barat.
  - LCC tentang Tap MPR dan UUD 45.
  - Pembinaan dan Pelaksanaan FLS2N SMA Tingkat Provinsi Sumatera Barat.
  - Pembinaan dan Pelaksanaan O2SN SMA 6Inggris SMA (ECAFE Learning).
  - Bridging Course Pemantapan Sains Siswa SMA Kelas X Baru.
  - Seleksi Pembekalan dan Pembinaan ADEM dan ADIT.
  - Dana BOS SMA Negeri (DAK Non Fisik).
  - Rehabilitasi Gedung SMA.
  - Pengadaan Labor komputer SMA.
  - Pengadaan Alat Kesenian dan Olahraga SMA.
  - Pengadaan Buku Teks Pelajaran dan Buku Referensi/ Pustaka SMA.

- Lomba Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris Tingkat SMA Provinsi Sumatera Barat.
  - Pembangunan Rumah Dinas Guru SMA Negeri 1 Sumatera Barat.
  - Lomba Best Practise Guru SMA,
  - Lomba Best Practise Kepala SMA.
  - Peningkatan Kompetensi Pengelola Sekolah Boarding untuk SMA.
  - Pembangunan Laboraturium IPA SMA.
  - Pembangunan Pagar SMAN 2 Sumatera Barat.
  - Rapat Teknis dan Bimbingan pada Tim Pengembang Kurikulum Tingkat SMA.
  - Pembangunan Ruang Kelas dan Asrama siswa SMAN 3 Sumatera Barat.
  - Bimtek Pendidikan Karakter Bagi Guru Mapel di SMA se-Sumatera Barat.
  - Bimtek Program Literasi di Sekolah Jenjang SMA, Latihan Dasar Kepemimpinan.
  - Pembangunan Fasilitas Gedung SMA.
  - Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA.
  - Penyediaan Sarana dan Prasarana SMA (DAK) dan BOP SMA untuk 233 sekolah.
- 7) Program Peningkatan Akses, Perluasan Dan Mutu Pendidikan SMK, dengan Kegiatan:
- Pengadaan Moubiler SMK.
  - Penyediaan Bahan Praktek Pendidikan Bagi Siswa di SMKN 1 padang.
  - Pembangunan Fasilitas Gedung SMK.
  - Penyediaan Sarana Prasarana SMK (DAK).
  - Penelusuran lulusan SMA dan SMK yang diterima di Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha/ Industri.
  - Pembinaan Guru SMK Teknologi Sumatera Barat (On Dan In Service).
  - Praktek Kompetensi Keahlian Siswa SMK.
  - Uji Kompetensi Keahlian siswa SMK melalui LSP.
  - Perbaikan Peralatan Praktek/Peraga Siswa di Asrama SMKN 1 Padang.
  - Pengelolaan Asrama SMK 1 Padang.

- Pemeliharaan Gedung Praktek (Workshop) SMKN 1 Padang dan Asrama SMKN 1 Padang.
  - Lomba Debat Bahasa Tingkat SMK Provinsi Sumatera Barat.
  - Workshop guru Bahasa Inggris SMK (ECAFE Learning).
  - Verifikasi Tempat Ujian Kompetensi Keahlian SMK.
  - Verifikasi Tempat Ujian Kompetensi Keahlian SMK.
  - Pembinaan dan Pelaksanaan FIKS SMK Tingkat Provinsi Sumatera Barat.
  - Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional.
  - Pembinaan dan Pelaksanaan FLS2N SMK Tingkat Provinsi Sumatera Barat.
  - Pembinaan dan Pelaksanaan O2SN SMK Tingkat Provinsi Sumatera Barat.
  - Pengadaan Alat Kesenian SMK.
  - Aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK.
  - Bridging Course Pemantapan Sains Siswa SMK Kelas X Baru.
  - Pengadaan Labor komputer SMK.
  - Pengadaan Alat Praktek/ Peraga Siswa SMK.
  - Pengadaan Buku Teks Pelajaran dan Buku Referensi/ Pustaka SMK.
  - Rehabilitasi Gedung SMK.
  - Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK.
  - Rapat Koordinasi Kemitraan dengan Institusi Pasangan.
  - Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Bagi SMK se Sumatera Barat.
  - Dana BOS SMK Negeri (DAK Non Fisik).
  - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMK PP Negeri Padang.
  - BOP SMK untuk 109 sekolah.
- 8) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan kegiatan :
- Seleksi dan Pembekalan Guru dan Kepala Sekolah Tingkat SMK.
  - pengawas ke Tingkat Nasional.
  - Sertifikasi Asesor Guru SMK se Sumatera Barat.

- Pemberian Penghargaan Bagi Guru.
  - Kepala Sekolah dan Pengawas berprestasi Tingkat Provinsi SMA.
  - Pemberian Penghargaan Bagi Guru.
  - Kepala Sekolah dan Pengawas berprestasi Tingkat Provinsi SMK.
  - Lomba Olimpiade Guru Nasional (OGN ) SMA Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional.
  - Lomba Olimpiade Guru Nasional (OGN ) SMK Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional.
  - Peningkatan Kompetensi Kepala SMA Tingkat Provinsi.
  - Peningkatan Kompetensi Kepala SMK Tingkat Provinsi.
  - Diklat Calon Kepala Sekolah Tingkat Provinsi Sumatera Barat.
  - Peningkatan Kompetensi Operator SMA dan SMK.
  - Seleksi dan Pembekalan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Tingkat SMA Tahun 2018.
- 9) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Tugas Terknis Lainnya dengan kegiatan:
- Gebyar Pendidikan dan Sumatera Barat Expo.
  - Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Urusan Pendidikan.
  - Pemberdayaan Dewan Pendidikan.
  - Penyusunan Data Base Pendidikan.
  - Pengelolaan Dana BOS.
  - Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) SD dan SMP Tk. Provinsi dan Persiapan Tk Nasional.
  - Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) Tk. Provinsi dan TC Jenjang SD dan SMP.
  - Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tk. Provinsi dan TC Jenjang SD dan SMP.
  - Lomba Olimpiade Sain guru SD dan SMP tingkat Provinsi dan tingkat Nasional.
  - Sosialisasi Penerimaan, Pendistribusian, Pelaporan, Penghapusan Blanko Ijazah SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA dan Program Paket A, Paket B dan Paket C, Pra UN SMA dan SMK.
  - Bimtek Pemetaan Mutu dan Perencanaan Penemuan SNP pada Sekolah yag terakreditasi C dan TT.
  - Pengadaan Rapor Siswa SMA, SMK dan SLB.

- Lomba Sekolah Sehat (UKS) Tingkat Provinsi.
  - Penyebaran Informasi Pendidikan melalui WEB.
  - Penyelenggaraan Pelaksanaan OSN SD,SMP dan SMA Tingkat Nasional (Menjadi Tuan Rumah) Tahun 2018.
  - Penilaian Angka Kredit Guru dan Pengawas.
  - Penyusunan Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Seleksi Apresiasi GTK PAUD dan DIKMAS Berprestasi Tingkat Provinsi.
  - Evaluasi Dan Validasi Implementasi KTSP SMA, SMK dan SLB.
  - Bimtek Pengelola Penatausahaan Keuangan SMA/SMK/SLB.
  - Peningkatan Kompetensi Pengurus Barang dan Aset SMA, SMK dan SLB dan Workshop Penyusunan Program Pencapaian SPM SMA, SMK dan SLB.
- 10) Program Pendidikan Berkarakter, dengan kegiatan :
- Bimtek Program Penanggulangan Resiko Penggunaan Narkoba Bagi Siswa SMA.
  - Bimtek Program Penanggulangan Resiko Penggunaan Narkoba Bagi Siswa SMK.
  - Bimtek Penerapan Pendidikan Karakter Cerdas melalui kelompok kecil bagi guru BK SMA dalam pencegahan Narkoba.
  - Bimtek Penerapan Pendidikan Karakter Cerdas melalui kelompok kecil bagi guru BK SMK dalam pencegahan Narkoba.
  - Bimtek Pelaksanaan Muatan Lokal bagi Guru SMA dan SMK Piloting.
  - MTQ Antar Siswa SMA.
- 11) Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, dengan kegiatan :
- Workshop Peningkatan Kompetensi Kepala SLB.
  - Peningkatan Kompetensi Guru berdasarkan Jenis Ketunaan (5 Ketunaan).
  - Peningkatan Kompetensi Guru Keterampilan SLB.
  - Seleksi, Pembekalan, dan Penghargaan GTK Berprestasi dan Berdedikasi (SLB, Inklusi dan Daerah 3T).
  - Lomba Literasi dan Lomba Keterampilan SDLB, SMPLB, dan SMALB.
  - Pembinaan dan Pengembangan KKKS/ KKG, MKKS.

- Workshop Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif.
  - FLS2N SLB Tingkat Provinsi dan Persiapan Tingkat Nasional.
  - O2SN SLB Tingkat Provinsi dan Persiapan Tingkat Nasional.
  - Pengadaan Alat Praktek/ Peraga Pendidikan SLB.
  - Dana BOS SLB Negeri (DAK Non Fisik).
  - US SDLB dan UAS SLB.
  - Pengadaan Meubilair SLB.
  - Rehabilitasi Sekolah Luar Biasa (SLB).
  - Pelatihan Teknis Program Khusus Bagi GTK Non PLB.
  - Pelatihan Penulisan.
  - Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Bagi Guru SLB.
  - Penyusunan dan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) Bagi Kepala SLB.
  - Revitalisasi Gedung SLB.
  - Pembuatan Pagar Sekolah Luar Biasa.
  - Verifikasi Pendirian SLB Baru.
  - Peningkatan Kompetensi Pengawas SLB.
  - Pelatihan Teknis Pelaksanaan Penilaian K.13 Bagi Guru SLB.
  - Penyediaan Sarana dan Prasarana SLB (DAK) dan BOP SLB untuk 28 sekolah.
- 12) Program Peningkatan SDM Pertanian, dengan kegiatan Peningkatan SDM Petugas Melalui Diklat Pertanian.
  - 13) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian dengan kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana pendidikan/Pelatihan Pertanian di Balai Diklat Pertanian.

**b. Realisasi Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran Rp.6.244.850.230,- dan realisasi sebesar Rp.5.223.907.395,- (83,65%).
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan anggaran Rp.4.033.252.300,- dan realisasi sebesar Rp.3.691.953.537,- (91,54%).
- 3) Program Peningkatan disiplin Aparatur, dengan anggaran Rp.235.178.400,- dan realisasi sebesar Rp.230.733.000,- (98,11%).

- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan anggaran Rp.24.602.000,- dan realisasi sebesar Rp.4.080.000,- (16,58%).
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan anggaran Rp.3.226.220.500,- dan realisasi sebesar Rp.2.949.580.575,- (91,43%).
- 6) Program Peningkatan Akses, Perluasan dan Mutu Pendidikan SMA, dengan anggaran Rp.399.716.044.575,- dan realisasi sebesar Rp.379.081.135.962,- (94,84%), dengan output :
  - Terbangunnya Fasilitas Gedung Sekolah dalam mendukung proses belajar mengajar.
  - Terlaksananya Pembinaan Olimpiade Sains Nasional tingkat SMA Provinsi Sumatera Barat.
  - Terpilihnya siswa terbaik Provinsi Sumatera Barat mewakili tingkat nasional.
  - Terlaksananya Pembinaan festival lomba seni siswa nasional tingkat SMA Provinsi Sumatera Barat.
  - Terlaksananya Pembinaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat SMA Provinsi Sumatera Barat.
  - Terlaksananya Pengembangan Inovasi Pembelajaran Kurikulum Bahasa Inggris di SMA.
  - Tersusunnya program Bridging Course Pemantapan sains siswa SMA kelas X baru.
  - Terpilihnya Siswa/Siswi daerah khusus sebagai peserta ADEM.
  - Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan SMA Negeri di Kota Padang :
    - SMA Negeri 1 Padang.
    - SMA Negeri 2 Padang.
    - SMA Negeri 3 Padang.
    - SMA Negeri 4 Padang.
    - SMA Negeri 5 Padang.
    - SMA Negeri 6 Padang.
    - SMA Negeri 7 Padang.
    - SMA Negeri 8 Padang.
    - SMA Negeri 9 Padang.
    - SMA Negeri 10 Padang.

- SMA Negeri 11 Padang.
- SMA Negeri 12 Padang.
- SMA Negeri 13 Padang.
- SMA Negeri 14 Padang.
- SMA Negeri 15 Padang.
- SMA Negeri 16 Padang.
- Terlaksananya PBM di SMA Negeri Keberbakatan Olahraga Sumatera Barat.
- Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan SMA Negeri di Kota Bukittinggi :
  - SMA Negeri 1 Bukittinggi.
  - SMA Negeri 2 Bukittinggi.
  - SMA Negeri 3 Bukittinggi.
  - SMA Negeri 4 Bukittinggi.
  - SMA Negeri 5 Bukittinggi.
- Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan Negeri di Kota Padang Panjang :
  - SMA Negeri 1 Padang Panjang.
  - SMA Negeri 2 Padang Panjang.
  - SMA Negeri 3 Padang Panjang.
  - SMA Negeri 1 Sumatera Barat.
- Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan SMA Negeri di Kota Sawahlunto :
  - SMA Negeri 1 Sawahlunto.
  - SMA Negeri 2 Sawahlunto.
  - SMA Negeri 3 Sawahlunto.
- Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan SMA Negeri di Kota Solok :
  - SMA Negeri 1 Solok.
  - SMA Negeri 2 Solok.
  - SMA Negeri 3 Solok.
  - SMA Negeri 4 Solok.
- Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan SMA Negeri di Kota Payakumbuh :
  - SMA Negeri 1 Payakumbuh.
  - SMA Negeri 2 Payakumbuh.
  - SMA Negeri 3 Payakumbuh.



- SMA Negeri 4 Payakumbuh.
- SMA Negeri 5 Payakumbuh.
- Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan SMA Negeri di Kota pariaman :
  - SMA Negeri 1 Pariaman.
  - SMA Negeri 2 Pariaman.
  - SMA Negeri 3 Pariaman.
  - SMA Negeri 4 Pariaman.
  - SMA Negeri 5 Pariaman.
  - SMA Negeri 6 Pariaman.
- Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan SMA Negeri di Kabupaten Agam :
  - SMA Negeri 1 Lubuk Basung.
  - SMA Negeri 2 Lubuk Basung.
  - SMA Negeri 3 Lubuk Basung.
  - SMA Negeri 1 Tilatang Kamang.
  - SMA Negeri 1 Tanjung Raya.
  - SMA Negeri 1 Ampek Angkek.
  - SMA Negeri 1 Palupuh.
  - SMA Negeri 1 Tanjung Mutiara.
  - SMA Negeri 1 Matur.
  - SMA Negeri 1 IV Koto.
  - SMA Negeri 1 Baso.
  - SMA Negeri 1 Palembayan.
  - SMA Negeri 1 Sungai Pua.
  - SMA Negeri 1 Candung.
  - SMA Negeri 2 Tilatang Kamang,
  - SMA Negeri 2 I V Koto.
  - SMA Negeri 1 Ampek Nagari.
  - SMA Negeri 1 Banuhampu.
  - SMA Negeri Agam Cendekia.
  - SMA Negeri 2 Palembayan Kabupaten Agam.
- Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan SMA Negeri di kabupaten Pasaman :
  - SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping.
  - SMA Negeri 1 Rao.

- SMA Negeri 1 Bonjol.
- SMA Negeri 1 Panti.
- SMA Negeri 1 Dua Koto.
- SMA Negeri 1 Tigo Nagari.
- SMA Negeri 1 Padang Gelugur.
- SMA Negeri 2 Lubuk Sikaping.
- SMA Negeri 1 Mapat Tunggul.
- SMA Negeri Mapat Tunggul Selatan.
- SMA Negeri 1 Rao Utara.
- SMA Negeri 3 Sumatera Barat.
- Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan SMA Negeri di kabupaten Lima Puluh Kota :
  - SMA 1 Kec. Lareh Sago Halaban.
  - SMA Negeri 1 Kec. Harau.
  - SMA Negeri 1 Kec. Guguak.
  - SMA Negeri 1 Kec. Situjuah Limo Nagari.
  - SMA Negeri 1 Kec. Pangkalan Koto Baru.
  - SMA Negeri 1 Kec. Suliki.
  - SMA Negeri 1 Kec. Akabiluru.
  - SMA Negeri 1 Kec. Kapur IX.
  - SMA Negeri 11 Kec. Payakumbuh.
  - SMA Negeri 1 Kec. Gunung Omeh.
  - SMA Negeri 2 Harau.
  - SMA Negeri 1 Kec. Mungka.
  - SMA Negeri 2 Kec. Bukik Barisan.
  - SMA Negeri 1 Bukik Barisan.
  - SMA Negeri 2 Kec. Pangkalan Koto Baru.
  - SMA Negeri 2 Kec. Kapur IX.
- Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan SMA Negeri di Kabupaten Solok :
  - SMA Negeri 11 X Koto Singkarak.
  - SMA Negeri 1 Gunung Talang.
  - SMA Negeri 1 Lembah Gumanti.
  - SMA Negeri 1 Bukit Sundi.
  - SMA Negeri 1 Kubung.
  - SMA Negeri 1 Lembang Jaya.

- SMA Negeri 1 X Koto Diatas.
- SMA Negeri 1 IX Koto Sungai Lasi.
- SMA Negeri 1 Pantai Cermin.
- SMA Negeri 2 X Koto Singkarak.
- SMA Negeri 1 Payung Sekaki.
- SMA Negeri 1 Junjung Sirih.
- SMA Negeri 1 Hiliran Gumanti.
- SMA Negeri 2 Gunung Talang.
- SMA Negeri 2 Lembang Jaya.
- SMA Negeri 2 Hiliran Gumanti.
- SMA Negeri 1 Danau Kembar.
- SMA Negeri 1 Tigo Lurah.
- SMA Negeri 2 Sumatera Barat.
- Terlaksananya Kebutuhan Biaya Pengelolaan SMA Negeri di Kabupaten Padang Pariaman :
  - SMA Negeri 1 Lubuk Alung.
  - SMA Negeri 1 Sungai Limau.
  - SMA Negeri 1 2 X 11 Enam Lingkung.
  - SMA Negeri 1 Enam Lingkung.
  - SMA Negeri 1 Nan Sabaris.
  - SMA Negeri 1 Sei Geringging.
  - SMA Negeri 1 V Koto Kampung Dalam.
  - SMA Negeri 1 VII Koto Sei Sarik.
  - SMA Negeri 1 Batang Anai.
  - SMA Negeri 2 Sei Limau.
  - SMA Negeri 1 IV Koto Aur Malintang.
  - SMA Negeri 1 Ulakan Tapakis.
  - SMA Negeri 1 Padang Sago.
  - SMA Negeri 1 2 X 11 Kayutanam.
  - SMA Negeri I V Koto Timur.
  - SMA Negeri 2 Lubuk Alung.
  - SMA Negeri 1 Patamuan,
  - SMA Negeri 1 Batang Gasan.
  - SMA Negeri 2 Batang Anai.
  - SMA Negeri 2 VII Koto Sungai Sarik.

- Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan SMA Negeri di Kabupaten Pesisir Selatan :
  - SMA Negeri 1 Painan.
  - SMA Negeri 2 Painan.
  - SMA Negeri 1 Koto XI Tarusan.
  - SMA Negeri 2 Koto XI Tarusan.
  - SMA Negeri 1 Batang Kapas.
  - SMA Negeri 2 Batang Kapas.
  - SMA Negeri 1 Lengayang.
  - SMA Negeri 1 Ranah Pesisir.
  - SMA Negeri 1 Basa Ampek Balai.
  - SMA Negeri 1 Bayang dan SMA Negeri 2 Bayang.
  - SMA Negeri 1 Pancung Soal.
  - SMA Negeri 1 Lunang.
  - SMA Negeri 1 Linggo Sari Baganti.
  - SMA Negeri 1 Sutera.
  - SMA Negeri 2 Lengayang.
  - SMA Negeri 3 Lengayang.
  - SMA Negeri 1 IV Nagari Bayang.
  - SMA Negeri 2 Ranah Pesisir.
  - SMA Negeri 1 Airpura.
  - SMA Negeri 1 Silaut.
  - SMA Negeri 3 Painan.
  - SMA Negeri 2 Sutera.
- Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan SMA Negeri di Kabupaten Tanah Datar :
  - SMA Negeri 1 Batusangkar.
  - SMA Negeri 2 Batusangkar.
  - SMA Negeri 3 Batusangkar.
  - SMA Negeri 1 Sungai Tarab.
  - SMA Negeri 2 Sungai Tarab.
  - SMA Negeri 1 Rambatan.
  - SMA Negeri 2 Rambatan.
  - SMA Negeri 1 Lintau Buo.
  - SMA Negeri 1 Padang ganting.
  - SMA Negeri 1 Batipuh.

- SMA Negeri 1 Pariangan.
- SMA Negeri 1 Salimpaung.
- SMA Negeri 1 Sungayang.
- SMA Negeri 1 X Koto Kabupaten Tanah Datar.
- SMA Negeri 2 Lintau Buo.
- Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan SMA Negeri di Kabupaten Sijunjung :
  - SMA Negeri 1 Sijunjung.
  - SMA Negeri 2 Sijunjung.
  - SMA Negeri 3 Sijunjung.
  - SMA Negeri 4 Sijunjung.
  - SMA Negeri 5 Sijunjung.
  - SMA Negeri 6 Sijunjung, SMA Negeri 7 Sijunjung, SMA Negeri 8 Sijunjung.
  - SMA Negeri 9 Sijunjung.
  - SMA Negeri 10 Sijunjung.
  - SMA Negeri 11 Sijunjung, SMA Negeri 12 Sijunjung.
  - SMA Negeri 13 Sijunjung.
- Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan SMA Negeri di Kabupaten Kepulauan Mentawai :
  - SMA Negeri 1 Siberut Selatan.
  - SMA Negeri 1 Pagai Utara Selatan.
  - SMA Negeri 1 Sipora.
  - SMA Negeri 2 Sipora.
  - SMA Negeri 1 Siberut Utara.
  - SMA Negeri 1 Siberut Tengah.
  - SMA Negeri 1 Pagai Selatan.
  - SMA Negeri 1 Siberut Barat.
  - SMA Negeri 2 Sikakap.
  - SMA Negeri 1 Siberut Barat Daya.
  - SMA Negeri 1 Pagai Utara.
- Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan SMA Negeri di Kabupaten Pasaman Barat :
  - SMA Negeri 1 Talamau.
  - SMA Negeri 1 Pasaman.
  - SMA Negeri 1 Lembah Melintang.

- SMA Negeri 1 Kinali.
- SMA Negeri 1 Koto Balingka.
- SMA Negeri 1 Gunung Tuleh.
- SMA Negeri 1 Sungai Beremas.
- SMA Negeri 1 Ranah Batahan.
- SMA Negeri 1 Luhak Nan Duo.
- SMA Negeri 1 Sungai Aur.
- SMA Negeri 2 Pasaman.
- SMA Negeri 2 Kinali,
- Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan SMA Negeri di Kabupaten Solok Selatan :
  - SMA Negeri 1 Solok Selatan.
  - SMA Negeri 2 Solok Selatan.
  - SMA Negeri 3 Solok Selatan.
  - SMA Negeri 4 Solok Selatan.
  - SMA Negeri 5 Solok Selatan.
  - SMA Negeri 6 Solok Selatan.
  - SMA Negeri 7 Solok Selatan.
  - SMA Negeri 8 Solok Selatan.
  - SMA Negeri 9 Solok Selatan.
  - SMA Negeri 10 Solok Selatan.
  - SMA Negeri 11 Solok Selatan.
- Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan SMA Negeri di Kabupaten Dharmasraya :
  - SMA Negeri 1 Sitiung.
  - SMA Negeri 1 Koto Baru.
  - SMA Negeri 2 Koto Baru.
  - SMA Negeri 1 Pulau Punjung.
  - SMA Negeri 2 Pulau Punjung.
  - SMA Negeri 1 Sungai Rumbai.
  - SMA Negeri 1 Timpeh.
  - SMA Negeri 1 Koto Besar.
  - SMA Negeri 1 IX Koto.
  - SMA Negeri 1 Koto Salak.
  - SMA Negeri 2 Sei. Rumbai.
  - SMA Negeri 1 Asam Jujuan.

- SMA Negeri Unggul Dharmasraya.
  - SMA Negeri 2 Sitiung Kabupaten Dharmasraya.
  - SMA Negeri 1 Sikabau Kabupaten Dharmasraya.
  - Tersalurnya dana BOS di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas.
  - Ruang Kelas yang representatif.
  - Tersedianya Alat Laboratorium Komputer.
  - Adanya alat kesenian SMA.
  - Tersedianya Buku Teks Pelajaran dan Buku Referensi/Pustaka SMA.
  - Terlaksananya Lomba Debat Bahasa tingkat Provinsi Sumatera Barat.
  - Rumah Dinas Guru SMAN 1 Sumatera Barat di Kabupaten Padang Panjang.
  - Terlaksananya Lomba Best Practise Guru Jurusan SMA IPA dan IPS Tingkat Provinsi.
  - Terlaksananya Lomba Best Practise Kepala Jurusan SMA IPA dan IPS Tingkat Provinsi.
  - Terlaksananya Program Sekolah Boarding Dengan Baik,
  - Terbangunnya Laboratorium IPA SMA.
  - Terbangunnya Pagar SMAN 2 Sumatera Barat.
  - Terlaksananya Rapat dan Bimbingan pada Tim Pengembang Kurikulum tingkat SMA.
  - Terbangunnya Ruang Kelas dan Asrama Siswa SMA 3 Sumatera Barat.
  - Terlaksananya Bimtek Pendidikan Karakter bagi guru mapel SMA se Sumatera Barat.
  - Tersusunnya program literasi di sekolah jenjang SMA 228 orang.
  - Tersusunnya program Latihan Dasar Kepemimpinan jenjang SMA 171 orang.
  - Terbangunnya Fasilitas Gedung Sekolah dalam mendukung proses belajar mengajar.
  - Terbangunnya Ruang Kelas Baru.
  - Tersedianya Kelengkapan Sarana Prasarana SMA se-Sumatera Barat dan Tersosialisasinya petunjuk teknis TPG dan pengawas.
- 7) Program Peningkatan Akses, Perluasan dan Mutu Pendidikan SMK, dengan anggaran Rp.266.094.673.870,-

dan realisasi sebesar Rp.239.062.989.956,- (89,84%), dengan output :

- Ruang kelas yang representatif.
- Terpenuhi Bahan Praktek Pendidikan Bagi Siswa SMK Teknologi dan Rekayasa Se Sumatera Barat.
- Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Gedung SMK.
- Tersedianya kelengkapan Sarana Prasarana SMK se-Sumatera Barat.
- Terdatanya siswa SMA dan SMK yang diterima di Perguruan Tinggi dan DUDI.
- Terlaksananya On dan In Service Guru SMK Teknologi se-Sumatera Barat.
- Terlaksananya Diklat Kompetensi Keahlian Siswa SMK Teknologi Jurusan Bangunan, Elektronika, Listrik, Mesin dan Otomotif.
- Terpenuhi Kebutuhan Biaya Pengelolaan SMK Negeri di Kota Padang :
  - SMK Negeri 1 Padang.
  - SMK Negeri 2 Padang.
  - SMK Negeri 3 Padang.
  - SMK Negeri 4 Padang.
  - SMK Negeri 5 Padang.
  - SMK Negeri 6 Padang.
  - SMK Negeri 7 Padang.
  - SMK Negeri 8 Padang.
  - SMK Negeri 9 Padang.
  - SMK Negeri 10 Padang.
- Terpenuhi Kebutuhan Biaya Pengelolaan di SMK Negeri 1 Sumatera Barat.
- Terpenuhi Kebutuhan Biaya Pengelolaan SMK Negeri di Kota Bukittinggi :
  - SMK 1 Bukittinggi.
  - SMK 2 Bukittinggi.
- Terpenuhi Kebutuhan Biaya Pengelolaan SMK Negeri di Kota Padang Panjang :
  - SMK Negeri 1 Padang Panjang.
  - SMK Negeri 2 Padang Panjang.



- Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan SMK Negeri di Kota Sawahlunto :
  - SMK Negeri 1 Sawahlunto.
  - SMK Negeri 2 Sawahlunto.
- Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan SMK Negeri di Kota Solok :
  - SMK Negeri 1 Solok.
  - SMK Negeri 2 Solok.
  - SMK Negeri 3 Solok.
- Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan SMK Negeri di Kota Payakumbuh :
  - SMK Negeri 1 Payakumbuh.
  - SMK Negeri 2 Payakumbuh.
  - SMK Negeri 3 Payakumbuh.
  - SMK Negeri 4 Payakumbuh.
- Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan SMK Negeri di Kota Pariaman :
  - SMK Negeri 1 Pariaman.
  - SMK Negeri 2 Pariaman.
  - SMK Negeri 3 Pariaman.
  - SMK Negeri 4 Pariaman.
- Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan SMK Negeri di Kabupaten Agam :
  - SMK Negeri 1 Tanjung Raya.
  - SMK Negeri 1 Lubuk Basung.
  - SMK Negeri 1 Ampek Angkek.
  - SMK Negeri 1 Palembayan.
  - SMK Negeri 2 Lubuk Basung.
  - SMK Negeri 1 Tilatang Kamang.
  - SMK Negeri 1 Matur.
  - SMK Negeri 1 Baso.
  - SMK Negeri 1 Tanjung Mutiara.
- Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan SMK Negeri di Kabupaten Dharmasraya :
  - SMK Negeri 1 Timpeh.
  - SMK Negeri 1 Koto Besar.
  - SMK Negeri 1 Sitiung.

- SMK Negeri 2 Pulau Punjung.
- SMK Negeri 1 Sungai Rumbai.
- SMK Negeri 1 Koto Baru.
- SMK Negeri 1 Pulau Punjung.
- SMK Negeri 1 Padang Lawas.
- Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan SMK Negeri di Kabupaten Solok Selatan :
  - SMK Negeri 5 Solok Selatan.
  - SMK Negeri 4 Solok Selatan.
  - SMK Negeri 3 Solok Selatan.
  - SMK Negeri 2 Solok Selatan.
  - SMK Negeri 1 Solok Selatan.
- Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan SMK Negeri di Kabupaten Pasaman :
  - SMK Negeri 1 Lubuk Sikaping.
  - SMK Negeri 1 Bonjol.
  - SMK Negeri 1 Rao Selatan.
  - SMK Negeri 1 Simpang Alahan Mati.
  - SMK Negeri 1 Dua Koto.
  - SMK Negeri 1 Padang Gelugur.
- Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan SMK Negeri di Kabupaten Pasaman Barat :
  - SMK Negeri 1 Sungai Aur.
  - SMK Negeri 1 Pasaman.
  - SMK Negeri 1 Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.
  - SMK Negeri 1 Gunung Tuleh.
  - SMK Negeri 1 Lembah Melintang.
  - SMK Negeri 1 Talamau.
  - SMK Negeri 1 Sasak Ranah Pasisie.
  - SMK Negeri 1 Kinali.
  - SMK Negeri 1 Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.
- Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan SMK Negeri di Kabupaten Solok :
  - SMK Negeri 1 Pantai Cermin.
  - SMK Negeri 2 Lembah Gumanti.

- SMK Negeri 1 Bukit Sundi.
- SMK Negeri 1 Singkarak.
- SMK Negeri 1 Gunung Talang.
- SMK Negeri 1 Hiliran Gumanti.
- SMK Negeri 1 Lembah Gumanti.
- SMK Negeri 2 Gunung Talang.
- SMK Negeri 1 X Koto Diatas.
- Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan SMK Negeri di Kabupaten Padang Pariaman :
  - SMK Negeri 1 Sintuk Toboh Gadang.
  - SMK Negeri 1 Enam Lingkung.
  - SMK Negeri 1 Sungai Limau.
  - SMK Negeri 1 IV Koto Aur Malintang.
- Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan SMK Negeri di Kabupaten Lima Puluh Kota :
  - SMK Negeri 1 Guguk.
  - SMK Negeri 1 Pangkalan.
  - SMK Negeri 1 Kec. Luak.
  - SMK-PP Negeri Padang Mengatas.
  - SMK Negeri 1 Kecamatan Suliki.
  - SMK Negeri 2 Kec. Guguak.
- Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan SMK Negeri di Kabupaten Pesisir Selatan :
  - SMK Negeri 1 Painan.
  - SMK Negeri 2 Painan.
  - SMK Negeri 1 Ranah Pesisir.
  - SMK Negeri 1 Sutera.
  - SMK Negeri 1 Koto XI Tarusan.
  - SMK Negeri 1 Ranah Ampek Hulu Tapan.
  - SMK Negeri 1 Linggo Sari Baganti.
  - SMK Negeri 1 Pancung Soal.
- Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan SMK Negeri di Kabupaten Tanah Datar :
  - SMK Negeri 1 Batusangkar.
  - SMK Negeri 2 Batusangkar.
  - SMK Negeri 1 Lintau Buo.

- SMK Negeri Batipuh.
- SMK Negeri 1 Tanjung Baru.
- Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan SMK Negeri di Kabupaten Sijunjung :
  - SMK Negeri 1 Sijunjung.
  - SMK Negeri 2 Sijunjung.
  - SMK Negeri 3 Sijunjung.
  - SMK Negeri 4 Sijunjung.
  - SMK Negeri 5 Sijunjung.
  - SMK Negeri 6 Sijunjung.
  - SMK Negeri 7 Sijunjung.
- Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan SMK Negeri di kabupaten Kepulauan Mentawai :
  - SMK Negeri 1 Kepulauan Mentawai.
  - SMK Negeri 2 Kepulauan Mentawai.
  - SMK Negeri 3 Kepulauan Mentawai.
- Terlaksananya Uji 5 Skema Sertifikasi bagi Siswa SMK Teknologi dan Rekayasa se Sumatera Barat.
- Terlaksananya Perbaikan Peralatan Praktek/ Peraga Siswa Jurusan Bangunan, Elektronika, Listrik, Mesin dan Otomotif.
- Terkelolanya Asrama Siswa di SMKN 1 Sumatera Barat.
- Terlaksananya Perbaikan dan Pemeliharaan Gedung Labor CNC dan Ruang makan.
- Terpilihnya Siswa SMK yang akan mewakili Sumatera Barat Pada Tingkat Provinsi dan Nasional.
- Terlatihnya guru Bahasa Inggris SMK untuk ECAFE Learning.
- Tervalidasinya tempat ujian kompetensi SMK di Sumatera Barat.
- Terpilihnya Pemenang Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia (FIKSI) SMK yang mewakili Sumatera Barat pada Tingkat.
- Didapatnya para juara dalam 34 Bidang Lomba LKS Tk. Provinsi.
- Didapatnya para juara dalam Bidang Lomba FLS2N Tk. Provinsi yang selanjutnya akan dikirim ke Tk. Nasional.
- Didapatnya para juara dalam Bidang Lomba O2SN Tk. Provinsi yang selanjutnya akan dikirim ke Tk. Nasional.

- Tersedianya Alat Kesenian untuk SMK.
  - Terlaksananya proses PPDB secara online berbasis Web dan Mobile Based jenjang SMA dan SMK tingkat Prov. Sumatera Barat.
  - Terselenggaranya Pemantapan Masa Orientasi Peserta Didik Baru.
  - Tersedianya Labor Komputer untuk siswa SMK.
  - Tersedianya Alat Praktek untuk siswa SMK.
  - Pengadaan Buku Teks Pelajaran dan Buku Referensi atau Pustaka SMK.
  - Ruang kelas yang representatif 6 lokasi.
  - Terbangunnya Fasilitas Gedung Sekolah dalam mendukung proses belajar mengajar.
  - Terlaksananya Rapat Koordinasi Kemitraan dengan institusi pasangan.
  - Terlaksananya Workshop Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Bagi SMK se-Sumatera Barat.
  - Tersalurnya dana BOS di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.
  - Terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana di SMK PP Negeri Padang.
  - Terpenuhi kebutuhan Biaya Pengelolaan di SMK PP Negeri Padang.
- 8) Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan, dengan anggaran Rp.5.706.158.115,- dan realisasi sebesar Rp.5.013.159.300,- (87,86%), dengan output :
- Terlaksananya seleksi dan pembekalan PTK SMK berprestasi tahun 2018.
  - Tersertifikasinya Guru SMK Kab/Kota se-Sumatera Barat Menjadi Asesor.
  - Terlaksananya pemberian penghargaan kepada PTK SMA berprestasi dan juara nasional.
  - Terlaksananya Pemberian Penghargaan kepada PTK SMK berprestasi tahun 2018.
  - Terlaksananya lomba tingkat provinsi dan tingkat nasional,
  - Terlaksananya Lomba Guru Nasional (OGN) Bidang SMK.
  - Peningkatan Kompetensi Manajerial Kepala SMA.
  - Terlaksananya peningkatan kompetensi kepala SMK.

- Terlaksananya Diklat Kepala Sekolah SMA dan SMK. SLB.
  - Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Operator SMA dan SMK tingkat provinsi.
  - Terlaksananya seleksi dan pembekalan bagi Guru dan Tenaga pendidik.
  - Terlaksananya pemberian penghargaan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan.
- 9) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan; dengan anggaran Rp.40.057.061.722,- dan realisasi sebesar Rp.37.124.018.633,- (92,68%), dengan output :
- Terlaksananya Pameran, Lomba, Seminar, Tampilan Karya Inovasi unggulan pendidikan.
  - Terlaksananya Rapat Kerja Bidang Teknis Urusan Pendidikan Tahun 2018.
  - Tersedianya Konsep dan Draft Pembelajaran Muatan Lokal.
  - Tersusunnya Data Pokok Pendidikan dan Profil Prov. Sumatera Barat.
  - Terlatihnya Operator Dapodik SMA, SMK, SLB Dinas Pendidikan.
  - Terevaluasinya dan terbinanya pengelolaan dana BOS di SMA, SMK, SLB dan BOS SD/SMP di Kab/Kota.
  - Terlaksananya Pembinaan FLS2N SD dan SMP Prov. Sumatera Barat utusan ke tingkat nasional.
  - Terlaksananya Pembinaan Lomba-lomba Siswa SD dan SMP dibidang Olahraga.
  - Terlaksananya Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD dan SMP dan terpilihnya utusan untuk mewakili Sumatera Barat ke Tk. Nasional.
  - Terlaksananya Lomba Tingkat Kab/Kota, Provinsi dan Nasional.
  - Tersosialisasinya penulisan Ijazah dan penghapusan Ijazah SMA, SMK dan SLB.
  - Terlaksananya hasil Pra Ujian Nasional SMA/SMK Tahun Pelajaran 2018/2019.
  - Terlaksananya Bimtek Pemetaan Pemenuhan SNP pada Sekolah yang terakreditasi.
  - Tersedianya Rapor SMA, SMK dan SLB.

- Terbinanya Sekolah Sehat di tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/SMA.
  - Tersebaranya Informasi Pendidikan ke Tenaga Pendidik dan Kependidikan.
  - Tersediannya mobilisasi penjemputan dan pemulangan kontingen.
  - Terlaksananya seremonial acara pembukaan dan penutupan.
  - Terlaksananya wisata edukasi, Terlaksananya jamuan makan malam oleh Gubernur.
  - Terlaksananya Penilaian dan Pelatihan Angka Kredit bagi Kepala Sekolah.
  - Terlaksananya Penilaian dan Pelatihan Angka Kredit bagi Kepala Sekolah,
  - Tersedianya dan Tersosialisasikannya Perda Pengganti Perda Nomor 2 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Terlaksananya Lomba dan Apresiasi PTK PAUNI, Tervalidasinya dokumen KTSP SMA, SMK dan SLB se-Sumatera.
  - Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Penatausahaan Keuangan dan pembinaan penatausahaan keuangan di SMA/SMK/SLB Negeri se Sumatera Barat.
  - Terlaksananya Bimtek Peningkatan Kompetensi Pengurus Barang dan Aset SMA, SMK dan SLB.
  - Terlaksananya Kegiatan Workshop Penyusunan Program Pencapaian SPM SMA, SMK, dan SLB.
- 10) Program Pendidikan Berkarakter, dengan anggaran Rp.1.351.696.940,- dan realisasi sebesar Rp.1.315.633.400,- (97,33%), dengan output :
- Terlaksananya Bimtek Penanggulangan resiko.
  - Meningkatnya Pemahaman Siswa dalam bahaya Narkoba bagi SMK.
  - Terlaksananya Bimtek Pendidikan Karakter Cerdas melalui kelompok kecil bagi guru BK SMA.
  - Terlaksananya Bimtek Pendidikan Karakter Cerdas melalui kelompok kecil bagi guru BK SMK.
  - Peserta memahami pelaksanaan kurikulum muatan lokal di SMA dan SMK Piloting.
  - Terlaksananya Pembinaan Musabaqah Tilawatil Qur`an antar siswa/siswi SMA/SMK Provinsi Sumatera Barat.

- 11) Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, dengan anggaran Rp.32.936.015.307,- dan realisasi sebesar Rp.29.732.071.577,- (90,27%), dengan output :
- Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan di SLBN 1 Padang di Kota.
  - Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan SLB Negeri 2 Padang Kota Padang.
  - Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan di SDLB Negeri Manggis Ganting.
  - Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan di SDLB Negeri 21 Silaing Bawah.
  - Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan di SDLB Negeri 26 Lubang Panjang.
  - Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan di SDLB Negeri Talawi, Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan di SDLB Negeri 20 Nan Balimo.
  - Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan di SLB Negeri Center Payakumbuh.
  - Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan di SLB Negeri Kota Pariaman.
  - Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan di SDLB Negeri 20 Pondok Duo.
  - Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaandi SLB Negeri Ampek Angkek.
  - Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan di SDLB Negeri 64 Surabaya.
  - Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan di SLB Negeri Lubuk Sikaping.
  - Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan di SDLB Negeri Panti.
  - Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan di SDLB Negeri 04 Tarantang.
  - Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaandi SDLB Negeri 40 Kota Baru.
  - Terlaksananya PBM di SLB Negeri Alahan Panjang.
  - Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan di SLB Negeri Linggo Sari Baganti.
  - Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan di SDLB Negeri 51 Lengayang.



- Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan di SDLB Negeri 35 Painan Utara.
- Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaandi SLB Negeri Lima Kaum.
- Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan di SDLB Negeri 34 Pagaruyung.
- Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan di SLB Negeri 1 Kabupaten Sijunjung.
- Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan di SDLB Negeri 36 Muaro Gambok.
- Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan di SLB Negeri Sungai Aur.
- Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan di SLB Negeri Solok Selatan.
- Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan di SLB Negeri 2 Solok Selatan.
- Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Pengelolaan di SLB Negeri Pulau Punjung.
- Terlatihnya Kepala SLB, Terlatihnya guru SLB Berdasarkan jenis ketunaan.
- Terlatihnya Guru Keterampilan.
- Terlaksananya seleksi dan pembekalan GTK Berprestasi dan berdedikasi.
- Terlaksananya kegiatan lomba keterampilan dan l.omba Literasi SLB tingkat provinsi.
- Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan MKKS.
- Terlaksananya Workshop Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif.
- Terlaksananya kegiatan FLS2N SLB Tingkat Provinsi Sumatera Barat.
- Terlaksannanya kegiatan O2SN SLB Tingkat Provinsi Sumatera Barat.
- Tersedianya alat peraga pendidikan untuk SLB.
- Tersalurnya dana BOS di jenjang pendidikan SLB.
- Tersusunya naskah soal US dan UAS SLB tahun pelajaran 2017/2018 dan terlaksananya US dan UAS SLB tahun pelajaran 2017/1018.
- Terlaksananya Rehabilitasi Gedung SLB.
- Meningkatkan kemampuan guru dalam dalam penulisan penelitian.

- Meningkatnya kemampuan guru dalam dalam penulisan penelitian Tindakan kelas.
  - Meningkatnya Kompetensi kepala sekolah dalam melaksanakan EDS.
  - Terlaksananya verifikasi dan monitoring ke lapangan untuk pendirian SLB Baru.
  - Meningkatnya Kompetensi Pengawas SLB Tingkat Provinsi.
  - Terlaksananya Penilaian Kurikulum 2013 oleh guru SLB.
  - Tersedianya Kelengkapan Sarana dan Prasarana SLB Se-Sumatera Barat.
- 12) Program Peningkatan SDM Pertanian, dengan anggaran Rp.1.412.631.250,- dan realisasi sebesar Rp.1.369.092.749,- (96,92%) dengan output meningkatnya SDM Petugas Melalui Diklat Pertanian.
  - 13) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian dengan anggaran Rp.1.309.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.1.304.623.186,- (99,67%) dengan output meningkatnya Sarana dan Prasarana pendidikan/Pelatihan Pertanian di Balai Diklat Pertanian.

**c. Outcomes**

- 1) Program Peningkatan Akses, Perluasan dan Mutu Pendidikan SMA, outcome dari program ini adalah :
  - Meningkatnya minat belajar siswa SMA sehingga dapat terpilih siswa/siswi sebagai peserta Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA untuk mewakili Sumatera Barat ke tingkat Nasional.
  - Meningkatnya kemampuan siswa tentang UUD 1945 dan TAP MPR RI.
  - Terpilihnya siswa terbaik di bidang seni untuk mewakili Sumatera Barat ditingkat nasional.
  - Terpilihnya siswa terbaik untuk mewakili Sumatera Barat ditingkat nasional.
  - Meningkatnya Kompetensi dan Kreatifitas Guru Bahasa Inggris Dalam Pengembangan Kurikulum Bahasa Inggris,
  - Meningkatnya kemampuan siswa baru dalam menyesuaikan mapel sains dari ijenjang SMP ke SMA.
  - Siswa/siswi daerah 3T dapat melanjutkan pendidikan menengah ke Tingak Provinsi.

- Terselenggaranya Kegiatan Proses Belajar dengan baik di tingkat SMA sehingga proses pembelajaran berjalan dengan lancar.
  - Terpenuhiya keamanan dan kenyamanan siswa dalam proses belajar mengajar.
  - Terlaksananya dengan baik Proses Pembelajaran Extra Curiculer Siswa SMA.
  - Meningkatnya Kompetensi Siswa SMA di Sumatera Barat untuk dapat mewakili di tingkat nasional.
  - Terlayaninya Tenaga Pengajar.
  - Meningkatnya Keterampilan dan Kemampuan Guru Mata Pelajaran IPA dan IPS di Kab/Kota.
  - Terpilihnya Pemenang Lomba Best Practise Kepala SMA IPA dan IPS di Kab/Kota.
  - Terwujudnya Siswa Yang Berkarakter Baik di Sekolah Boarding.
  - Terlaksananya dengan baik proses pembelajaran siswa SMA.
  - Terlaksananya dengan baik proses pembelajaran siswa SMA.
  - Meningkatnya kompetensi Tim Pengembang Kurikulum SMA Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
  - Terlaksananya dengan baik proses pembelajaran siswa SMA.
  - Terintegrasinya Materi karakter Pendidikan ke Mata pelajaran di SMA.
  - Meningkatnya kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran.
  - Meningkatnya kemampuan siswa dalam memahami manajemen.
  - Meningkatnya minat belajar siswa SMA.
  - Meningkatnya daya tampung sekolah.
  - Peningkatan Kinerja Guru dan Kompetensi Siswa SMA Se-Sumatera.
- 2) Program Peningkatan Akses, Perluasan dan Mutu Pendidikan SMK, outcome dari program ini adalah :
- Proses Belajar Mengajar Berjalan Lancar dan Kompetensi Siswa SMK Teknologi dan Rekayasa Se-Sumatera Barat Meningkat.

- Terlaksananya dengan baik proses pembelajaran siswa SMK.
- Peningkatan Kinerja Guru dan Kompetensi Siswa SMK se-Sumatera Barat.
- Diperolehnya data siswa SMA dan SMK Sumatera Barat masuk Perguruan Tinggi dan DUDI.
- Meningkatnya Kompetensi Keahlian Guru Kejuruan SMK Sesuai Dengan Pogram Keahlian.
- Meningkatnya Kompetensi Keahlian Siswa SMK Jurusan Bangunan, Elektronika, Listrik, Mesin dan Otomotif.
- Terselenggaranya Kegiatan Proses Belajar Mengajar dengan Baik SMK Negeri 1 Padang Kota Padang.
- Terselenggaranya Kegiatan Proses Belajar Mengajar dengan Baik SMK Negeri 2 Padang Kota Padang, Bangunan, Elektronika, Listrik, Mesin dan Otomotif.
- Terlaksananya proses belajar mengajar dengan baik pada SMK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Tersertifikasinya 5 Skema Sertifikasi bagi Siswa SMK Teknologi dan Rekayasa se-Sumatera Barat.
- Tersertifikasinya 5 Skema Sertifikasi bagi Siswa SMK Teknologi dan Rekayasa se-Sumatera Barat.
- Terpeliharanya Peralatan Praktek /Peraga Siswa Jurusan Bangunan, Elektronika, Listrik, Mesin dan Otomotif.
- Meningkatnya Pengelolaan dan Pelayanan Asrama SMKN 1 Sumatera Barat.
- Terpeliharanya Gedung Gedung Labor CNC dan Ruang Makan.
- Meningkatnya Kemampuan dan Keterampilan Siswa Berbahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Bahasa Jepang.
- Meningkatnya kemampuan dan keterampilan guru dalam mengajar bahasa inggris /ECAFE Learning.
- Adanya tempat ujian kompetensi SMK yang sesuai dengan standar.
- Meningkatnya kemampuan siswa SMK dalam mengekspresikan ide-ide yang kreatif, inovatif melalui hasil karya dibidang Teknologi Informasi, Seni, Ekonomi dan lainnya.
- Siswa memiliki kemampuan untuk berkompetensi dibidangnya masing-masing serta memupuk rasa persahabatan dan kerjasama antara sesama siswa.

- Siswa memiliki kemampuan untuk berkompetensi dibidangnya masing-masing serta memupuk rasa persahabatan dan kerjasama antara sesama siswa.
  - Siswa memiliki kemampuan untuk berkompetensi dibidangnya masing-masing serta memupuk rasa persahabatan dan kerjasama antara sesama siswa.
  - Meningkatnya proses pembelajaran di bidang kesenian,
  - Peningkatan PPDB secara terbuka, efisien dan efektif berbasis computerized.
  - Adanya meningkatnya kesiapan siswa baru dalam memasuki jenjang SMK.
  - Terlaksananya dengan baik proses pembelajaran siswa SMK.
  - Lancarnya Proses Belajar Mengajar di SMK se-Sumatera Barat.
  - Terpenuhiya keamanan dan kenyamanan siswa dalam belajar.
  - Meningkatnya minat belajar siswa SMK, Terjadinya Koordinasi Kemitraan dengan institusi pasangan.
  - Terselenggaranya Kegiatan Proses Belajar Mengajar dengan Baik SMK PP Negeri padang.
  - Terselenggaranya Kegiatan Proses Belajar Mengajar dengan Baik SMK PP Negeri padang.
- 3) Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan, outcome dari program ini adalah :
- Terpilihnya PTK berprestasi tingkat Provinsi untuk mengikuti lomba ke tingkat nasional.
  - Meningkatnya Jumlah Asesor Metodologi Lembaga Sertifikasi Profesi.
  - Termotivasinya guru dan tenaga kependidikan SMA untuk meningkatkan prestasi.
  - Termotivasinya PTK Bidang SMK untuk meningkatkan prestasinya.
  - Termotivasinya guru dalam meningkatkan prestasi dan kinerjanya.
  - Terpilihnya Guru berprestasi tingkat Provinsi untuk mengikuti lomba ke tingkat nasional.
  - Meningkatnya Efektivitas Manajemen Sekolah.
  - Meningkatnya Kompetensi Kepala SMK, Kepala Sekolah SMA dan SMK Memiliki Sertifikat NUKS.

- Keterampilan dan Kemampuan Operator SMA dan SMK Dalam Menjalankan Program Sekolah di Kab/Kota.
  - Terpilihnya GTK SMA berprestasi tingkat Provinsi untuk mengikuti lomba ke tingkat Nasional.
  - Termotivasinya guru dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan prestasi.
- 4) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan tugas teknis lainnya, outcome dari program ini adalah :
- Meningkatnya motivasi tenaga pendidik, peserta didik dan masyarakat tentang arti dan peranan pendidikan dalam memanfaatkan TIK.
  - Dipahaminya Rencana Kerja Tahun 2018 dan Tersusunnya Arah Kebijakan Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
  - Meningkatnya Pembelajaran Muatan Lokal bagi siswa SMA/SMK di Sumatera Barat.
  - Tersedia Data Pokok dan Profil Pendidikan Prov. Sumatera Barat.
  - Meningkatnya Kinerja Pengelola BOS SMA, SMK, SLB dan SD/SMP di kab/kota.
  - Meningkatnya Prestasi siswa SD dan SMP di bidang Seni.
  - Meningkatnya Prestasi siswa di SD dan SMP di bidang Olahraga.
  - Meningkatnya Prestasi siswa SD dan SMP di bidang Sains.
  - Termotivasinya guru dalam meningkatkan prestasi dan kinerjanya.
  - Sekolah Pahami dalam penulisan Blangko Ijazah dan penghapusannya.
  - Tersedianya soal dan meningkatnya hasil ujian nasional SMA/SMK tahun pelajaran 2017/2018.
  - Terdatanya Sekolah yang memenuhi SNP pada sekolah yang terakreditasi.
  - Adanya Bukti hasil evaluasi belajar Siswa SMA, SMK dan SLB.
  - Terpilihnya Sekolah Sehat ( UKS ) tingkat Provinsi Tahun 2018.
  - Meningkatnya Penyebaran Informasi Pendidikan, OSN SD, SMP, dan SMA Tingkat Nasional (Menjadi Tuan Rumah) tahun 2018.

- Terbitnya SK PAK Guru dan Pengawas.
  - Tersusunnya Perda Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Adanya PTK PAUDNI berprestasi Tingkat Nasional.
  - Meningkatnya kualitas dan keterlaksanaan Penyusunan Dokumen.
  - Meningkatnya Kompetensi Pengelola Keuangan di SMA/SMK/SLB negeri se-Sumatera Barat.
  - Meningkatnya Kompetensi Pengurus Barang dan Aset SMA/SMK/SLB Negeri se-Sumatera Barat.
  - Meningkatnya Kompetensi dalam Penyusunan Pencapaian SPM SMA, SMK, dan SLB se-Sumatera Barat.
- 5) Program Pendidikan Berkarakter, outcome dari program ini adalah :
- Terwujudnya Modul Mata Pelajaran Tentang Bahaya Narkoba ke Mata pelajaran yang relevan.
  - Terwujudnya Modul Mata Pelajaran Tentang Bahaya Narkoba ke Mata pelajaran yang relevan.
  - Meningkatnya Pengetahuan Guru BK SMA dalam Penerapan peningkatan karakter cerdas dalam pencapaian narkoba.
  - Meningkatnya Pengetahuan Guru BK SMK dalam penerapan peningkatan karakter cerdas dalam pencapaian narkoba.
  - Tersedianya Materi Muatan Lokal yang berintegritas pada semua mata pelajaran.
  - Terpilihnya siswa/siswi terbaik untuk lomba MTQ, Hafiz, Lomba Dakwah.
- 6) Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, outcome dari program ini adalah :
- Terselenggaranya kegiatan proses belajar dengan baik pada SLB.
  - Meningkatnya Kompetensi Kepala SLB.
  - Meningkatnya pelaksanaan PBM di SLB Sumatera Barat.
  - Meningkatnya Keterampilan Guru SLB.
  - Terpilihnya GTK berprestasi tingkat provinsi untuk mengikuti lomba tingkat Nasional.
  - Terwujudnya Kepala Sekolah yang Berwawasan.
  - Peningkatan mutu dan pemahaman masalah pendidikan inklusif.

- Meningkatnya motivasi dan apresiasi siswa dan guru dalam bidang seni.
- Meningkatnya sportifitas siswa dalam berkompetisi di bidang olahraga.
- Siswa berkemampuan mandiri.
- Proses pembelajaran berjalan dengan lancar.
- Diketuinya hasil belajar siswa sehingga dapat dipedomani kualitas.
- Terpenuhnya Meubller Sekolah Luar Biasa.
- Meningkatnya fungsi gedung SLB.
- Mampunya guru menulis program khusus bagi GTK Non PLB.
- Mampunya guru menulis penelitian tindakan kelas.
- Mampunya Kepala Sekolah melaksanakan Evaluasi Diri Sekolah (EDS).
- Berdirinya gedung SLB dan pengamanan sekolah.
- Melihat keabsahan dokumen SLB yang akan didirikan.
- Meningkatnya Pengawas SLB.
- Meningkatnya kompetensi guru SLB dalam melakukan penilaian Kurikulum 2013.
- Peningkatan Kinerja Guru dan mutu sekolah SLB Se-Sumatera Barat.

#### **d. Permasalahan dan Solusi**

Secara umum capaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 relatif baik dan berhasil, Indikasi keberhasilan tersebut terbukti dari besarnya tingkat capaian kinerja 94,67%.

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan tidak terlaksana karena tidak ada peserta memenuhi persyaratan/sesuai undangan.

## **2. Kesehatan**

Urusan Kesehatan pada Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ahmad Mochtar Bukittinggi, Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin, Rumah Sakit Umum Daerah Solok, Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman dengan anggaran sebesar Rp.583.786.741.661,- dan realisasi Rp.504.598.932.203,28 (86.44%) untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :



**a. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan.
- 6) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan dengan kegiatan :
  - Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (*Buffer Stock*) Dinas Kesehatan Provinsi.
  - Pengadaan Bahan Kimia dan Perbekalan Labor Kesehatan.
  - Pengadaan Obat-Obatan Bahan Habis Pakai BKMM.
  - Pengadaan Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan BP4.
  - Workshop Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.
  - Pengelolaan Obat Buffer Stock Provinsi dan Workshop SDM dalam Pengawasan Alat Kesehatan.
- 7) Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan :
  - Penilaian Puskesmas Berprestasi dan Nakes Teladan.
  - Pertemuan Program Kesmas dan Rujukan.
  - Peningkatan Pelayanan Siaga dan Tindak Siaga Medik.
  - Monitoring dan Evaluasi Dalam Rangka Peningkatan Laboratorium Kesehatan sebagai labor Rujukan.
  - Pemantauan dan pengamanan makanan (food security),
  - Pengambilan Sampel Lapangan Laboratorium.
  - Pelatihan Manajemen Asfiksia Dan BBLR Bagi Pengelola Program.
  - Pendampingan Penilaian Akselerasi Cakupan KB dalam rangka Pencapaian SDGs.
  - Pertemuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
  - Review Peningkatan Kualitas Hidup Anak.
  - Pertemuan Petugas Laboratorium Kab Kota dan RS.
  - Penilaian Dan Pembinaan Rumah Sakit Sayang Ibu.
  - Tenaga Medis Sub Spesialis Teladan.
  - Pembinaan dan pemantauan sebagai laboratorium rujukan uji silang.
  - TOT Kelas Ibu Hamil Dan Balita.

- Analisis Akselerasi Pembinaan Dan Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah.
- Review Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Remaja Esential Terpadu.
- Pengadaan Logistik Pasien dan Petugas UPTD.
- Pelayanan Kesehatan Tim P3K.
- Monitoring dan evaluasi program akreditasi, registrasi dan sertifikasi, Evaluasi ISO 17025 dan ISO 15189 Laboratorium Oleh KAN.
- Pertemuan Otopsi Verbal dan Audit Maternal Perinatal dan Medik KB.
- Bimtek Penyusunan Dokumen Akreditasi Institusi Bkom dan Pelkes.
- Kesiapsiagaan Bencana dan Pemantauan Daerah Pra dan Pasca Bencana.
- Workshop Evaluasi Program Akreditasi Dan Perizinan.
- Workshop Pra Dan Pasca Bencana.
- Sosialisasi Program Pelayanan Integrasi di Puskesmas Kab/Kota.
- Pelatihan Teknis Assestmen Intitusi Pemerintah Wajib Lapor (IPWL) dan Evaluasi Pelaksanaan IPWL.
- Review Program KIA dan Kunjungan Neonatus dan Nifas bagi pengelola Program, Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan dan Olah Raga.
- Pertemuan Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional.
- Pertemuan Rakontek pengelola program Kesehatan tradisional kab/kota.
- Workshop pelayanan kesehatan primer.
- Workshop kesehatan nelayan wilayah pesisir.
- Pembinaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP).
- Pertemuan Penyusunan Sistem Rujukan UKM dan UKP Tingkat Propinsi.
- Peningkatan dan Penguatan PIS PK di Kab/Kota.
- Pertemuan Evaluasi DAK Non Fisik di Tingkat Propinsi.
- Monitoring Teksnis BOK Propinsi ke Kab/Kota dan Puskesmas.
- Pertemuan Koordinasi Peningkatan SPM di Tingkat Propinsi, Rujukan Spesimen.

- Penjaringan Screening Indra ke Kab/Kota oleh BKIM,
  - Pertemuan Penguatan UKM Sekunder.
  - Pengawasan dan Pembinaan Limbah Medis dan Non Medis di Puskesmas dan Rumah Sakit.
  - Rapat Koordinasi Teknis DAK dan Non Fisik Tingkat Propinsi.
  - Pembinaan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat).
  - Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Pelayanan Kesehatan Tradisional.
  - Sosialisasi Persiapan BLUD UPTD laboratorium Kesehatan.
  - Pelatihan Bantuan Hidup Dasar.
  - Sosialisasi Tes Kebugaran Bagi PNS di Lingkungan Pemprov. Sumbar.
  - Workshop Review Manual Rujukan Maternal Neonatal.
- 8) Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat dengan kegiatan :
- Jambore Kader PKK.
  - Kampanye Kesehatan Tingkat Provinsi dalam rangka pencapaian SDGs, Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit (PKMRS).
  - Workshop Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan Kab/Kota.
  - Workshop Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) dan Pengembangan media promosi dan komunikasi, informasi dan edukasi.
- 9) Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan kegiatan :
- Peningkatan Kapasitas Manajemen pemberian makanan bayi dan anak bagi petugas kab.kota.
  - Pendidikan dan Pemulihan Gizi Berbasis Masyarakat (Positif Deviance).
  - Pelatihan kelompok pendukung ASI Dalam Rangka program GEPEMP.
  - Evaluasi Program Gizi terintegrasi.
  - TOT Pelayanan Gizi Lansia Kab/Kota.
  - Quick Respon Dalam Pemantauan Pelaksanaan Therapeutic Food Center (TFC) .
  - Pertemuan Evaluasi Kemitraan Gizi dengan PKK.
  - Peningkatan kapasitas petugas dalam pencegahan dan

penanggulangan kegemukan dan obesitas pada anak sekolah.

- Sosialisasi proses asuhan gizi terstandar dan review pelaksanaan gizi saat berencana.

10) Program Pengembangan Lingkungan Sehat dengan kegiatan :

- Pertemuan Supervisi Fasilitasi Pengawasan dan Pemantauan Higiene Sanitasi Lingkungan.
- Workshop sanitasi RS.
- Pemantauan Percepatan Sanitasi Pemukiman Penilaian Lingkungan bersih dan sehat.
- Rakontek Pamsimas dan Penyehatan Lingkungan Lainnya.
- Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan UPTD.
- Pemantauan Tempat Pengelolaan Makanan pengelola kab/kota.
- Workshop pengembangan tatanan kab/kota sehat.
- Workshop STBM dengan metoda CLTS bagi stakeholder terkait.

11) Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit (Menular/Tidak Menular) dengan kegiatan :

- Penanggulangan HIV/AIDS.
- Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Tuberculosis.
- Pelatihan Layanan HIV-AIDS Komprehensif Berkesinambungan.
- Workshop Imunisasi dan Penemuan Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular (PTM).
- Workshop Teknis Program Kesehatan Jiwa dan NAPZA.
- Pertemuan monitoring dan evaluasi program pencegahan pengendalian Penyakit Tidak Menular.
- Pertemuan monitoring dan evaluasi program surveilans dan imunisasi.
- Pertemuan surveilans dan Kejadian Luar Biasa (KLB).
- Penanggulangan dan Pemberantasan Demam Berdarah Dengue (DBD).
- Workshop Program Flu burung Bagi Petugas Kesehatan,
- Pelatihan Konselor HIV/AIDS.
- Peningkatan Pelayanan Kesehatan Haji.
- Pelatihan Teknis Program Penanggulangan Penyakit

Menular Langsung (P2ML) .

- Pelatihan Teknis Program Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang.
  - Penanggulangan Filariasis Limfatik (Kaki Gajah) dan Pemberantasan Penyakit Kecacingan.
  - Pertemuan Evaluasi Imunisasi dan Penemuan Kasus TB dengan lintas sektor dan lintas program terkait.
  - Pelatihan petugas layanan deteksi dini kanker payudara dan serviks.
  - Workshop skering dengan menggunakan assist.
  - Workshop infeksi saluran pencernaan.
  - Advokasi sosialisasi vaksin baru measles rubella.
- 12) Peningkatan Sarana Dan Prasarana RS/ Rumah Sakit Jwa/ RS Paru-Paru/ RS Mata dengan kegiatan :
- Pengadaan Alat Kedokteran UPTD BKIM.
  - Pengadaan Peralatan Labkes.
  - Pembuatan DED Lanjutan RS Khusus Paru.
  - Penyediaan Sarana Perawatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok.
  - Pengadaan Penunjang Diklat BKOM dan Pelkes (DAK).
  - Rehab Renovasi Gedung BKOM dan Pelkes (DAK).
  - Pembuatan Lanjutan RS Khusus Paru.
  - **Rumah Sakit Achmad Mochtar Bukittinggi**
    - Pengadaan Peralatan Laboratorium.
    - Pembangunan Gedung IGD Terpadu (DAK).
  - **RSUD PARIAMAN**
    - Pengadaan Sarana Perawatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCHT).
    - Peningkatan Prasarana Alat Kesehatan (DAK).
    - Pengadaan alat kesehatan.
  - **RSUD SOLOK**
    - Pengadaan peralatan medis kedokteran umum bedah dan penunjang lainnya.
    - Pembangunan Gedung OK tahap I (DAK).
  - **RSJ HB. Sa'anin**
    - Pengembangan Jalan Lingkung Rumah Sakit.
    - Pembangunan Pagar Rumah Sakit.
    - Pengembangan selasar Rumah Sakit.

- Pengadaan Sarana Perawatan bagi Penderita Asap Rokok.
  - Pengadaan Peralatan Kesehatan/Kedokteran (DAK).
  - Peningkatan Prasarana Alat Kesehatan.
  - Pengembangan instalasi NAPZA.
- 13) Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana RS/ RSJ/ RS Paru-Paru/ RS Mata dengan kegiatan Pemeliharaan Alat Labor dan Alat Kesehatan di UPTD Dinkes Propinsi.
- 14) Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan dengan kegiatan :
- Pembekalan dan Pendampingan Dokter Internsip.
  - Pelatihan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Siaga Bencana.
  - Evaluasi dan Validasi Data SDM Bidang Kesehatan.
  - Peningkatan Sumber Daya Kesehatan BP4.
  - TOT Akreditasi Puskesmas.
  - Pelatihan Manajemen Dokter Puskesmas Peduli Kesehatan Olah Raga pengelola Kab/Kota.
  - Magang Tenaga Laboratorium Kesehatan.
  - Pelaksanaan Ujian Kompetensi Jabatan Fungsional.
- 15) Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan dengan kegiatan :
- Pertemuan Analisis dan Verifikasi Data Kesehatan Berbasis Elektronik.
  - Workshop Data Pelayanan Kesehatan.
  - Pertemuan Koordinasi Bidang Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
  - Sosialisasi Hukum Kesehatan dan Produk Hukum Lainnya.
  - Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pertemuan Sikronisasi dan Integrasi Perencanaan.
  - Penganggaran Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota.
- 16) Program Penanggulangan Kemiskinan dengan kegiatan Pembiayaan dan Jaminan Pelayanan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS) dan Pertemuan Evaluasi Program Jaminan Kesehatan Daerah.
- 17) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan kegiatan Pelayanan BLUD UPTD BKIM Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Achmad Mochtar

Bukittinggi, RSUD PARIAMAN, RSUD SOLOK, RSJ HB. Sa'anin.

- 18) Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba dengan kegiatan: Perkembangan instalasi NAPZA.

**b. Realisasi Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran Rp.5.885.485.732,- dan realisasi sebesar Rp.5.153.264.769,60 (87,56%).
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan anggaran Rp.7.798.627.680,- dan realisasi sebesar Rp.7.520.372.441,- (96,43%).
- 3) Program Peningkatan disiplin Aparatur, dengan anggaran Rp.286.380.000,- dan realisasi sebesar Rp.262.434.000,- (91,64%).
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan anggaran Rp.24.640.150,- dan realisasi sebesar Rp.24.011.250,- (97,45%).
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan anggaran Rp.603.463.000,- dan realisasi sebesar Rp.555.580.616,- (92,07%).
- 6) Program Obat dan Pembekalan Kesehatan, dengan anggaran Rp.9.302.946.572,- dan realisasi sebesar Rp.8.591.967.649,- (92,36%), dengan output :
  - Tersedianya obat dan Perbekalan Kesehatan untuk *buffer Stok* Provinsi untuk 18 bulan.
  - Tersedianya Bahan Kimia dan peralatan Labor Kesehatan.
  - Tersedianya obat-obatan dan peralatan dokter pakai habis.
  - Terlaksananya pengadaan obat, peralatan dokter dan Labor pakai habis.
  - Terlaksananya workshop Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan.
  - Terlaksananya pengelolaan Obat *Buffer Stok* Provinsi selama 12 bulan.
  - Terlaksananya Workshop SDM dalam Pengawasan Alat Kesehatan.
- 7) Program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), dengan anggaran Rp.12.819.413.916,- dan realisasi

Rp.10.582.901.249,- (82,55%), dengan output :

- Terlaksananya penilaian puskesmas berprestasi dan nakes teladan.
- Terlaksananya Workshop Program Kesmas dan Rujukan.
- Tersedianya Jasa Pelayanan Siaga dan Tindak Siaga Medik.
- Terlaksananya Monev Dalam Rangka Peningkatan Laboratorium Kesehatan sebagai labor Rujukan.
- Terlaksananya Pemantauan dan pengamanan makanan (food security).
- Terlaksananya Pengambilan Sampel Lapangan Laboratorium.
- Terlaksananya Pelatihan Manajemen Asfiksia Dan BBLR Bagi Pengelola Program.
- Terlaksananya Pendampingan Penilaian Akselerasi Cakupan KB dalam rangka Pencapaian SDGs.
- Terlaksananya Pertemuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
- Terlaksananya Review Peningkatan Kualitas Hidup Anak, Terlaksananya Pertemuan Petugas Laboratorium Kab Kota dan RS.
- Terlaksananya Penilaian Dan Pembinaan Rumah Sakit Sayang Ibu, Tenaga Medis Sub Spesialis Teladan.
- Terlaksananya Pembinaan dan pemantauan sebagai laboratorium rujukan uji silang.
- Terlaksananya TOT Kelas Ibu Hamil Dan Balita.
- Terlaksananya Analisis Akselerasi Pembinaan Dan Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Pengelola Kab/Kota.
- Terlaksananya Review Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Remaja Essential Terpadu.
- Terlaksananya Pengadaan Logistik Pasien dan Petugas UPTD.
- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Tim P3K.
- Terlaksananya monitoring dan evaluasi program akreditasi, registrasi dan sertifikasi.
- Terlaksananya Evaluasi ISO 17025 dan ISO 15189 Laboratorium Oleh KAN.
- Terlaksananya Pertemuan Otopsi Verbal dan Audit Maternal Perinatal dan Medik KB.



- Terlaksananya Bimtek Penyusunan Dokumen Akreditasi Institusi BKOM dan Pelkes.
- Terlaksananya Kesiapsiagaan Bencana dan Pemantauan Daerah Pra dan Pasca Bencana.
- Workshop Evaluasi Program Akreditasi Dan Perizinan.
- Terlaksananya Workshop Pra Dan Pasca Bencana.
- Terlaksananya Sosialisasi Program Pelayanan Integrasi di Puskesmas Kab/Kota.
- Terlaksananya Pelatihan Teknis Assestmen Intitusi Pemerintah Wajib Lapor (IPWL) dan Evaluasi Pelaksanaan IPWL.
- Terlaksananya Review Program KIA dan Kunjungan Neonatus dan Nifas bagi pengelola Program.
- Terlaksananya pelatihan Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan dan Olah Raga.
- Terlaksananya Pertemuan Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional, Terlaksananya Pertemuan Rakontek pengelola program Kesehatan tradisional kab/kota.
- Terlaksananya Workshop pelayanan kesehatan primer.
- Terlaksananya Workshop Kesehatan Nelayan Wilayah Pesisir.
- Terlaksananya Pembinaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP).
- Terlaksananya Pertemuan Penyusunan Sistem Rujukan UKM dan UKP Tingkat Propinsi.
- Terlaksananya Peningkatan dan Penguatan PIS PK di Kab/Kota.
- Terlaksananya Pertemuan Evaluasi DAK Non Fisik di Tingkat Propinsi.
- Terlaksananya Monitoring Teknis BOK Propinsi ke Kab/Kota dan Puskesmas.
- Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Peningkatan SPM di Tingkat Propinsi.
- Terlaksananya kegiatan Rujukan Spesimen dari Puskesmas ke RS Paru.
- Terlaksananya Penjaringan Screaning Indra ke Kab/Kota oleh BKIM.
- Terlaksananya Pertemuan Penguatan UKM Sekunder.
- Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Limbah Medis dan Non Medis di Puskesmas dan Rumah Sakit.

- Terlaksananya Rapat Koordinasi Teknis DAK dan Non Fisik Tingkat Propinsi.
  - Terlaksananya Pembinaan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) .
  - Terlaksananya Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Pelayanan Kesehatan Tradisional.
  - Terlaksananya Sosialisasi Persiapan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan.
  - Terlaksananya Pelatihan Bantuan Hidup Dasar.
  - Terlaksananya Sosialisasi Tes Kebugaran Bagi PNS di Lingkungan Pemprov. Sumbar.
  - Terlaksananya Workshop Review Manual Rujukan Maternal Neonatal.
- 8) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan anggaran Rp.1.513.406.114,- dan realisasi sebesar Rp.1.441.095.165,- (95,22%), dengan output :
- Terlaksananya Jambore PKK/KB Kes.
  - Terlaksananya Kampanye kesehatan tingkat provinsi dalam rangka pencapaian SDGs.
  - Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit (PKMRS).
  - Terlaksananya Workshop Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan Kab/Kota.
  - Terlaksananya Workshop Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM).
  - Terlaksananya Pengembangan Media Promosi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
- 9) Program Perbaikan Gizi Masyarakat, dengan anggaran Rp.919.119.989,- dan realisasi sebesar Rp.810.064.976,- (88,13%), dengan output :
- Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Manajemen pemberian makanan bayi dan anak bagi petugas Kabupaten/Kota.
  - Terlaksananya Pendidikan dan Pemulihan Gizi Berbasis Masyarakat (Positif Deviance) .
  - Terlaksananya Pelatihan Konseling ASI bagi petugas dalam rangka GEPEMP.
  - Terlaksananya workshop Program Gizi Terintegrasi.
  - Terlaksananya TOT Pelayanan Gizi Lansia

Kabupaten/Kota.

- Terlaksananya Quick Respon Dalam Pemantauan Pelaksanaan Therapeutic Food Center (TFC).
  - Terlaksananya workshop kemitraan gizi dengan PKK.
  - Terlaksananya Peningkatan kapasitas petugas dalam pencegahan dan penanggulangan kegemukan dan obesitas pada anak sekolah.
  - Terlaksananya Sosialisasi proses asuhan gizi terstandar dan review pelaksanaan gizi saat bencana.
- 10) Program Pengembangan Lingkungan Sehat, dengan anggaran Rp.846.255.198,- dan realisasi sebesar Rp.621.120.967,- (73,40%), dengan output :
- Terlaksananya Pertemuan Supervisi Fasilitatif Pengawasan dan Pemantauan Higiene Sanitasi Lingkungan.
  - Terevaluasinya program sanitasi RS.
  - Terlaksananya Pemantauan Percepatan Sanitasi Pemukiman Dan Penilaian Lingkungan Bersih dan Sehat.
  - Terlaksananya Rakontek Pamsimas dan Penyehatan Lingkungan.
  - Terlaksananya pengelolaan dan pemantauan lingkungan UPTD.
  - Terlaksananya Pemantauan Tempat Pengelolaan Makanan pengelola Kabupaten/Kota.
  - Terlaksananya Workshop pengembangan Kabupaten/Kota sehat.
  - Terlaksananya Workshop STBM dengan Metoda CLTS Bagi Stakeholder Terkait.
- 11) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, dengan anggaran Rp.2.314.114.732,- dan realisasi sebesar Rp.2.002.414.190,- (86,53%), dengan output :
- Terlaksananya Upaya Penanggulangan HIV/AIDS.
  - Terlaksananya Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Tuberculosis.
  - Terlaksananya Pelatihan Layanan HIV-AIDS Komprehensif Berkesinambungan.
  - Terlaksananya Workshop Imunisasi dan Penemuan Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular (PTM).
  - Terlaksananya Workshop Teknis Program Kesehatan Jiwa dan NAPZA.

- Terlaksananya Pertemuan monitoring dan evaluasi program pencegahan pengendalian Penyakit Tidak Menular.
  - Terlaksananya Pertemuan Monitoring Dan Evaluasi Program Surveilans Dan Imunisasi.
  - Terlaksananya Pertemuan Surveilans dan Kejadian Luar Biasa (KLB).
  - Terlaksananya Penanggulangan dan Pemberantasan Demam Berdarah Dengue (DBD).
  - Terlaksananya Workshop Program Flu burung Bagi Petugas Kesehatan.
  - Terlaksananya Pelatihan Konselor HIV/AIDS.
  - Terlaksananya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Haji.
  - Terlaksananya Pelatihan Teknis Program Penanggulangan Penyakit Menular Langsung (P2ML) .
  - Pelatihan Teknis Program Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang.
  - Terlaksananya kegiatan Penanggulangan Filariasis Limfatik (Kaki Gajah) dan Pemberantasan Penyakit Kecacingan.
  - Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Imunisasi dan Penemuan Kasus TB dengan lintas sektor dan lintas program terkait.
  - Terlaksananya Pelatihan Petugas Layanan Deteksi Dini Kanker Payudara Dan Serviks.
  - Terlatihnya petugas Workshop Skrening dengan menggunakan Assist.
  - Terlaksananya Workshop infeksi saluran pencernaan.
  - Terlaksananya Advokasi Sosialisasi Vaksin Baru Measles Rubella.
- 12) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata dengan anggaran Rp.155.066.813.420,- dan realisasi sebesar Rp.115.984.144.602,68 (74,79%), dengan output :
- Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran UPTD BKMM.
  - Terlaksananya Pengadaan Peralatan Labkes.
  - Terlaksananya Pembuatan DED Lanjutan RS Khusus

Mata.

- Terlaksananya Penyediaan Sarana Perawatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok.
- Terlaksananya Pengadaan Penunjang Diklat BKOM dan Pelkes (DAK).
- Terlaksananya Rehab Renovasi Gedung BKOM dan Pelkes (DAK).
- Terlaksananya pembayaran kontrak kegiatan Pembuatan Lanjutan RS Khusus Paru tahun 2017.
- **Rumah Sakit Achmad Mochtar Bukittinggi**
  - Tersedianya peralatan Labor.
  - Tersedianya 35 unit peralatan kedokteran umum.
  - Tersedianya 1 unit peralatan kedokteran THT.
  - Tersedianya 6 unit peralatan kedokteran bedah.
  - Tersedianya 6 unit peralatan kedokteran jantung.
  - Tersedianya 2 unit peralatan kedokteran radiolog.i.
  - Tersedianya 68 unit peralatan kedokteran ICU.
  - Terlaksananya pembangunan Pondasi Gedung IGD terpadu dengan KSSL. (Konstruksi Sarang Laba-Laba)
- **RSUD PARIAMAN**
  - Terlaksananya pengadaan Alat kesehatan RSUD Pariaman, sebanyak 20 unit.
  - Terlaksananya pengadaan peningkatan prasarana alat kesehatan (DAK) sebanyak . 57 unit + 5 set.
  - Tersedianya Pengadaan Alat kesehatan untuk pelayanan.
- **RSUD SOLOK**
  - Terpenuhinya standar sarana dan prasaran rumah sakit.
  - Terbangunnya Gedung OK 5 (lima) lantai.
- **RSJ HB. Sa'anin**
  - Terlaksananya pengadaan pengembangan jalan lingkung, pembangunan pagar RS, Pengembangan selasar RS.
  - Tersedianya peralatan kesehatan RS.

- 13) Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata dengan anggaran Rp.423.000.000,- dan realisasi

sebesar Rp.421.527.260,- (99,65%), dengan output :  
Terlaksananya Pemeliharaan Alat Labor dan Alat Kesehatan  
di UPTD Dinkes Propinsi.

- 14) Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan, dengan anggaran sebesar Rp.852.591.860,- dan realisasi sebesar Rp.761.692.749,- (89,34%), dengan output :
- Terlaksananya Pembekalan dan Pendampingan Dokter Internship.
  - Terlaksananya Pelatihan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Siaga Bencana.
  - Terlaksananya kegiatan Evaluasi dan Validasi Data SDM Bidang Kesehatan.
  - Terlaksananya Pelatihan bagi Sumber Daya Kesehatan BP4.
  - Terlaksananya TOT Akreditasi Puskesmas.
  - Terlaksananya Pelatihan Manajemen Dokter Puskesmas Peduli Kesehatan Olah Raga pengelola Kabupaten/Kota.
  - Terlaksananya Magang Tenaga Laboratorium Kesehatan.
  - Terlaksananya Ujian Kompetensi Jabatan Fungsional.
- 15) Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan, dengan anggaran Rp.543.968.982,- dan realisasi sebesar Rp.490.649.300,- (90,20%), dengan output :
- Terlaksananya Pertemuan Analisis dan Verifikasi Data Kesehatan Berbasis Elektronik.
  - Terlaksananya Workshop Data Pelayanan Kesehatan.
  - Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Bidang Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
  - Terlaksananya Sosialisasi Hukum Kesehatan dan Produk Hukum Lainnya.
  - Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perencanaan ke Kabupaten/Kota.
  - Terlaksananya Sikronisasi dan Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 16) Program Penanggulangan Kemiskinan, dengan anggaran Rp.35.098.629.425,- dan realisasi sebesar Rp.34.356.897.450,- (87,89%), dengan output:  
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS) dan Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Program Jaminan Kesehatan Daerah.

- 17) Program Peningkatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan anggaran Rp.339.556.634.891,- dan realisasi Rp.285.588.834.337,- (84.10%) dengan output : tersedianya kebutuhan pelayanan rumah sakit untuk obat-obatan, alat kesehatan pakai habis, bahan laboratorium, makanan dan minuman pasien, kebersihan rumah sakit, perlengkapan rumah sakit, rehabilitasi dan pemeliharaan ruang perawatan, peralatan kedokteran, pendidikan pelatihan karyawan, dengan cukup serta tindak siaga medik selama 1 (satu) tahun/ 12 (dua belas) bulan dan terlaksananya pelayanan kesehatan perorangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD.
- 18) Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba dengan anggaran Rp.1.806.250.000,- dan realisasi Rp.1.747.145.000,- (96.73%) dengan output : tersedianya perkembangan instalasi NAPZA.

**c. Outcomes**

- 1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, outcome dari program ini adalah :
  - Terpenuhinya seluruh kebutuhan obat sangat essensial generik sebagai *buffer stok* Provinsi di tahun 2018 dan bahan labor untuk pelayanan pengobatan di BP4.
  - Meningkatnya kemampuan petugas dalam melakukan pelaksanaan program obat dan perbekalan kesehatan dengan pengelolaan Obat *Buffer Stok* Provinsi selama 12 bulan.
  - Meningkatnya upaya pemeriksaan kesehatan di laboratorium dan terlaksananya Workshop SDM dalam Pengawasan Alat Kesehatan.
- 2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat, outcome dari program ini adalah :
  - Terpilihnya 6 Puskesmas Berprestasi dan 24 orang Tenaga Kesehatan Teladan.
  - Adanya Kesepakatan program Kesmas dan Rujukan antara kab/kota dan provinsi sehingga meningkatnya mutu pelayanan kepada masyarakat di UPTD.
  - Terpenuhinya Peningkatan upaya Laboratorium Kesehatan sebagai labor Rujukan sehingga terpenuhinya kebutuhan Pemantauan dan pengamanan makanan (food security) pada event kedatangan tamu kenegaraan.
  - Terpantaunya penyebab masalah dari Sampel Lapangan

Laboratorium.

- Meningkatnya kemampuan pengelola program dalam melaksanakan Manajemen Asfiksia Dan BBLR.
- Terpilihnya pemenang Akselerasi Cakupan KB dalam rangka Pencapaian SDGs.
- Meningkatnya Pengetahuan dan Upaya Daerah Dalam Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
- Terpenuhi Peningkatan Capaian Program Kualitas Hidup Anak.
- Meningkatnya kemampuan petugas Laboratorium Kab / Kota dan RS dalam melaksanakan program.
- Terpilihnya Rumah Sakit Sayang Ibu dan Tenaga Medis Sub Spesialis Teladan, Meningkatnya peran Labkes sebagai laboratorium rujukan uji silang.
- Terpenuhi upaya peningkatan keterampilan petugas pada Kelas Ibu Hamil Dan Balita.
- Terpenuhi Pembinaan Dan Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Pengelola Kab/Kota.
- Terpenuhi Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Remaja Esential Terpadu.
- Terpenuhi kebutuhan Logistik Pasien dan Petugas UPTD.
- Terpenuhi pelayanan Kesehatan pada event-event di daerah yang ada.
- Terpenuhi kebutuhan program akreditasi, registrasi dan sertifikasi.
- Terstandarnya pelayanan di UPTD Labkes sesuai ISO 17025 dan ISO 15189.
- Meningkatnya kemampuan petugas dalam melakukan Otopsi Verbal dan Audit Maternal Perinatal dan Medik KB,
- Terakreditasinya pelayanan pelatihan di BKOM dan Pelkes.
- Terpenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan pada Daerah-daerah Pra dan Pasca Bencana.
- Meningkatnya kemampuan petugas dalam program Akreditasi dan Perizinan.
- Meningkatnya kemampuan petugas dalam penanganan Pra Dan Pasca Bencana.
- Meningkatnya pelayanan Integrasi di Puskesmas



Kab/Kota.

- Meningkatkan kemampuan petugas dalam Pelatihan Teknis Assestmen Intitusi Pemerintah Wajib Lapor (IPWL) dan Evaluasi Pelaksanaan IPWL.
- Meningkatkan Capaian Program KIA dan Kunjungan Neonatus dan Nifas bagi pengelola Program.
- Meningkatkan kemampuan Petugas Kesehatan dan Olah Raga.
- Meningkatkan kemampuan petugas dalam melaksanakan Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional.
- Terpenuhinya kebutuhan data perencanaan program Kesehatan tradisional kab/kota.
- Terlayannya pelayanan kesehatan di daerah terpencil.
- Meningkatkan Pengetahuan Kesehatan Nelayan Di Wilayah Pesisir.
- Meningkatkan peran Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP).
- Terbentuknya Sistem Rujukan UKM dan UKP Tingkat Propinsi.
- Meningkatkan cakupan pencapaian PIS PK di Kab/Kota.
- Tercapainya tujuan pelaksanaan kegiatan DAK Non Fisik di Tingkat Propinsi.
- Meningkatkan Capaian Pelaksanaan Kegiatan Bersumber Dana BOK di Kab/Kota.
- Terpantaunya upaya pencapaian SPM di Tingkat Propinsi, Kab/kota.
- Meningkatkan peran RS Paru sebagai Pusat Rujukan Spesimen Penyakit Paru.
- Meningkatkan cakupan penanganan masalah penyakit Indra ke Kab/Kota oleh BKIM.
- Meningkatkan peran UKM Sekunder Dalam Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat.
- Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Limbah Medis dan Non Medis di Puskesmas dan Rumah Sakit.
- Meningkatkan capaian hasil DAK fisik dan Non Fisik Tingkat Propinsi dan Kab/Kota.
- Meningkatkan kekePembinaan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) .
- Meningkatkan Peranan Pelayanan Kesehatan Tradisional di masyarakat yang aman sesuai standar.

- Tersedianya dokumen persiapan, penilaian dan draft keputusan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan, Meningkatkan kemampuan petugas di RS paru dalam melakukan Bantuan Hidup Dasar.
  - Meningkatnya tingkat Kebugaran Bagi PNS di Lingkungan Pemprov. Sumbar dan Terpantaunya Workshop Review Manual Rujukan Maternal Neonatal.
- 3) Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat, outcome dari program ini adalah :
- Meningkatnya peran aktif PKK dalam penerapan PHBS.
  - Meningkatnya Pencapaian SDGs Bidang Kesehatan.
  - Meningkatnya peran PKMRS dalam memberikan penyuluhan kepada pasien.
  - kemampuan petugas dalam mengkampanyekan dan menggerakkan program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Kab/Kota.
  - kemampuan petugas dalam menggerakkan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) di masyarakat dan Tersedianya Media Promosi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
- 4) Program Perbaikan Gizi Masyarakat, outcome dari program ini adalah :
- Peningkatan Kapasitas Manajemen pemberian makanan bayi dan anak bagi petugas Kabupaten/Kota.
  - Peningkatan kemampuan petugas dalam melakukan Pendidikan dan Pemulihan Gizi Berbasis Masyarakat (Positif Deviance).
  - kemampuan petugas dalam memberikan Konseling ASI.
  - Terintegrasinya program gizi di kab/kota.
  - Kemampuan petugas dalam memberikan Pelayanan Gizi Lansia.
  - Upaya deteksi dini anak gizi buruk dan meningkatnya peran Therapeutic Food Center (TFC) di Kab/Kota.
  - Peranan PKK dalam penanganan masalah gizi di kab/kota.
  - Kemampuan Petugas dalam pencegahan dan penanggulangan kegemukan dan obesitas pada anak sekolah.
  - Kemampuan petugas dalam proses asuhan gizi terstandar dan review pelaksanaan gizi saat bencana.

- 5) Program Pengembangan Lingkungan Sehat, outcome dari program ini adalah :
- Meningkatnya Pengawasan dan Pemantauan Higiene Sanitasi Lingkungan di Kab/Kota.
  - Pengelolaan Sanitasi RS.
  - Pantauan percepatan sanitasi pemukiman dan penilaian lingkungan bersih dan sehat serta tersedianya jamban percontohan bagi masyarakat.
  - Capaian Pamsimas dan Program Penyehatan Lingkungan Kab/Kota.
  - Kualitas kesehatan lingkungan di UPTD.
  - Keamanan pangan yang dihasilkan Tempat Pengelolaan Makanan pengelola kab/kota.
  - Aktifnya forum kab/kota sehat dan peran Stakeholder dalam mendukung pelaksanaan STBM dengan Metoda CLTS.
- 6) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, outcome dari program ini adalah :
- Ditekannya perkembangan kejadian penyakit HIV/AIDS.
  - Cakupan program pencegahan dan penanggulangan penyakit tuberculosis.
  - Keterampilan petugas layanan HIV-AIDS komprehensif berkesinambungan.
  - kemampuan petugas dalam pelaksanaan program Imunisasi dan Penemuan Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular (PTM).
  - Kemampuan petugas Teknis Program Kesehatan Jiwa dan NAPZA.
  - capaian target program pencegahan pengendalian Penyakit Tidak Menular.
  - Cakupan pencapaian program Surveilans Dan Imunisasi.
  - Pencapaian target Surveilans dan Kejadian Luar Biasa (KLB).
  - Menurunnya Kasus Kejadian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD).
  - Meningkatnya kemampuan Petugas Program Flu Burung.
  - Meningkatnya Kemampuan Petugas Konselor HIV/AIDS.
  - Meningkatnya pelayanan kesehatan haji bagi jamaah haji dan meningkatnya kemampuan petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan haji.

- Kemampuan teknis Petugas Dalam Penanggulangan Penyakit Menular Langsung (P2ML).
  - Keterampilan teknis petugas program pemberantasan penyakit bersumber binatang.
  - Menurunnya kasus Filariasis Limfatik (Kaki Gajah), peranan lintas sektor dan lintas program terkait dalam meningkatkan capaian program Imunisasi dan Penemuan Kasus TB.
  - Kemampuan petugas dalam Deteksi Dini Kanker Payudara Dan Serviks.
  - Ketersediaan tenaga Terlatih Skrining dengan menggunakan Metoda Assist.
  - Capaian hasil pelaksanaan program infeksi saluran pencernaan dan Cakupan Imunisasi Pada Program Nasional Imunisasi Measles Rubella.
- 7) Peningkatan Sarana dan Prasarana Rs/ Rumah Sakit Jiwa/ Rs Paru-Paru/ Rs Mata, outcome dari program ini adalah :
- Tersedianya Peralatan Kedokteran UPTD BKIM.
  - Terpenuhiya Kebutuhan Peralatan Labkes.
  - Terpenuhiya kebutuhan DED Untuk Perencanaan Pengembangan BKIM Menjadi RS Khusus Mata.
  - Terpenuhiya kebutuhan Sarana Perawatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok.
  - Tersedianya Peralatan Penunjang Diklat di UPTD BKOM dan Pelkes (DAK).
  - Tersedianya Gedung BKOM dan Pelkes (DAK) yang representatif.
  - Terpenuhiya kebutuhan biaya Lanjutan RS Khusus Paru.
  - **Rumah Sakit Achmad Mochtar Bukittinggi**
    - Meningkatnya fasilitas penunjang pelayanan laboratorium.
    - Meningkatnya fasilitas penunjang pelayanan kedokteran umum, THT, Bedah, Anak, Jantung, Radiologi, dan ICU.
    - Meningkatnya sarana gedung IGD.
  - **RSUD PARIAMAN**
    - Tersedianya Alat Kesehatan untuk pelayanan paru.
    - Tersedianya Prasarana Alat Kesehatan.
  - **SUD SOLOK**

- Terpenuhi jumlah sarana prasarana sesuai standar Rumah Sakit Standar Tipe B untuk meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit.
  - Terasilitasi pengadaan aplikasi dan perangkat yang bernasis informasi dan teknologi untuk pendaftaran rekam medis oleh pasien secara mandiri tanpa melalui loket, pengadaan sarana khusus nuntuk pasien yang akan pulang dan tempat bermain anak sehingga anak-anak tidak masuk ke ruang rawat ini saat kunjungan dilakukan.
- **RSJ HB. Sa'anin**
- Terpenuhi jalan lingkung, sarana pagar, prasarana, peralatan kesehatan meningkatnya sarana pelayanan, Rumah Sakit.
  - Terpenuhi sarana prasaran pelayanan instalasi NAPZA.
- 8) Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rs/ Rumah Sakit Jwa/ Rs Paru-Paru/ Rs Mata, outcome dari program ini adalah : Tersedianya Alat Labor dan Alat Kesehatan yang baik dan terstandarisasi di UPTD Dinkes Propinsi.
- 9) Peningkatan Sumber Daya Kesehatan, outcome dari program ini adalah :
- Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan tenaga Dokter yang Ikut Program Internship.
  - Meningkatnya ketersediaan Tenaga Terlatih Siaga Bencana.
  - Tersedianya Data SDM Bidang Kesehatan.
  - Terpenuhi kebutuhan tenaga teknis kesehatan terlatih di BP4.
  - Tersedianya tenaga Dokter Puskesmas terlatih untuk Program Peduli Kesehatan Olah Raga.
  - Meningkatnya kemampuan teknis Tenaga Laboratorium Kesehatan.
  - Terpenuhi persyaratan kenaikan pangkat Jabatan Fungsional.
- 10) Kebijakan Dan Manajemen Pembangunan Kesehatan, outcome dari program ini adalah :
- Terpenuhi kebutuhan Data Kesehatan Berbasis Elektronik.
  - Tersedianya Data Pelayanan Kesehatan.

- Terpenuhi integrasi perencanaan Bidang Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
  - Meningkatnya pemahaman Hukum Kesehatan dan Produk Hukum Lainnya.
  - Terpenuhi data perencanaan kesehatan ke kab/kota.
  - Terpenuhi Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota.
- 11) Program Penanggulangan Kemiskinan, outcome dari program ini adalah :
- Terjaminnya Masyarakat Tidak Mampu yang belum memiliki Jaminan Kesehatan Dalam Program Jaminan Kesehatan Daerah.
  - Meningkatnya Keberhasilan dan Ketepatan Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah.
- 12) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), outcome dari program ini adalah :
- Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan UPTD BKIM.
  - Pelayanan per orang kesehatan operasional Badan Layanan Umum Daerah Rumah sakit umum daerah selama 12 bulan.
  - Pelayanan kepada pasien dan masyarakat terselenggara dengan cepat dan lancar.

**d. Permasalahan dan Solusi**

1) Permasalahan :

Secara umum semua program dan kegiatan yang telah dialokasikan melalui APBD Tahun 2018 telah dapat terlaksana dengan baik, rata-rata pencapaian realisasi fisik 99.4 %, dan realisasi keuangan 91.59 %.

Dari 158 kegiatan yang ada secara umum kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Namun demikian masih terdapat 4 kegiatan yang pencapaian fisiknya tidak 100% hal ini disebabkan oleh berbagai hal sebagai berikut :

- Kegiatan Pembuatan DED RS Khusus Mata, kegiatan ini hanya dengan capaian realisasi fisik 20 %, sampai penetapan pemilihan pemenang, tetapi tidak berlanjut karena adanya issue perubahan regulasi Penetapan Kelas Rumah Sakit oleh Kemenkes dimana untuk RS Khusus Type/terendah adalah kelas B. Berdasarkan kondisi tersebut, maka penyempurnaan/ penyesuaian master plan

untuk di tuangkan ke dalam DED butuh kajian lebih dalam dan komprehensif sehingga perlu pertimbangan dan kesiapan terkait sarana prasarana lainnya untuk menetapkan kembali kelas RS. Khusus Mata bagi BKIM, sehingga dibutuhkan waktu yang lama untuk menyiapkan semua hal tersebut diatas, sementara sisa waktu pengerjaan DED tidak akan mencukupi maka direkomendasikan untuk dibatalkan/ ditunda.

- Pemantauan Percepatan Sanitasi Pemukiman Dan Penilaian Lingkungan Bersih Dan Sehat, Realisasi Fisik hanya sampai 56,59 %, hal ini disebabkan lokasi yang telah ditetapkan untuk mendapatkan bantuan jamban terkena bencana banjir, sehingga melihat kondisi daerah dan keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan maka ditunda pelaksanaannya dengan adanya surat penundaan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman.
- Kegiatan Workshop Pelayanan Kesehatan Primer, realisasi fisik hanya mencapai 92 % hal ini disebabkan karena kegiatan dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke 54 Tahun 2018 dilaksanakan juga bakti sosial di 8 Kabupaten/Kota terpilih. Permasalahan pelayanan kesehatan daerah terpencil dan bakti sosial tidak semua lokasi dapat dilakukan pelayanan karena keterbatasan waktu dokter spesialis.

Rendahnya realisasi keuangan kegiatan pelayanan kesehatan primer disebabkan sisa belanja bahan kontak, belanja sewa mobilitas darat tidak bisa cair, honor spesialis, perjalanan dinas monitoring evaluasi pelayanan daerah terpencil ke kabupaten/kota.

- Pelayanan BLUD UPTD BKIM Dinas Kesehatan, realisasi fisik 57,17 % sesuai dengan pendapatan yang diterima, tidak tercapainya target pendapatan ini disebabkan oleh: jumlah kunjungan tahun 2018 menurun 27.300 orang dibandingkan tahun 2017 sebanyak 29.833 orang hal ini antara lain disebabkan: pembatasan kuota pasien oleh BPJS sesuai dengan jumlah dokter spesialis mata dan lama bekerja di BKIM (spesialis mata hanya 2 orang dengan jam kerja 6 jam/hari, adanya pembatasan rujukan berdasarkan jarak lokasi puskesmas ke Pusat rujukan, Poliklinik BKIM buka hanya sampai 14.30 WIB.

Untuk meningkatkan jumlah pasien maka upaya yang dilakukan adalah dengan membuka layanan poliklinik sore, menambah dokter spesialis mata dengan kontrak

melalui dana BLUD dan menambah tenaga yang dibutuhkan lainnya.

**- Rumah Sakit Achmad Mochtar Bukittinggi**

- Kurangnya capaian realisasi pengadaan peralatan laboratorium rumah sakit disebabkan karena harga alat untuk 2 (dua) unit mikroskop ditambah 1 (satu) unit kamera seharga Rp.216.997.000,- dan biosafety cabinet seharga Rp.95.591.000,- dengan total belanja Rp.312.588.000,- sedangkan spesifikasi barang yang diinginkan pengguna sesuai dengan spesifikasi yang diadakan melalui E-Katalog.
- Terkendala dalam Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pembangunan Gedung IGD Terpadu, sementara tender sudah dilaksanakan melalui ULP Provinsi Sumatera Barat, dari hasil proses tender jadwal kontrak sudah ditetapkan tanggal 2 Juli 2018 s.d. 28 November 2018.
- Permasalahan muncul pada saat pengurusan IMB pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bukittinggi, saat memasukkan persyaratan Pengurusan IMB, RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi melampirkan dokumen UKL/UPL yang telah ada, tetapi ditolak oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengharuskan melampirkan dokumen AMDAL bukan Dokumen UKL/UPL. Kemudian dilakukan konsultasi ke Instansi terkait, dan hasil konsultasi, RSAM harus membuat AMDAL karena luas bangunan lebih dari 10.000 m<sup>2</sup>. Tender terlambat dilakukan disebabkan proses pembuatan AMDAL membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga pengurusan IMB juga terkendala yang mengakibatkan keterlambatan memulai pekerjaan, dimana IMB baru keluar pada tanggal 12 November 2018. Akibatnya jangka waktu penyelesaian pekerjaan sudah mendekati berakhirnya masa kontrak, maka dilakukan optimasi pekerjaan menjadi 37,35% sehingga nilai kontrak menjadi Rp.14.966.761.000,00 dan waktu pelaksanaan juga dilakukan adendum menjadi sampai tanggal 28 Desember 2018.
- Adanya aturan baru yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan tentang sistem Rujukan Online dimana rujukan pasien dari FKTP (Puskesmas, Klinik Pratama, Dokter Keluarga) adalah ke RS Tipe D dan C. Akibatnya kunjungan pasien ke RSAM (RS Tipe B)



terbatas, sehingga jumlah pendapatan RS mengalami penurunan sehingga target TTK tidak tercapai 100%. Realisasi belanja BLUD yang hanya tercapai 77,62% disebabkan oleh tidak terealisasinya belanja BLUD. Anggaran belanja BLUD berasal dari pendapatan BLUD. Rendahnya pendapatan BLUD disebabkan oleh keterlambatan pembayaran klaim pasien BPJS dan pasien pihak ke 3 yang sudah dilayani. Akibat tidak masuknya penerimaan tersebut, tidak bisa belanja kegiatan yang sudah dianggarkan dalam BLUD.

**- RSUD PARIAMAN**

- Dari 3 Program dengan 13 Kegiatan tersebut yang bisa masuk ke dalam Perencanaan KUA – PPAS hanya 2 Program dengan 3 kegiatan, sehingga BLUD- RSUD Pariaman belum dapat melaksanakan kegiatan seperti yang diharapkan pada Renstra tersebut.
- Tagihan klaim pelayanan kesehatan rujukan pasien BPJS kepada pihak penyelenggara BPJS ada permasalahan yaitu terlambatnya diterima pembayaran tagihan klaim BPJS sehingga terganggu operasional Rumah Sakit dalam belanja Obat dan bahan habis pakai dokter dalam melayani pasien berikutnya.
- Tagihan jasa pelayanan pasien miskin yang tidak ada kartu bantuan berobat dari pemerintah (KIS) nya, sehingga mengganggu penerimaan pendapatan BLUD- RSUD Pariaman sebagai dana operasional rumah sakit.

**- RSUD SOLOK**

- Akibat BPJS mengalami kerugian berdampak pada pencairan BPJS yang dipending sehingga mempengaruhi operasional rumah sakit terutama untuk obat, bahan laboratorium dan alat kesehatan habis pakai yang berdampak pada belanja kegiatan lainnya.
- Sistem rujukan online yang diterapkan BPJS berdampak terhadap jumlah pasien.

**- RSJ HB. Sa'anin**

- Kendala klaim BPJS sehingga pendapatan Rumah Sakit tertunda.
- Belum optimal kepedulian dan pengetahuan dari SDM khususnya tenaga profesional dan tingginya tuntutan masyarakat yang mengharuskan SDM selalu mengembangkan diri.

- Peralatan kedokteran yang ada belum memenuhi standar pelayanan sebagai rumah sakit jiwa kelas A, disamping itu banyak peralatan kedokteran rusak berat sehingga penambahan dan penggantian yang rusak.
- Sarana Prasarana instalasi NAPZA masih kurang sehingga perlu penambahan untuk meningkatkan pelayanan.
- Sistem rujukan online yang diterapkan BPJS berdampak terhadap jumlah pasien.
- Tidak tercapainya target pendapatan.

2) Solusi :

- Meningkatkan koordinasi lebih lanjut dengan berbagai pihak terkait yang mendukung pelaksanaan kegiatan sehingga dapat berperan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai yang telah direncanakan, dan membuat alternatif lain/inovasi sehingga kegiatan dapat dilaksanakan.
- Peningkatan upaya perhitungan waktu perencanaan pelaksanaan kegiatan sehingga jika terjadi berbagai hal diluar perhitungan masih bisa dicarikan solusi lebih lanjut dalam pelaksanaan kegiatan.
- RSUD Pariaman
  - Kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada tahun berjalan menjadi prioritas untuk pengusulan pada tahun berikutnya, dengan ketentuan mengajukan perubahan revisi Renstra.
  - Solusi dari permasalahan tagihan klaim BPJS belum ada jalan keluarnya, karena pihak Rumah sakit sudah sering menagih kepada pihak penyelenggara BPJS tetapi pembayarannya menunggu berdasarkan adanya keuangan BPJS. Solusi yang ditawarkan BPJS dengan meminjam uang ke Bank tidak bisa dilaksanakan karena rencana anggaran untuk meminjam ke pihak Bank belum ada dalam rencana anggaran rumah sakit. Rumah sakit melakukan negosiasi janji untuk membayar kepada Distributor obat dan bahan habis pakai dokter dengan membuat surat pernyataan akan segera membayar setelah dana tagihan BPJS diterima.
  - Solusi untuk tagihan pasien miskin yang belum tertampung oleh Kartu Indonesia Sehat (KIS) sudah dicarikan jalan keluarnya yaitu dengan mengupayakan permohonan menggunakan sebagian

Dana Zakat dari karyawan Rumah sakit dengan memohon izin ke Baznas Provinsi, alhamdulillah diberi izin oleh Baznas provinsi dibentuk unit pembantu pendistribusian zakat di Rumah Sakit.

- RSUD SOLOK
  - Melakukan efisiensi belanja kegiatan.
- RSJ HB. Sa'anin
  - Untuk meningkatkan pelayanan melakukan kerjasama dengan RS. Dr. M. Djamil Padang, untuk pelayanan lainnya mengoptimalkan SDM yang ada.
  - Adanya mutasi pegawai dr. spesialis ke RSJ Prof HB. Saanin.
  - Untuk peningkatan pelayanan pemenuhan tenaga perawat dan ADM dengan perekrutan tenaga Non PNS.
  - Mengupayakan perbaikan semua fasilitas pelayanan di Lingkungan Rumah Sakit dan mengoptimalkan pemakaian peralatan kesehatan.
  - Mengoptimalkan belanja operasional RS yang tersedia.

### **3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Untuk Urusan Pekerjaan Umum pada Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan oleh dua OPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.

#### **Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Untuk melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum mendapat alokasi APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.454.508.912.062,- dengan realisasi Rp.410.883.552.502,86 (90,40%), untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

##### **a. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- 6) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi, dengan kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Kegiatan Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatera Barat.
  - Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kota Padang dan Kab. Pesisir Selatan.
  - Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kab. Solok dan Kota Solok.
  - Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh.
  - Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat.
  - Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kab. Sijunjung dan Kab. Dhamasraya.
  - Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kab. Tanah Datar dan Kota Sawahlunto.
  - Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kab. Agam dan Kota Bukittinggi.
  - Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kab. Solok Selatan.
  - Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kab. Kep. Mentawai.
  - Pembangunan Jembatan Provinsi Wilayah – I;  
Pembangunan Jembatan Provinsi Wilayah – II;  
Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Jalan/Jembatan Provinsi.
  - Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Jalan/Jembatan Provinsi.
  - Pengadaan Lahan untuk Pembangunan jalan/jembatan dan infrastruktur strategis.
  - Monitoring dan Pengawasan Perizinan Utilitas Umum.
  - Perencanaan Pembangunan Jalan Provinsi.
  - Perencanaan Pembangunan Jembatan Provinsi.
  - Penyusunan Database dan Survey Jalan dan Jembatan Provinsi.
  - Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi.
  - Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi DAK.
  - Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kab. Padang Pariaman dan Kota Pariaman.
- 7) Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi, dengan kegiatan :

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jembatan Propinsi dan Bangunan Pelengkap Jalan.
  - Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Bukittinggi dan Agam Timur.
  - Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh.
  - Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. Tanah Datar dan Kota Padang Panjang.
  - Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. Padang Pariaman dan Kota Padang.
  - Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. Solok dan Kota Solok.
  - Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. Solok Selatan.
  - Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kota Sawahlunto, Kab. Sijunjung dan Kab. Dharmasraya.
  - Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. Pesisir Selatan dan Kab. Kepulauan Mentawai.
  - Pemeliharaan Peralatan Jalan dan Jembatan.
  - Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. Agam.
  - Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Kab. Pasaman.
  - Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Kab. Pasaman Barat.
  - Pemeliharaan Berkala Jalan Wilayah I.
  - Pemeliharaan Berkala Jalan Wilayah II.
  - Pengadaan Peralatan dan Bahan Jalan dan Jembatan.
- 8) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ke Binamargaan, dengan kegiatan :
- Pemeliharaan Alat - alat Ukur Laboratorium Ke Binamargaan.
  - Kegiatan Pengadaan Alat - alat Ukur dan Laboratorium Ke Binamargaan.
  - Monitoring Pengendalian Mutu UPTD.
- 9) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, dengan kegiatan :
- Pendampingan Program Sanimas IDB dan PPSP.
  - Pembinaan Penyusunan Masterplan Sanitasi Kab/Kota.

- Penyusunan Profil Pengelolaan Sanitasi Provinsi Sumatera Barat.
- 10) Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :
- Pembangunan Stadium Utama Sumatera Barat (Lanjutan).
  - Pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat (Lanjutan).
  - Pembangunan Gedung Utama Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
  - Pembangunan Gedung Convention Hall Sumatera Barat (Lanjutan).
  - Pembangunan Gedung Bundo Kandung Provinsi Sumatera Barat.
  - Pembinaan dan Pengelolaan Teknis (TPT) Bangunan Negara di Sumatera Barat.
  - Penyelenggaraan Hari Pers Nasional.
  - Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara.
  - Pembangunan Gedung Pengendali Inflasi Provinsi Sumatera Barat.
  - Penambahan Garase Rumah Dinas Gubernur.
  - Pembangunan Taman Wisata Kelok Sembilan.
  - Pendampingan Pembinaan Pengelolaan Rumah Negara di Sumatera Barat.
  - Penyelenggaraan Layanan Konsultasi Teknis dan Advokasi Serta Tersedianya Data Informasi Teknis Bidang Kecipta Karya.
  - Pembinaan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG).
  - Assesmen Bangunan Gedung dan Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung; Rekonstruksi Bangunan Pasca I.
  - Pembangunan Shelter di Musholla Jabal Rahmah di Painan (lanjutan).
  - Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat.
  - Pembangunan Lapangan Tenis Gubernur (lanjutan) .
  - Rekonstruksi Bangunan Pasca Bencana II.
  - Penyusunan Masterplan Pasar Koto Baru.
- 11) Program Peningkatan dan Pengembangan Jasa Konstruksi, dengan kegiatan :

- Penyusunan Ranperda SMM.
  - Kegiatan Bimbingan Teknis/Workshop Jasa Konstruksi.
  - Lokakarya, Sosialisasi dan Forum Komunikasi Jasa Konstruksi.
  - Kegiatan Update Profil Jasa Konstruksi.
  - Penyusunan Ranperda SMK3.
  - Sertifikasi Ahli Muda.
- 12) Program Perencanaan Penataan Ruang, dengan kegiatan :
- Penyusunan RTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP).
  - Proses Legalisasi RTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP).
  - Pelatihan Pemetaan Tata Ruang.
  - Penyusunan Database ke PU an dan Tata Ruang Provinsi / Kabupaten / Kota.
  - Legalisasi Perda Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat.
  - Koordinasi Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Sumatera Barat.
  - Peningkatan Pemahaman Pemangku Kepentingan terhadap Penataan Ruang.
  - Penyebarluasan Informasi dan Bahan Komunikasi Penataan Ruang.
- 13) Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang, dengan kegiatan :
- Pengawasan Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penataan Ruang di Kabupaten/Kota.
  - Pengawasan Pemanfaatan Ruang oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat.
  - Monitoring Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- 14) Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah, dengan kegiatan : Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi.
- 15) Program Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Provinsi, dengan kegiatan :
- Pembangunan Drainase Lintas Kabupaten/Kota.
  - Survey Drainase lintas kabupaten/kota.
  - Pembangunan Drainase kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang.
  - Pembangunan Drainase Kabupaten Solok dan kota Solok.

- 16) Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Lintas Daerah Kab/Kota, dengan kegiatan :
- Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Keciaptakarya di Provinsi Sumatera Barat.
  - Pembinaan Kegiatan PAMSIMAS di Provinsi Sumatera Barat.
  - Penyusunan Rencana Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM) Regional di Prov. Sumatera Barat.
  - Peningkatan Kinerja Pelayanan Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM) Di Prov. Sumatera Barat Wilayah I.
  - Peningkatan Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM) Kawasan Palangai - Nyiur Malambai Kabupaten Pesisir Selatan.

**b. Realisasi Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran Rp.5.125.016.140,- dan realisasi sebesar Rp.4.667.332.355,- (91,07%).
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan anggaran Rp.6.986.908.167,- dan realisasi sebesar Rp.6.717.495.819,86 (96,14%).
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan anggaran Rp.309.819.200,- dan realisasi sebesar Rp.299.822.000,- (96,77%).
- 4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dengan anggaran Rp.185.148.000,- dan realisasi sebesar Rp. 161.967.795,- (87,48%).
- 5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan anggaran Rp.1.369.035.000,- dan realisasi sebesar Rp.1.258.727.796,- (91,94%).
- 6) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi, dengan anggaran Rp.204.488.943.817,- dan realisasi sebesar Rp.181.077.032.125,- (88,55%). Serta Output :
  - Terlaksananya Dokumen Lingkungan Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi/ Strategis Provinsi serta Prasarana ke PU-an sebanyak 4 Dokumen yaitu Penyusunan Dokumen Lingkungan Jalan Lubuk Sikaping - Talu (P.096), Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Penyusunan Dokumen Lingkungan Jembatan Kuranji Kota Padang, Penyusunan laporan Pelaksanaan RKLRLP Pembangunan Infrastruktur



ke PU an Kota Padang.

- Terbangunnya Jalan Provinsi di Wilayah Kab.Pesisir Selatan yaitu Jalan Surantih-Kayu Aro-Langgai (P.086) sepanjang 3,325 km, Jalan Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) Paket I sepanjang 1.300 km, Pembangunan Drainase dan Bahu Jalan Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) Sepanjang 170 m.
- Terbangunnya Jalan Provinsi di Wilayah Kab.Solok dan Kota Solok yaitu Jalan Pintu Angin - Labuah Saiyo (P. 094) Kab. Solok sepanjang 3,110 km, Jalan Sp. Ganting Payo - Batas Tanah Datar - Sumani (P.092) Kab. Solok sepanjang 3,285 km, Jalan Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) Paket II Kab. Solok sepanjang 1,525 km, Pembangunan Bahu Jalan/Pasang Batu (P.082) Alahan Panjang - Kiliran Jao sepanjang 150 m, Pembangunan Bahu Jalan/Pasang Batu (P.093) Singkarak - Aripa - Tj.Balit Padang Ganting sepanjang 100 m.
- Terbangunnya Jalan Provinsi di Wilayah Kab.50 kota dan Kota Payakumbuh yaitu Jalan Palupuh - Pua Gaduh - Koto Tinggi (P. 090) Paket II Kab.50 Kota sepanjang 1,490 km, Jalan Lingkar Selatan (Payakumbuh) (P. 084) Kota Payakumbuh sepanjang 1,600 km, Jalan Provinsi Pangkalan Kapur Sembilan (P.076) Kab. 50 Kota sepanjang 0,500 km.
- Terbangunnya jalan provinsi di wilayah Kab.Pasaman dan Kab.Pasaman Barat yaitu Pengamanan Badan Jalan Panti - Simpang Empat (P.031) Kab. Pasaman sepanjang 0,049 km, Jalan Tapus - Muara Sei. Lolo - Gelugur (P.101) Kab. Pasaman sepanjang 2,584 km.
- Terbangunnya jalan provinsi di wilayah Kab.Sijunjung dan Kab.Dharmasraya yaitu Peningkatan Simp. Koto Baru - Junction (P.012) Kab. Dharmasraya sepanjang 2,225 km, Jalan Abai Sangir - Sei. Dareh (P.056.3) Kab. Dharmasraya sepanjang 1,100 km, Jalan 2 Jalur di Depan Kantor Bupati Ruas Jalan Tj. Ampalu - Sijunjung (P.008) Kab.Sijunjung 0,310 km, Pemotongan Tebing 2 Jalur di Depan Kantor Bupati Ruas Jalan Tj.Ampalu - Sijunjung (P.008) Kab.Sijunjung sepanjang 75 m.
- Terbangunnya jalan provinsi di wilayah Kab.Tanah Datar dan Kota Sawahlunto yaitu Jalan Guguk Cino - Sawahlunto (Lapangan Segitiga) (P. 038) Kota Sawahlunto sepanjang 0,930 km, Jalan Simp. Baso - Piladang (P.079) Kab. Tanah Datar sepanjang 1,054 km.

- Terbangunnya jalan provinsi di wilayah Kab.Agam dan Kota Bukittinggi sepanjang 5,60 Km yaitu Jalan Matur - Palembayan (P.080) Kab. Agam, Jalan Palembayan - Palupuh (Simp. Patai) (P. 081) Kab. Agam sepanjang 1,050 km, Jalan Palupuh - Pua Pagadih - Koto Tinggi(P.090) Paket I Kab. Agam sepanjang 1,025 km, Lanjutan Pembangunan Jalan Padang Koto Gadang - Palembayan (P. 088) Kab. Agam, Jalan Manggopoh - Padang Luar (P. 025) (Dari Bayur menuju Maninjau) Kab. Agam sepanjang 0,715 km, Pembangunan Saluran Drainase dan Bahu Jalan kelok 44 sepanjang 175 m.
- Terbangunnya jalan provinsi di wilayah Kab.Solok Selatan sepanjang 1,639 Km yaitu Jalan Simp. Padang Aro - Lubuk Malako (P.056.1) sepanjang 1,639 km.
- Terbangunnya Jalan Provinsi dan di Wilayah Kab. Kep. Mentawai sepanjang 1,115 Km yaitu Jalan Kantor Camat - Berkat (P.104) sepanjang 1,115 km.
- Terbangunnya jembatan wilayah – I (Kota Padang) sepanjang 80 m yaitu Jembatan Lolong (P.099) sepanjang 80 m.
- Terbangunnya jembatan provinsi wilayah – II (Kab.Agam dan Kab.50 Kota) sepanjang 50 m yaitu Jembatan Batang Sopan (P.076), Jembatan Lubuk Gadang (P.088) sepanjang 50 m.
- Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan dan Koordinasi Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan/Jembatan Sumatera Barat serta Jalan Tol ( 1 laporan tahunan ).
- Terlaksananya Pembebasan Lahan seluas 67.100 M2 untuk Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Ruas Jalan Baso – Piladang P.079 (2 Km) Kec. Akabiluru, Ruas Jalan Matur – Palembayan P.080 (1,5 Km) Kec. Matur, Ruas Jalan Palembayan – Palupuh P.081 (2 Km) Kec. Palembayan, Ruas Jalan Padang Koto Gadang – Palembayan P.088 (1 Km), Ruas Jalan manggopoh – Padang Luar P.025 (1 km) Ruas Jalan Bungus Teluk kabung – Mandeh – Tarusan P.083 Kec. Bungus TI Kabung, Ruas Jalan Duku – Ketaping P.075 (1,5 Km) Kec. Ulakan Tapakis.
- Terlaksananya Pembebasan Lahan seluas 5.335 M2 Untuk Pembangunan Infrastruktur Strategis di Jalan dan Jembatan Kuranji, Fly Over Jalur Kereta Api Ruas Jalan

Duku – Lb. Alung dan Persiapan Pengurusan Lahan Jalan Tol Padang – Pekanbaru.

- Terlaksananya Monitoring dan Pengawasan Perizinan Utilitas Umum Wilayah Sumbar.
  - Terlaksananya Penyusunan DED Jembatan Provinsi sebanyak 7 Dokumen yaitu DED Pengaman Jalan Simancung - Tj. Ampalu (P.007), DED Pengaman Jalan Singkarak - Arian - Tj. Balit - Padang Ganting (P.093), DED Pengaman Jalan Palupuh - Pua Gaduh - Koto tinggi (P.090), DED Pengaman Jalan Simpang Manggopoh - Padang Luar (P.025), DED Pengaman Jalan Provinsi Guguk Cino - Sawahlunto (P.038), DED Jalan Duku - Sicincin (Akses Menuju Main Stadium), DED Jalan Akses Jembatan Kuranji.
  - Terlaksananya Penyusunan DED Jembatan Provinsi sebanyak 3 Dokumen yaitu DED Jembatan Lubuk Gadang II (P.088), DED Jembatan Provinsi (Ruas Jalan Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073), DED Jembatan Cubadak (P.073).
  - Terlaksananya Penyusunan BMS serta Updating Dokumen IRMS dan Dokumen Leger Jalan dan Jembatan Provinsi sebanyak 3 dokumen.
  - Terlaksananya pengawasan pembangunan jalan dan jembatan sebanyak 6 Paket Pengawasan Terhadap Pembangunan Peningkatan 26 Ruas Jalan provinsi dan 2 unit jembatan dan 6 paket pengadaan langsung.
  - Terbangunnya jalan provinsi DAK sepanjang 5,10 Km yaitu Jalan Teluk Bayur - Nipah - Purus DAK (P.098) Kota Padang sepanjang 1,900 km, Jalan Bungo Tanjung - Teluk Tapang DAK (P.097) Kab. Pasaman Barat sepanjang 7,300 km, Jalan Lubuk Sikaping - Talu DAK (P.096) Kab. Pasaman Barat sepanjang 6,500 km.
  - Terbangunnya jalan provinsi di wilayah Kab. Pd. Pariaman yaitu Jalan Simpang Duku (Ketaping) - Pariaman (P.075) Kab. Padang Pariaman sepanjang 0,451 km.
  - Pekerjaan rigid bahu jalan paket Duku ( Ketaping ) Pariaman (P.075) sepanjang 200 m.
- 7) Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi, dengan anggaran Rp.65.298.230.300,- dan realisasi sebesar Rp.62.760.807.356,- (96,11%). Serta Output :

- Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi sepanjang 100 m.
- Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan provinsi yang terletak di wilayah Kab.Agam Timur dan Kota Bukittinggi sepanjang 109,67 Km dan 1 Paket Rehabilitasi Drainase Diperkeras/Rigid Bahu Jalan Ruas Jalan Baso – Piladang.
- Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan provinsi yang terletak di wilayah Kab.50 Kota dan Kota Payakumbuh sepanjang 118,32 Km dan 7 Paket Pekerjaan yaitu Paket Perbaikan Badan Jalan Provinsi Pada Ruas Jalan Pangkalan-Sialang-Gelugur, (P.076) sepanjang 68 m; Paket Pasangan Batu Penahan Badan Jalan Pada Ruas Jalan Payakumbuh - Suliki-Koto Tinggi (P.069.2) sepanjang 34 m.
- Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan provinsi yang terletak di wilayah Kab.Tanah Datar dan Kota Padang Panjang sepanjang 125,92 Km dan 3 Paket : Paket Saluran Tertutup Ruas Jalan Baso – Batusangkar sepanjang 100 m; Paket Saluran Tertutup Ruas Jalan Batas Payakumbuh – Sitangkai sepanjang 106 m; Paket Pasangan Batu Ruas Jalan Baso – Batusangkar sepanjang 15 m.
- Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan provinsi yang terletak di wilayah Kab.Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang sepanjang 80,84 Km dan 1 paket Paket Bahu Beton, pasangan bahu dan saluran di ruas jalan Teluk Bayur – Nipah – Purus sepanjang 229 m. .
- Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan provinsi yang terletak di wilayah Kab.Solok, Kota Solok sepanjang 106,31 Km dan 1 Paket pemeliharaan jalan ruas Sumani – Sp. Ganting Payo sepanjang 23,50 m.
- Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan provinsi yang terletak di wilayah Kab.Solok Selatan sepanjang 116,38 Km.
- Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan provinsi yang terletak di wilayah Kota Sawahlunto, Kab.Sijunjung, Kab. Dharmasraya 161,96 Km.
- Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab.Pesisir Selatan sepanjang 56,34 Km dan 1 Paket.

- Paket Pemeliharaan badan jalan ruas Surantih – Kayu Aro – Langgai sepanjang 27.70 m.
  - Terkontrol dan Terpeliharanya Peralatan Jalan dan Jembatan sebanyak 62 unit .
  - Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi yang terletak di Kab. Agam sepanjang 90 Km.
  - Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan provinsi yang terletak di wilayah Kab.Pasaman dan Kab.Pasaman Barat sepanjang 126,73 Km dan 3 paket : Pembuatan Saluran Drainase Jalan Panti- Simpang Empat (P.031) 153 m; Pembuatan Saluran Drainase Jalan Rao – Rokan (P.095) 137 m; Rigid bahu jalan Tapus – Moaro – Sungai Lolo (P.101) 80 m.
  - Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi yang terletak di Kab. Pasaman Barat sepanjang 110,10 Km.
  - Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Wilayah I Sumatera Barat sepanjang 2 Paket (8,735) dan 1 Paket berkala Wilayah I di ruas jalan Lubuk Basung- Sungai Limau Sepanjang 200 m.
  - Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Wilayah I Sumatera Barat sepanjang 2 Paket (6.70 km) dan satu Paket Berkala Wilayah II di Ruas Jalan Inderapura-Muara Sakai 120 m.
  - Terlaksananya Rehabilitas dan Pemeliharaan Jalan Provinsi 6 Paket (2 unit Backhoe Loader,200 buah patok km, 500 lbr bronjong,200 m guard rail, 1 unit Excavator, 4 unit Roller).
- 8) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ke Binamargaan, dengan anggaran Rp. 1.982.623.465,- dan realisasi sebesar Rp. 1.967.517.728,- (99,24%). Serta Output :
- Tersedianya Peralatan dan Alat Ukur untuk Laboratorium UPTD.
  - Tersedianya peralatan dan Alat Ukur untuk Laboratorium UPTD sebanyak 4 Paket.
  - Terkendalinya mutu bahan untuk pekerjaan ke PU-an sebanyak 1 Kegiatan dan 1 Laporan Tahunan.
- 9) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, dengan anggaran Rp.836.941.000,- dan realisasi sebesar Rp.711.142.859,- (84,97%). Serta Output :

- Terlaksananya Pendampingan Aparatur Kab/Kota Bidang Teknis Program Sanimas IDB dan PPSP sebanyak 3x Kegiatan (174 orang).
  - Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Masterplan Sanitasi Kab/Kota sebanyak 3x Kegiatan (196 orang).
  - Tersusun Profil Sanitasi Provinsi Sumatera Barat sebanyak 2 dokumen.
- 10) Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp.157.341.202.743,- dan realisasi sebesar Rp.143.245.064.585,- (91,04%). Serta Output :
- Terlaksananya Pembangunan Bangunan Gedung Stadium Utama Sumatera Barat sebanyak 1 Unit.
  - Terlaksananya Pembangunan Bangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat sebanyak 1 Unit.
  - Adanya Dokumen lingkungan dan studi kelayakan sebanyak 2 Dokumen.
  - Terlaksananya Pembangunan Bangunan Gedung Strategis Provinsi sebanyak 1 Unit.
  - Terlaksananya Pembangunan Bangunan Gedung Strategis Provinsi sebanyak 1 Unit.
  - Terehabilitasinya Bangunan Gedung Pemerintah Provinsi sebanyak 2 Unit.
  - Terlaksananya Dukungan Penyelenggaraan Hari Pers Nasional sebanyak 1 Unit.
  - Terehabilitasinya Bangunan Gedung Pemerintahan Provinsi sebanyak 2 Unit.
  - Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah Provinsi Sebanyak 1 Unit.
  - Terlaksananya Penambahan Garase Rumah Dinas Gubernur dan Bangunan Pendukung Lainnya sebanyak 1 Unit.
  - Tersedianya Perencanaan Pembangunan Taman Wisata kelok Sembilan sebanyak 4 Dokumen.
  - Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Pengelolaan Rumah Negara di Sumatera Barat.
  - Terlaksananya Pelayanan Konsultasi Teknis dan Informasi sebanyak 1 kali untuk 80 orang.
  - Terlaksananya Pembinaan Fasilitas TABG sebanyak 1 kali untuk 102 orang/19 Kab/Kota.

- Terlaksananya Assesmen Bangunan Gedung di 19 Kabupaten/Kota.
  - Terlaksananya Rekonstruksi Pasca Bencana Sebanyak 1 Unit.
  - Terlaksananya Pembangunan Shelter di Mushola Jabal Rahman Di Painan (Lanjutan) Sebanyak 1 Paket.
  - Tersedianya Pembangunan Bangunan Gedung Kantor Dispora Sebanyak 1 Unit.
  - Terlaksananya Pembangunan Lapangan Tenis Indoor di Komplek Gubernurnuran Sebanyak 1 Unit.
  - Tersedianya Gedung Kantor Dinas Instansi sebanyak 1 Unit.
  - Adanya Dokumen Masterplan Pembangunan Pasar Koto Baru sebanyak 1 Dokumen.
- 11) Program Peningkatan dan Pengembangan Jasa Konstruksi, dengan anggaran Rp.1.463.838.965,- dan realisasi sebesar Rp.1.232.310.365,- (84,18%). Serta Output :
- Tersusunnya Ranperda Sistem Manajemen Mutu sebanyak 1 ranperda.
  - Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Penata usaha Keuangan, Kegiatan Pelatihan Aspek Hukum Kontrak, Kegiatan Pelatihan Penyusunan HPS, Kegiatan Bimtek Sistem Manajemen Mutu, Kegiatan Bimtek K3, Kegiatan Pelatihan pengawasan Pekerjaan Konstruksi, Kegiatan Pelatihan pengelolaan teknis Bangunan Negara dan Kegiatan Pelatihan Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Sebanyak 1 Dokumen (8x kegiatan, 400 Orang).
  - Terlaksananya Kegiatan Lokakarya Road Safety, kegiatan Sosialisasi Tentang penilai Ahli, Kegiatan Forum Komunikasi Jasa Konstruksi (2 kali), Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang No.11 Tahun 2014 Tentang insinyur (1 kali) dan kegiatan Lokakarya dan Sosialisasi Permen PU No 31 Tahun 2015 (1 kali) sebanyak 1 Dokumen ( 7x kegiatan, 350 orang).
  - Dokumen Profil Jasa kontruksi sebanyak 1 Laporan.
  - Tersusunnya Ranperda SMK3 sebanyak 1 Ranperda.
  - Terlaksananya Kegiatan Sertifikasi Ahli Muda Sistem Manajemen Mutu sebanyak 1 Dokumen (1xkegiatan,60 orang).



- 12) Program Perencanaan Penataan Ruang, dengan anggaran Rp.4.929.252.510,- dan realisasi sebesar Rp.4.140.183.131,- (83,99 %). Serta Output :
- Terlaksananya Penyusunan Zoning Regulation Kawasan Wisata Mandeh Kab.Pesisir Selatan sebanyak 1 Dokumen.
  - Terlaksananya Proses Legalisasi Ranperda Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau dan Danau Singkarak sebanyak 2 Perda.
  - Terlaksananya Pelatihan Interpretasi Citra Satelit dan Penyusunan Peta Tematik Rencana Tata Ruang sebanyak 3 Kali Kegiatan,180 orang peserta.
  - Terlaksananya Penjaringan Data dan Informasi Penataan Ruang Kabupaten/Kota/ Provinsi Sumatera Barat.
  - Terlaksananya Proses Legalisasi Revisi Perda RTRW Provinsi Sumatera Barat sebanyak 1 perda.
  - Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat/ BKPRD sebanyak 5 kali kegiatan, 300 orang,dan 19 Kabupaten/Kota.
  - Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang di 19 Kabupaten/Kota (5x kegiatan,350 Orang).
  - Terlaksananya Kampanye Publik Penataan Ruang Melalui Media Masa pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.
- 13) Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang, dengan anggaran Rp.479.701.250,- dan realisasi sebesar Rp.325.983.700,- (67,96%). Serta Output :
- Terlaksananya Pengawasan Teknis SPM Bidang Penataan Ruang di Kabupaten/Kota sebanyak 1 Dokumen, 3 kali pertemuan, 150 Orang.
  - Terlaksananya Operasional PPNS Bidang Penataan Ruang sebanyak 1 Dokumen.
  - Terlaksananya Monitoring Penyelenggaraan Penataan Ruang sebanyak 1 Dokumen (1 laporan Tahunan).
- 14) Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah, dengan anggaran Rp.302.700.755,- dan realisasi sebesar Rp.285.189.146,- (94,21%). Serta Output : Terlaksananya Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi UPTD sebanyak 1 Kegiatan.



- 15) Program Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Provinsi, dengan anggaran Rp.638.335.750,- dan realisasi sebesar Rp.630.330.148,- (98,75%). Serta Output :
  - Terlaksananya Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Provinsi.
  - Terlaksananya Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Provinsi.
  - Terbangunnya Drainase Kewenangan Provinsi.
- 16) Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Lintas Daerah Kab/Kota, dengan anggaran Rp.2.771.215.000,- dan realisasi sebesar Rp.1.402.645.594,- (50,61%). Serta Output:
  - Terlaksananya Laporan Pengendalian Kegiatan Keciptakarya di Provinsi Sumatera Barat untuk 12 Laporan Bulanan dan 1 Laporan Tahunan.
  - Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Kegiatan Pamsimas di 15 Kab/Kota.
  - Tersusunnya Dokumen Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum Regional sebanyak 4 Dokumen.
  - Dokumen Pengembangan Lingkungan Hidup Adanya Kebijakan dan Strategi Air Minum Provinsi Sumbar sebanyak 2 dokumen.
  - Instalasi Jaringan Air Minum di 1 Kawasan pada 1 Kab/Kota.

**c. Outcomes**

- 1) Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi, outcome dari program ini adalah :
  - Terbangun / peningkatan jalan menuju daerah terisolir sepanjang 15,62 km, terbangun / peningkatan jalan daerah wisata sepanjang 6,83 km.
  - Terbangunnya jalan daerah menuju pelabuhan laut / udara sepanjang 9,20 km dan peningkatan jalan sepanjang 17,66 km untuk penunjang Kemantapan dengan persentase capaian 72,058%, sehingga peningkatan kualitas dan kuantitas sarana jalan dan jembatan untuk ekonomi rakyat di provinsi Sumatera Barat.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ke Binamargaan, dengan Outcome : terpeliharanya kemantapan jalan kondisi jalan provinsi sepanjang 1.182,67 km.

- 3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, dengan Outcome : meningkatnya kinerja Sanimas IDB dan PPSP.
- 4) Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dengan Outcome : terbangunnya sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan sebanyak 8 unit
- 5) Program Peningkatan dan Pengembangan Jasa Konstruksi, dengan Outcome : meningkatnya pengetahuan pelaku jasa konstruksi.
- 6) Program Perencanaan Penataan Ruang, dengan Outcome : tersedianya perencanaan penataan ruang.
- 7) Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang, dengan Outcome : meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang.
- 8) Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah, dengan Outcome : meningkatnya kinerja UPTD Laboratorium Konstruksi dan Lingkungan.
- 9) Program Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Provinsi, dengan Outcome : terbangunnya drainase lintas Kabupaten/Kota.
- 10) Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Lintas Daerah Kab/Kota, dengan Outcome : terlaksananya pembangunan P/S Air Minum.

**d. Permasalahan dan Solusi**

**1) Permasalahan**

Pada dasarnya, dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ditemui adanya permasalahan yang signifikan. Namun ada beberapa kegiatan pada tahun 2018 yang memiliki realisasi pencapaian target dibawah 90 % .

- Kegiatan Pembangunan Jalan Provinsi dan Strategis di Wilayah Kab.Tanah Datar dan Kota Sawahlunto, permasalahan yang dihadapi adalah :
  - Kelalaian kontraktor dalam penyelesaian pekerjaan pasangan batu di lahan masyarakat. Penyelesaian pekerjaan pasangan batu mempengaruhi pekerjaan rigid beton di badan jalan yang merupakan major item di dalam paket ini.
  - Lambatnya memulai pekerjaan di segmen 1 (dari gerbang PLTU sampai ke Jembatan Siasam) karena

menunggu proses pembebasan lahan yang dilaksanakan oleh pihak Pemko Sawahlunto.

- Lalu lintas truk tronton pengangkut batu bara untuk kebutuhan PLTU Ombilin dengan tonase berat melebihi 40 ton. Tidak tercapai kesepakatan untuk mengganti dengan truk yang lebih kecil sehingga mempengaruhi metoda dan waktu pelaksanaan pekerjaan rigid beton di badan jalan.
- Kegiatan Pembangunan Jembatan Strategis Wilayah – II, permasalahan yang dihadapi adalah :
  - Jeleknya pengelolaan keuangan proyek yang berdampak terlambatnya pembayaran upah dan leveransir material sehingga mengganggu jalannya pekerjaan.
  - Tingginya curah hujan pada periode kontrak (bulan Oktober s/d bulan November) 2018 sehingga kurang optimalnya pencapaian progress di lapangan.
- Kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Jalan dan Jembatan, permasalahan yang dihadapi adalah :
  - Untuk Lokasi Bungus Teluk Kabung – Mandeh – Tarusan : DPA awal belum tercantum 4 tahap dan telah dilakukan perubahan menjadi 4 tahap dengan proses terakhir penetapan lokasi dan menunggu pembentukan panitia Satgas A dan B oleh Kanwil Pertanahan.
  - Lokasi Batusangkar - Lokasi Baso – Piladang lambat pembuatan alas hak dari masyarakat sehingga terakhir sampai di BPN akhir November 2018 dan hasil perbaikan alas hak sampai saat ini belum selesai.
  - Lokasi Agam, Pemindahan lokasi di DPA perubahan sicincin – malalak (selesai); Manggopoh – padang luar (simpang gudang) peta bidang belum siap dari BPN.
- Kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Infrastruktur Strategis, proses kegiatan ini cukup panjang, saat ini dalam proses tim appraisal.
- Kegiatan Penyusunan Database dan Survey Jalan dan Jembatan Provinsi, Kegiatan BMS yang tidak dilaksanakan karena gagal pengadaan konsultan individu.
- Kegiatan Pembangunan Jalan Provinsi DAK, Pada prinsipnya paket pekerjaan fisik telah terlaksana terhadap

sisanya anggaran senilai 16,69 % merupakan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran.

- Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Bahan Jalan dan Jembatan, Proses pengadaan yang sebelumnya direncanakan dengan pengadaan E-catalog dan perencanaan harga pun berdasarkan harga yang tertera pada website LKPP E- catalog harganya adalah sekitar Rp.480.000.000,- namun dikarenakan E-Katalog turun tayang pada bulan juli dan sampai akhir desember tetap belum tayang dan dilakukan pengadaan secara lelang cepat juga tidak diminati dikarenakan harga yang direncanakan bukan harga lelang. Maka pengadaan Roller 3 ton ini tidak bisa dilakukan.
- Kegiatan Pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat (Lanjutan), Selisih pagu dana dari harga terkontrak dan adanya addendum kontrak yang harganya turun.
- Kegiatan Penambahan Garasi Rumah Dinas Gubernur, Terdapat tiang listrik di lokasi pekerjaan yang mengganggu pelaksanaan pekerjaan. Proses pemindahan membutuhkan waktu.
- Kegiatan Pembangunan Taman Wisata Kelok Sembilan, Tidak terlaksananya 2 (dua) pekerjaan karena mengusulkan Balai KSDA anggaran biaya untuk penyusunan rencana pengelolaan dan disain tapak melalui dana di Dinas PUPR untuk dilaksanakan oleh Balai KSDA.
- Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Konsultasi Teknis dan Advokasi Serta Tersedianya Data Informasi Teknis Bidang Keciaptakarya, Kegiatan sosialisasi diselenggarakan dari tanggal 26 s/d 28 November 2018 di Bukittinggi. Target/ sasaran sosialisasi adalah para mandor mekanikal elektrik dan mandor bangunan gedung dari gapensi, Gapensi Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Minimnya kehadiran peserta sebagai akibat dari penyelenggaraan sosialisasi yang bertepatan dengan finalisasi penyelesaian pekerjaan dilapangan.
- Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat, Tidak terlaksananya 1 (satu) pekerjaan karena tidak mencukupi waktu pelaksanaan pekerjaan.
- Kegiatan Bimbingan Teknis/Workshop Jasa Konstruksi, Terjadinya pergeseran narasumber dari luar daerah ke

dalam daerah sehingga tidak diperlukan transportasi dan honorinya sesuai dengan Pergub.

- Kegiatan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Sumatera Barat, Pelaksanaan kegiatan TKPRD telah dilaksanakan pembahasan Revisi RTRW untuk 5 kabupaten/kota dari 19 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat. Pembahasan RDTR dilaksanakan hanya 1 RDTR yaitu RDTR kawasan kayu tanam Kab. Padang Pariaman. Dalam kegiatan ini kami hanya menunggu kabupaten/kota yang akan melakukan pembahasan dokumen derive RTRW atau penyusunan dokumen revisi RTRW atau penyusunan dokumen RDTR yang nantinya diberikan rekomendasi gubernur terkait kebenaran isi dokumen. Rekomendasi gubernur menjadi salah satu syarat dalam menerbitkan persetujuan substansi oleh Kementerian ATR. Sehingga penyerapan dana sangat tergantung dari kesiapan kabupaten/kota dalam penyusunan dokumen tata ruangnya dan rapat-rapat khusus yang membahas permasalahan penataan ruang lainnya.
- Kegiatan Peningkatan Sistem Pelayanan Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM) Kawasan Palangai - Nyiur Melambai Kab. Pesisir Selatan, Tidak jadi dilaksanakan karena bukan kewenangan provinsi

## 2) Solusi

- Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dengan menentukan prioritas kinerja yang akurat dan handal.
- Mengupayakan adanya keseragaman persepsi dalam mendefinisikan indikator kinerja output untuk paket pekerjaan non-fisik, sehingga dapat terukur dengan jelas dan terjaga akuntabilitasnya.
- Meningkatkan kompetensi petugas pelaporan dengan memberikan alih pengetahuan dan pembinaan yang berkelanjutan.
- Pelaksanaan kebijakan/peraturan pemerintah yang baru secara bertahap dan tetap menjaga pencapaian target sesuai rencana dan kualitas.

### **Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas PSDA**

Untuk Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas PSDA pada Tahun Anggaran 2018 mendapat alokasi APBD Provinsi

Sumatera Barat sebesar Rp.174.827.055.141,- dengan realisasi Rp.160.950.087.404,11 (92,06%), untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

**a. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- 4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- 5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
- 6) Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Kewenangan Provinsi Lainnya, dengan kegiatan :
  - Rehabilitasi D.I Batang Sianok Kabupaten Agam.
  - Rehabilitasi D.I Bandar Sangkir Geragahan Kabupaten Agam.
  - Rehabilitasi D.I Bandar Batang Dareh Kabupaten Agam.
  - Rehabilitasi D.I Baramban III Lurah Kabupaten Agam.
  - Rehabilitasi D.I Ladang Laweh Kabupaten Padang Pariaman.
  - Rehabilitasi D.I Batang Tingkarang Kabupaten Pasaman.
  - Rehabilitasi D.I Kapar Ampu Kabupaten Pasaman Barat.
  - Rehabilitasi D.I Rimbo Tampurung Kabupaten Pasaman Barat.
  - Rehabilitasi D.I Lubuk Gobing Kabupaten Pasaman Barat.
  - Rehabilitasi D.I Lubuak Sariak Kabupaten Pesisir Selatan.
  - Rehabilitasi D.I Amping Parak Kabupaten Pesisir Selatan.
  - Rehabilitasi D.I Koto Kandis Kabupaten Pesisir Selatan.
  - Rehabilitasi D.I Bintungan Kabupaten Solok.
  - Rehabilitasi D.I Bdr. Bangko Kabupaten Solok Selatan.
  - Rehabilitasi D.I Bandar Pekonina Kabupaten Solok Selatan.
  - Rehabilitasi D.I Bdr. Sungai Aro Kabupaten Solok Selatan.
  - Rehabilitasi D.I Batang Selo Kabupaten Tanah Datar.
  - Rehabilitasi D.I Bandar Galo Gandang Kabupaten Tanah Datar.
  - Rehabilitasi D.I Koto Tuo Kota Padang; Rehabilitasi D.I Gunung Nago Kota Padang.
  - Rehabilitasi D.I Bdr. Pamujan Kabupaten Solok - Kota

Solok.

- Rehabilitasi D.I Batang Talawi Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh.
- Rehabilitasi D.I Batang Tabik Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh.
- Rehabilitasi D.I Bdr. Batu Hampa Kabupaten Agam - Kota Bukittinggi.
- Rehabilitasi D.I Sawah Aru Kabupaten Padang Pariaman - Kota Pariaman.
- Rehabilitasi D.I Bdr. Panjang Selayo Kabupaten Solok - Kota Solok.
- Rehabilitasi D.I Bdr. Halim Kabupaten Solok - Kota Solok.
- Rehabilitasi D.I Bdr. Batang Lembang Kabupaten Solok - Kota Solok.
- Rehabilitasi D.I Batang Parika Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang.
- Rehabilitasi D.I Bdr. Gadang II Paninjauan Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang.
- Rehabilitasi D.I Bdr. Gadang Darek Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang.
- Angka Kebutuhan Nyata Operasional dan Pemeliharaan Daerah Irigasi ( AKNOP ) Balai PSDA Wilayah Bukittinggi Sumatera Barat.
- Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada Balai PSDA Wilayah Bukittinggi Sumatera Barat.
- Angka Kebutuhan Nyata Operasional dan Pemeliharaan Daerah Irigasi ( AKNOP ) Balai PSDA Wilayah Sungai Dareh Sumatera Barat.
- Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada Balai PSDA Wilayah Sungai Dareh Sumatera Barat.
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Inventarisasi Irigasi Kewenangan Provinsi pada Balai PSDA Wilayah Bukittinggi Sumatera Barat.
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Inventarisasi Irigasi Kewenangan Provinsi pada Balai PSDA Wilayah Sungai Dareh Sumatera Barat.
- Pembinaan dan Koordinasi Komisi Irigasi Sumatera Barat.
- Perkuatan Dewan Daerah Sumber Daya Air dan Kegiatan Hari Air Dunia Kota Padang.
- Sistem Informasi Manajemen Irigasi SDA.

- Pelatihan OP untuk Pengamat, Juru ,dan PPA Irigasi Sumatera Barat; DED D.I Batang Gumarang Kabupaten Agam.
- DED D.I Amping Parak Kabupaten Pesisir Selatan.
- UKL/UPL D.I Bdr. Sungai Aro Kabupaten Solok Selatan.
- Survey, Identifikasi dan Desain Kerusakan serta Inventarisasi Jaringan Irigasi D.I Sei. Dareh Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh.
- Survey, Identifikasi dan Desain Kerusakan serta Inventarisasi Jaringan Irigasi D.I Bandar Batang Dareh Kabupaten Agam.
- Survey, Identifikasi dan Desain Kerusakan serta Inventarisasi Jaringan Irigasi D.I Rimbo Tampurung Kabupaten Pasaman Barat.
- Survey, Identifikasi dan Desain Kerusakan serta Inventarisasi Jaringan Irigasi D.I Malepang Kabupaten Pesisir Selatan.
- Survey,Identifikasi dan Desain Kerusakan serta Inventarisasi Jaringan Irigasi D.I Bdr. Bangko Kabupaten Solok Selatan.
- Pembayaran sisa pekerjaan 50 hari kalender Rehabilitasi D.I Bandar Galo Gandang Kabupaten Tanah Datar.
- Pembayaran sisa pekerjaan 50 hari kalender Rehabilitasi D.I Amping Parak Kabupaten Pesisir Selatan.
- Pembayaran sisa pekerjaan 50 hari kalender Rehabilitasi D.I Baramban III Lurah Kabupaten Agam.
- Pengukuran Rencana Kegiatan Fisik Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Tahun 2019.
- Sistem Informasi OP Irigasi berbasis aplikasi mobile.
- Rehabilitasi DI Batang Tingkarang Kabupaten Pasaman (Lanjutan).
- Rehabilitasi DI Bandar Pekonina Kabupaten Solok Selatan (Lanjutan).
- Rehabilitasi DI Gunung Nago Kota Padang (Lanjutan).
- Rehabilitasi DI Bdr Batang Lembang Kabupaten Solok - Kota Solok (Lanjutan).
- Rehabilitasi DI Bandar Galo Gandang Kabupaten Tanah Datar (Lanjutan).
- Rehabilitasi DI Bandar Sangkir Geragahan Kabupaten Agam (Lanjutan).



- Rehabilitasi DI Lubuk Gobing Kabupaten Pasaman Barat (Lanjutan).
  - Rehabilitasi DI Batang Gumarang Kabupaten Agam.
  - Rehabilitasi DI Bdr Panjang Selayo Kabupaten Solok - Kota Solok (Lanjutan).
  - Rehabilitasi DI Rimbo Tampurung Kabupaten Pasaman Barat (Lanjutan).
  - Rehabilitasi DI Bdr Halim Kabupaten Solok - Kota Solok (Lanjutan).
  - Rehabilitasi DI Batang Selo Kabupaten Tanah Datar (Lanjutan).
  - Rehabilitasi DI Sawah Aru Kabupaten Padang Pariaman - Kota Pariaman (Lanjutan).
  - Rehabilitasi DI Batang Sianok Kabupaten Agam (Lanjutan).
  - Rehabilitasi DI Bdr Bangko Kabupaten Solok Selatan (Lanjutan).
  - Rehabilitasi DI Baramban III Lurah Kabupaten Agam (Lanjutan).
  - Rehabilitasi DI Bdr Batu Hampa (Lanjutan).
  - Rehabilitasi DI Sicaung Kabupaten Padang Pariaman.
  - Rehabilitasi DI Talang Kemuning Jaya Kabupaten Pesisir Selatan.
  - Rehabilitasi DI Malepang Kabupaten Pesisir Selatan.
- 7) Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku, dengan kegiatan :
- Profil PSDA dan Neraca Air Sumatera Barat Sumatera Barat.
  - Survey dan Pengumpulan Data Hidrologi (Balai Bukittinggi) Sumatera Barat.
  - Alokasi Air pada DAS Kewenangan Provinsi Sumatera Barat.
  - Survey Pengumpulan Data Hidrologi (Balai Sungai Dareh).
- 8) Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai, dengan kegiatan :
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Sinamar Kabupaten 50 Kota.
  - Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Antokan Kabupaten Agam.

- Pengendalian Banjir Batang Kalampaian Kabupaten Padang Pariaman.
- Normalisasi dan Perkuatan tebing Sungai Batang Sungai Sariak Malai Kabupaten Padang Pariaman.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman.
- Pengendalian Banjir Batang Maligi Kabupaten Pasaman Barat.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Palangai Kabupaten Pesisir Selatan.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Surantiah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Siguntur Kabupaten Pesisir Selatan.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
- Pengendalian Banjir Batang Lumpo Kabupaten Pesisir Selatan.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Palangki Kabupaten Sijunjung.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Piruko Kabupaten Sijunjung.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Sangir Kabupaten Solok Selatan.
- Pengendalian Banjir Batang Lurus-Maransi Kota Padang.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Sungai Sapih Kota Padang.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Lembang Kota Solok - Kabupaten Solok.
- Pengamanan Pantai Bungus Kota Padang.
- Pembangunan Checkdam Sungai Tanuik Baruang-Baruang Balantai Kabupaten Pesisir Selatan.
- Pembangunan Checkdam Batang Malana Kabupaten Tanah Datar.
- Pembangunan Checkdam Batang Timbalun Kota Padang.
- Pembersihan dan Pengerukan Sungai (Operasional dan

Pemeliharaan Sungai) pada Balai PSDA Wilayah Bukittinggi) Sumatera Barat.

- Pembersihan dan Pengerukan Sungai (Operasional dan Pemeliharaan Sungai) pada Balai PSDA Wilayah Sungai Dareh) Sumatera Barat.
- Rehabilitasi Pos Hidrologi dan Hidrometri pada Balai PSDA Wilayah Bukittinggi Sumatera Barat.
- Rehabilitasi Pos Hidrologi dan Hidrometri pada Balai PSDA Wilayah Sungai Dareh Sumatera Barat.
- Monitoring Kualitas Air/Lingkungan SDA pada Balai PSDA Wilayah Bukittinggi Sumatera Barat.
- Monitoring Kualitas Air/Lingkungan SDA pada Balai PSDA Wilayah Sungai Dareh Sumatera Barat.
- DED Pengendalian Banjir Batang Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.
- SID Pengendalian Banjir Batang Sumpur Kabupaten Pasaman.
- SID Pengendalian Banjir Batang Masang Kabupaten Pasaman Barat.
- SID Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Pigogah Kabupaten Pasaman Barat.
- SID Batang Pangian Kabupaten Pesisir Selatan.
- SID Batang Lasi Kabupaten Sijunjung.
- SID Batang Lunto Kota Sawahlunto.
- Inventarisasi sungai-sungai Rawan Bencana di Sumatera Barat WS Lunang Silaut dan WS Masang Pasaman.
- Pengelolaan Aset Bangunan Sungai, Pantai dan Konservasi Sumatera Barat.
- DED Pengamanan Pantai Surantiah Kabupaten Pesisir Selatan.
- DED Pengamanan Pantai Tiram Kota Pariaman.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Asik.
- Studi Penetapan Daerah Sempadan Sungai WS Silaut – Tarusan.
- Studi Penetapan Daerah Sempadan Sungai WS Masang – Pasaman.
- Penyusunan Rancangan Pergub tentang Sempadan Sungai Kewenangan Provinsi.
- SID Batang Sibinail Kabupaten Pasaman.
- SID Batang Hulu Masang Kec. Bonjol Kabupaten

Pasaman.

- Kajian UKL/UPL Batang Nyalo dan Batang Mandeh.
- Kajian UKL/UPL Batang Inderopuro.
- Kajian UKL/UPL Pengendalian Banjir Batang Asik Kec. Rao Utara.
- Operasi dan Pemeliharaan Checkdam, Groundsill dan Pengaman Pantai.
- Pengadaan Bahan Banjiran.
- Normalisasi Muaro Sungai Batang Kandis Punggasan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Pembayaran Sisa 50 Hari Pekerjaan NPT Batang Lurus – Maransi.
- Pembayaran Sisa 50 Hari Pekerjaan NPT Batang Kumuih.
- Pembayaran Sisa 50 Hari Pekerjaan NPT Batang Sungai Limau.
- Pengukuran Rencana Kegiatan Sungai Wilayah Selatan Tahun Anggaran 2019.
- Pengukuran Rencana Kegiatan Sungai Wilayah Utara Tahun Anggaran 2019.
- Pengendalian Banjir Batang Lurus-Maransi Kota Padang (Lanjutan).
- SID Batang Punago, Nagari Sungai Kamuyang Kec. Luhak Kab. 50 Kota.
- Normalisasi Batang Piobang, Nagari Limbuku, Kec. Harau Kab. 50 Kota.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Katiak Nagari Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kab. Agam.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Partupangan Jorong Langgam Kinali Kecamatan Kinali Kab. Pasaman Barat.
- Normalisasi Batang Tambau, Nagari Persiapan Mudiak Labuah, Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat.
- Normalisasi Batang Mandiingin, Nagari Persiapan Bancah Kariang, Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Sapih Kota Padang (Lanjutan).
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Guo Belimbing Kota Padang.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Gn. Sariak Kota Padang Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang

Gn. Sariak Kp. Lapau Manggis Kota Padang.

- Normalisasi dan Perkuatan tebing Batang Surantih Kenagarian Aur Duri Kec. Sutera Kab. Pesisir Selatan.
- Normalisasi dan Perkuatan tebing Batang Surantih Kenagarian Gn. Malelo Kec. Sutera Kab. Pesisir Selatan.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Lakitan Kampung Subarang Tarok Kenagarian Lakitan Selatan Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Salido Kab. Pesisir Selatan.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Lengayang Kab. Pesisir Selatan (lanjutan).
- Normalisasi dan Perkuatan tebing Bataang Surantih Kenagarian Gunuang Mudik Selatan Kab. Pesisir Selatan;
- Normalisasi Muaro Sungai Batang Punggasan Kab. Pesisir Selatan (lanjutan).
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Kumuih Kab. Sijunjung.
- Normalisasi dan Pekuatan Tebing Batang Painan Kab. Pesisir Selatan.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Kumbung Kab. Pesisir Selatan.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Anak Batang Surantiah Batu Bala Kec. Sutera Kab. Pesisir Selatan.
- Rehabilitasi Checkdam Batang Kamumuan Kabupaten Padang Pariaman.
- Pengamanan Tebing Bt. Ampek Koto Mudiak Kec. Batang Kapas Kab. Pesisir Selatan.
- Pengamanan Tebing Batang Bayang Sani Kenagarian Kapeh Panji Kampung Jambak Kec. Bayang Kab. Pesisir Selatan.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Tarusan Kab.Pesir Selatan (Lanjutan).
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Tarusan Kanagarian Barung Barung Balantai Timur Kab.Pesir Selatan.
- Pengamanan Tebing Sungai Batang Kapas Kec. Batang Kapas Kab.Pesisir Selatan.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Anak Sungai Lolo Bancah Kec. KPGD Kab. Solok Selatan.

- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Sangir Kab. Solok Selatan (Lanjutan).
  - Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Belimbing Kota Padang.
  - Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Lagan Nagari Lagan Mudiak Punggasan Kab. Pesisir Selatan.
  - Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Gawan Kota Solok.
  - Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Tarusan Nagari Barung - Barung Belantai Tengah Kab. Pesisir Selatan.
  - Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Laweh Kec. Sungai Pagu Kab. Solok Selatan.
  - Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Galodo Kp. Pasar Nagari Barung - Barung Belantai Kab. Pesisir selatan.
  - Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Palangai Kaciak Kab. Pesisir Selatan.
  - Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Palangai Timur Kab. Pesisir Selatan.
  - Normalisasi dan Perkuatan tebing Batang Lagan Kenagarian Lagan Mudik Punggasan Kec. Linggo sari Baganti Kab. Pesisir Selatan.
  - Normalisasi dan Perkuatan Tebing Ampiang Parak Kenagaraan Ampiak Parak Timur Kec. Sutera Kab. Pesisir Selatan.
- 9) Program Peningkatan dan Pengembangan Jasa Konstruksi, dengan kegiatan :
- Bimbingan Teknis dan Pengendalian Mutu kegiatan konstruksi (quality assurance) Sumatera Barat.
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tahun Berjalan Sumatera Barat.
  - Monitoring Pembangunan dan Pembongkaran P/S SDA yang memerlukan izin Gubernur Sumatera Barat.
  - Pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi.
  - Workshop sinkronisasi kajian lingkungan terhadap rencana pelaksanaan pembangunan bidang SDA.
  - Peningkatan sumber daya manusia bidang SDA Kota Padang.
  - Verifikasi dan Monev perencanaan teknis bidang SDA Sumatera Barat.

- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kota Padang.
  - Sosialisasi peraturan perundang-undangan.
  - Lokakarya jasa konstruksi.
  - Survey Kepuasan masyarakat (SKM) Sumatera Barat.
  - Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Kota Padang, Peringatan Hari Pers Nasional.
  - Dukungan Sumatera Barat Expo Tahun 2018.
- 10) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya, dengan kegiatan :
- Pembangunan Embung Tambangan Nagari Tambangan Kabupaten Tanah Datar.
  - Pemeliharaan Embung pada Balai PSDA Wilayah Bukittinggi Sumatera Barat.
  - Pemeliharaan Embung pada Balai PSDA Wilayah Sungai Dareh Sumatera Barat.
  - SID Embung Kubang Badak Nagari Koto Laweh Lembang Jaya Kabupaten Solok.
  - UKL/UPL Embung sabai Nan Aluih Kabupaten Pesisir Selatan.
  - UKL/UPL Embung Balai Okak Tarung - Tarung Kabupaten Pesisir Selatan.
  - UKL/UPL Embung Batu Licin Kabupaten Pesisir Selatan.
  - SID Embung Aro Kabupaten Lima Puluh Kota.
  - SID Embung Batang Dareh Kabupaten Sijunjung.
  - Pembangunan Embung Talago Parayun Kabupaten Solok.
  - Kajian UKL/UPL Waduk Retensi Maransi/Larap.
  - Kajian UKL/UPL Embung Sijonie Nagari Pamuatan Kec. Kupitan.
  - Pembangunan Embung Salido Kabupaten Pesisir Selatan.
  - SID Embung Cirubuih Nagari Sirukam Kabupaten Solok.
  - Pengukuran Rencana Kegiatan Konservasi Tahun Anggaran 2019.
  - Pengukuran Embung Tanjung Bingkuang Kab. Solok.
  - Pembangunan Embung Payo Talao Kabupaten Sijunjung (Lanjutan).

**b. Realisasi Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran Rp.3.641.902.378,- dan realisasi sebesar Rp.3.211.548.676,- (88,18%).
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan anggaran Rp.5.513.462.926,- dan realisasi sebesar Rp.5.309.775.656,- (96,31%).
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan anggaran Rp.128.250.000,- dan realisasi sebesar Rp.91.256.000,- (71,15%).
- 4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dengan anggaran Rp.587.488.000,- dan realisasi sebesar Rp.480.027.266,- (81,71%).
- 5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan anggaran Rp.982.902.390,- dan realisasi sebesar Rp.890.612.277,- (90,61%).
- 6) Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Kewenangan Provinsi Lainnya, dengan anggaran Rp.53.058.519.033,- dan realisasi sebesar Rp.49.143.497.985,- (92,62%). Serta Output :
  - Terlaksananya Rehabilitasi D.I Batang Sianok Kabupaten Agam 400 m saluran sekunder.
  - Terlaksananya Rehabilitasi D.I Bandar Sangkir Garagahan Kabupaten Agam (DAK) 392 m saluran sekunder.
  - Terlaksananya Rehabilitasi D.I Bandar Batang Dareh Kabupaten Agam 390 m saluran sekunder.
  - Terlaksananya Rehabilitasi D.I Baramban III Lurah Kabupaten Agam 128 m saluran sekunder.
  - Terlaksananya Rehabilitasi D.I Ladang Laweh Kabupaten Padang Pariaman 1 bendung.
  - Rehabilitasi D.I Batang Tingkarang Kabupaten Pasaman 1 bendung.
  - Rehabilitasi D.I Kapar Ampu Kabupaten Pasaman Barat 1.700 m galian sedimen.
  - Rehabilitasi D.I Rimbo Tampurung Kabupaten Pasaman Barat 155 m saluran sekunder, 1 unit pintu air.
  - Rehabilitasi D.I Lubuk Gobing Kabupaten Pasaman Barat 189 m saluran primer.



- Rehabilitasi D.I Lubuak Sariak Kabupaten Pesisir Selatan 1 m talang, 54 m saluran sekunder.
- Rehabilitasi D.I Amping Parak Kabupaten Pesisir Selatan 425 m saluran sekunder, 583 m saluran tersier.
- Rehabilitasi D.I Koto Kandis Kabupaten Pesisir Selatan (DAK) 430 m saluran primer, 410 saluran sekunder.
- Rehabilitasi D.I Bintungan Kabupaten Solok 1,300 m saluran primer.
- Rehabilitasi D.I Bdr. Bangko Kabupaten Solok Selatan 140 m saluran sekunder.
- Rehabilitasi D.I Bandar Pekonina Kabupaten Solok Selatan 1 bendung, 1 bangunan ukur, 1 bangunan penguras, 1 bangunan sadap, 100 m saluran primer.
- Rehabilitasi D.I Bdr. Sungai Aro Kabupaten Solok Selatan 68 m saluran sekunder.
- Rehabilitasi D.I Batang Selo Kabupaten Tanah Datar 21 m talang, 157 m saluran sekunder.
- Rehabilitasi D.I Bandar Galo Gandang Kab.Tanah Datar (DAK) 1,250 m saluran sekunder.
- Rehabilitasi D.I Gunung Nago Kota Padang 371 m saluran sekunder.
- Rehabilitasi D.I Bdr. Pamujan Kabupaten Solok - Kota Solok 284 m saluran sekunder.
- Rehabilitasi D.I Batang Talawi Kab. 50 Kota - Kota Payakumbuh 1 bangunan bagi sadap, 231 m saluran sekunder.
- Rehabilitasi D.I Batang Tabik Kab. 50 Kota - Kota Payakumbuh 1 bangunan bagi sadap, 2 bangunan pelengkap, 124 m saluran sekunder.
- Rehabilitasi D.I Bdr. Batu Hampa Kab. Agam - Kota Bukittinggi 1 bangunan bagi, 1 bangunan pelengkap, 88 m saluran sekunder.
- Rehabilitasi D.I Sawah Aru Kab. Padang Pariaman - Kota Pariaman 334 m saluran sekunder.
- Rehabilitasi D.I Bdr. Panjang Selayo Kabupaten Solok - Kota Solok 1 bendung, 26 m saluran primer, 12 m penahan tebing, 1 unit rumah pelindung.
- Rehabilitasi D.I Bdr. Halim Kabupaten Solok - Kota Solok 601 m saluran primer.
- Rehabilitasi D.I Bdr. Batang Lembang Kabupaten Solok-Kota Solok 218 m saluran sekunder.

- Rehabilitasi D.I Batang Parika Kab.Tanah Datar-Kota Padang Panjang 190 m saluran sekunder.
- Rehabilitasi D.I Bdr. Gadang II Paninjauan Kab. Tanah Datar - Kota Padang Panjang 200 m saluran sekunder.
- Rehabilitasi D.I Bdr. Gadang Darek Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang 284 m saluran sekunder.
- Angka Kebutuhan Nyata Operasional dan Pemeliharaan Daerah Irigasi (AKNOP) Balai PSDA Wilayah Bukittinggi Sumatera Barat 1 dokumen.
- Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada Balai PSDA Wilayah Bukittinggi Sumatera Barat 40 DI, 1 kegiatan konreg, 25 unit mesin potong rumput.
- Angka Kebutuhan Nyata Operasional dan Pemeliharaan Daerah Irigasi (AKNOP) Balai PSDA Wilayah Sungai Dareh Sumatera Barat 1 dokumen.
- Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada Balai PSDA Wilayah Sungai Dareh Sumatera Barat 25 DI, 25 unit mesin potong rumput.
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Inventarisasi Irigasi Kewenangan Provinsi pada Balai PSDA Wilayah Bukittinggi Sumatera Barat 1 dokumen.
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Inventarisasi Irigasi Kewenangan Provinsi pada Balai PSDA Wilayah Sungai Dareh Sumatera Barat 1 dokumen.
- Pembinaan dan Koordinasi Komisi Irigasi Sumatera Barat 1 laporan.
- Perkuatan Dewan Daerah Sumber Daya Air dan Kegiatan Hari Air Dunia Kota Padang 2 laporan.
- Sistim Informasi Manajemen Irigasi SDA 1 dokumen.
- Pelatihan OP untuk Pengamat, Juru, dan PPA Irigasi Sumatera Barat 1 dokumen.
- DED D.I Batang Gumarang Kabupaten Agam 1 dokumen.
- DED D.I Amping Parak Kabupaten Pesisir Selatan 1 dokumen.
- UKL/UPL D.I Bdr. Sungai Aro Kabupaten Solok Selatan 1 dokumen.
- Survey, Identifikasi dan Desain Kerusakan serta Inventarisasi Jaringan Irigasi D.I Sei. Dareh Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh 1 dokumen.

- Survey, Identifikasi dan Desain Kerusakan serta Inventarisasi Jaringan Irigasi D.I Bandar Batang Dareh Kabupaten Agam 1 dokumen PAI.
- Survey, Identifikasi dan Desain Kerusakan serta Inventarisasi Jaringan Irigasi D.I Rimbo Tampurung Kabupaten Pasaman Barat 1 dokumen PAI.
- Survey, Identifikasi dan Desain Kerusakan serta Inventarisasi Jaringan Irigasi D.I Malepang Kabupaten Pesisir Selatan 1 dokumen PAI.
- Survey, Identifikasi dan Desain Kerusakan serta Inventarisasi Jaringan Irigasi D.I Bdr. Bangko Kabupaten Solok Selatan 1 dokumen PAI.
- Pembayaran sisa pekerjaan 50 hari kalender Rehabilitasi D.I Bandar Galo Gandang Kabupaten Tanah Datar 1 paket.
- Pembayaran sisa pekerjaan 50 hari kalender Rehabilitasi D.I Amping Parak Kabupaten Pesisir Selatan 1 paket.
- Pembayaran sisa pekerjaan 50 hari kalender Rehabilitasi D.I Baramban III Lurah Kabupaten Agam 1 paket.
- Pengukuran Rencana Kegiatan Fisik Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Tahun 2019 1 paket.
- Sistem Informasi OP Irigasi berbasis aplikasi mobile 1 aplikasi.
- Rehabilitasi DI Batang Tingkarang Kabupaten Pasaman (Lanjutan) 160 m saluran sekunder.
- Rehabilitasi DI Bandar Pekonina Kabupaten Solok Selatan (Lanjutan) 100 m saluran primer.
- Rehabilitasi DI Gunung Nago Kota Padang (Lanjutan) 32 m saluran sekunder.
- Rehabilitasi DI Bdr Batang Lembang Kabupaten Solok - Kota Solok (Lanjutan) 1 unit bangunan ukur, 1 unit bangunan sadap, 80 m saluran primer, 10 m saluran tersier.
- Rehabilitasi DI Bandar Galo Gandang Kabupaten Tanah Datar (Lanjutan) 103 m saluran sekunder.
- Rehabilitasi DI Bandar Sangkir Geragahan Kabupaten Agam (Lanjutan) 132 m saluran sekunder.
- Rehabilitasi DI Lubuk Gobing Kabupaten Pasaman Barat (Lanjutan) 80 m saluran sekunder.
- Rehabilitasi DI Batang Gumarang Kabupaten Agam 90 m saluran sekunder, 1 m penahan tebing.

- Rehabilitasi DI Bdr Panjang Selayo Kabupaten Solok - Kota Solok (Lanjutan) 1 unit bangunan penguras, 80 m saluran primer, 1 m penahan tebing.
  - Rehabilitasi DI Rimbo Tampurung Kabupaten Pasaman Barat (Lanjutan) 181 m saluran sekunder.
  - Rehabilitasi DI Bdr Halim Kabupaten Solok - Kota Solok (Lanjutan) 1 unit bangunan pelengkap, 40 m saluran primer, 2 unit pintu air.
  - Rehabilitasi DI Batang Selo Kabupaten Tanah Datar (Lanjutan) 157 m saluran sekunder.
  - Rehabilitasi DI Sawah Aru Kabupaten Padang Pariaman - Kota Pariaman (Lanjutan) 90 m saluran sekunder.
  - Rehabilitasi DI Batang Sianok Kabupaten Agam (Lanjutan) 122 m saluran sekunder.
  - Rehabilitasi DI Bdr Bangko Kabupaten Solok Selatan (Lanjutan) 111 m saluran sekunder.
  - Rehabilitasi DI Baramban III Lurah Kabupaten Agam (Lanjutan) 128 m saluran sekunder, 1 m penahan tebing.
  - Rehabilitasi DI Bdr Batu Hampa (Lanjutan) 135 m saluran sekunder.
  - Rehabilitasi DI Sicaung Kabupaten Padang Pariaman 130 m saluran sekunder.
  - Rehabilitasi DI Talang Kemuning Jaya Kabupaten Pesisir Selatan 2 m talang, 1 m penahan tebing.
  - Rehabilitasi DI Malepang Kabupaten Pesisir Selatan 1 unit bending.
- 7) Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku, dengan anggaran Rp.1.290.918.400,- dan realisasi sebesar Rp.1.199.384.569,- (92,91%). Serta Output :
- Profil PSDA dan Neraca Air Sumatera Barat Sumatera Barat 80 eks.
  - Survey dan Pengumpulan Data Hidrologi (Balai Bukittinggi) Sumatera Barat 1 laporan publikasi hidrologi.
  - Alokasi Air pada DAS Kewenangan Provinsi Sumatera Barat 1 laporan.
  - Survey dan Pengumpulan Data Hidrologi (Balai Sungai Dareh) Sumatera Barat 1 laporan publikasi hidrologi.
- 8) Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai, dengan anggaran Rp.98.579.931.923,- dan realisasi sebesar Rp.90.832.116.223,11 (92,14%). Serta Output :

- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Sinamar Kabupaten 50 Kota 444 m.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Antokan Kabupaten Agam 162 m.
- Pengendalian Banjir Batang Kalampaian Kab. Padang Pariaman 303 m.
- Normalisasi dan Perkuatan tebing Sungai Batang Sungai Sariak Malai Kabupaten Padang Pariaman 221,96 m.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman 210 m.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Palangai Kabupaten Pesisir Selatan 195 m.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Surantiah Kabupaten Pesisir Selatan 136 m.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan 58 m.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Bayang Kabupaten Pesisir Selatan 837 m.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan 733,2 m.
- Pengendalian Banjir Batang Lumpo Kabupaten Pesisir Selatan 101 m.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Palangki Kabupaten Sijunjung 382 m.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Piruko Kabupaten Sijunjung 340 m.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Sangir Kabupaten Solok Selatan 161 m.
- Pengendalian Banjir Batang Lurus-Maransi Kota Padang 1300 m.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Sungai Sapih Kota Padang 242 m.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Lembang Kota Solok - Kabupaten Solok 492,95 m.
- Pengamanan Pantai Bungus Kota Padang 228 m.
- Pembangunan Checkdam Sungai Tanuik Baruang-Baruang Balantai Kabupaten Pesisir Selatan 1 unit.
- Pembangunan Checkdam Batang Malana Kabupaten Tanah Datar 1 unit.

- Pembangunan Checkdam Batang Timbalun Kota Padang 1 unit.
- Pembersihan dan Pengerukan Sungai (Operasional dan Pemeliharaan Sungai) pada Balai PSDA Wilayah Bukittinggi Sumatera Barat 1 laporan.
- Pembersihan dan Pengerukan Sungai (Operasional dan Pemeliharaan Sungai) pada Balai PSDA Wilayah Sungai Dareh Sumatera Barat 1 laporan.
- Rehabilitasi Pos Hidrologi dan Hidrometri pada Balai PSDA Wilayah Bukittinggi Sumatera Barat 3 unit.
- Rehabilitasi Pos Hidrologi dan Hidrometri pada Balai PSDA Wilayah Sungai Dareh Sumatera Barat 3 unit.
- Monitoring Kualitas Air/Lingkungan SDA pada Balai PSDA Wilayah Bukittinggi Sumatera Barat 1 Laporan.
- Monitoring Kualitas Air/Lingkungan SDA pada Balai PSDA Wilayah Sungai Dareh Sumatera Barat 1 Laporan.
- DED Pengendalian Banjir Batang Bayang Kab. Pesisir Selatan 1 dokumen.
- SID Pengendalian Banjir Batang Sumpur Kabupaten Pasaman 1 dokumen.
- SID Pengendalian Banjir Batang Masang Kab. Pasaman Barat 1 dokumen.
- SID Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Pigogah Kabupaten Pasaman Barat 1 dokumen.
- SID Batang Pangian Kabupaten Pesisir Selatan 1 dokumen.
- SID Batang Lasi Kabupaten Sijunjung 1 dokumen.
- SID Batang Lunto Kota Sawahlunto 1 dokumen.
- Inventarisasi sungai-sungai Rawan Bencana di Sumatera Barat WS Lunang Silaut dan WS Masang Pasaman 1 dokumen.
- Pengelolaan Aset Bangunan Sungai, Pantai dan Konservasi Sumatera Barat 1 Laporan.
- DED Pengamanan Pantai Surantiah Kabupaten Pesisir Selatan 1 dokumen.
- DED Pengamanan Pantai Tiram Kota Pariaman 1 dokumen; Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Asik Kab. Pasaman 228 m.
- Studi Penetapan Daerah Sempadan Sungai WS Silaut - Tarusan 1 Laporan.

- Studi Penetapan Daerah Sempadan Sungai WS Masang - Pasaman 1 Laporan.
- Penyusunan Rancangan Pergub tentang Sempadan Sungai Kewenangan Provinsi 1 dokumen.
- SID Batang Sibinail Kabupaten Pasaman 1 dokumen.
- SID Batang Hulu Masang Kec. Bonjol Kabupaten Pasaman 1 dokumen.
- Kajian UKL/UPL Batang Nyalo dan Batang Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan 1 dokumen.
- Kajian UKL/UPL Batang Inderopuro Kabupaten Pesisir Selatan 1 dokumen.
- Kajian UKL/UPL Pengendalian Banjir Batang Asik Kec. Rao Utara Kabupaten Pasaman 1 dokumen.
- Operasi dan Pemeliharaan Checkdam, Groundsill dan Pengaman Pantai Sumatera Barat 1 Laporan.
- Pengadaan Bahan Banjiran 1000 buah.
- Normalisasi Muaro Sungai Batang Kandis Punggasan Kabupaten Pesisir Selatan 53,5 m.
- Pembayaran Sisa 50 Hari Pekerjaan NPT Batang Lurus - Maransi 1 paket.
- Pembayaran Sisa 50 Hari Pekerjaan NPT Batang Kumuih 1 paket.
- Pembayaran Sisa 50 Hari Pekerjaan NPT Batang Sungai Limau 1 paket.
- Pengukuran Rencana Kegiatan Sungai Wilayah Selatan Tahun Anggaran 2019 1 dokumen.
- Pengukuran Rencana Kegiatan Sungai Wilayah Utara Tahun Anggaran 2019 1 dokumen.
- Pengendalian Banjir Batang Lurus-Maransi Kota Padang (Lanjutan) 400 m.
- SID Batang Punago, Nagari Sungai Kamuyang Kec. Luhak Kab. 50 Kota 1 dokumen.
- Normalisasi Batang Piobang, Nagari Limbuku, Kec. Harau Kab. 50 Kota 67,5 m.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Katiak Nagari Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kab. Agam 144,6 m.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Partupangan Jorong Langgam Kinali Kecamatan Kinali Kab. Pasaman Barat 46 m.

- Normalisasi Batang Tambau, Nagari Persiapan Mudiak Labuah, Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat 61,85 m.
- Normalisasi Batang Mandiangin, Nagari Persiapan Bancah Kariang, Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat 40 m.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Sapih Kota Padang (Lanjutan) 48,6 m.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Guo Belimbing Kota Padang 49,6 m.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Gn. Sariak Kota Padang 41,3 m.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Gn. Sariak Kp. Lapau Manggis Kota Padang 71,1 m.
- Normalisasi dan Perkuatan tebing Batang Surantih Kenagarian Aur Duri Kec. Sutura Kab. Pesisir Selatan 18 m.
- Normalisasi dan Perkuatan tebing Batang Surantih Kenagarian Gn. Malelo Kec. Sutura Kab. Pesisir Selatan 43 m.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Lakitan Kampung Subarang Tarok Kenagarian Lakitan Selatan Kec. Lembang Kab. Pesisir Selatan 24,5 m.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Salido Kab. Pesisir Selatan 45 m.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Lembang Kab. Pesisir Selatan (lanjutan) 32 m.
- Normalisasi dan Perkuatan tebing Batang Surantih Kenagarian Gunung Mudik Selatan Kab. Pesisir Selatan 50 m.
- Normalisasi Muaro Sungai Batang Punggasan Kab. Pesisir Selatan (lanjutan) 26 m.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Kumuih Kab. Sijunjung 79,5 m.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Painan Kab. Pesisir Selatan 84 m.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Kumbang Kab. Pesisir Selatan 42 m.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Anak Batang Surantiah Batu Bala Kec. Sutura Kab. Pesisir Selatan 43 m.
- Rehabilitasi Checkdam Batang Kamumuan Kabupaten Padang Pariaman 1 unit.



- Pengamanan Tebing Bt. Ampek Koto Mudiak Kec. Batang Kapas Kab. Pesisir Selatan 37 m.
- Pengamanan Tebing Batang Bayang Sani Kenagarian Kapeh Panji Kampung Jambak Kec. Bayang Kab. Pesisir Selatan 54 m.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Tarusan Kab.Pesir Selatan (Lanjutan) 60 m.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Tarusan Kanagarian Barung Barung Balantai Timur Kab.Pesir Selatan 58,1 m.
- Pengamanan Tebing Sungai Batang Kapas Kec. Batang Kapas Kab.Pesisir Selatan 36 m.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Anak Sungai Lolo Bancah Kec. KPGD Kab. Solok Selatan 79,1 m.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Sangir Kab. Solok Selatan (Lanjutan) 43,9 m.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Belimbing Kota Padang 62 m.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Lagan Nagari Lagan Mudiak Punggasan Kab. Pesisir Selatan 110,86 m.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Gawan Kota Solok 42 m.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Tarusan Nagari Barung - Barung Belantai Tengah Kab. Pesisir Selatan 43 m.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Laweh Kec. Sungai Pagu Kab. Solok Selatan 47,7 m.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Galodo Kp. Pasar Nagari Barung - Barung Belantai Kab. Pesisir selatan 67 m.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Palangai Kaciak Kab. Pesisir Selatan 24 m.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Palangai Timur Kab. Pesisir Selatan 36 m.
- Normalisasi dan Perkuatan tebing Batang Lagan Kenagarian Lagan Mudik Punggasan Kec. Linggo sari Baganti Kab. Pesisir Selatan 71,85 m.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Ampiang Parak Kenagaraian Ampiak Parak Timur Kec. Sutera Kab. Pesisir Selatan 38 m.

- 9) Program Peningkatan dan Pengembangan Jasa Konstruksi, dengan anggaran Rp.1.953.966.265,- dan realisasi sebesar Rp.1.570.180.038,- (80,36%). Serta Output :
- Pengendalian Mutu Kegiatan Konstruksi (Quality Assurance) 1 laporan.
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tahun Berjalan Sumatera Barat 1 laporan.
  - Monitoring Pembangunan dan Pembongkaran P/S SDA yang memerlukan izin Gubernur Sumatera Barat 1 laporan.
  - Pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi Kota Padang 1 laporan.
  - Workshop sinkronisasi kajian lingkungan terhadap rencana pelaksanaan pembangunan bidang SDA Kota Padang 1 laporan.
  - Peningkatan sumber daya manusia bidang SDA Kota Padang 1 laporan.
  - Verifikasi dan Monev perencanaan teknis bidang SDA Sumatera Barat 1 laporan.
  - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kota Padang 1 laporan.
  - Sosialisasi peraturan perundang-undangan Kota Padang 1 laporan.
  - Survey Kepuasan masyarakat (SKM) Sumatera Barat 1 laporan.
  - Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Kota Padang 1 laporan.
  - Peringatan Hari Pers Nasional 1 kegiatan.
  - Dukungan Sumatera Barat Expo Tahun 2018 1 kegiatan.
- 10) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya, dengan anggaran Rp.9.089.713.826,- dan realisasi sebesar Rp.8.221.688.714,- (90,45 %). Serta Output :
- Pemeliharaan Embung pada Balai PSDA Wilayah Bukittinggi Sumatera Barat 1 laporan.
  - Pemeliharaan Embung pada Balai PSDA Wilayah Sungai Dareh Sumatera Barat 1 laporan.
  - SID Embung Kubang Badak Nagari Koto Laweh Lembang Jaya Kabupaten Solok 1 dokumen.

- UKL/UPL Embung sabai Nan Aluih Kabupaten Pesisir Selatan 1 dokumen.
- UKL/UPL Embung Balai Okak Tarung - Tarung Kabupaten Pesisir Selatan 1 dokumen.
- UKL/UPL Embung Batu Licin Kabupaten Pesisir Selatan 1 dokumen.
- SID Embung Aro Kabupaten Lima Puluh Kota 1 dokumen.
- SID Embung Batang Dareh Kabupaten Sijunjung 1 dokumen.
- Pembangunan Embung Talago Parayun Kabupaten Solok 1 unit.
- Kajian UKL/UPL Waduk Retensi Maransi/Larap Kota Padang 1 dokumen.
- Kajian UKL/UPL Embung Sijonie Nagari Pamuatan Kec. Kupitan Kab. Sijunjung 1 dokumen.
- SID Embung Cirubuih Nagari Sirukam Kabupaten Solok 1 dokumen.
- Pengukuran Rencana Kegiatan Konservasi Tahun Anggaran 2019 1 dokumen.
- Pengukuran Embung Tanjung Bingkuang Kab. Solok 1 dokumen.

**c. Outcomes**

- 1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Kewenangan Provinsi Lainnya, dengan Outcome :
  - Telah terlaksananya dengan baik program pengembangan dan pengelolaan sistem jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya dengan 51 kegiatan pada 35 Daerah irigasi kewenangan Provinsi dengan total panjang penanganan :  $\pm 13,358$  Km saluran pembawa, rehabilitasi ringan 5 unit bendung, 17 unit bangunan pelengkap, 18 meter penahan tebing, 25 meter talang, 11 unit pintu air.
  - Pemenuhan kebutuhan air irigasi pada daerah irigasi kewenangan Provinsi Sumatera Barat yang dapat dilayani sebesar  $\pm 1.975$  hektar.
  - Telah terlaksananya program dan kegiatan lainnya yang memberikan dukungan secara tidak langsung untuk keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran.
- 2) Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku, dengan Outcome : Telah terlaksananya program pengendalian banjir dan pengamanan pantai dengan 61 kegiatan di 44 lokasi

Pengendalian Banjir dan pengamanan pantai dengan panjang total infrastruktur terbangun 9.575,06 m dan luas kawasan yang terlindungi sebesar 53, 09 Ha.

- 3) Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai, dengan Outcome : luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air.
- 4) Program Peningkatan dan Pengembangan Jasa Konstruksi, dengan Outcome : Persentase peningkatan kualitas SDM pengelola SDA.
- 5) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya, dengan Outcome :
  - Telah terlaksananya program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya dengan 1 kegiatan pembangunan embung, yaitu embung talago Parayun di kabupaten Solok dengan peningkatan kapasitas tampungan air sebesar  $\pm 22.160 \text{ m}^3$ .
  - Telah terlaksananya dengan baik program dan kegiatan lainnya yang memberikan dukungan secara tidak langsung untuk keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran ini, berupa pembangunan groud sill untuk pengamanan embung pada embung salido Kabupaten Pesisir Selatan dan Penambahan kedalaman sayap, penambahan lantai pada embung payo Talao kabupaten Sijunjung.

#### **d. Permasalahan dan Solusi**

##### **1. Permasalahan**

Secara keseluruhan tidak terhadap yang cukup berarti, namun terkait dengan pelaksanaan kegiatan ada hal-hal yang menjadi permasalahan dan kendala yaitu :

- Lamanya proses mulainya lelang kegiatan sehingga berdampak kepada tertundanya pelaksanaan kegiatan.
- Masih ada kendala pembebasan lahan oleh pemerintah Kabupaten/Kota pada lokasi dilaksanakannya kegiatan.
- Kompetensi personel penyedia jasa (konsultan perencanaan, konsultan pengawas, dan kontraktor) serta kinerja penyedia jasa yang masih perlu ditingkatkan.
- Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas PSDA terus mengalami penurunan setiap tahunnya.
- Sarana dan prasarana seperti kendaraan roda empat sebagai alat transportasi untuk menuju lokasi-lokasi

kegiatan yang tersebar di Provinsi Sumatera Barat belum mencukupi.

2) Solusi

Berikut solusi dan langkah-langkah perbaikan yang dapat dilakukan :

- Agar proses lelang kegiatan dapat dimulai lebih awal.
- Proses perencanaan dan persiapan kegiatan agar lebih matang lagi untuk mengurangi adanya permasalahan lahan maupun permasalahan ketidaksesuaian perencanaan dengan kondisi eksisting sebelum pelaksanaan kegiatan.
- Agar pemilihan jasa kontruksi dan konsultansi lebih mengutamakan kinerja dan kompetensi penyedia jasa, tidak saja memenangkan penyedia jasa dengan penawaran ternedah.
- Jumlah Sumber Daya Manusia terutama untuk tenaga teknis ditambah, sedangkan yang sudah ada tetap dioptimalkan.
- Pengadaan tambahan kendaraan transportasi roda empat serta optimalisasi kendaraan yang ada.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja agar lebih ditingkatkan.
- Pada saat perencanaan, pemrograman, penganggaran maupun implementasi, semua komponen tersebut harus terintegrasi dengan baik sehingga apa yang sudah ditargetkan dapat tercapai dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

**4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**

Untuk Urusan Perumahan pada Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan mendapat alokasi APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.10.631.680.414,- dengan realisasi Rp.8.181.596.983,50 (76,95 %), untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

**a. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- 4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- 5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- 6) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, dengan kegiatan : Peningkatan pembangunan Infrastruktur TPA Regional.
- 7) Program Pengembangan Perumahan, dengan kegiatan :
  - Penguatan dan Pembinaan POKJA Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat.
  - Sosialisasi Percepatan Penyediaan Perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
  - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perumahan.
  - Sosialisasi dan Workshop Pembangunan Rumah yang Aman Terhadap Bencana Alam.
  - Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat.
  - Penyusunan SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Barat.
  - Updating Data Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Sumatera Barat.
- 8) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, dengan kegiatan :
  - Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK).
  - Pembangunan PLP2K-BK dan Supervisi.
  - Pembangunan PSU Kawasan Strategis dan Khusus (Rawan Bencana, Agropolitan, Minapolitan, Desa Tertinggal).
  - Perencanaan Prasarana Sarana Utilitas Umum Kawasan Strategis dan Khusus.
  - Penyusunan Ranperda Persampahan Provinsi Sumatera Barat.
  - Sosialisasi persampahan terhadap Kab/Kota.

**b. Realisasi Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran Rp.976.264.785,- dan realisasi sebesar Rp.738.550.298,- (75,65 %).
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan anggaran Rp.1.541.484.078,- dan realisasi sebesar Rp.1.370.241.040,- (88,89 %).
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan anggaran Rp.79.315.200,- dan realisasi sebesar Rp.60.016.000,-

(75,67 %).

- 4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dengan anggaran Rp.144.960.000,- dan realisasi sebesar Rp. 104.338.475,- (71,98 %).
- 5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan anggaran Rp.455.723.300,- dan realisasi sebesar Rp.366.637.640,- (80,45 %).
- 6) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, dengan anggaran Rp.1.254.423.000,- dan realisasi sebesar Rp.1.249.772.000,- (99,63%). Serta Output : Tersedianya Infrastruktur di TPA Sampah Regional.
- 7) Program Pengembangan Perumahan, dengan anggaran Rp.1.623.188.392,- dan realisasi sebesar Rp.1.517.611.590,- (93,50 %). Serta Output :
  - Terlaksananya Sosialisasi dan rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan dan Pembinaan Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat serta terlaksananya pendampingan Bidang Teknis PPSP dan AMPL.
  - Terlaksananya Sosialisasi Percepatan Penyediaan Perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
  - Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perumahan Kepada Aparatur Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
  - Terlaksananya Sosialisasi dan Workshop Pembangunan Rumah yang Aman terhadap Bencana Alam kepada Pelaku Pembangunan di Bidang Perumahan.
  - Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat pada 19 Kabupaten/Kota.
  - Tersusunnya Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan di Provinsi Sumatera Barat.
  - Terlaksananya Updating Data Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Sumatera Barat.
- 8) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, dengan anggaran Rp.4.556.321.659,- dan realisasi sebesar Rp.2.774.429.940,50 (60,89 %). Serta Output :
  - Terlaksananya Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan

(PLP2K-BK).

- Terlaksananya Pembangunan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK).
- Terlaksananya Pembangunan Kawasan Strategis dan Khusus.
- Terlaksananya Perencanaan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Kawasan Strategis dan Khusus.
- Dokumen Draft Ranperda Provinsi Sumatera Barat tentang Persampahan.
- Jumlah Kab/Kota yang telah diberikan sosialisasi persampahan.

**c. Outcomes**

- 1) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, dengan Outcomes : Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur TPA Sampah Regional.
- 2) Program Pengembangan Perumahan, dengan Outcomes : Peningkatan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- 3) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan dengan Outcomes : Meningkatnya Pemberdayaan Komunitas Perumahan.

**d. Permasalahan dan Solusi**

- 1) Permasalahan
  - Belum lengkapnya NSPK dalam pelaksanaan kegiatan sehingga menjadi kendala untuk melakukan kegiatan.
  - Belum lengkapnya data kumuh yang menjadi kewenangan Provinsi (10-15) Hektar.
  - Belum lengkapnya data PSU (prasarana, sarana, umum) kawasan permukiman lintas Kabupaten / Kota. Dengan.
- 2) Solusi
  - Melengkapi NSPK dalam pelaksanaan kegiatan.
  - Melengkapi data kumuh yang menjadi kewenangan Provinsi.

**5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat**

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, pada Tahun Anggaran 2018 mendapat alokasi APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.9.590.402.728,- dengan



realisasi Rp.9.262.432.378,- (96,58 %), untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

**a. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- 6) Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat, dengan kegiatan :
  - Inventarisasi Potensi Personil Satlinmas di Kab/Kota.
  - Pemetaan Rawan Kebakaran.
  - Pembinaan Keperansertaan Masyarakat dalam Menunjang Tupoksi Satpol PP.
- 7) Program Pemeliharaan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, dengan kegiatan :
  - Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Wilayah Lintas Batas Antar Provinsi Tetangga (Sumut, Riau, Jambi, Bengkulu).
  - Pengamanan Unjukrasa dan Keramaian dengan Aparat Terkait.
  - Penyediaan Jasa Tenaga Pengaman.
  - Gelar Pasukan Satpol PP dan Satlinmas.
  - Patroli Lapangan Dalam Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Kabupaten / Kota Se-Sumatera Barat.
  - Koordinasi Forum Komunikasi Lintas Provinsi dan Kabupaten / Kota Se Sumatera Barat.
  - Pengamanan Dan Pengawalan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pejabat VIP.
  - Pengamanan dan Pengawasan Hari Pers Nasional.
  - Deteksi Dini Pelanggaran Perda/Perkada dan Permasalahan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Sumatera Barat.
  - Pengamanan dan Pengawasan Kegiatan Daerah, Nasional dan Internasional.
  - Operasi Penanganan Pelanggaran Perda, Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

- 8) Program Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Aparatur, dengan kegiatan Latihan Beladiri Karate Bagi Anggota Pol dan Bimbingan Teknis Penyidikan terhadap Pelanggaran PERDA.
- 9) Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah Dan Pemberdayaan PPNS, dengan kegiatan;
  - Pelaksanaan Penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
  - Peningkatan Koordinasi Dan Fasilitasi PPNS, Penyelesaian Administrasi Legalitas PPNS.
  - Pelaksanaan Penegakan Perda Terkait Pemerintahan dan Izin, Pelaksanaan Penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
  - Pembentukan Produk Hukum Daerah Terkait Penegakan Perda dan Pelaksanaan Penegakkan Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- 10) Program Peningkatan Pemberantasan Maksiat, dengan kegiatan pengawasan Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat dan Operasi Gabungan Pemberantasan Maksiat.

**b. Realisasi Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran Rp.1.640.991.465,- dengan realisasi Rp.1.592.738.166,- (97.06%)
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran Rp.1.500.609.000,- Realisasi Rp.1.404.940.103,- (93.62%)
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, anggaran Rp.345.192.000,- dengan realisasi Rp.339.743.166,- (98.42%)
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, anggaran Rp.101.400.000,- dengan realisasi Rp.48.418.574,- (97,06%)
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran Rp.419.562.250,- dengan realisasi Rp.418.385.535,- (99.72%)
- 6) Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat anggaran Rp.418.962.700,- dengan realisasi Rp.400.252.351,- (95,53%) dengan output :

- Jumlah laporan inventarisasi potensi personil Satlinmas di kab/kota.
  - Jumlah laporan pemetaan rawan kebakaran.
  - Jumlah kab/kota yang dibina untuk keperansertaan masyarakat dalam menunjang tupoksi Satpol PP.
- 7) Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat anggaran Rp.3.506.547.763,- dengan realisasi Rp.3.430.014.962,- (97.82%) dengan output :
- Jumlah provinsi dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada wilayah lintas batas antar provinsi tetangga (Sumut, Riau, Jambi, Bengkulu).
  - Jumlah pengamanan unjukrasa dan keramaian dengan aparat terkait.
  - jumlah pengamanan unjuk rasa dan keramaian dengan aparat terkait, tenaga pengamanan.
  - jumlah kali gelar pasukan Satpol PP dan Satlinmas, Jumlah kab/kota yang dipatroli lapangan dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum lintas kab/kota se Sumbar.
  - Jumlah rapat koordinasi forum komunikasi lintas provinsi dan kabupaten/kota se-Sumatera Barat.
  - Jumlah kali pengamanan dan pengawalan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pejabat VIP.
  - Jumlah pelaksanaan pengamanan dan pengawasan Hari Pers Nasional.
  - Jumlah kab/kota yang dideteksi dini pelanggaran - Perda/Perkada dan permasalahan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Sumatera Barat.
  - Jumlah pelaksanaan pengamanan dan pengawasan - kegiatan daerah, nasional dan internasional.
  - Jumlah kab/kota dalam operasi penanganan - pelanggaran Perda.
  - gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- 8) Program Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Aparatur anggaran Rp.151.063.500,- dengan realisasi Rp.149.609.500,- (99,04%) dengan output : Jumlah aparatur yang dilatih beladiri karate dan Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis penyidikan terhadap pelanggaran PERDA.

- 9) Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Pemberdayaan PPNS anggaran Rp.967.553.265,- dengan realisasi Rp.900.392.278,- (93.06%) dengan output :
- Jumlah kab/kota dalam pelaksanaan penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
  - Jumlah pelaksanaan peningkatan koordinasi dan fasilitasi PPNS.
  - Persentase administrasi legalitas PPNS yang dapat diselesaikan.
  - Jumlah kab/kota dalam pelaksanaan Penegakan Perda terkait Pemerintahan dan Izin.
  - Jumlah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
  - Naskah Akademik (NA) Ranperda terkait.
  - Jumlah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Penegakkan Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- 10) Program Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat anggaran Rp.538.520.785,- dengan realisasi Rp.527.937.743,- (98,03%) dengan output : Jumlah Kab/Kota dalam pengawasan/pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan maksiat dan pelaksanaan operasi gabungan pemberantasan maksiat.

**c. Outcomes**

- 1) Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat , outcome dari program ini adalah : Meningkatnya peran perlindungan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat.
- 2) Program Pemeliharaan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, outcome dari program ini adalah : Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 3) Program Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Aparatur, outcome dari program ini adalah : Meningkatnya SDM dan kompetensi aparaturnya Satpol PP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
- 4) Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah Dan Pemberdayaan PPNS, outcome dari program ini adalah : Meningkatnya Program Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Aparatur penegakan Peraturan Daerah dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

- 5) Program Peningkatan Pemberantasan Maksiat Menurunnya perbuatan maksiat.

**d. Permasalahan dan Solusi**

**1) Permasalahan**

- Masih kurangnya anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga belum optimalnya pembinaan kepada masyarakat, badan dan aparatur untuk mematuhi Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- Dalam pelaksanaan Penegakan Perda, Satpol PP dihadapi kekurangan sumber daya manusia dibidang PPNS untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
- Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat belum memiliki gedung yang representatif sebagaimana SKPD lainnya. Sehingga hal ini dapat mengganggu kinerja Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar karena gedung kantor yang ditempati sekarang tidak bisa menampung seluruh pegawai.
- Dari segi sarana dan prasarana kantor seperti ketersediaan meja kerja, kursi kerja, meubeleurnya lainnya, kendaraan masih kurang. Sehingga hal ini dapat juga mengganggu kinerja pegawai.

**2) Solusi**

- Dalam hal kekurangan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan, diatasi dengan mengajukan penambahan anggaran dalam pembahasan anggaran setiap tahunnya.
- Untuk mengatasi kekurangan SDM PPNS adalah dengan mengirimkan PNS untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) secara bertahap.
- Untuk mengatasi masalah gedung Satpol PP Prov. Sumbar diatasi dengan peminjaman gedung kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumbar yang terletak di Jalan Aur No. 1 Padang.
- Sedangkan kekurangan sarana dan prasarana kantor diatasi dengan menganggarkan setiap tahun.

## 6. Sosial

Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan anggaran sebesar Rp.51.339.114.899,- dan realisasi Rp.47.270.992.628,- (92,08%), untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

### a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- 6) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan:
  - Rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
  - Sosialisasi Program Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).
  - Sosialisasi Perda dan Pergub Disabilitas Pemantapan Satuan Bakti Pekerja Sosial.
- 7) Program Pembinaan Anak Terlantar, dengan kegiatan:
  - Pengadaan Kelengkapan Klien.
  - Seleksi Penerimaan Calon Klien.
  - Rapat Koordinasi Pelayanan dan Rehabilitasi Kesos Anak.
  - Sehari Bersama Anak.
  - Tim PIPA (Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak).
  - Pelatihan Keterampilan dan Praktik Belajar bagi Anak Terlantar (PSAABR Budi Utama Lubuk Alung).
  - Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti (PSAABR Budi Utama Lubuk Alung).
  - Pelatihan Keterampilan dan Praktik Belajar bagi Anak Terlantar (PSBR Harapan Padang Panjang).
  - Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti (PSAA Tri Murni).
  - Biaya Pendidikan Klien (PSAA Tri Murni).
  - Pengadaan bahan Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis.
  - Penyediaan Bahan Pendidikan.
  - Pengadaan Makanan dan Minuman.
- 8) Program Pembinaan Para Penyandang disabilitas dan Eks Trauma, dengan kegiatan:

- Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang disabilitas.
  - Biaya Makan dan Minum Klien.
  - Penyediaan bahan Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis.
  - Biaya Kelengkapan Klien.
  - Pendayagunaan para Penyandang Disabilitas.
  - Bimbingan Sosial dan Pendampingan Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat (JSPC).
  - Penguatan Motivasi Penyandang Disabilitas.
  - Rehabilitasi Sosial Terhadap Penyandang Disabilitas melalui Loka Bina Karya (LBK).
  - Pemberian Penghargaan bagi Tokoh yang Peduli pada Penyandang Disabilitas.
- 9) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Lansia, dengan kegiatan:
- Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Jompo.
  - Biaya Kelengkapan Klien Panti Jompo.
  - Biaya Makanan dan Minimum Klien di Panti Jompo.
  - Penyediaan bahan Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis, Biaya Jasa Penguburan/Pemulangan Klien.
  - Bimbingan Teknisi dan Pendampingan Jaminan Sosial Lanjut Usia.
  - Lanjut Usia Berkreasi.
- 10) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya), dengan kegiatan:
- Pengadaan Kelengkapan Klien.
  - Biaya Obat-obatan dan Dokter Pakai Habis.
  - Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial.
  - Pengadaan Makanan dan Minuman.
- 11) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan:
- Bimbingan Jejaring Kerja LKS/ Orsos se-Sumatera Barat dalam rangka Akreditasi.
  - Penyuluhan Kesejahteraan Sosial.
  - Bimbingan Pengurus Organisasi Sosial se-Sumatera Barat.
  - Penilaian PSKS (Karang Taruna, Orsos, PSM, TKSK) Berprestasi Tingkat Sumatera Barat.

- KSN Expo dan Award dalam HKSN.
  - Penguatan Nilai-nilai KSN.
  - Penguatan Kelembagaan Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.
  - Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan LKS.
  - Penguatan Peran LKS Posdaya Dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
  - Bimbingan Kapasitas bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan se-Sumatera Barat.
  - Pertemuan Pengurus Karang Taruna se-Sumatera Barat.
  - Bimbingan Kapasitas bagi Pengurus Karang Taruna se-Sumatera Barat.
  - Pertemuan Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK-PSM) se-Sumatera Barat.
  - Pelatihan Lanjutan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumatera Barat.
  - Pelatihan Dasar Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Sumatera Barat.
  - Sumatera Barat Expo 2018 (Publikasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial).
- 12) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, dengan kegiatan:
- Sosialisasi Undian Berhadiah Gratis (UGB).
  - Bimbingan Keterampilan Berusaha bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE).
  - Pelayanan Orang Terlantar.
  - Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Komunitas Adat Terpencil.
  - Penetapan Calon Lokasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT).
  - Pengadaan Beras Untuk Panti Swasta se-Sumatera Barat.
  - Bimbingan Motivasi Sosial/ Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin (dalam rangka HARGANAS).
  - Bimbingan Pemantapan Pengurus LK3 Kab/Kota.
  - Seleksi Penghargaan KUBE dan Pendamping KUBE Berprestasi.
  - Sosialisasi E-Warong dan KUBE Jasa.



- Penumbuhan Usaha Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) FM.
  - Asistensi Pengembangan UEP Gelandangan/ Pengemis Program Desaku Menanti.
  - Pemberdayaan UEP bagi Waria/ WTS.
  - Pengembangan KUBE melalui program terpadu UMKM Perkotaan.
  - Rapat Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/ Rastra.
  - Rapat Evaluasi Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi BDT Kab/Kota.
- 13) Program Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial, dengan kegiatan:
- Pertemuan Pendamping dan Operator Program Keluarga Harapan.
  - Pemantapan Tim Psikososial Korban Bencana Alam.
  - Pemantapan Tim TRC Bencana Alam.
  - Sosialisasi Tingkat Provinsi Program Keluarga Harapan.
  - Rakor Koordinator Program Keluarga Harapan.
  - Sosialisasi Program Bencana Sosial.
  - Bantuan Logistik Bencana.
- 14) Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba, dengan kegiatan:
- Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan dan Bimbingan Sosial Korban NAPZA/HIV.
  - Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah.
  - Rapat Koordinasi Penguatan Lembaga RBM tentang Korban Penyalahgunaan Napza.

**b. Realisasi Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran Rp.5.412.623.044,- dan realisasi sebesar Rp.5.160.287.750,- (95,34%).
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan anggaran Rp.2.750.526.334,- dan realisasi sebesar Rp.2.580.885.076,- (93,83%).
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan anggaran Rp.159.870.000,- dan realisasi sebesar Rp.143.903.200,- (90,01%).

- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan anggaran Rp.75.360.000,- dan realisasi sebesar Rp.28.578.300,- (91.00%).
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan anggaran Rp.924.324.110,- dan realisasi sebesar Rp.898.324.235,- (97,19%).
- 6) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan anggaran Rp.217.070.620,- dan realisasi sebesar Rp.202.286.823,- (93,19%), dengan output:
  - Terlaksananya Koordinasi dan pengiriman penyandang disabilitas untuk mengikuti rehabilitasi di Panti Sosial Rujukan.
  - Terlaksananya sosialisasi penanganan ABH, tersosialisasikan Peraturan Gubernur dan Peraturan Daerah disabilitas.
  - Terlaksananya Bimbingan Teknis Satuan Bhakti Pekerja Sosial untuk 30 orang.
- 7) Program Pembinaan Anak Terlantar, dengan anggaran Rp.6.668.077.240,- dan realisasi sebesar Rp.6.606.334.232,- (99,07%), dengan output:
  - Tersedianya bahan kelengkapan anak terlantar sebanyak 455 orang (155 orang laki-laki, 300 orang perempuan).
  - Terlaksananya kegiatan seleksi penerima calon kelayan.
  - Terselenggaranya rapat koordinasi pelayanan dan rehabilitasi kesos anak sebanyak 125.
  - Terlaksananya penyelenggaraan sehari bersama anak sebanyak 200 orang.
  - Terciptanya tim pertimbangan izin pengangkatan anak sebanyak 25.
  - Terlaksananya Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar (PSAABR Budi Utama Lubuk Alung) sebanyak 2 angkatan sebanyak 160 orang.
  - Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan anak asuh di PSAABR Budi Utama Lubuk Alung sebanyak 75 orang.
  - Terlaksananya keterampilan dan praktek belajar kerja bagi Anak Terlantar di PSBR Harapan Padang Panjang sebanyak 200 orang.
  - Terlaksananya pendidikan dan pelatihan anak asuh sebanyak 100 orang.

- Tersedianya penyediaan biaya pendidikan anak asuh sesuai dengan kebutuhan sekolah sebanyak 100 orang.
  - Tersedianya obat-obatan dan jasa dokter untuk kelayan di panti sebanyak 455 orang (155 orang laki-laki dan 300 orang perempuan).
  - Tersedianya bahan pendidikan klien di PSAABR Budi Utama sebanyak 160 orang.
  - Terlaksananya pengadaan makanan dan minuman kelayan di UPTD PSAABR Budi Utama Lubuk Alung, PSAA Tri Murni Padang Panjang, dan PSBR Harapan Padang Panjang sebanyak 160 orang.
- 8) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma, dengan anggaran Rp.2.938.531.175,- dan realisasi sebesar Rp.2.931.695.620,- (99,77%), dengan output:
- Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma sebanyak 50 orang.
  - Terlaksananya biaya makan dan minum kelayan bagi penyandang disabilitas sebanyak 150 orang (92 laki-laki dan 58 perempuan).
  - Terlaksananya pengadaan bahan obat-obatan.
  - Terlaksananya pengadaan biaya kelengkapan klien sebanyak 150 orang (92 laki-laki dan 58 perempuan).
  - Terlaksananya pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma sebanyak 100 orang.
  - Terlaksananya bimbingan sosial dan pendampingan jaminan sosial bagi disabilitas sebanyak 66 orang.
  - Terlaksananya bimbingan penguatan motivasi penyandang disabilitas.
  - Terlaksananya Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Disabilitas melalui Loka Bina Karya (LBK) sebanyak 15 orang.
  - Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi Tokoh yang Peduli Penyandang Disabilitas sebanyak 58 orang.
- 9) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Wanita Tuna Susila, dan Penyakit Sosial Lainnya) Rp.879.396.600,- dan realisasi sebesar Rp.878.895.724,- (99,94%), dengan output:
- Terlaksananya pengadaan kelengkapan klien sebanyak 40 orang (perempuan).
  - Terlaksananya pengadaan obat-obatan sebanyak 40 orang (perempuan).

- Terlaksananya pengadaan makan dan minuman bagi eks tuna susila sebanyak 40 (perempuan).
  - Terlaksananya pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha eks penyandang penyakit sosial sebanyak 40 orang (perempuan).
- 10) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dengan anggaran Rp.3.569.775.000,- dan realisasi sebesar Rp.3.301.245.187,- (92.48%), dengan output:
- Terlaksananya Bimbingan Jejaring Kerja LKS/Orsos se-Sumatera Barat dalam rangka Akreditasi sebanyak 28 orang.
  - Terlaksananya penyuluhan sosial melalui berbagai media sebanyak 30 orang.
  - Terlaksananya bimbingan bagi pengurus organisasi sosial se Sumatera Barat sebanyak 45 orang.
  - Terlaksananya Penilaian Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) berprestasi tingkat Sumatera Barat, diikuti sertakannya Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam rangka memeriahkan pameran Kesetiakawanan Sosial Nasional (KSN) Expo dan Awards di Jakarta.
  - Terlaksananya Penguatan Nilai-Nilai Kesetiakawanan Sosial Nasional (KSN).
  - Terlaksananya kegiatan penguatan kelembagaan LKKS provinsi dan kab/kota Sumatera Barat sebanyak 500 orang pengurus LKKS, LKS dan peserta KNKS VIII.
  - Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan lembaga koordinasi kesejahteraan sosial pada 19 Kabupaten/Kota.
  - Terlaksananya penguatan peran LKS Posdaya sebanyak 960 orang.
  - Terlaksananya Bimbingan Kapasitas bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan se-Sumatera Barat sebanyak 50 orang.
  - Terlaksananya Pertemuan Pengurus Karang Taruna se-Sumatera Barat sebanyak 33 orang.
  - Terlaksananya Bimbingan Kapasitas bagi Pengurus Karang Taruna se-Sumatera Barat sebanyak 40 orang.
  - Terlaksananya Pertemuan Forum Komunitas Pekerja Sosial Masyarakat (FK-PSM) se-Sumatera Barat sebanyak 28 orang.

- Terlaksananya pelatihan Lanjutan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang telah mengikuti pelatihan dasar sebanyak 272 orang.
  - Terlaksananya Pengkajian Gelar Calon Pahlawan Nasional sebanyak 3 orang.
  - Terlaksananya pelatihan dasar PSM sebanyak 25 orang,
  - Tersedianya jasa informasi dan publikasi.
- 11) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp.24.404.887.505,- dan realisasi sebesar Rp.21.181.402.100,- (86,79%), dengan Output :
- Terlaksananya sosialisasi undian gratis berhadiah sebanyak 25 orang.
  - Terlaksananya bantuan stimulan usaha ekonomi produktif bagi keluarga rentan dan wanita rawan sosial ekonomi sebanyak 3.800 orang.
  - Terlaksananya pelayanan orang terlaksana sebanyak 28 orang.
  - Terlaksana Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Komunitas Adat Terpencil sebanyak 20 KK/warga KAT.
  - Terlaksananya penetapan calon lokasi Pemberdayaan sebanyak 1 rekomendasi.
  - Terlaksananya pengadaan beras untuk panti sosial swasta sebanyak 400 orang.
  - Terlaksananya bimbingan motivasi sosial dan kesejahteraan keluarga bagi keluarga miskin sebanyak 43 orang.
  - Terlaksananya bimbingan pemantapan bagi pengurus LK3 di 19 Kab/Kota sebanyak 43 orang.
  - Terlaksananya Seleksi Penghargaan KUBE dan Pendamping KUBE Berprestasi sebanyak 42 orang.
  - Terlaksananya Bantuan Usaha melalui Kelompok Usaha Bersama sebanyak 8 klp/8 KK.
  - Terlaksananya Sosialisasi E-Warong dan KUBE Jasa sebanyak 50 orang.
  - Terlaksananya Bantuan Usaha melalui Kelompok Usaha Bersama sebanyak 3.530 kk/ 353 klp.
  - Terlaksananya pemberian bantuan UEP Gelandangan/ Pengemis Program Desaku Menanti sebanyak 40 orang.

- Terlaksananya pemberian bantuan UEP bagi waria/ WTS sebanyak 4 klp.
  - Terlaksananya Bantuan Usaha melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) FM Perkotaan sebanyak 50 orang.
  - Terlaksananya koordinasi program dan kegiatan BPNT/ Rastra Provinsi dengan tim BPNT/ Rastra Kab/ Kota se-Sumbar sebanyak 50 orang.
  - Terlaksananya rapat evaluasi pelaksanaan verifikasi dan validasi data BDT Kab/ Kota sebanyak 50 orang.
- 12) Program Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial, dengan anggaran Rp.497.293.180,- dan realisasi sebesar Rp.487.192.210,- (97,97%), dengan output :
- Terlaksananya Pertemuan Pendamping dan Operator Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 38 orang.
  - Terlaksananya Pemantapan Tim Psikososial Bencana Alam sebanyak 45 orang.
  - Terlaksananya Pemantapan Tim TRC Bencana Alam sebanyak 45 orang.
  - Terlaksananya Sosialisasi Tingkat Provinsi Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 48 orang.
  - Terlaksananya Sosialisasi Program Bencana Sosial sebanyak 50 orang.
  - Terlaksananya pengadaan Bantuan Logistik Bencana.
- 13) Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba, dengan anggaran sebesar Rp.168.845.970,- dan realisasi sebesar Rp.161.750.250,- (95,80%), dengan output :
- Terlaksananya bimbingan sosial bagi korban HIV sebanyak 20 orang.
  - Terlaksananya penyuluhan tentang Narkoba dan PMS terhadap PSKS sebanyak 120 orang.
  - Terlaksananya Koordinasi penguatan lembaga RBM tentang Korban Penyalahgunaan NAPZA sebanyak 36 orang.

**c. Outcomes**

- 1) Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri adalah Target Panti Swasta adalah 4000 orang dan realisasi 4000 orang.
- 2) Target Jumlah Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Yang terampil adalah 20 orang dan realisasi 20 orang.

- 3) Bimbingan keterampilan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) Yang Mandiri diikuti oleh 3800 orang.
- 4) Bimbingan Motivasi Sosial/Keterampilan berusaha bagi keluarga miskin yang diikuti sebanyak 43 orang.
- 5) Target Jumlah Daerah Yang Terpenuhinya Kebutuhan Logistik adalah 19 Kabupaten/Kota.

**d. Permasalahan dan Solusi**

Secara prinsip tidak ada permasalahan pada program dan kegiatan. Permasalahan di luar dinas, dimana disebabkan adanya penambahan pokok di perubahan anggaran 2018 sehingga ada beberapa kegiatan tidak terlaksana karena waktu pelaksanaan dengan sistem tender tidak mencukupi.

**7. Tenaga Kerja**

Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan anggaran sebesar Rp.19.066.739.721,- dan realisasi Rp.17.810.368.233,- (93,41%), untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

**a. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- 6) Program Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Laboratorium, dengan kegiatan : Pemeliharaan Alat Labor dan Pengadaan Alat Labor.
- 7) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan kegiatan :
  - Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja UPTD BLK Payakumbuh.
  - Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja UPTD BLK Padang Panjang.
  - Pelatihan Kewirausahaan Mandiri (PKM; Pelatihan Pra Seleksi Calon Peserta Magang ke Jepang.
  - Sosialisasi dan Seleksi Daerah Calon Peserta Magang ke Jepang.
  - Seleksi Pusat Calon Peserta Magang ke Jepang, Workshop Program Pemagangan.

- Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri.
  - Pelatihan Peningkatan Produktivitas; Monitoring Program Pelatihan ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kab/Kota.
  - Pelatihan Motivasi Berprestasi Bagi Usaha Produktif.
  - Akreditasi Program Pelatihan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS).
- 8) Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan diversifikasi Usaha, dengan kegiatan:
- Pengumpulan dan Pengolah Data Informasi Pasar Kerja (IPK).
  - Pengumpulan dan Pengolahan Data Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.
  - Sosialisasi Program Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dalam Negeri/Luar Negeri.
  - Monitoring dan Orientasi Calon Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD).
  - Pembinaan Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Pra-Pemberangkatan.
  - Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Lembaga Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (LPTKIS).
  - Identifikasi Wilayah Padat Karya.
  - Bimtek Perantara Kerja.
  - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Kepada Calon Pencari Kerja.
  - Bimbingan Teknis Petugas Pengumpul dan Pengolah Informasi Pasar Kerja (IPK).
  - Pengumpul dan Pengolahan Data Informasi Pasar Kerja (IPK).
  - Bimbingan Teknis Pelaksana Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Pembinaan Bursa Kerja Khusus (BKK).
  - Promosi Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Teknologi Tepat Gunas (TTG).
  - Promosi Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Tenaga Kerja Mandiri (TKM).
  - Pameran Bursa Kerja (Job Fair) dan Pembinaan Bursa Kerja Online.
- 9) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, dengan kegiatan:
- Pembinaan Pelaksanaan Upah Minimum di Kab/Kota.



- Pembinaan Pembentukan Dewan Pengupahan Kab/Kota dan Penetapan UMP.
  - Pembinaan Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan/Kesehatan di Kab/Kota.
  - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Perusahaan.
  - Pembinaan, Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga Kerja Swasta (LKS) Bipartit di Perusahaan.
  - Pembinaan, Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga Kerja Swasta (LKS) Tripartit di Kab/Kota dan Provinsi.
  - Pembinaan Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Perusahaan.
  - Pemetaan Perusahaan Melalui Deteksi Dini di Perusahaan.
- 10) Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja dengan kegiatan :
- Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan.
  - Pembinaan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Perusahaan.
  - Penanganan Kasus Ketenagakerjaan dan Permasalahan Ketenagakerjaan.
  - Pembinaan dan Penilaian ke Perusahaan Dalam Rangka Pencapaian Zero Accident.
  - Pemeriksaan Kesehatan Kerja.
  - Pengujian Lingkungan Kerja.
  - Akreditasi Laboratorium.
  - Peringatan Bulan K3.
  - Pemeriksaan Norma Kerja dan Norma Keselamatan Kerja (K3) di Perusahaan Kab/Kota.
- 11) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan : Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi.

**b. Realisasi Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran Rp.2.967.957.101,- dan realisasi sebesar Rp.2.590.653.590,- (87,29%).
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan anggaran Rp.2.582.942.374,- dan realisasi sebesar Rp.2.414.763.877,- (93,49%).

- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan anggaran Rp.191.452.800,- dan realisasi sebesar Rp.183.600.000,- (95,90%).
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan anggaran Rp.15.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.15.000.000,- (100%).
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan anggaran Rp.940.582.483,- dan realisasi sebesar Rp.930.750.813,- (98,95%).
- 6) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan anggaran Rp.7.662.716.745,- dan realisasi sebesar Rp.7.377.701.773,- (96,28%). Dengan output :
  - Tersedianya tenaga kerja kompeten dengan jurusan menjahit, Asesoris rumah tangga yang sesuai dengan pasar kerja di UPTD Payakumbuh sebanyak 304 orang dan di UPTD Padang Panjang sebanyak 320 orang.
  - Masyarakat dan UKM yang terlatih.
  - Meningkatnya produktivitas masyarakat dan UKM sebanyak 325 orang.
  - Terseleksinya calon peserta magang ke Jepang untuk mengikuti seleksi dengan Tim Pusat (IM Japan dan Kemenakertrans RI.
  - Tersedianya 745 orang calon peserta yang siap mengikuti program pemagangan ke Jepang.
  - Terakreditasinya 45 Lembaga pelatihan Kerja Swasta (LPKS).
  - Terlaksananya pelatihan pemagangan dalam negeri sebanyak 32 orang.
  - Teridentifikasinya kebutuhan pasar kerja dalam negeri.
  - Terdata kebutuhan pelatihan dalam negeri bagi 4 perusahaan.
  - Meningkatnya produktivitas masyarakat dan UKM sebanyak 50 orang.
  - Tersedianya data yang akurat tentang kegiatan Lembaga Latihan Kerja sebanyak 150 LPK.
  - Meningkatnya kualitas Lulusan Pelatihan LPK, Jumlah Instruktur yang mempunyai Sertifikat Metodologi Pelatihan sebanyak 50 orang.
  - Terlaksananya Pelatihan Softskill Instruktur sebanyak 30 orang.

- 7) Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha, dengan anggaran Rp.2.111.340.800,- dan realisasi sebesar Rp.1.982.470.033,- (93,90%). Dengan output :
- Tersedianya data informasi pencari kerja dan lowongan kerja serta penempatan tenaga kerja di 18 Kab/kota.
  - Tersedianya sebanyak 25 buah Buku Data Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian serta Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK).
  - Tersedianya informasi ketenagakerjaan.
  - Tersosialisasinya Program Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri sebanyak 360 orang.
  - Terpahaminya program penempatan tenaga kerja Dalam dan Luar Negeri.
  - Terbentuknya Kelompok Usaha Masyarakat yang mandiri 75 orang.
  - Terlaksananya Penyuluhan Bagi Calon Tenaga Kerjanya 1.500 orang.
  - Tersedianya Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing yang menguasai mekanisme Tenaga Kerja Asing.
  - Terbinanya Perusahaan Pengguna TKA 80 orang.
  - Tersedianya lokasi padat karya pada 14 Kabupaten/Kota.
  - Terlaksananya Bimtek Pelaksana Bursa Kerja Khusus untuk 40 orang.
  - Terlatihnya petugas pelaporan IPK Kab/Kota dan Provinsi sebanyak 30 orang.
  - Terbinanya calon TKI Pra Pemberangkatan ke Luar Negeri sebanyak 100 orang.
  - Terlaksananya pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) untuk 80 lembaga.
  - Terlaksananya kegiatan monitoring dan orientasi pra Pemberangkatan tenaga kerja AKAD sebanyak 50 orang.
- 8) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, dengan anggaran Rp.772.966.000,- dan realisasi sebesar Rp.659.754.400 (85,35%). Dengan output :
- Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Bidang HI dan Jamsos sebanyak 120 orang.

- Terlaksananya Pembinaan BPJS Ketenagakerjaan bagi 65 perusahaan.
  - terselesaikannya masalah ketenagakerjaan di perusahaan secara bipartite melalui musyawarah 20 perusahaan.
  - Pembinaan dan pembentukan dewan pengupahan Kab/kota dan penetapan UMP 7 kab/kota.
  - Meningkatnya pemahaman perusahaan terhadap ketentuan UMP 50 perusahaan.
- 9) Program Perlindungan Tenaga Kerja Sistem Pengawasan Tenaga Kerja, dengan anggaran Rp.1.377.395.418,- dan realisasi sebesar Rp.1.269.350.607,- (92,16%). Dengan output :
- Terlaksananya pengawasan pelaksanaan peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan untuk 125 perusahaan.
  - Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan SMK3 di 112 Perusahaan.
  - Menurunnya kasus tenaga kerja.
  - Terakreditasinya Laboratorium Balai Hiperkes 1 laboratorium.
  - Tersedianya pemeriksaan kesehatan tenaga kerja 1.500 orang.
  - Meningkatnya kualitas lingkungan kerja dan kesehatan kerja di lingkungan UMKM serta mempunyai tenaga kerja menggunakan peralatan K3 700 sampel.
- 10) Program Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Laboratorium, dengan anggaran Rp.233.800.000,- dan realisasi sebesar Rp.213.157.600,- (91,17%). Dengan output :
- terlaksananya kalibrasi alat labor 1 paket.
  - pengadaan peralatan dan perlengkapan laboratorium 12 unit.
- 11) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengeolaan Keuangan Daerah, dengan anggaran Rp.210.586.000,- dan realisasi sebesar Rp.173.165.540,- (82,23%), dengan output : meningkatnya Pendaatan Asli Daerah dari pengujian lingkungan kerja, pemeriksanaan kesehatan kerja dan sewa pemakaian kekayaan daerah 40 perusahaan.

### c. Outcomes

- 1) Meningkatnya tata kelola organisasi dengan target BB telah tercapai untuk Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, terget telah tercapai 93,41% untuk realisasi keuangan dan target 100% telah tercapai untuk realisasi fisik.
- 2) Meningkatnya kesempatan kerja dengan target 10,89%, telah tercapai 7,55%.
- 3) Meningkatnya Hubungan Industrial Yang Harmonis, Dinamis dan Berkeadilan dengan terget 3,61%, telah tercapai 3,58%.
- 4) Meningkatnya Pendapatan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi dengan target 40%, telah tercapai 25%.

**d. Permasalahan dan Solusi**

- 1) Permasalahan
  - Masih kurangnya tenaga instruktur yang kompeten dan sarana prasarana pelatihan yang representativ.
  - Pelaksanaan Uji Kompetensi yang direncanakan terhadap 10 paket sebabnya pelatihan hanya 1 (satu) paket yang terealisasi yaitu jurusan Sepeda Motor dilakukan oleh LSP LLAJR.
  - Perusahaan-perusahaan pada sektor usaha Mikro Kecil/Menengah masih banyak yang belum memberikan perlindungan bagi tenaga kerjanya belum adanya pemahaman tentang ketentuan yang mengatur tentang jaminan sosial.
  - Masih ada pimpinan/pengurus perusahaan yang belum melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap objek pengawasan atau peralatan keselamatan dan kesehatan kerja yang dioperasikan di perusahaan sehingga dapat berdampak kepada terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja sehingga menimbulkan kerugian pada semua pihak.
  - Masih rendahnya pengetahuan dan wawasan serta kemampuan dari sebagian pengawas ketenagakerjaan, sehingga pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan yang dilakukan tidak/belum menyentuh substansi/pokok permasalahan.
  - Perusahaan mengharapkan hasil pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja seharusnya diketahui oleh dokter yang ada di Hiperkes, sementara UPTD Balai Hiperkes dan KK belum memiliki PNS dengan latar belakang dokter.
- 2) Solusi

- Melibatkan instruktur dan Lembaga Pelatihan Swasta yang ada di Kab/Kota tempat pelatihan dilaksanakan.
- Pada tahun 2019 akan disegerakan dibentuk LSP Penguji di Provinsi Sumatera Barat.
- Perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pimpinan/ pengurus perusahaan, sehingga perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Perlu dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap peralatan sebagai objek pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang dimiliki dan dioperasikan di perusahaan, guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dan kerugian pada semua pihak.
- Penambahan anggaran untuk pengujian/ pemeriksaan secara maksimal dan pelatihan paramedis.
- Perlu diadakan sosialisasi bagi perusahaan kab/kota agar melakukan pemeriksaan K3 minimal 1 (satu) kali setahun.
- Mengingat jumlah perusahaan di kab/kota masih banyak yang membutuhkan untuk melakukan pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja, sedangkan dana tersedia sangat terbatas, oleh sebab itu anggaran untuk ditingkatkan sehingga mitra kerja akan tetap memakai jasa Balai Hiperkes dalam hal pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja.

## **8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan anggaran sebesar Rp.7.522.143.228,- dan realisasi Rp.6.631.616.792,- (84.38%), untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

### **a. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- 5) Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, dengan kegiatan:
  - Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- Penilaian Program Pemberdayaan Perempuan.
  - Peningkatan Kapasitas SDM dan Jaringan Organisasi Perempuan Prov. Sumatera Barat.
  - Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) .
  - Peningkatan Kapasitas SDM Anggota KPPI Provinsi Sumatera Barat.
  - Peningkatan Pemahaman Kabupaten/kota Dalam Pelaksanaan PPRG.
  - Pelatihan Keterampilan Ekonomi Perempuan Kepala Keluarga.
- 6) Program Peningkatan Kualitas Keluarga, dengan kegiatan:
- Pengembangan dan Peningkatan Industri Rumah Tangga Perempuan.
  - Pembinaan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan pada lokasi TMMN.
- 7) Program Peningkatan Sistem Data Gender dan Anak, dengan kegiatan:
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Data Gender dan Anak.
  - Publikasi Data dan Informasi Gender dan Anak.
  - Sosialisasi Sistem Data Gender dan Anak.
  - Penyusunan Buku Profil Gender dan Anak.
- 8) Program Peningkatan Perlindungan Perempuan, dengan kegiatan:
- Penanganan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
  - *Workshop* Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) .
  - Workshop Forum Lembaga Layanan Perempuan.
  - Advokasi Program Perlindungan Perempuan.
  - Penanganan dan Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan.
  - Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) .
- 9) Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak, dengan kegiatan :
- Pengembangan Model Sekolah Ramah Anak.
  - Sosialisasi Model Sekolah Layak Anak.
  - Workshop dan Advokasi KLA.

- Workshop Kesejahteraan dan Perlindungan Anak se Sumatera Barat.
  - Wokshop Pengembangan Jejaring PHA (Pemenuhan Hak Anak).
  - Sosialisasi Konvensi Hak Anak.
  - Penyusunan Peraturan Daerah Sumatera Barat Tentang Ketahanan Keluarga.
  - Capacity Buliding Forum Anak di Daerah Sumatera Barat.
  - Pelatihan peningkatan pemenuhan hak partisipasi anak.
- 10) Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak, dengan kegiatan:
- *Workshop* Pencegehan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Sekolah.
  - Pelatihan Peningkatan SDM Pendampig Lembaga Layanan Anak Korban Kekerasan.
  - Koordinasi Lintas Sektor Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum.
  - Workshop Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus.

**b. Realisasi Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran Rp.993.788.663,- dan realisasi sebesar Rp.838.555.996,- (84,38%).
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran Rp.647.540.000,- dan realisasi sebesar Rp.574.424.113,- (88,71%).
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan anggaran Rp.30.380.000,- dan realisasi sebesar Rp.26.112.900,- (85,95%).
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan anggaran Rp. 285.027.995,- dan realisasi sebesar Rp. 274.832.445,- (96.42%).
- 5) Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dengan anggaran Rp.2.460.460.475,- dan realisasi sebesar Rp.2.311.219.118,- (93,93%), dengan *output* :
  - Terhimpunnya hasil evaluasi pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
  - Meningkatnya program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
  - Meningkatnya SDM dan Jaringan Organisasi Perempuan.



- Meminimalisir kemiskinan bagi perempuan di 4 Kab/Kota.
  - Meningkatnya SDM Anggota KPPI.
  - Meningkatnya OPD yang melaksanakan PPRG.
  - Meningkatnya ekonomi perempuan kepala keluarga di 5 nagari di Kab. Agam.
- 6) Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan anggaran Rp.174.016.915,- dan realisasi sebesar Rp.154.743.200,- (88.92%), dengan *output* :
- Meningkatnya SDM perempuan kepala keluarga pengelola industri rumahan yang telah dilatih.
  - Meningkatnya pengetahuan dan wawasan perempuan serta masyarakat di lokasi TMMN tentang Program Pembangunan Pemberdayaan Perempuan.
- 7) Program Peningkatan Sistem Data Gender dan Anak, dengan anggaran Rp.241.448.665,- dan realisasi sebesar Rp.234.561.272,- (97,15%), dengan *output* :
- Meningkatnya kapasitas SDM pengelola data gender dan anak.
  - Meningkatnya kapasitas SDM pengelola data gender dan anak.
  - Terinventarisasinya data gender dan anak.
- 8) Program Peningkatan Perlindungan Perempuan, dengan anggaran Rp.1.281.347.365,- dan realisasi sebesar Rp.1.202.874.189,- (93,88%), dengan *output* :
- Meningkatnya upaya penanganan pencegahan kekerasan terhadap perempuan.
  - Persentase perlindungan perempuan dan anak dari tindak pidana perdagangan orang.
  - Persentase SDM layanan perempuan dan anak yang terlatih.
  - Tersosialisasikannya upaya perlindungan perempuan.
  - Meningkatnya kemampuan aparat/petugas kab/kota dalam penanganan dan pelayanan perempuan korban kekerasan.
  - Persentase tenaga pendamping yang terlatih.
- 9) Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak, dengan anggaran Rp.1.067.327.980,- dan realisasi sebesar Rp.682.802.187,- (63.97%), dengan *output* :

- Persentase Kab/Kota dengan fasilitas pengembangan model sekolah ramah anak.
  - Jumlah Kab/Kota yang mengikuti sosialisasi model sekolah layak anak.
  - Meningkatnya persentase Kab/Kota Layak Anak.
  - Jumlah Kab/Kota yang memiliki SDM yang kompeten dalam pelaksanaan strategi pendekatan sistem perlindungan anak.
  - Meningkatnya jejaringan pemenuhan hak anak.
  - Jumlah Kab/Kota yang memiliki SDM yang kompeten dalam pelaksanaan strategi pemenuhan hak anak.
  - Meningkatnya regulasi tentang kesejahteraan dan perlindungan anak.
  - Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan ana.
  - Persentase lembaga forum anak Kab/Kota yang dilatih
- 10) Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak, dengan anggaran Rp.301.925.170,- dan realisasi sebesar Rp.294.750.372,- (97,62%), dengan *output* :
- Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah.
  - Meningkatnya SDM dan keterampilan pendamping lembaga layanan anak korban kekerasan.
  - Meningkatnya SDM dan keterampilan pendamping lembaga layanan anak korban kekerasan dengan hukum.
  - Terwujudnya pemenuhan hak dan perlindungan anak disabilitas.

**c. Outcomes**

- 1) Terhimpunnya hasil evaluasi pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- 2) Meningkatnya program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- 3) Meningkatnya SDM dan Jaringan Organisasi Perempuan.
- 4) Meminimalisir kemiskinan bagi perempuan di 4 Kab/Kota.
- 5) Meningkatnya SDM Anggota KPPI.
- 6) Meningkatnya OPD yang melaksanakan PPRG.
- 7) Meningkatnya ekonomi perempuan kepala keluarga di 5 nagari di Kab. Agam.
- 8) Meningkatnya SDM perempuan kepala keluarga pengelola industri rumahan yang telah dilatih.

- 9) Meningkatnya pengetahuan dan wawasan perempuan dan masyarakat di lokasi TMMN tentang Program Pembangunan Pemberdayaan Perempuan.
- 10) Meningkatnya upaya penanganan pencegahan kekerasan terhadap perempuan.
- 11) Persentase perlindungan perempuan dan anak dari tindak pidana perdagangan orang.
- 12) Persentase SDM layanan perempuan dan anak yang terlatih.
- 13) Tersosialisasikannya upaya perlindungan perempuan.
- 14) Meningkatnya kemampuan aparat/petugas kab/kota dalam penanganan dan pelayanan perempuan korban kekerasan.
- 15) Persentase tenaga pendamping yang terlatih.
- 16) Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah.
- 17) Meningkatnya SDM dan keterampilan pendamping lembaga layanan anak korban kekerasan.
- 18) Meningkatnya kemampuan aparat dalam penanganan anak bermasalah dengan hukum.
- 19) Terwujudnya pemenuhan hak dan perlindungan anak disabilitas.
- 20) Meningkatnya kapasitas SDM pengelola data gender dan anak.
- 21) Tersedianya data dan informasi gender dan anak ditengah masyarakat.
- 22) Terinventarisasinya data gender dan anak.
- 23) Persentase Kab/Kota dengan fasilitas pengembangan model sekolah ramah anak.
- 24) Jumlah Kab/Kota yang mengikuti sosialisasi model sekolah layak anak.
- 25) Meningkatnya persentase Kab/Kota Layak Anak.
- 26) Jumlah Kab/Kota yang memiliki SDM yang kompeten dalam pelaksanaan strategi pendekatan sistem perlindungan anak
- 27) Meningkatnya jejaringan pemenuhan hak anak.
- 28) Jumlah Kab/Kota yang memiliki SDM yang kompeten dalam pelaksanaan strategi pemenuhan hak anak.
- 29) Meningkatnya regulasi tentang kesejahteraan dan perlindungan anak.
- 30) Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- 31) Persentase lembaga forum anak Kab/Kota yang dilatih.

#### **d. Permasalahan dan Solusi**

##### **1) Permasalahan**

- Permasalahan kekerasan perempuan dan anak setiap tahunnya meningkat, selain kekerasan perempuan dan anak, isu narkoba, trafficking, perlindungan tenaga kerja perempuan, pornografi, pekerja anak, anak berhadapan dengan hukum lansia disabilitas belum lagi persoalan perempuan dan anak yang terjadi pada saat konflik sosial maupun kondisi darurat bencana.
- Terbatasnya Penganggaran, sesuai dengan beban dan tanggung jawab dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, kegiatan yang dilaksanakan masih bersifat sosialisasi, maka membutuhkan program/kegiatan yang lebih akuntabel, yang menyentuh masyarakat secara teknis yang membutuhkan dana APBD dan APBN.

##### **2) Solusi**

Untuk mengoptimalkan program/kegiatan terus diupayakan dengan mempelajari dokumen yang ada sesuai kewenangan untuk urusan program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang diharapkan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

#### **9. Pangan**

Urusan Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Pangan dengan anggaran sebesar Rp.9.427.535.825,- dan realisasi Rp.9.184.825.759,- (97,43%), untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

##### **a. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur.
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- 6) Program Diversifikasi Pangan, dengan kegiatan:
  - Pemanfaatan Pekarangan dalam Pengembangan Pangan (P-KRPL).
  - Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP).

- Lomba Cipta Menu Konsumsi Pangan B2SA Tingkat Provinsi.
  - Pengembangan Pangan Tradisional (Lokal) Dalam Menunjang Pariwisata.
  - Pemantauan Sosialisasi dan Analisa Pola Konsumsi Pangan Masyarakat Berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH).
- 7) Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan kegiatan:
- Penyusunan Database Ketahanan Pangan.
  - Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan OPD.
  - Penyediaan dan Pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
  - Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP).
  - Koordinasi dan Diseminasi Hasil Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan (FSVA).
  - Pengembangan Kawasan dan Pembinaan Nagari Mandiri Pangan.
  - Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.
  - Pemantauan dan Pengembangan Distribusi dan Akses Pangan.
  - Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM).
  - Koordinasi Pemantauan Harga dan Pengembangan JiH Wilayah.
  - Pengembangan dan Perluasan Pasar Gapoktan.
  - Pengembangan Panel Harga Pangan Pokok.
  - Bazar/Pasar Murah Bahan Pangan.
  - Sertifikasi Keamanan Pangan Segar (Sertifikat Prima).
  - Surveilans dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Tingkat Produsen.
  - Pemasyarakatan Sistem Mutu dan Keamanan Pangan Segar Menuju Sertifikat Prima.
  - Koordinasi Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (SD/MI).
  - Pengawasan Keamanan Pangan Segar Yang Beredar Dimasyarakat, Gerakan Hari Pangan Sedunia.
  - Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan.
  - Analisis Ketersediaan dan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM).

- Pemantauan Produksi dan Ketersediaan Wilayah Sumatera Barat.
- Pembangunan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan.

**b. Realisasi Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran Rp.1.691.947.025,- realisasi sebesar Rp.1.603.676.073,- (94,78%).
- 2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, dengan anggaran Rp.1.346.350.000,- realisasi sebesar Rp.1.331.406.010,- (98,89%).
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan anggaran Rp.72.316.800,- realisasi sebesar Rp.70.842.750,- (96,85%).
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, dengan anggaran Rp.12.904.000,- realisasi sebesar Rp.11.161.000,- (65,85%).
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan anggaran Rp.316.245.000,- realisasi sebesar Rp.312.657.775,- (98,87%).
- 6) Program diversifikasi Pangan, dengan anggaran Rp.740.160.000,- dan realisasi sebesar Rp.703.428.674,- (95,04%), dengan output :
  - Tersedianya kebutuhan pangan dan gizi keluarga dengan mudah dan murah sepanjang waktu.
  - Meningkatnya kesadaran, peran dan keikutsertaan masyarakat dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) serta berkurangnya ketergantungan terhadap pangan tertentu.
  - Meningkatnya partisipasi kelompok wanita dalam penyediaan sumber pangan dan gizi keluarga melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai penghasil sumber karbohidrat, vitamin, mineral, dan protein untuk konsumsi keluarga.
  - Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, pemahaman, dan kesadaran kaum wanita dalam menyediakan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) bagi konsumsi keluarga melalui sosialisasi, pembinaan dan penyebaran informasi P2KP dengan berbagai media promosi.
  - Makin meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat dengan menerapkan pola konsumsi pangan

B2SA dan makin berkurangnya tingkat konsumsi beras dan terigu.

- Termotivasinya peserta dan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam penyusunan menu B2SA serta meningkatnya keterampilan masyarakat, khususnya kaum wanita dalam menyiapkan dan mengolah bahan pangan untuk konsumsi keluarga sesuai prinsip B2SA.
  - Meningkatnya kreativitas kaum wanita untuk menciptakan resep menu B2SA kreasi baru yang berbasis sumberdaya lokal (pangan lokal).
  - Berkembangnya budaya konsumsi pangan B2SA di tengah masyarakat serta mengurangi konsumsi pangan non beras non terigu.
  - Termotivasinya peserta dan masyarakat untuk melaksanakan pengolahan bahan pangan lokal untuk mewujudkan panganekaragaman konsumsi pangan di rumah tangga.
  - Meningkatnya kreativitas pelaku usaha pengolahan pangan lokal untuk menghasilkan berbagai variasi aneka produk pangan lokal yang dapat memenuhi selera pasar dalam menunjang pariwisata.
  - Meningkatnya kecintaan masyarakat terhadap produk olahan pangan lokal.
  - Berkembangnya olahan pangan lokal non beras non terigu di 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
  - Diketuinya situasi konsumsi pangan masyarakat berupa skor PPH, rata-rata konsumsi energi per kapita per hari dan konsumsi protein per kapita per hari.
- 7) Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan anggaran Rp.5.247.613.000,- realisasi sebesar Rp.5.151.198.817,- (98,16%), dengan *output*:
- Tersusunnya buku Analisa Ketersediaan Pangan berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) Sumatera Barat Tahun 2018.
  - Tersusunnya buku database ketahanan pangan sebanyak 30 buku.
  - Terlaksananya pertemuan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Program Ketahanan Pangan.

- Terlaksananya monitoring, evaluasi, koordinasi pengendalian program ketahanan pangan di wilayah Sumatera Barat.
- Gambaran ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok dan strategis berdasarkan produksi masing-masing Kabupaten/Kota.
- Tersedianya data ketersediaan pangan pokok dan strategis dalam menghadapi Hari-hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN).
- Terlaksananya pembinaan kepada kelompok melalui pertemuan kelompok Lumbung Pangan Tahap Pengembangan (49 kelompok) LPM yang masih aktif.
- Tertanggulangnya masalah rawan pangan pada saat/pasca bencana alam/ gejolak harga pangan yang signifikan dan keadaan darurat.
- Tersalurkannya bahan pangan bagi masyarakat yang terkena bencana alam, gagal panen dan gizi buruk berupa paket bantuan kebutuhan pokok yang terdiri dari beras, ikan/daging kaleng, minyak goreng, susu, telur, dll sesuai dengan kebutuhan.
- Terlaksananya pertemuan dalam rangka peningkatan kapasitas petugas SKPG.
- Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan Integrasi antar instansi dalam pengawasan, pembinaan dan pemantauan keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).
- Meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan akibat penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dan/atau bahan yang dilarang digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan.
- Menyebarkan informasi dan sosialisasi tentang keamanan pangan.
- Terlaksananya pengawasan pangan segar yang beredar di masyarakat melalui uji laboratorium sebanyak 37 sampel.
- Terlaksananya pertemuan koordinasi pengawasan keamanan pangan segar sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta masing-masing sebanyak 50 orang.
- Terlaksananya pengawasan keamanan pangan oleh Tim Terpadu Pengawasan Keamanan Pangan Segar Sumatera Barat terutama produk perikanan di sekitar



danau Singkarak Kabupaten Solok, Kota Solok dan Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat.

- Terlaksananya pengadaan bahan sosialisasi berupa poster sebanyak 700 lembar yang didistribusikan ke kabupaten/kota se Sumatera Barat.
- Tersusunnya naskah akademik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang keamanan Pangan.
- Terlaksananya pemberdayaan nagari/kelurahan/desa agar Mandiri Pangan.
- Terlaksananya pendampingan oleh penyuluh dilapangan, walinagari, dan lembaga keuangan desa.
- Terlaksananya pertemuan apresiasi nagari mandiri pangan replikasi.
- Terlaksananya bantuan bibit-bibit buah-buahan untuk motivasi bagi masyarakat/petani dalam meningkatkan sumber pendapatan pada nagari mandiri pangan awal (32 nagari/desa/kelurahan) dan replikasi (23 nagari/desa).
- Terlaksananya SL Nagari Mandiri Pangan sebanyak 110 pada 32 nagari/desa/kelurahan.
- Terlaksananya pencaanangan nagari mandiri pangan di Kabupaten Pasaman Barat (Desa Baru), Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok di Nagarimandiri Pangan Replikasi (Panyakalan), Kabupaten Agam (Koto Tinggi).
- Terlaksananya Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Se-Sumatera Barat dan ditetapkannya Rekomendasi/Rumusan kesepakatan DKP Provinsi dalam rangka meningkatkan peran DKP dalam Koordinasi program lintas sektor pertemuan 4 kali dan penerbitan 1000 eksemplar majalah pangan.
- Tersedia Pangan segar (buah dan sayuran) yang dijamin aman dikonsumsi (residu pestisida minimal sama dengan BMR).
- Terpantaunya konsistensi penerapan Good Agriculture Practise (GAP) sesuai Standar Operasional Procedur (SOP) oleh pelaku usaha.
- Terlaksananya surveilen kebun pelaku usaha pangan segar hasil pertanian yang telah memiliki sertifikat sebanyak 30 Pelaku Usaha.
- Terlaksana Uji Laboratorium terhadap komoditi kebun pelaku usaha/petani pangan segar hasil pertanian (buah

dan sayur) yang telah memiliki Sertifikat Prima 3 sebanyak 10 sampel.

- Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar.
- Meningkatnya fungsi Dinas Pangan selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Sumatera Barat dalam hal jaminan mutu dan keamanan pangan segar yang beredar di masyarakat.
- Diperolehnya data dan informasi distribusi pangan di daerah sentra produksi padi, cabe dan bawang merah.
- Diperolehnya data dan informasi akses pangan.
- Diperolehnya data dan informasi pemantauan distribusi pangan.
- Terlaksananya perjanjian kerjasama antara Sumbar dan Riau serta Sumbar dan Kepri.
- Terpantaunya harga pangan pokok dan strategis ditingkat produsen dan konsumen.
- Diketuainya faktor – faktor penyebab terjadinya fluktuasi harga pangan.
- Berkembangnya sistem informasi harga pangan ditingkat petani dan pelaku pasar.
- Tersedianya data pasokan dan harga pangan pokok ditingkat konsumen dan produsen.
- Hasil analisa tentang harga dan pasokan pangan 18 Kabupaten/Kota secara periodik.
- Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan.
- Diperolehnya informasi peluang investasi dan insentif kemudahan dan pelayanan investasi.
- Diperolehnya peluang akses pasar bagi produk –produk olahan pangan.
- Meningkatnya wawasan SDM petugas dan pelaku usaha (kelompok tani) dalam menghadapi persaingan teknologi dalam hal pengembangan dan pengolahan produk pertanian.
- Termotivasi masyarakat untuk mengkonsumsi produk pangan dalam negeri.
- Terlaksananya Laporan 1 kali pertemuan dan 1 event kegiatan pameran dan promosi produk pertanian.

- Terlaksananya peringatan Hari Pangan Sedunia ( HPS ) ke-38 tingkat Provinsi Sumatera Barat.
- Mengikuti peringatan HPS ke-38 tingkat Nasional.
- Terlaksananya pertemuan diseminasi hasil penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA).
- Terlaksananya pembinaan, monitoring dan evaluasi ke Gapoktan penerima bantuan P-LDPM.
- Diketuinya permasalahan yang dihadapi oleh Gapoktan P-LDPM dalam pelaksanaan kegiatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat.
- Terlaksananya kegiatan Bazar/Pasar Murah Bahan Pangan.
- Terlaksananya peningkatan dan pengembangan Sumberdaya manusia AKP.

**c. Outcomes**

- 1) Diperolehnya hasil pengolahan data untuk penyusunan buku analisa Ketersediaan pangan berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) yang dihitung menurut ATAP 2016, ARAM Tahun 2017 dan angka proyeksi Tahun 2018.
- 2) Meningkatnya kesadaran, peran dan keikutsertaan masyarakat dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) serta berkurangnya ketergantungan terhadap pangan tertentu (beras).
- 3) Tertanggulangnya masalah rawan pangan pada saat/pasca bencana alam, tertanggulangnya gejolak kenaikan harga beras, tersalurkanya beras cadangan pangan pemerintah kepada masyarakat rawan pangan pada saat dan pasca bencana, terlaksananya Koordinasi dengan badan/kantor/ lembaga ketahanan pangan, penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota.

**d. Permasalahan dan Solusi**

- 1) Permasalahan
  - Masih lemahnya pemahaman pelaku usaha/petani, konsumen dan pelaku pemasok/pemasar terhadap produk pangan segar yang aman dan bersertifikat/berlabel.
  - Belum konsistennya instansi terkait dalam membina dan memfasilitasi pelaku usaha/petani dalam penerapan GAP/SOP.

- Pada kawasan mandiri pangan yang akan dilaksanakan di 18 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat masih banyak memerlukan dukungan dari pihak lain baik di Provinsi maupun di Kabupaten.
- Sebagian besar penerima manfaat bantuan kegiatan Pemanfaatan Pekarangan dalam Pengembangan Pangan (P-KRPL) ini hanya aktif melaksanakan kegiatan pada saat permulaan menerima bantuan dan/atau beberapa bulan setelahnya.
- Petani umumnya tidak memiliki gudang penyimpanan yang memadai sehingga terjadi kerusakan hasil panen pada saat musim hujan, sehingga kualitas hasil rendah dan berpengaruh terhadap pemasaran hasil.

## 2) Solusi

- Agar dapat membangun jaringan sistem informasi sertifikasi dan registrasi pangan segar.
- Agar dapat meningkatkan jumlah dan kompetensi SDM inspektur keamanan pangan.
- Diperlukan pembinaan dan Koordinasi yang intensif kepada kelompok masyarakat pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan baik dari Pusat Provinsi maupun Kabupaten Kota.
- Meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga yang mudah, murah dan aman.
- Pemerintah menjamin harga Komoditi pangan, sehingga pada saat produksi melimpah, petani tidak dirugikan karena harga jatuh.

## 10. Pertanahan

Untuk Urusan Pertanahan pada Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan mendapat alokasi APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.983.000.000,- dengan realisasi Rp. 763.265.608,- (77,65 %), untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

### a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pengelolaan Pertanahan, dengan kegiatan :
  - Penyusunan Perencanaan Penggunaan Tanah.
  - Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee.

- Bimtek Pengelolaan Pertanahan.
- Inventarisasi dan Penanganan Masalah Pengelolaan Pertanahan.
- Pembinaan dan Monitoring Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.
- Penanganan Masalah Sengketa dan Konflik Pertanahan di Sumatera Barat.
- Pembinaan dan Monitoring Pemberian Izin Lokasi.

**b. Realisasi Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pengelolaan Pertanahan, dengan anggaran Rp.983.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.763.265.608,- (77,65 %). Serta Output :
  - Terlaksananya Sosialisasi dan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Penggunaan Tanah.
  - Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee kepada Aparatur Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota di Sumatera Barat.
  - Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Pertanahan.
  - Terlaksananya Sosialisasi dan Koordinasi dalam Pelaksanaan Inventarisasi dan Penanganan Masalah Pengelolaan Pertanahan.
  - Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.
  - Terlaksananya Penanganan Masalah Sengketa dan Konflik Pertanahan di Provinsi Sumatera Barat.
  - Terlaksananya Sosialisasi dan Monitoring Pemberian Izin Lokasi.

**c. Outcomes**

Program Pengelolaan Pertanahan, dengan Outcomes : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pertanahan di Sumatera Barat.

**d. Permasalahan dan Solusi**

- 1) Permasalahan  
Permasalahan dalam pelaksanaan program Pengelolaan Pertanahan adalah belum lengkapnya NSPK dalam pelaksanaan kegiatan sehingga menjadi kendala untuk melakukan kegiatan.
- 2) Solusinya melengkapi NSPK dalam pelaksanaan kegiatan.

## 11. Urusan Lingkungan Hidup

Untuk Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan, pada Tahun Anggaran 2018 mendapat alokasi APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.30.419.956.790,- dengan realisasi Rp.28.601.582.073,- (94,02%), untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

### a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.
- 6) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan :
  - Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala Provinsi.
  - Pengawasan Pengendalian Terhadap Pengelolaan Lingkungan Usaha/Kegiatan.
  - Pengawasan Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
  - Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan (PROPER Daerah).
  - Evaluasi dan pengkajian baku mutu limbah cair dan peruntukan sungai.
  - Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sektor Pengelolaan Limbah.
  - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).
  - Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - Pemantauan Kualitas Udara Ambien; Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (Program Kampung Iklim).
  - Peningkatan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih.
  - Pembinaan Pengelolaan Sampah Kab/Kota.
  - Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Media Lingkungan Hidup.
  - Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan (Adipura).
  - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3.

- Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Penatalaksanaan.
  - Penilaian/Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup.
  - Pengadaan Peralatan, Supporting laboratorium dan Bahan Kimia.
- 7) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, dengan kegiatan :
- Peningkatan Pembinaan Konservasi Wilayah Pesisir Laut.
  - Peningkatan Konservasi Kualitas Air Danau di Provinsi Sumatera Barat.
  - Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Sumatera Barat.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan, dengan kegiatan :

- Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA.
  - Pengendalian dampak perubahan iklim.
  - Pengelolaan Keanekaragaman hayati dan Ekosistem.
  - Pengamanan dan Peerindungan Hutan.
  - Pengukuran Simpanan Karbon.
  - Konservasi Alam di Wilayah KPH.
  - Pengembangan Ecowisata dan Jasa Lingkungan.
  - Penyusunan Peta Rawan Bencana Kawasan Hutan.
- 8) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, dengan kegiatan :
- Pembinaan dan Penilaian Peran serta Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup (Kalpataru).
  - Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan.
  - Peningkatan Kapasitas Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Pelestarian Lingkungan Hidup.
  - Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.
- Serta program ini dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dengan Kegiatan :
- Implementasi ISO pelayanan operasional Dinas Kehutanan dan SPIP.

- Pengembangan data dan Informasi Kehutanan.
  - Penyusunan neraca sumber daya hutan.
  - Monitoring pelaksanaan pembangunan Kehutanan.
- 9) Program Tata Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup, dengan kegiatan :
- Penataan Hukum Lingkungan.
  - Pembinaan Hukum Lingkungan dan Perizinan.
  - Pembinaan KLHS Terhadap Dokumen Perencanaan.
  - Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan.
  - Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Daya Dukung Daya Tampung.
- 10) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan, dengan kegiatan :
- Pemantauan Kualitas Lingkungan Kawasan TPA Sampah Regional.
  - Pengendalian dan Operasional UPTD TPA Sampah Regional.
- 11) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA, dengan kegiatan :
- Rehabilitasi hutan dan lahan di luar kawasan hutan.
  - Monitoring dan Pembinaan kegiatan RHL.
  - Pengendalian pengelolaan daerah aliran sungai.
  - Pembuatan tanaman (DAK).
  - Pembangunan DAM Penahan (DAK).
- Rehabilitasi lahan dan penghijauan lingkungan.

**b. Realisasi Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran Rp.1.598.599.242,- realisasi sebesar Rp.1.565.562.206,- (97,93%).
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan anggaran Rp.1.628.540.680,- realisasi keuangan sebesar Rp.1.597.384.279,- (98,09%).
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan anggaran Rp.47.680.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.47.680.000,- (100%).
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan anggaran Rp.125.060.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.123.720.030,- (98,93%).



- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan, dengan anggaran Rp.205.372.576,- realisasi keuangan sebesar Rp.201.818.950,- (98,26 %).
- 6) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dengan anggaran Rp.2.569.575.720,- realisasi sebesar Rp.2.512.403.277,- (97,78%). Dengan output :
  - Jumlah Sungai yang didata kualitas air serta sumber pencemarannya sebagai bahan kebijakan dalam pengelolaannya.
  - Jumlah objek kegiatan yang dilakukan pembinaan wasdal pengelolaan lingkungan.
  - Jumlah objek kegiatan yang dilakukan wasdal kerusakan lingkungan, Jumlah lokasi / media lingkungan yang dipulihkan.
  - Jumlah objek kegiatan yang dinilai kinerja pengelolaan lingkungan hidupnya.
  - Jumlah Dokumen Kajian Teknis Peruntukan sungai; Jumlah Kabupaten/Kota yang terevaluasi dan diinventarisasi pelaksanaan RAD GRK bidang pengelolaan limbah.
  - Jumlah Kab/Kota yang dimonitoring dan evaluasi.
  - Jumlah peserta koordinasi pengelolaan lingkungan hidup.
  - Jumlah Kab/Kota yang dilakukan monitoring dan evaluasi.
  - Jumlah Kab/Kota yang terpantau kualitas Udara Ambienya.
  - Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dalam pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
  - Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang dibina dan dinilai.
  - Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam Pengelolaan Sampah, Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek, Jumlah pergub yang disusun.
  - Percontohan pengelolaan limbah.
  - Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina.
  - Jumlah objek kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pemantauan dalam pengelolaan LB3 dan fasilitasi kerjasama pengelolaan limbah B3 antar daerah.
  - Jumlah Kabupaten/Kota yang dievaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian dokumen Amdal atau pemeriksaan UKL-UPLnya.

- Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina/diverifikasi terkait pengajuan lisensi Komisi Penilai Amdalnya.
  - Terlaksananya Penyediaan Peralatan Laboratorium.
- 7) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, program ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp.240.078.000,- dan realisasi sebesar Rp.226.552.500,- (94,37%), Dengan output :
- kawasan pesisir pantai dan muara sungai yang dipantau kualitas air lautnya.
  - jumlah danau yang dikoordinasikan peranserta stakeholder masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian ekosistem danau.
  - Jumlah Taman Kehati yang dibina.
- Serta Dinas Kehutanan dengan anggaran Rp.4.519.931.510,- dan realisasi Rp.4.155.866.216,- (91,95%), dengan output :
- Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA.
  - Terkendalinya dampak perubahan iklim.
  - Terkelolanya Keanekaragaman hayati dan Ekosistem.
  - Terlaksananya Pengamanan dan Perlindungan Hutan.
  - Terlaksananya pengukuran Simpanan Karbon.
  - Terlaksananya konservasi Alam di Wilayah KPH.
  - Terlaksananya pengembangan Ecowisata dan Jasa Lingkungan.
  - Terlaksananya penyusunan Peta Rawan Bencana Kawasan Hutan.
- 8) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, dengan anggaran Rp.1.351.597.100,- realisasi sebesar Rp.1.239.930.432,- (91,74%). Dengan output :
- Jumlah calon yang dibina dan di usulkan sebagai calon penerima Kalpataru Tingkat Nasional.
  - Terlaksananya Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup.
  - Jumlah sekolah yang dibina dan dinilai dalam program adiwiyata.
  - Jumlah buku DIKPLH Tahun 2017.
  - Draf Buku Data DIKPLH 2018.

- Jumlah kab/kota yang ditetapkan sebagai penyusun DIKPLHD terbaik tingkat provinsi Sumatera Barat.

Serta dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan, dengan anggaran Rp.983.290.313,- dengan realisasi Rp.928.544.120,- (94,43%), dan Output :

- Terlaksananya implementasi ISO pelayanan operasional Dinas Kehutanan dan SPIP.
- Terlaksananya pengembangan data dan Informasi Kehutanan.
- Tersusunnya neraca sumber daya hutan.
- Terlaksananya monitoring pelaksanaan pembangunan Kehutanan.

9) Program Tata Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup, dengan anggaran Rp.712.410.100,- dan realisasi keuangan Rp.696.740.482,- (97,80%). Dengan output :

- Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan hukum dan perizinan di bidang lingkungan hidup serta terhimpunnya data hasil pembinaan hukum dan perizinan lingkungan.
- Jumlah pemilik usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan dalam mentaati peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan mekanisme penegakan hukum lingkungan.
- Jumlah perizinan yang diterbitkan Kab/Kota; Jumlah kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan penyelesaiannya.
- Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang dijadikan objek penegak hukum.
- Jumlah kabupaten/kota yang dibina untuk penerapan KLHS terhadap dokumen perencanaan.
- Jumlah peserta sosialisasi/bimtek terkait pelaksanaan KLHS.
- Tersusunnya dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.
- Tersusunnya naskah akademik Ranperda RPPLH Provinsi Sumatera Barat.

10) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan, dengan anggaran Rp.3.626.666.649,-

realisasi keuangan sebesar Rp.3.511.878.140,- (96,83%).  
Dengan output :

- Jumlah laporan kawasan lingkungan TPA Sampah Regional yang di pantau.
- Terlaksananya pengelolaan TPA Sampah Regional.

11) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA, dengan anggaran Rp.12.811.154.900,- realisasi keuangan Rp.11.793.501.441,- (92,06%), dengan Output :

- Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan di luar kawasan hutan.
- Terlaksananya monitoring dan Pembinaan kegiatan RHL.
- Terlaksananya Pengendalian pengelolaan daerah aliran sungai.
- Terlaksananya pembuatan tanaman (DAK).
- Terlaksananya pembangunan DAM Penahan (DAK).
- Terlaksananya rehabilitasi lahan dan penghijauan lingkungan.

**c. Outcomes**

- 1) Terkendalinya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari usaha/ kegiatan.
- 2) Ditaatinya mekanisme, implementasi izin lingkungan dan kajian lingkungan hidup strategis.
- 3) Meningkatnya efektifitas penanganan kasus lingkungan hidup dan penataan hukum lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat.
- 4) Meningkatnya peran serta stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- 5) Terlaksananya pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.

**d. Permasalahan dan Solusi**

- 1) Permasalahan :
  - Pagu yang tersedia tidak mencukupi dalam rangka memenuhi target yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada.
  - Kurangnya/keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Lingkungan Hidup.
  - Kegiatan yang ada belum didukung oleh Kabupaten/Kota karena pagu anggaran yang kecil dan kurang Koordinasi sehingga pencapaian target tidak bisa maksimal.

- Belum semua objek usaha/kegiatan yang dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan kegiatannya mempedomani dokumen lingkungan.
- Masih rendahnya tingkat pemahaman aparatur daerah tentang lingkungan hidup.
- Adanya perubahan juknis kegiatan dari pusat.
- Adanya mekanisme anggaran yang belum bisa dipenuhi, sehingga terjadi perubahan target kegiatan.
- Sebagian kegiatan masih sangat berorientasi output, belum berorientasi outcome.
- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup.

## 2) Solusi

- Melakukan penambahan anggaran Dinas lingkungan hidup agar pencapaian target lebih maksimal.
- Melakukan penambahan jumlah SDM yang kompeten pada Dinas Lingkungan Hidup.
- Peningkatan pemahamanakan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup baik untuk objek usaha/kegiatan maupun untuk aparatur daerah melalui Sosialisasi/Bimtek/Rakor.
- Juknis yang ada agar tidak mengalami perubahan setiap waktu.
- Perlu meningkatkan lagi pemahaman untuk mekanisme penganggaran.
- Perbaiki sistem akuntabilitas kinerja.
- Perlu sosialisasi yang intensif kepada masyarakat agar meningkatkan kesadaran lingkungan hidup yang baik.

## 12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Untuk Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun Anggaran 2018 mendapat alokasi APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.3.082.100.268,- dengan realisasi Rp.2.968.287.196,- (96,31%) untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

### a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan kegiatan:
  - Supervisi Penyusunan Profil Kependudukan.
  - Pemantauan dan Pengendalian Kerjasama dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

- Supervisi Inovasi Pengolahan dan Penyajian Data.
- Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- Rakor Penyelenggaraan dan Pelaksana Adminduk Kab/Kota se-Sumbar.
- Pembinaan Administrasi Pendaftaran Kependudukan.
- Pekan Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
- Pengendalian Pelayanan Administrasi Kependudukan.
- Workshop Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Pencatatan Sipil.
- Penilaian Inovasi Pelayanan dalam Pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil.
- Pemantauan Pemeliharaan Database Kependudukan.
- Sosialisasi Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Adminduk (DAK).
- Rapat Koordinasi Tingkat Kab/Kota Tentang Pencapaian Target Nasional Akta Kelahiran Anak Usia 0 – 18 Tahun (DAK).
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Kab/Kota (DAK).
- Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk (DAK).
- Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil (DAK).
- Bimbingan Teknis PIAK (DAK).
- Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan (DAK).
- Rapat Koordinasi dalam Rangka Penerbitan KTP Elektronik (DAK).
- Penyusunan Profil Kependudukan Tingkat Provinsi (DAK).
- Penyusunan Buku Data Kependudukan Per Semester (DAK).
- Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi (DAK).
- Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (DAK).
- Bimbingan Teknis Petugas Pelayanan Adminduk (Front Office) (DAK).
- Pendistribusian Blangko KTP-EI ke Kab/Kota (DAK).

**b. Realisasi Program dan Kegiatan**

- 1) Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan anggaran Rp.3.082.100.268,- dan realisasi sebesar Rp.2.968.287.196,- (96,31%) Dengan output :
  - Tersupervisinya Profil Kependudukan sesuai dengan aturan di 19 Kab/Kota se-Sumatera Barat.
  - Terlaksananya 1 kali Pemantauan Kerjasama dan Pemanfaatan Data.
  - Tersupervisinya Inovasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan sesuai dengan aturan Kependudukan di 19 Kab/Kota se-Sumatera Barat.
  - Terkelolanya SIAK.
  - Meningkatnya Penyelenggaraan Adminduk Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat.
  - Terlaksananya Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk.
  - Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
  - Terlaksananya Pengendalian Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  - Terlaksananya Workshop Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  - Meningkatnya inovasi pelayanan dalam pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
  - Terlaksananya Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil Kab/Kota se-Sumbar.
  - Terlaksananya pemanfaatan pemeliharaan database kependudukan.
  - Tersosialisasinya administrasi kependudukan dengan baik.
  - Terlaksananya koordinasi pencapaian target nasional akte kelahiran anak usia 0-18 tahun.
  - Meningkatnya pengawasan pelayanan administrasi kependudukan.
  - Meningkatnya pemahaman aparatur pendaftaran penduduk.
  - Meningkatnya pemahaman aparatur pencatatan sipil .
  - Meningkatnya kemampuan aparatur dalam pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

- Meningkatnya kemampuan aparaturnya dalam pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
- Meningkatnya koordinasi penerbitan KTP el.
- Jumlah Profil Kependudukan yang disusun serta tervalidasinya data perkembangan kependudukan tingkat provinsi.
- Tersajinya informasi yang akurat tentang data kependudukan serta tervalidasinya data agregat kependudukan per semester tingkat provinsi.
- Termanfaatnya data kependudukan untuk perumusan kebijakan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan .
- Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Meningkatnya pemahaman aparaturnya pendaftaran penduduk.
- Terlaksananya fasilitasi distribusi blanko KTP el.

**c. Outcomes**

Program Penataan Administrasi Kependudukan, outcome dari program ini adalah meningkatnya penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan.

**d. Permasalahan dan Solusi**

1) Permasalahan

- Kurangnya Sumber Daya Manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga pelayanan tidak optimal.
- Pagu yang tersedia tidak mencukupi dalam rangka memenuhi target yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada.
- Kemampuan personil yang terlibat dalam pengolahan dan penyajian data kependudukan yang ada belum memadai,
- Sarana dan prasarana penunjang administrasi kependudukan masih belum tersedia dan mencukupi.
- Kurang pedulinya/kurang perhatiannya Kepala Daerah terhadap penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil, sehingga kurangnya SDM, Sarana dan Prasarana dalam peningkatan inovasi pelayanan.
- Masih banyak perbedaan pendapat dan tindakan Dinas Dukcapil Kabupaten/kota dalam memahami peraturan perundang-undangan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.



- Penduduk masih belum memandang pentingnya akta kelahiran.
- Masih Kurangnya kompetensi SDM di bidang pendaftaran penduduk pada Dinas dukcapil kabupaten/kota, dan masih belum optimalnya pelayanan pendaftaran penduduk di beberapa dinas dukcapil.
- Adanya perbedaan persepsi dan cara pengolahan data kepemilikan KTP-el yang dilakukan oleh Kab/Kota,
- Masih adanya sebagian Kabupaten/Kota yang masih mengolah dan menyajikan data kependudukan dari data pelayanan dengan alasan DKB yang dihasilkan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri tidak update dan masih terdapat data-data anomali dalam DKB tersebut,
- Masih adanya data-data yang tidak selaras dari data yang telah diolah dari DKB.
- Masih kurangnya pemahaman OPD terkait dengan pemanfaatan data kependudukan,
- OPD banyak yang belum memanfaatkan akses data kependudukan,
- Masih banyak OPD yang belum mempunyai aplikasi yang dibutuhkan untuk implementasi pemanfaatan data kependudukan.
- Masih Kurangnya kompetensi SDM Front Office di Dinas dukcapil kabupaten/kota, dan masih belum optimalnya pelayanan front office di beberapa dinas dukcapil.
- Masih terbatasnya stok blangko KTP elektronik di Ditjen Dukcapil yang menyulitkan dilakukan distribusi ke Kabupaten/Kota se-Sumbar.

## 2) Solusi

- Perlu penambahan porsonel pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Perlu penambahan pagu untuk memenuhi target yang telah ditetapkan.
- Provinsi akan mulai mengadakan Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Kependudukan pada Tahun Anggaran 2019. Serta melakukan pembinaan kepada personil Kabupaten/kota untuk memberikan pemahaman dalam mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- Sarana dan prasarana penunjang administrasi kependudukan masih perlu ditambah dan diperbaharui.

- Perlu meningkatkan koordinasi dengan kepala Daerah untuk mrmberi pemahaman pentingnya penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil.
- Provinsi akan rutin memfasilitasi kegiatan bimbingan teknis dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- Disarankan kepada Kabupaten/Kota agar melakukan sosialisasi pentingnya akta kelahiran dan melakukan pendataan kepemilikan akta pada masing-masing daerah.
- Meningkatkan kapasitas SDM yang ada dengan mengikutsertakan dalam pelatihan dan bimbingan teknis baik yang diadakan oleh pusat maupun provinsi,
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama 18 Kabupaten/Kota melakukan pelayanan terintegrasi untuk perekaman dan pencetakan KTP-el bagi kabupaten yang masih rendah capaian perekamannya yaitu Kabupaten Solok Selatan dalam kegiatan Pekan Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
- Melaksanakan berbagai pertemuan pembahasan permasalahan pendaftaran penduduk atau dapat menggunakan media komunikasi terbatas aparatur untuk melakukan diskusi internal antar aparatur pendaftaran penduduk dinas dukcapil kabupaten/kota.
- Melakukan peningkatan kompetensi aparatur bidang pencatatan sipil dengan mengirimkan aparatur untuk melakukan studi formal dan studi komparatif ke daerah lain.
- Melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman mengenai pemanfaatan akses data kependudukan untuk pelayanan publik, perencanaan dan pengambilan kebijakan serta pemanfaatan card reader KTP-el.
- Memfasilitasi OPD untuk mengakses data kependudukan melalui DWH dengan mengkoordinasikan dan menyiapkan pemenuhan syarat administrasi berupa izin pemanfaatan dari Gubernur dan Perjanjian Kerjasama antara OPD dengn DPPKBKPS.
- Berkoordinasi dengan Diskominfo serta OPD terkait untuk pembuatan dan optimalisasi integrsi aplikasi di OPD pengguna dengan aplikasi data kependudukan (DWH) di DPPKBKPS untuk kebutuhan teknis pemanfaatan akses data kependudukan.

- Melakukan peningkatan kompetensi front office dengan melakukan pendidikan lapangan secara berkala untuk mendapatkan penyegaran dalam bekerja, seperti dilakukan acara outbond di lingkungan dinas dukcapil setempat.
- Membuat perencanaan kebutuhan blangko KTP elektronik yang meliputi jadwal perkiraan habis, dan perkiraan kebutuhan masing-masing kabupaten/kota.

### **13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Tahun Anggaran 2018 mendapat alokasi APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.29.136.894.943,- dengan realisasi Rp.27.137.019.714,- (93,14%) untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

#### **a. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.
- 6) Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna, dengan kegiatan:
  - Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Tepat Guna (TTG) di Pedesaan.
  - Pemetaan Potensi dan Kebutuhan Teknologi Tepat Guna (TTG).
  - Penguatan Kelembagaan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantekdes).
- 7) Program Penanggulangan Kemiskinan, dengan kegiatan :
  - Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
  - Pemberdayaan Masyarakat dalam menunjang kegiatan Lingkungan (LMP).
  - Pemanfaatan Sarjana Ke Nagari Melalui Program Sarjana Pemberdayaan Masyarakat Nagari (SPMN).
  - Pengembangan Ekonomi Lokal dan daerah berbasis Keunggulan Lokal pada kawasan perdesaan.
  - Pendataan dan Inventarisasi Kegiatan Kredit Mikro Nagari (KMN).

- Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Liquified Petroleum Gas (LPG).
  - Pemberdayaan Masyarakat dalam pemanfaatan SDM dan Lingkungan peningkatan masyarakat Perdesaan.
  - Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Percepatan Pembangunan Desa Tertinggal.
  - Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat berbasis Sarana dan Prasarana pada Kawasan Perdesaan.
  - Pemetaan Karakteristik Potensi Kawasan Perdesaan.
  - Peningkatan Kerjasama antar Desa dalam menunjang Potensi Unggulan Masyarakat Perdesaan.
- 8) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan / Nagari, dengan kegiatan :
- Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
  - Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Dana Desa.
  - Penilaian Nagari/Kelurahan Berprestasi melalui Perlombaan Nagari/Kelurahan.
  - Pemberdayaan Masyarakat dalam Menunjang TMMD/N.
  - Pemberdayaan Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah PMT-AS.
  - Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
  - Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong; Peningkatan Kapasitas dan Penguatan Kelembagaan Badan Pengelola Sarana dan Prasarana Air Minum (BP-SPAMS).
  - Pembentukan Kelembagaan Komisi Penanggulangan AIDS.
  - Pemberdayaan Masyarakat melalui KKN-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (PPM).
  - Pilot Project Pembentukan Pusat Kemasyarakatan.
- 9) Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha, dengan kegiatan :
- Penguatan Kelembagaan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan (UEM-SP).
  - Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (UP2K-PKK).
  - Pemberdayaan Cadangan Pangan Masyarakat Nagari Desa dan Kelurahan.

- 10) Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, dengan kegiatan :
  - Pemberdayaan Masyarakat secara terpadu di Nagari/Desa dan Kelurahan Prioritas.
  - Inventarisasi dan Penguatan Kelembagaan Kelompok Pengelola Prasarana; Pemberdayaan Manajemen Pasar Nagari.
  - Pembinaan dan Revitalisasi Posyandu.
  - Penguatan Kelembagaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Se-Sumatera Barat.
  - Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Nagari BumNag/BumDes.
  - Pemberdayaan Manajemen Pasar Nagari; Pembinaan Penyusunan Profil Desa/Nagari dan Kelurahan.
  - Penguatan dan Pemberdayaan Kelembagaan Adat.
  - Penilaian KAN terbaik tingkat Provinsi Sumatera Barat.
  - Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat.
  - Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat.
- 11) Program Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Nagari, dengan kegiatan :
  - Monev Penguatan Pemerintahan Nagari.
  - Sosialisasi Perda tentang Nagari.
  - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Nagari/Desa.
  - Pendataan Dana Bergulir dan Aset Lain Pasca Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.
  - Lomba Nagari/Desa Peduli Informasi Dana Desa se-Sumatera Barat.
- 12) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari, dengan kegiatan :
  - Peningkatan Kapasitas Wali Nagari/Kades.
  - Penilaian Kompetensi Bagi Wali Nagari dan Lurah.

**b. Realisasi Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran sebesar Rp.1.896.117.488,- dan realisasi Rp.1.827.285.768,- (96,37%).
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan anggaran Rp.1.023.384.000,- dan realisasi sebesar Rp.988.121.953,- (96,55%).

- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan anggaran Rp.43.660.000,- dan realisasi sebesar Rp.41.384.000,- (94,79%).
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan anggaran Rp.45.568.800,- dan realisasi sebesar Rp.41.591.800,- (91,27%).
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan, dengan anggaran Rp.674.371.980,- dan realisasi sebesar Rp.631.557.375,- (93,65%).
- 6) Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna, dengan anggaran Rp.500.340.000,- dan realisasi sebesar Rp.463.798.500,- (92,70%). Dengan output :
  - Terlaksananya Gelar TTG Tingkat Provinsi sebanyak 1 kali, terpilihnya Pemenang Lomba Inovasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat sebanyak 3 Inovator, terikutinya promosi TTG Nasional ke XX DI Bali sebanyak 1 kali, terlaksananya Monitoring Kegiatan Pemasyarakatan dan Kerjasama TTG ke 19 Kab/Kota;
  - Terlaksananya Pendataan Potensi dan Kebutuhan Teknologi Tepat Guna di Perdesaan/Kelurahan di 5 Kabupaten/kota, terlaksananya Pemetaan Potensi dan Kebutuhan teknologi Tepat Guna di Perdesaan/Kelurahan sebanyak 1 Peta;
  - Terlaksananya Sosialisasi bagi aparat dan pengurus Posyantek Kabupaten/Kota se Sumatera Barat melalui Forum Koordinasi Pengurus Posyantek sebanyak 40 orang peserta, terlaksananya pembinaan/monitoring Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) pada 19 Kabupaten/Kota, terpilihnya Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 untuk 3 Posyantek terbaik, terlaksananya Orientasi Posyantek sebanyak 1 kali untuk 40 orang peserta.
- 7) Program Penanggulangan Kemiskinan, dengan anggaran Rp.939.296.890,- dan realisasi sebesar Rp.839.023.125,- (89,32%). Dengan output :
  - Terlaksananya Rakor Kemiskinan tingkat Provinsi Sumbar sebanyak 1 kali dan 45 Orang, terlaksananya Pembinaan, Evaluasi dan Sinkronisasi Program Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat ke 19 Kabupaten/kota.

- Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Kegiatan dan Pemanfaatan dan Pengelolaan LMP pada 9 kabupaten.
- Terlaksananya monitoring dan evaluasi SPMN ke 16 Kabupaten/kota, Terlaksananya rapat koordinasi dalam rangka evaluasi kebutuhan SPMN Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat sebanyak 2 kali rapat, terlaksananya Mid Review SPMN XIII dan XIV sebanyak 1 kali.
- Terlaksananya Sosialisasi Produk Unggulan dalam rangka Pengembangan Ekonomi Lokal bagi Aparat Kab/kota dan Pokmas/Petani untuk 40 orang, terlaksananya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi pada Kab/kota pada 10 Kabupaten/Kota.
- Pelatihan Manajemen Pengelolaan KMN, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan KMN.
- Terlaksananya Rakor program PELD untuk 24 orang dan pembinaan dan konsultasi serta monev ke 19 Kab/Kota.
- Terlaksananya Rakor Kredit Mikro Nagari 1 kali dan monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap Pokmas penerima dana KMN 14 di Kab/Kota.
- Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengawasan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg sebanyak 4 kali.
- Terlaksananya Bimtek Pemanfaatan SDA dan Lingkungan sebagai Sumber Pendapatan dan Energi Alternatif sebanyak 5 Kabupaten/Kota dan 40 orang, terlaksananya Sosialisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk 40 Orang Peserta, terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Pemb. Masyarakat dalam Pemanfaatan SDA dan Lingkungan Peningkatan Masyarakat Perdesaan pada 5 Kabupaten/Kota.
- Terlaksananya Sosialisasi Indeks Desa Membangun bagi Aparatur Kabupaten/Kota sebanyak 60 orang, terlaksananya Pembinaan dan Monitoring dan Evaluasi Pendataan Desa tertinggal ke 14 Kab/Kota.
- Terlaksananya Sosialisasi Permendes tentang PKKPM untuk aparat Kab/Kota sebanyak 40 orang, terlaksananya Pembinaan dan Monitoring dan Evaluasi PKKPM ke 4 Kab/Kota.
- Terlaksananya Sosialisasi Pemetaan Kawasan Perdesaan bagi paratur Kabupaten/kota sebanyak 60 orang, terlaksananya Pembinaan dan Monitoring dan Evaluasi Potensi Kawasan Perdesaan ke 14 Kab/Kota.

- Terlaksananya Sosialisasi dan Rapat Kerja bagi aparaturnya Kabupaten/kota sebanyak 60 orang, terlaksananya Pembinaan dan Monitoring dan Evaluasi Potensi Kawasan Perdesaan ke 14 Kab/Kota.
- 8) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan / Nagari, dengan anggaran Rp.9.474.765.145,- dan realisasi sebesar Rp.9.007.336.368,- (95,07%). Dengan output :
- Terlaksananya Orientasi Manajerial Kelembagaan PKK sebanyak 120 orang.
  - Terlaksananya dukungan terhadap Jambore Kader PKK Kabupaten/Kota dan provinsi untuk 500 orang peserta Jambore.
  - Terlaksananya Pembinaan Dewan Pembina PKK pada 17 Kabupaten/kota, terikutinya Jambore Kader PKK Tk. Provinsi sebanyak 1 kali.
  - Terikutinya Hari Puncak Peringatan HKG-PKK Tingkat Nasional sebanyak 1 kali.
  - Terlaksananya Rapat Persiapan HKG PKK tingkat Nasional sebanyak 10 kali.
  - rapat Koordinasi HKG PKK tingkat Nasional sebanyak 4 kali di Jakarta.
  - Study HKG PKK Tingkat Nasional ke Kalimantan Selatan sebanyak 1 kali.
  - Terlaksananya rapat teknis dan Koordinasi Pendamping Desa sebanyak 3 kali pada 156 kecamatan.
  - Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi program dana Desa ke 14 Kabupaten/Kota.
  - Penilaian Nagari/Kelurahan Berprestasi dengan target kinerja mengetahui perkembangan/ kemajuan yang dicapai oleh nagari dan kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 tahun pada 18 Kab/Kota.
  - Pelaksanaan Pekan Inovasi Nasional (PIN) Nagari/Kelurahan di Provinsi Bali sebanyak 1 kali.
  - Pembinaan & Monitoring/Evaluasi bagi Nagari/ Kelurahan kurang berkembang pada 19 kab/kota.
  - Terlaksananya Rapat Koordinasi Tk Nasional sebanyak 2 kali.
  - Terlaksananya Rapat Koordinasi Tk. Provinsi TMMD ke 101, 102 dan 103 sebanyak 3 kali.
  - Terlaksananya fasilitasi fisik dan non fisik kemanunggalan ABRI dan masyarakat dalam pembangunan sebanyak 100



orang untuk 5 Kabupaten (Kab. Solok dan Sijunjung, Kab. Pasaman Barat dan Kab. Pesisir Selatan & Kab. Tanah Datar).

- Terlaksananya Monitoring/Evaluasi kegiatan TMMD/N di 5 Kabupaten.
- Terlaksananya Pembinaan program PMTAS ke 9 Kabupaten/Kota.
- Rapat program PMTAS sebanyak 2 kali.
- Terlaksananya TOT LP 3K-PKK.
- Terlaksananya Rapat Pengurus lengkap sebanyak 11 kali untuk 60 orang, dilakukan setiap bulan di Aula Kantor TP-PKK.
- Terlaksananya Rakor dengan Ketua TP-PKK dan Sekretaris Kab/Kota se Sumatera Barat untuk 100 orang.
- Terlaksananya Bimbingan Teknik Gerakan PKK ke Kab/Kota se Sumatera Barat untuk 19 Kab/ Kota.
- Terlaksananya Temu Ketua Dasawisma Berprestasi untuk 65 orang.
- Terlaksananya penilaian Kelompok Dasawisma Berprestasi untuk 19 Kab/ Kota.
- Terikutinya Expo Gelanggang Dagang dalam Rangka Peringatan BBGRM dan HKG PKK Tingkat Nasional untuk 4 orang.
- Terlaksananya hari puncak Peringatan HKG-PKK Tk. Provinsi Sumatera Barat.
- Terlaksananya Penilaian/ lomba gerakan PKK pada 19 Kab/Kota.
- Terlaksananya Rakon dengan SKPD terkait sebanyak 100 orang.
- Terlaksananya Jambore Kader PKK berprestasi Tingkat Provinsi Sumbar sebanyak 500 orang.
- Terlaksananya kegiatan Kesatuan gerak PKK-KB kesehatan.
- Terikutinya Rakon PKK Tk. Nasional Tahun 2018, terikutinya Jambore Nasional 2018.
- Terlaksananya pencahangan Bulan Bakti Dasa Wisma.
- Terlaksananya Talk Show Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui life skill.
- Terlaksananya Seminar pemberdayaan Diversifikasi Pangan lokal dan Pengelolaan sampah Rumah tangga.

- Terlaksananya Talk Show Pemberdayaan PHBS melalui Cerdik.
- Terlaksananya Pilot Project lokasi Percontohan Binaan Gerakan PKK.
- Terlaksananya Orientasi Ketua TP-PKK Kecamatan dan Kab/Kota se Sumatera Barat.
- Terlaksananya monitoring pelaksanaan Bulan Bakti Kelompok Dasa Wisma.
- Terlaksananya peringatan hari bumi tingkat Prov. Sumbar Tahun 2018.
- terlaksananya Peningkatan wawasan dan Profesionalisme pengurus TP PKK.
- Terlaksananya Orientasi Ketua TP-PKK Nagari/Kelurahan se Sumatera Barat.
- Terlaksananya Sosialisasi Perpres Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK.
- Terlaksananya Orientasi Pembinaan Keluarga Sakinah bagi calon Pengantin.
- Terlaksananya Orientasi Kelompok Dasa Wisma Berprestasi sebanyak 200 orang.
- Peringatan BBGRM Tk. Nasional ke XIV dan Pameran 1 kali.
- Pembinaan pencanangan BBGRM Kab/Kota dan Evaluasi Penilaian pelaksanaan BBGRM Tahun 2018 pada 19 Kab/Kota.
- Terlaksananya Penilaian BP-SPAMS pada 10 KP-SPAMS.
- Terlaksananya Penetapan pemenang KP-SPAMS terbaik 1, 2 dan 3 Tk. Provinsi Sumatera Barat.
- Terlaksananya Monitoring kegiatan BP-SPAMS ke Kab/Kota.
- Terlaksananya Rapat KPA HIV AIDS sebanyak 20 orang.
- Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring ke 6 Kabupaten/Kota.
- Terlaksananya KKN-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se-Sumatera Barat sebanyak 10 Perguruan Tinggi.
- Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring ke 6 Kabupaten/Kota.

- Terlaksananya Pendataan Lembaga Kemasyarakatan sebanyak 1 dokumen.
  - Terlaksananya Sosialisasi pembentukan Pusat Kemasyarakatan sebanyak 50 orang.
  - Terlaksananya Pembinaan/ Monitoring lembaga kemasyarakatan pada 2 Kabupaten.
- 9) Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha, dengan anggaran Rp.941.768.600,- dan realisasi sebesar Rp.900.970.094,- (95,67%). Dengan output :
- Terlaksananya pembinaan terhadap UEM-SP.
  - Terlaksananya Pelatihan Manajemen pengelolaan UEM-SP sebanyak 52 orang.
  - Terlaksananya Pelatihan Kewira usahaan sebanyak 52 orang.
  - Terlaksananya Penilaian UEM-SP Berprestasi pada 6 Kab/Kota.
  - Terlaksananya pelatihan Pengelolaan UP2K-PKK sebanyak 155 orang, yang terdiri dari aparatur pemberdayaan masyarakat Kab/ Kota se-Sumatera Barat, dari TP-PKK Kab/ Kota dan SKPD Provinsi.
  - Pembinaan program UP2K-PKK untuk 19 Kab/Kota.
  - Rapat evaluasi kegiatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan Kabupaten/Kota dan SKPD terkait.
  - Pelatihan kelembagaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa/Nagari 1 angkatan.
- 10) Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, dengan anggaran Rp.8.654.049.090,- dan realisasi sebesar Rp.8.199.646.010,- (94,75%). Dengan output :
- Terlaksananya Rakor/pertemuan nagari/desa/ kelurahan prioritas sebanyak 1 kali dengan 33 orang dan pembinaan/ evaluasi program kegiatan di nagari prioritas untuk 17 Nagari pada 17 Kab/kota, SKPD dan Perantau.
  - Terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Pemukiman Masyarakat sebanyak 30 orang.
  - Terlaksananya rapat evaluasi pengelolaan pasar nagari/desa di Sumatera Barat untuk 4 kali rapat.
  - Terlaksananya Rapat persiapan pembentukan Tim pembinaan pasar nagari Provinsi Sumatera Barat untuk 1 kali.

- Terlaksananya Evaluasi/Penilaian Kader Posyandu Berprestasi sebanyak 11 orang ke 14 Kab/Kota.
- Temu Kader Posyandu Berprestasi Tk. Provinsi Sumatera Barat sebanyak 57 orang.
- Pembinaan Program Revitalisasi Posyandu untuk 19 Kab/Kota.
- Pelatihan penguatan Sistim Informasi Posyandu.
- Pembinaan pelaksanaan Sistim Informasi Posyandu dan Implementasi pelaksanaan Posyandu Terintegrasi BKB dan Paud Kabupaten/Kota.
- Pelaksanaan pembinaan Kelembagaan LPM pada 8 Kab/Kota.
- Terlaksananya Mukerda DPD LPM Provinsi dengan peserta 60 orang.
- Bimbingan Teknis Kelembagaan LPM untuk 200 orang.
- Capacity Building kelembagaan LPM 1 kali.
- Bimtek peran LPM dalam Pembangunan se-Sumatera Barat dengan peserta 128 orang.
- Pelaksanaan Pelatihan Manajemen bagi Direktur dan Pengelola BUMNag/Des 2 angkatan.
- Pelatihan Kewirausahaan bagi Direktur dan Pengelola BUMNag/Desa 2 angkatan.
- Penguatan dan Pengembangan BUMNagari/Desa 1 angkatan.
- Mengikuti Sumbar Expo Tahun 2018 di Makasar Sulawesi Selatan.
- Terlaksananya bimbingan teknis profil bagi aparat Kab/Kota, Nagari/Desa dan Kelurahan Kota sebanyak 302 orang.
- Terlaksananya Pembinaan dan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Profil Nagari/Desa dan Kelurahan pada 19 Kab/Kota.
- Bimbingan teknis masyarakat Hukum adat 3 angkatan sebanyak 345 orang.
- Pelaksanaan Sosialisasi Pilot Proyek Nagari model Desa Adat Percontohan pada 40 orang.
- Focus Group Discussion Pilot Proyek pada 2 kabupaten sebanyak 80 orang.
- Bimbingan Teknis Pilot Proyek pada 2 Kabupaten sebanyak 80 orang.

- Pembinaan Masyarakat Hukum Adat pada 4 Kab/Kota.
  - Pembinaan Penguatan Lembaga Adat pada 10 Kab/Kota.
  - Terlaksananya Penilaian KAN terbaik TK. Provinsi Sumatera Barat.
  - Terlaksananya Pembinaan KAN.
  - Terlaksananya Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 130 orang.
  - Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring pada 19 Kabupaten/Kota.
- 11) Program Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Nagari, dengan anggaran Rp.3.105.072.950,- dan realisasi sebesar Rp.2.692.623.042,- (86,72%). Dengan output :
- Terlaksananya Pembinaan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Nagari ke 14 Kab/Kota.
  - Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Nagari di 14 Kabupaten/Kota sebanyak 1400 orang.
  - Monitoring/Evaluasi pelaksanaan Perda tentang Nagari pada 14 Kab/Kota.
  - Terlaksananya Bimbingan Teknis Wali Nagari/Kepala Desa sebanyak 400 orang.
  - Terlaksananya pelaksanaan Rapat Koordinasi BAMUS Nagari dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Kabupaten/Kota lokasi Dana Desa sebanyak 150 orang.
  - Terlaksananya pelaksanaan koordinasi pembinaan dan Monev terhadap BAMUS Nagari tentang pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 pada Kab/kota terpilih.
  - Pendataan dana bergulir dan aset-aset pasca PNMPM-MPd pada 12 Kabupaten.
  - Koordinasi dan Monitoring/Evaluasi pendataan dan kegiatan pelaksanaan dana bergulir dan aset-aset PNPM-MPd pada 12 Kabupaten.
- 12) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari, dengan anggaran Rp.1.838.500.000,- dan realisasi sebesar Rp.1.503.681.679,- (81,79%). Dengan output :
- Sarasehan Wali Nagari/Kepala Desa sebanyak 600 orang.
  - Terlaksananya penyerahan hadiah Lomba Nagari/Desa Peduli Informasi dana Desa untuk pemenang 1, 2 dan 3.
  - Penilaian Wali Nagari/ Lurah sebanyak 19 Nagari/Kelurahan.

- Rapat Koordinasi dengan Kab/Kota, Rapat Teknis, klarifikasi data oleh Tim Penilai 3 kali.

**c. Outcomes**

- 1) Terwujudnya Transformasi Informasi TTG yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Perdesaan.
- 2) Terwujudnya Peta Potensi dan Kebutuhan TTG di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
- 3) Terwujudnya Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna sebagai Pusat Informasi Teknologi Tepat Guna bagi masyarakat Nagari/Desa dan Kelurahan.
- 4) Terwujudnya Komitmen antar SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mendukung Program Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.
- 5) Terwujudnya Kemampuan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Lingkungan Mandiri dan Lestari.
- 6) Terwujudnya Peluang Usaha dan Mitra Kerja Pemerintahan Nagari/Kelurahan dalam Proses Pembangunan.
- 7) Terwujudnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat 100%.
- 8) Terwujudnya kelompok usaha produktif penerima dan pemanfaat dana kredit mikro Nagari.
- 9) Diperolehnya rumusan produk unggulan dalam rangka Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah dan ekonomi unggulan di Kab/Kota (19 Kab/Kota).
- 10) Terwujudnya perkembangan usaha kelompok masyarakat penerima.
- 11) Terwujudnya Kelancaran Ketersediaan LPG dan Pemantauan Harga yang sesuai dengan Regulasi.
- 12) Terwujudnya Kepedulian Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber daya Alam dan lingkungan yang bersih dan hijau.
- 13) Terwujudnya Peningkatan Pemahaman Aparatur terhadap indikator indikator IDM yang akan di intervensi dalam meningkatkan status IDM di Daerah.
- 14) Meningkatnya Kinerja dan Pengetahuan Aparat dalam pembentukan dan pengembangan kawasan.
- 15) Meningkatnya Kinerja dan Pengetahuan Aparat dalam Pengembangan Kawasan (100%).
- 16) Meningkatnya Kinerja dan Pengetahuan Aparat dalam Pengembangan Kawasan perdesaan.

- 17) Terwujudnya kader PKK yang memiliki Pengetahuan dalam pelaksanaan kegiatan PKK untuk kesejahteraan keluarga.
- 18) Terwujudnya keterpaduan lintas sektor dan masyarakat yang terdampingi dalam pelaksanaan penggunaan dana Desa.
- 19) Terpilihnya nagari dan kelurahan terbaik tingkat provinsi, Terpromosikannya Inovasi Perlombaan Desa melalui PIN.
- 20) Terwujudnya Sinkronisasi dan kelancaran Pelaksanaan TMMD.
- 21) Meningkatnya kepedulian kab/kota untuk mendukung program PMT-AS dalam upaya meningkatkan kesehatan dan gizi anak sekolah di daerah miskin.
- 22) Meningkatnya wawasan dan keterampilan TP-PKK kab/kota Kab/ Kota dalam pelaksanaan gerakan PKK, Meningkatnya pemahaman kader PKK dalam melaksanakan kegiatan 10 program pokok PKK dilapangan, Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kader PKK untuk mensejahterakan keluarga dan masyarakat diwilayahnya, Meningkatnya kinerja pengurus TP-PKK dalam pelaksanaan 10 PP PKK, Termotivasinya kader PKK yang berprestasi dalam melaksanakan gerakan PKK di lapangan, Terwujudnya sinkronisasi program kerja dengan TP PKK kab/kota se Sumatera Barat, Terjalinnnya kerjasama dengan SKPD terkait (100%).
- 23) Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan melalui Pencanangan BBGRM Tingkat Provinsi Sumatera Barat.
- 24) Terwujudnya pemahaman aparaturn kab/kota dan kelompok masyarakat dalam pemanfaatan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.
- 25) Terwujudnya kepedulian masyarakat dalam penyuluhan dan pencegahan Penanggulangan HIV AIDS.
- 26) Terwujudnya transformasi ilmu Pengetahuan dan Teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Nagari/Desa/Kelurahan.
- 27) Terwujudnya Pusat Kemasyarakatan Desa/Nagari (100%).
- 28) Terwujudnya peran Usaha Ekonomi Masyarakat Simpan Pinjam (UEM-SP) dan Lembaga Keuangan Mikro lainnya dalam menyediakan modal untuk usaha ekonomi produktif masyarakat secara murah, ringan dan cepat.
- 29) Terwujudnya kegiatan usaha ekonomi kelompok UP2K PKK.

- 30) Terwujudnya peningkatan pemahaman pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintahan Nagari/Desa dalam pembentukan Cadangan Pangan Pemerintahan Nagari/Desa dan Kelurahan.
- 31) Meningkatnya ekonomi masyarakat serta pembangunan di Nagari Prioritas (17 nagari/desa/kelurahan).
- 32) Terwujudnya Prasarana dan sarana umum di Nagari / Perdesaan (100%).
- 33) Terwujudnya Peningkatan Pemahaman Pengelola Pasar tentang Manajemen Pasar Nagari (100%).
- 34) Terwujudnya Koordinasi & Kinerja Pokjanal Posyandu Kab/Kota dalam mendukung Kelancaran Pengelolaan Kegiatan di Posyandu untuk Pemberdayaan & Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat.
- 35) Meningkatnya peran dan fungsi Pengurus LPM dan Meningkatnya kapasitas DPD LPM (100 %).
- 36) Terwujudnya Pembentukan BUMNag/Des di Nagari/Desa di Sumatera Barat.
- 37) Meningkatnya pengetahuan aparat Nagari/Desa dan Kelurahan tentang Profil Nagari/Desa dan Kelurahan.
- 38) Terwujudnya pemahaman aparat, lembaga adat dan masyarakat dalam menjaga dan keberadaan adat istiadat dan nilai sosial masyarakat, dan terpilihnya Nagari Model.
- 39) Terwujudnya pemahaman aparat, KAN Masyarakat dalam menjaga Adat Istiadat.
- 40) Meningkatnya Peran Serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.
- 41) Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- 42) Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- 43) Meningkatnya kinerja dan Pemahaman BAMUS Nagari terpilih tentang Peran tugas dan fungsi kelembagaan BAMUS Nagari dalam pelaksanaan Undang Undang No.6 Tahun 2014.
- 44) Terinventarisir dan terkelolanya dana bergulir dan Aset-aset PNPM-MPd.
- 45) Ditetapkannya pemenang/Juara Nagari/Desa Peduli Informasi Dana Desa Tk. Provinsi Sumatera Barat (100 %).
- 46) Terwujudnya peningkatan kinerja Wali Nagari dan Lurah melalui Penilaian Wali Nagari dan Lurah.



#### **d. Permasalahan dan Solusi**

##### **1) Permasalahan :**

- Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Adat
  - Masih adanya beberapa Kabupaten/ Kota yang belum dapat melaksanakan kegiatan, seperti Program Penyediaan Makanan Tabahan Anak Sekolah (PMT-AS), Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan dan Penanggulangan Penyakit Menular (DBD) dan P2W-KSS karena keterbatasan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerahnya.
  - Kurangnya dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap Program-Program Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pusat dan Provinsi.
  - Kurang berdayanya aparat Pemberdayaan Kabupaten/Kota dalam memberikan masukan-masukan untuk meyakinkan Kepala Daerah dalam mengusulkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
  - Belum semua Kabupaten dan Kota yang mengalokasikan dana APBD kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat sehingga partisipasi dan swadaya masyarakat belum terinventarisir dengan baik.
- Bidang Pemerintahan Nagari
  - Terbatasnya kemampuan daerah dalam mengalokasikan pembiayaan, sehingga kegiatan Perlombaan Nagari dan Kelurahan melalui Sistem komputerisasi belum terwujud.
  - Seringnya terjadinya mutasi pada SKPD Pemberdayaan Masyarakat Kab/Kota, Sangat besar pengaruhnya peningkatan kinerja aparat dalam memahami Tugas dan Kegiatan Perlombaan Nagari/ Kelurahan.
- Pendataan Profil Nagari dan Kelurahan .
  - Belum semua Kabupaten dan Kota yang menyediakan dana pendukung untuk pelaksanaan pendataan Profil Nagari/Kelurahan, sehingga proses pelaksanaan ditingkat nagari/ kelurahan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.
  - SKPD Pemberdayaan Masyarakat kab/kota sebagian besar sudah dilatih dan menerima penjelasan dari aparat Pemda Provinsi untuk segera menindak lanjuti Permendagri Nomor 12 Tahun 2007.

- Pendataan Dana Bergulir Aset Pasca PNPM
  - Masih Banyak nya Dana bergulir Pasca PNPM di Kabupaten/Kota yang belum terinventarisasi Sepenuhnya.
- Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan SDA TTG
  - Beberapa Kabupaten/Kota tidak jelas di institusi mana melekatnya tugas-tugas pemberdayaan ekonomi masyarakat, walaupun ada institusi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten/Kota tersebut, kadang kala terbentur dengan kualitas teknis dan kuantitas SDM yang tersedia.
  - Perbedaan persepsi tentang otonomi daerah dan kurang jelasnya program prioritas institusi pemberdayaan di Kabupaten/Kota masih dirasakan sebagai faktor penghambat dalam mewujudkan sinergitas operasional tugas-tugas pengembangan usaha ekonomi masyarakat di Sumatera Barat.
  - Tidak lancarnya Dinas/Instansi dalam mengirimkan laporan pengentasan kemiskinan secara periodik kepada sekretariat TKPK, sehingga sulit untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan secara tepat.
  - Tingginya minat Sarjana dan Sarjana Muda yang belum mendapatkan pekerjaan untuk menjadi Sarjana Pemberdayaan Masyarakat Nagari (SPMN) sedangkan kemampuan APBD terbatas sehingga tidak dapatnya dilakukan perekrutan.
  - Masih banyaknya masyarakat yang mengkonsunsi air yang tidak layak mengakibatkan banyak yang dapat penyakit diare, ispa, gatal-gatal dan lain sebagainya mengakibatkan rendahnya kualitas kesehatan masyarakat.
  - Masih rendahnya kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam penguasaan TTG sehingga belum mampu mendorong peningkatan dan perkembangan usaha mereka serta persaingan alat-alat TTG yang telah dipatenkan oleh Pabrik.
  - Belum teridentifikasi dan terinventarisasinya kebutuhan TTG bagi masyarakat Nagari/Desa/ Kelurahan baik teknologi baru, maupun modifikasi teknologi yang telah dimanfaatkan secara menyeluruh dan spesifik.

- Pemanfaatan teknologi masih terbatas pada beberapa Nagari/Desa/Kelurahan yang relatif dekat dengan pusat-pusat fasilitas seperti Ibu Kota Kecamatan, Kabupaten. Sedangkan Nagari/Desa/Kelurahan yang relatif jauh dari pusat fasilitas berbagai usaha masih ditangani secara konvensional/tradisional.
- Bidang Kerjasama dan Pengembangan Kawasan Perdesaan.
  - Belum seluruh Fasilitas Umum yang dibangun Pemerintah mempunyai Kelompok Pengelola Prasarana Fasilitas Umum (KPP Fasum), karena itu fasilitas yang dibangun kurang terawat dan kurang berfungsi, dan adanya bencana alam yang selalu melanda di Provinsi Sumatera Barat.
  - KPP Fasum yang telah dibentuk di Nagari/Desa/Kelurahan Pembinaan, pemeliharaan dan pengembangannya belum maksimal masih ditemui KPP Fasum kepengurusannya belum begitu aktif dan administrasinya belum lengkap.
  - Masih banyaknya daerah-daerah tertinggal di Sumatera Barat (terisolir, masyarakat miskin dan bencana alam) yang memerlukan percepatan pembangunan melalui TMMD/N.

2) Solusi :

- Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Adat
  - Perlunya komitmen Kepala Daerah Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota) untuk mensinergikan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
  - Perlunya dukungan dan kepedulian Kepala Daerah Kabupaten/Kota untuk mendukung program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pusat dan Provinsi.
- Bidang Pemerintahan Nagari
  - Melakukan pendekatan dan selalu berusaha melakukan sosialisasi kepada masyarakat lokasi permasalahan.
  - Perlunya komitmen Kepala Daerah Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota) untuk mensinergikan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan SDA TTG

- Untuk sinergitasnya program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat di Sumatera Barat perlu ada dan jelas institusi yang menanganinya, dan kualitas teknis dan kuantitas SDM pada institusi pemberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan melalui berbagai pelatihan teknis Manajemen.
- Diperlukan upaya untuk meningkatkan kepedulian antar program SKPD dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan antara lain melalui peningkatan frekwensi rapat koordinasi, baik secara berkala maupun insidental.
- Dinas/Instansi pelaksana program penanggulangan kemiskinan dan Pemda Kabupaten/Kota agar melakukan akurasi data KK miskin di Sumatera Barat.
- Upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara sistemik dan komprehensif mulai dari perencanaan, tujuan dan sasaran , target group, pelaksanaan operasional sampai pada pemantauan dan evaluasi.
- Untuk mencapai keberhasilan Program SPMN secara optimal, Pemda kabupaten dan kota perlu membentuk tim pembina/teknis baik di kabupaten/kota maupun di kecamatan, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh SPMN dalam mengembangkan usaha mandiri dan pengabdian masyarakat dapat dicarikan alternatif pemecahannya.
- Menumbuh kembangkan lembaga teknologi dalam rangka mendorong upaya peningkatan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan, mengembangkan dan penguasaan TTG.
- Mengintensifkan peranan lembaga koordinasi pembinaan TTG disetiap jajaran pemerintahan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna di Kecamatan serta Warung Teknologi di Nagari/Desa/Kelurahan dalam rangka mendorong peningkatan ekonomi masyarakat serta perluasan lapangan kerja melalui pemanfaatan TTG.
- Meningkatkan kerjasama serta memfasilitasi keterlibatan aktif pelaku pembangunan dalam rangka mendorong pemanfaatan dan pengembangan TTG ataupun berbagai lembaga yang peduli maupun yang bergerak dibidang pemanfaatan TTG seperti Perguruan

Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Badan Usaha/Perbengkelan.

- Peningkatan pengetahuan aparat pembina dan pengelola dalam pelaksanaan program Pendayagunaan TTG melalui pelatihan-pelatihan sosialisasi dan lain sebagainya, Meningkatkan dan memantapkan koordinasi, kerjasama dan keterpaduan program antara Dinas/Instansi Pemerintah/Swasta yang terkait dalam peningkatan hasil usaha produksi masyarakat pengguna TTG.
  - Menggalakkan kampanye dan promosi TTG melalui media elektronika, cetak, leaflet/brosur dan pameran/Gelar Teknologi.
  - Pembinaan usaha produksi masyarakat secara utuh dan komprehensif mulai dari pengadaan bahan baku sampai pada pemasaran produk dengan harapan dapat memberikan nilai tambah produktivitas dan hasil produksi, sekaligus mengurangi angka kemiskinan di daerah.
- Bidang Kerjasama dan Pengembangan Kawasan Perdesaan.
- Memberikan Fasilitas Pembinaan ke Kab/Kota dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan Fasilitas Umum melalui KPP Fasum.
  - Untuk menumbuh kembangkan KPP Fasum dan meningkatkan motivasi KPP Fasum yang telah dibentuk Nagari/Desa/Kelurahan telah diadakan Evaluasi dan Penilaian KPP Fasum secara berjenjang dan memberikan hadiah bagi yang mempunyai prestasi baik.
  - Memerlukan Fasilitas Pembinaan ke Kab/Kota dan Sosialisasi dalam upaya memberi pengertian kepada Aparat dan masyarakat dalam pelestarian alam di pesisir pantai, agar masyarakat dapat menjaga pelestarian alam dan mengembangkan tanaman bakau dan lainnya yang bersifat produktif.
  - Melakukan Fasilitas Pembinaan Perencanaan, dan Operasional dalam penanganan Pamsimas di Nagari/Desa/Kel.
  - Mendayagunakan peran Kuliah Kerja Nyata mahasiswa sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mendorong peningkatan ekonomi masyarakat dan pemanfaatan TTG.

- Menumbuhkembangkan TTG yang berbasis sosial budaya masyarakat untuk menunjang pemanfaatan potensi dan produk unggulan daerah.
- Memberikan Fasilitas dan mengkoordinasikan antar lintas sektor dan program dalam percepatan pembangunan melalui TMMD/N agar masyarakat tertinggal dapat secara berangsur-angsur diantaskan.

#### **14. Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana**

Urusan Pengendalian Pendudukan, Keluarga Berencana pada Tahun Anggaran 2018 mendapat alokasi APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.4.129.037.589,- dengan realisasi Rp.4.040.961.801,- (97,87%) untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

##### **a. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran.
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.
- 6) Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi, dengan kegiatan : Advokasi dan KIE Kesehatan Reproduksi Bagi Remaja.
- 7) Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak, dengan kegiatan :
  - Promosi dan Temu Karya Program Keluarga
  - Komunikasi, Informasi dan Edukasi KB.
- 8) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga, dengan kegiatan :
  - Peningkatan Kapasitas Konselor dan Pendidik Sebaya
  - Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
  - Peningkatan Kapasitas Ormas/Orsos dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- 9) Program Pelayanan Kontrasepsi, dengan kegiatan :
  - Pembinaan dan Penilaian Kegiatan Kesatuan Gerak PKK-KB-KES.

- Pengembangan Kampung KB sesuai Kearifan Lokal .
  - Pembinaan dan Pelayanan KB.
- 10) Program Peningkatan Pengendalian Penduduk, dengan kegiatan :
- Advokasi Pengendalian Dampak Pendudukan.
  - Grand Desain Pengendalian Kependudukan Provinsi Sumatera Barat.
  - Rakor Pengendalian Penduduk Skala Provinsi.
  - Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan.
  - Bimtek Strategi Pengendalian Penduduk.
  - Sosialisasi Dampak Kependudukan.

**b. Realisasi Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran sebesar Rp.1.394.715.892,- dan realisasi Rp.1.364.368.378,- (97,82%)
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran, dengan anggaran Rp.1.541.500.000,- dan realisasi sebesar Rp.1.519.329.142,- (98,56%).
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan anggaran Rp.35.769.600,- dan realisasi sebesar Rp.35.420.000,- (99,02%).
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan anggaran Rp.17.636.000,- dan realisasi sebesar Rp.17.470.000,- (99,06%).
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan, dengan anggaran Rp.378.368.097,- dan realisasi sebesar Rp.368.284.381,- (97,33%).
- 6) Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi, dengan anggaran Rp.50.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.49.610.000,- (99,22%). Dengan output : 90 orang pembinaan dan koordinasi terhadap OPD Kab/Kota.
- 7) Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak, dengan anggaran Rp.100.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.98.310.000,- (98,31%). Dengan output :
  - 3 KK, Model ASN yang mengikuti rangkaian kegiatan peringatan Harganas.
  - Penyerahan hadiah lomba KK Model.
  - 2 kali dialog interaktif.
- 8) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina

Keluarga, dengan anggaran Rp.150.000.00,- dan realisasi sebesar Rp.145.172.800,- (96,78%). Dengan output :

- 36 orang peserta pembina dan konseler dan pendidikan sebaya yang dilatih.
  - Terlaksananya 3 kampung KB.
  - 2 kali sosialisasi dengan 68 orang.
- 9) Program Pelayanan Kontrasepsi, dengan anggaran Rp.155.000.00,- dan realisasi sebesar Rp.152.476.800,- (98,37%). Dengan output :
- 17 Kab/Kota dengan 4 kategori penilaian.
  - 6 Kampung KB sesuai kearifan lokal.
  - Terlaksananya pembinaan, pelayanan dan Advokasi KB pada 19 Kab/Kota.
- 10) Program Peningkatan Pengendalian Penduduk, dengan anggaran Rp.306.048.000,- dan realisasi sebesar Rp.290.520.300,- (94,93%). Dengan output :
- 31 orang/19 Kab/Kota yang teradvokasi.
  - 1 laporan persiapan penyusunan grand desain pengendalian kependudukan.
  - 2 kali rakor 60 orang peserta.
  - 1 kali sosialisasi 157 orang peserta.
  - 60 orang peserta bimtek.
  - 19 Kab/Kota 1 kali sosialisasi 50 orang.

**c. Outcomes**

- 1) Meningkatnya motivasi remaja ttg perencanaan keluarga, KB dan kesehatan reproduksi, terciptanya Genre (Generasi Berencana) kreatif.
- 2) Tersebarinya informasi KB dan ketahanan keluarga menuju keluarga Sejahtera.
- 3) Meningkatnya pemahaman dan wawasan tentang KKBPK.
- 4) Peningkatan persentase konselor sebaya yang memahami Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), Terwujudnya konselor sebaya yang mampu memberikan layanan konseling dan rujukan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).
- 5) Meningkatnya ketahanan keluarga pra sejahtera menuju keluarga sejahtera.
- 6) Meningkatnya pengetahuan pengurus ormas, orsos tentang ketahanan keluarga.



- 7) Terpilihnya Kab/Kota Terbaik dalam pelaksanaan kegiatan PK-KKB-KES.
- 8) Terciptanya Keterpaduan Program Kependudukan, KB Pembangunan Keluarga di Kampung KB.
- 9) Meningkatnya kesertaan ber KB di Prov. Sumatera Barat.
- 10) Jumlah Kab/ Kota yang di Advokasi.
- 11) Meningkatnya kapasitas tim penyusun Grand Desain Pembangunan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat dan Aparatur SKPD penyusun GDPK Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
- 12) Terciptanya kesatuan aksi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota dalam pelaksanaan pengendalian pendduduk.
- 13) Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan, Aparatur yang diberi sosialisasi Berwawasan Kependudukan.
- 14) Meningkatnya kemampuan teknis Aparatur di bidang strategi pengendalian penduduk.
- 15) Jumlah Aparatur yang mengikuti sosialisasi Penduduk.

**d. Permasalahan dan Solusi**

- 1) Permasalahan
  - Belum teradvokasinya OPD KB 19 Kab/Kota untuk melakukan pembinaan Genre di Kab/Kota masing-masing.
  - Belum optimalnya pemahaman tentang KB oleh peserta ASN KK Model dan OPD Lingkup Provinsi, sehingga partisipasi ASN KK Model belum sesuai dengan yang diharapkan.
  - Belum tersedianya program KKBPK sesuai kearifan lokal.
  - OPD Kab/Kota tidak memiliki kegiatan peningkatan kapasitas konselor dan pendidik sebaya sehingga kegiatan ini belum optimal diikuti Kab/Kota.
  - Masih rendahnya SDM masyarakat kampung KB dan kurangnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di kampung KB.
  - Belum teridentifikasinya Ormas / Orsos yang ada di Sumatera Barat yang akan mengikuti pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
  - Belum seragamnya hadiah yang diberikan OPD terkait kepada pemenang penilaian KKG PKK KB-Kesehatan.

- Masih rendahnya OPD Terkait Provinsi (Tim Terintegrasi Provinsi) yang mengintegrasikan program / kegiatannya di Kampung KB Terintegrasi (kakabeti) 2018.
- Belum optimalnya pembinaan dan koordinasi yang dilakukan oleh Provinsi sehingga belum dapat memfasilitasi permasalahan yang dihadapi oleh Kab/Kota.
- Masih kurangnya pemahaman pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terkait masalah pengendalian penduduk.
- Belum adanya data yang akurat terkait masalah kependudukan di kabupaten/kota, yang mempunyai peran penting bagi semua pihak dalam mengambil kebijakan.
- Belum sinerginya program/kegiatan pengendalian penduduk dengan OPD dan stakeholder lainnya.
- Belum adanya koordinasi dan pembinaan terkait dengan pengendalian penduduk.
- Belum adanya penyamaan persepsi sehingga belum ada kesepakatan untuk membentuk wadah forum koordinasi terkait pengendalian penduduk.

## 2) Solusi

- Perlu advokasi ke 19 Kab/Kota pada OPD PPKB di Kab/Kota agar mengalokasikan anggaran untuk pembinaan kepada PIK Remaja di Kab/Kota.
- Perlunya dilakukan sosialisasi tentang KB kepada seluruh OPD lingkup provinsi dan memberikan pembekalan terhadap para peserta ASN KK Model sehingga partisipasi peserta ASN KK Model meningkat.
- Tersedianya program / kegiatan KKBPK sesuai kearifan lokal yang sinergi dari Provinsi dengan Kab/Kota.
- Perlu sinkronisasi program/kegiatan Provinsi dengan Kab/Kota sehingga kegiatan Provinsi diikuti oleh Kab/Kota.
- Intervensi program kegiatan pembinaan dan pemberdayaan peningkatan kualitas SDM Kampung KB baik oleh DPPKBKPS maupun oleh OPD terkait lintas sektor lingkup Provinsi dan Kab/Kota.
- Lebih teliti mengidentifikasi Ormas / Orsos yang akan mengikuti pembinaan ketahanan keluarga termasuk jadwal pelaksanaan kegiatan.
- Penyeragaman hadiah dalam bentuk tabanas.

- Membuat surat himbauan dari Gubernur yang ditujukan kepada seluruh OPD terkait lintas sektor lingkup Provinsi untuk dapat mengintegrasikan program / kegiatannya di Kampung KB terintegrasi.
- Mengoptimalkan pembinaan dan koordinasi yang dilakukan oleh Provinsi sehingga Provinsi mampu memfasilitasi permasalahan yang dihadapi oleh Kab/Kota.
- Perlunya melakukan Sosialisasi, diseminasi dan advokasi tentang dampak tidak terkendalinya penduduk kepada semua pihak yang terkait, Perlunya pemetaan keberadaan penduduk terutama kaum milenials dimasing-masing daerah, mengusulkan kebijakan-kebijakan yang terintegrasi antara Dinas yang menanngani kependudukan dengan aspek yang berkaitan dengan kependudukan di daerah.
- Meningkatkan koordinasi dan menambah intensitas pelaksanaan kegiatan, Pelibatan Kabupaten/Kota dalam tahapan penyusunan GDPK Provinsi, Mengirimkan kembali surat permintaan nama tim penyusun GDPK Provinsi Sumatera Barat ke OPD dan instansi terkait, Membuat SK Tim Penyusun, Perlu dilakukan kembali rapat penyamaan persepsi tim penyusun pada tahapan penyusunan GDPK.
- Menciptakan hubungan kerjasama yang intens antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dan OPD teknis, Menambah jumlah personil dan meningkatkan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan, Memasukkan indikator sektor terkait dalam program perencanaan dan penganggaran, Kabupaten/Kota diharapkan melakukan pendataan masalah kependudukan, Melakukan sinkronisasi dan sinergitas progaram perencanaan pada masing-masing OPD terkait.
- Melakukan koordinasi dan monev terpadu dengan pemangku kepentingan dalam upaya penanganan masalah kependudukan.
- Kegiatan pengendalian akan diagendakan pada Rakor Gubernur sebagai salah satu isu strategis pembangunan.

## 15. Perhubungan

Urusan Perhubungan pada Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan anggaran sebesar Rp.13.183.353.299,- dan realisasi Rp.12.351.547.152,- (93,69%), untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

**a. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur.
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- 4) Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- 6) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian, dengan kegiatan:
  - Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRL) Perlintasan Sebidang Jalan Kereta Api pada Ruas Jalan di Sumatera Barat.
  - Sosialisasi Keselamatan Kereta Api.
  - Pengembangan/ Pembangunan Sarana Prasarana Kereta Api Sumatera Barat.
  - Pengumpulan dan analisis data angkutan kereta api di Sumatera Barat.
- 7) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas, dengan kegiatan:
  - Pengadaan dan Pemasangan (Rambu, Marka, *Guardrail*, Deliniator, Cermin Tikungan, *Traffict Light* dan *ZoSS*) Sarana Perlengkapan Jalan.
  - Pengadaan dan pemasangan prasarana lalu lintas pendukung *Tour de Singkarak*.
  - Pengadaan dan Pemasangan RPPJ (Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan) di Sumatera Barat.
  - Pemeliharaan/perawatan (Rambu, marka, *guardrail*, *deliniator* dan *traffict light*) sarana perlengkapan jalan.
  - Survey Perlengkapan / Fasilitas Lalu lintas jalan.
  - Evaluasi dan Monitoring Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi.
- 8) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut, dengan Kegiatan :
  - Pengawasan pelayanan angkutan laut perintis.
  - Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pelabuhan Tua Pejat.
  - Pembinaan tentang keselamatan pelayaran.
  - Sosialisasi Penyesuaian Peraturan Terhadap Perusahaan Penunjang Angkutan Laut.

- 9) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, dengan kegiatan : Peningkatan Fasilitas Terminal Tipe B Pada Kabupaten / Kota.
- 10) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, dengan kegiatan:
  - Perawatan Sistem Informasi Perizinan Angkutan Umum (SIMPAU) .
  - Pemanfaatan kendaraan derek.
  - Pembinaan/pemilihan Unit Penguji Kendaraan Bermotor Teladan.
  - Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  - Pembinaan dan Pengawasan Bengkel Karoseri Industri Kendaraan Bermotor.
  - Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dengan Instansi Terkait.
  - Rapat Koordinasi Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional.
  - Forum Komunikasi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Lalu Lintas Angkutan Umum Prov.Sumbar.
  - Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan.
  - Pemeriksaan Perizinan Kendaraan Angkutan Penumpang Umum di Terminal tipe A dan B / di jalan.
  - Satuan Tugas Pengawasan Bermotor di jalan (STPJ).
  - Investigasi kecelakaan dan investigasi daerah rawan longsor dan bencana alam.
  - Audit Keselamatan Jalan.
  - Pemeriksaan Laik Jalan Angkutan Penumpang Umum.
  - Penghargaan Wahana Tata Nugraha.
  - Monitoring dan Pembinaan Penyelenggaraan Operasional Terminal Type B.
  - Pembinaan Pengusaha Angkutan Umum.
  - Pengumpulan dan analisis data volume lalu lintas jalan.
  - Dukungan Penyelenggaraan hari Pers Nasional.
  - Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan.
  - Monitoring dan Pembinaan Penyelenggaraan Angkutan Perintis.
  - Penyuluhan / sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**b. Realisasi Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran Rp.3.705.262.491,- dan realisasi sebesar Rp.3.516.318.948,- (94,90%).
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan anggaran Rp.2.202.473.504,- dan realisasi sebesar Rp.2.125.478.553,- (96,50%).
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan anggaran Rp.173.942.300,- dengan realisasi sebesar Rp.116.807.500,- (67,15%).
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan anggaran Rp.254.636.200,- dan realisasi sebesar Rp. 201.666.683,- (79,20%).
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan anggaran Rp.434.773.710,- dengan realisasi sebesar Rp.354.306.310,- (81,49%).
- 6) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian, dengan anggaran sebesar Rp.484.574.050,- dan realisasi sebesar Rp.372.491.902,- (76,87%), dengan output:
  - Terlaksana Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRL) perlintasan sebidang jalan kereta api pada ruas jalan di Sumatera Barat sebanyak 1 paket.
  - Jumlah peserta Sosialisasi Keamanan Keselamatan Kereta Api sebanyak 90 orang.
  - Terlaksananya Fasilitas atau Koordinasi Tim Percepatan Pembangunan KA di Sumbar.
  - Tersedianya Data Analisis Angkutan Perkeretaapian di Sumbar.
- 7) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas, dengan anggaran Rp.1.582.308.404,- dan realisasi sebesar Rp.1.502.557.692,- (94,96%), dengan output :
  - Terlaksananya penyusunan Dokumen Rencana Aksi Penurunan Gas Rumah Kaca Sektor Perhubungan sebanyak 1 dokumen.
  - Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan Perlengkapan / Fasilitas Lalu lintas sebanyak 1 dokumen.
  - Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan (Rambu, Marka, *Guardrail*, *Deliniator*, Cermin Tikungan, *Traffic*

- Light* dan ZoSS) Sarana Perlengkapan Jalan di 6 Kabupaten/Kota.
- Pemeliharaan/perawatan (Rambu, Marka, *Guardrail*, *Deliniator* dan *Traffic Light*) Sarana Perlengkapan Jalan sebanyak 3 paket.
  - Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Prasarana Lalu Lintas Pendukung *Tour de Singkarak* sebanyak lintasannya. dan
  - Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan RPPJ (Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan) di Sumatera Barat sebanyak 8 unit.
- 8) Program pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut dengan alokasi anggaran Rp.983.765.870,- dan realisasi sebesar Rp.975.709.065,- (99.18%), dengan output :
- Terlaksananya Pengawasan pelayanan angkutan laut perintis 4 trayek.
  - Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pelabuhan Tua Pejat sebanyak 1 dokumen.
  - Terlaksananya pembinaan tentang keselamatan pelayaran 200 orang peserta.
  - Jumlah peserta Sosialisasi Penyesuaian Peraturan Terhadap Perusahaan Penunjang Angkutan Laut sebanyak 30 orang.
- 9) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, dengan alokasi anggaran Rp.243.725.560,- dan realisasi sebesar Rp.236.357.834,- (96,98%), dengan output : Terlaksananya Peningkatan Fasilitas Prasarana Terminal Tipe B di Sumbar sebanyak 4 terminal.
- 10) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dengan anggaran sebesar Rp.3.117.891.210,- dan realisasi sebesar Rp.2.949.852.665,- (94,61%), dengan output :
- Terlaksananya perawatan Sistem Informasi Perizinan Angkutan Umum (SIMPAU) sebanyak 1 paket.
  - Jumlah pemakaian kendaraan derek untuk membantu kasus kecelakaan guna kelancaran lalu lintas sebanyak 15 kali.
  - Terlaksananya Penilaian Unit Penguji Kendaraan Bermotor sebanyak 18 unit di Kab/Kota.

- Terlaksananya Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebanyak 30 Orang Pelajar Tingkat SLTA.
- Terlaksananya pembinaan dan pengawasan bengkel karoseri industri kendaraan sebanyak 25 orang pengusaha dan bengkel karoseri.
- Jumlah pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dengan instansi terkait sebanyak 12 kali dalam setahun.
- Jumlah peserta Rapat Koordinasi Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Tingkat Provinsi sebanyak 50 orang peserta.
- Terlaksananya Forum Komunikasi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang LLAJ Prov. Sumbar 1 kali.
- Terlaksananya Forum Lalin Angkutan Jalan Provinsi Sumbar 2 kali.
- Terlaksananya pemeriksaaan perizinan kendaraan angkutan penumpang umum di terminal Tipe B di jalan sebanyak 3 kali.
- Terlaksananya pelayanan Satuan Tugas Pengawasan Bermotor di Jalan (STPJ) selama 1 tahun.
- Terlaksananya *update* data daerah rawan kecelakaan longsor bencana alam dan data kecelakaan di ruas jalan nasional dan provinsi.
- Terauditnya daerah rawan kecelakaan lalin sebanyak 2 titik rawan.
- Jumlah pemeriksaan laik jalan angkutan penumpang umum sebanyak 11 kali.
- Terlaksananya seleksi Penghargaan Wahana Tata Nugraha sebanyak 15 Kabupaten/Kota.
- Tersedianya laporan hasil monitoring dan pembinaan penyelenggaraan operasional terminal tipe B di 8 Kabupaten/Kota.
- Terlaksananya pembinaan pengusaha angkutan umum di Prov. Sumbar.
- Terlaksananya pengumpulan dan analisis *database* pelayanan jasa angkutan jalan 1 kali.
- Terlaksananya dukungan angkutan transportasi peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2018 sebanyak 1 kali.



- Terlaksananya Pemilihan Abdi Yasa Teladan sebanyak 36 Orang Tingkat Provinsi dan 2 Orang ke Tingkat Nasional.
- Tersedianya Laporan Monitoring dan Pembinaan Penyelenggaraan Angkutan Perintis sebanyak 1 laporan.
- Jumlah peserta Penyuluhan/Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebanyak 36 orang (masyarakat komunitas dan 10 sekolah).

**c. Outcome**

- 1) Meningkatnya Mutu Pelayanan Jasa Transportasi, Sarana dan Prasarana Lalu Lintas yang Berkeselamatan, dengan indikator :
  - Ratio menurunnya angka kecelakaan lalu lintas tahun 2018 sebesar 2,05, sedikit menurun dibanding Tahun 2017 dengan ratio 2,53. Dimana jumlah kecelakaan lalu lintas pada tahun 2018 sebanyak 2.955 kejadian yang terdiri dari korban kecelakaan meninggal dunia sebanyak 473 orang, luka berat sebanyak 292 orang dan korban luka ringan sebanyak 2.190 orang.
  - Persentase peningkatan sarana prasarana perhubungan tahun 2018 dengan target 40%, terealisasi dengan capaian 100%.
  - Jumlah peningkatan MRL pada perlintasan sebidang jalur kereta api dengan jalan raya pada Tahun 2018 dengan realisasi 1 paket (capaian 100%), sama dengan tahun 2017.
- 2) Meningkatnya Aksesibilitas Pelayanan Transportasi Umum, dengan indikator :
  - Peningkatan keterbukaan wilayah terpencil pada Tahun 2018 dengan target 1 pelabuhan terealisasi 100%.
  - Jumlah pelayanan angkutan udara untuk keselamatan penerbangan jemaah haji, pada Tahun 2018 terealisasi 6.637 orang, meningkat dibanding Tahun 2017 yang berjumlah 6.349 orang (capaian Tahun 2018 sebesar 100%).
- 3) Tersedianya Fasilitas Prasarana Terminal Tipe B di Sumatera Barat.
- 4) Perubahan perilaku Masyarakat & Pelajar dalam berlalu Lintas.
- 5) Meningkatnya Keselamatan dan Keselamatan lalin bagi Peserta Turde Singkarak.
- 6) Menurunnya Korban Laka usia Muda.

- 7) Tersedianya Pelayanan Angkutan Printis yang Handal.
- 8) Terciptanya Ketaatan dan kepatuhan para Pengusaha & Operator kendaraan Angkutan Penumpang.
- 9) Lancarnya Penerbangan Angkutan perintis.
- 10) Tersedianya Buku Statistik Perhubungan.

**d. Permasalahan dan Solusi**

- 1) Permasalahan :
  - Mutu pelayanan jasa transportasi, sarana dan prasarana lalu lintas yang berkeselamatan masih perlu ditingkatkan.
  - Perlunya rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ.
  - Prilaku /ketaatan dan kepatuhan para pengusaha & operator kendaraan angkutan penumpang masih perlu ditingkatkan.
  - Perubahan perilaku masyarakat dan pelajar dalam berlalulintas untuk lebih taat dengan aturan masih perlu ditingkatkan.
  - Perlunya menjaga kelancaran transportasi darat, laut dan udara.
- 2) Solusi :
  - Meningkatkan mutu pelayanan jasa transportasi, sarana dan prasarana lalu lintas yang berkeselamatan.
  - Melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ.
  - Memberikan bimtek/sosialisasi terhadap para pengusaha dan operator kendaraan angkutan penumpang untuk dapat patuh/mentaati aturan berkendara yang benar.
  - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelajar dalam berlalulintas untuk lebih taat dengan aturan.
  - Meningkatkan dan menjaga kelancaran transportasi darat, laut dan udara.

**16. Komunikasi dan Informatika**

Urusan Komunikasi dan Informatika pada Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan anggaran sebesar Rp.12.482.011.970,- dan realisasi Rp.11.799.917.713,- (94,54%), untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

**a. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- 2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur.
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- 6) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi, dengan kegiatan :
  - Penyelenggaraan Ekosistem TIK.
  - Kerjasama *Smart Province*.
- 7) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi, dengan kegiatan :
  - Pengembangan Sumber Daya TIK.
  - SDM Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- 8) Program Informasi dan Komunikasi Publik, dengan kegiatan:
  - Penyelenggaraan Kompilasi Produk Administrasi.
  - Pelayanan Permintaan informasi Publik.
  - Layanan *Website* Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan Pemda.
  - Literasi Informasi Media Komunikasi.
- 9) Program Keterbukaan Informasi, dengan kegiatan :  
Operasionalisasi Komisi Informasi.
- 10) Program Pengelolaan e-*Government* Pemerintah Daerah, dengan kegiatan :
  - Implementasi e-*Government* Provinsi Sumatera Barat.
  - Koordinasi Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah.
  - Layanan Nama Domaian dan Sub Domaian bagi Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
  - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Rangka Persandian untuk Pengamanan Informasi milik Pemerintah Daerah.
  - Layanan Infrastruktur Dasar *Data Center, Disaster Recovery Center* dan TIK.
  - Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah.
  - Layanan Akses *Internet* dan *Intranet* Pemerintah Daerah.
  - Pengendalian dan Koordinasi Infrastruktur TIK.
  - Pengembangan dan Operasional *Community Access Point*.

- 11) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa, dengan kegiatan :
  - Penyelenggaraan Diseminasi Informasi.
  - Pemilihan Media Tradisional Terbaik.

**b. Realisasi Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran Rp.1.404.120.379,- dan realisasi sebesar Rp.1.340.747.612,- (95,49%).
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan anggaran Rp.2.077.456.315,- dan realisasi sebesar Rp.1.952.703.118,- (93,99%).
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan anggaran Rp.54.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.49.968.000,- (92,53%).
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan anggaran Rp.42.630.000,- dan realisasi sebesar Rp.42.620.000,- (99,98%).
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan anggaran Rp.518.796.306,- dan realisasi sebesar Rp.507.987.895,- (97,92%).
- 6) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi, dengan anggaran Rp.83.991.000,- dan realisasi sebesar Rp.82.008.200,- (97,64%), dengan output : Terlaksananya pemenuhan kebutuhan pendataan dan koordinasi infrastruktur komunikasi daerah *blankspot* dan *smart city*.
- 7) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi, dengan anggaran Rp.90.258.987,- dan realisasi sebesar Rp.81.221.471,- (89,99%), dengan output :
  - Terbentuknya Dewan TIK, terlaksananya bimtek sertifikasi kompetensi TIK dengan jumlah peserta 50 orang.
  - Terlaksananya FGD/Semiloka oleh dewan TIK 1 (satu) kali dengan target kineja nilai SPBE 2.6.
- 8) Program Informasi dan Komunikasi Publik, dengan anggaran Rp.917.664.134,- dan realisasi sebesar Rp.829.452.814,- (90,39%), dengan output :
  - Terlaksananya 4 kali pertemuan dengan *stakeholder* sumber data statistik sektoral.

- Tersedianya 60 exemplar buku data statistik sektoral, 1 buah naskah rencana induk /rencana aksi/ naskah akademis statistik.
  - Tersediaannya Daftar Informasi Publik (DIP) dan Pelayanan Informasi Publik melalui PPID (Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi).
  - Tersedianya daftar informasi publik dan pelayanan informasi publik melalui PPID.
  - Terlaksananya literasi pendidikan *online* di 19 Kab/Kota, 4 lomba literasi, 2 konten, buku panduan HPN serta pembinaan portal info public.id.
- 9) Program Keterbukaan Informasi, dengan anggaran Rp.2.360.281.141,- dan realisasi sebesar Rp.2.192.811.210,- (92,90%), dengan output : Pengelolaan Daftar Informasi Publik dan Pelayanan Informasi di OPD Provinsi Sumbar serta 19 Kab/kota.
- 10) Program Pengelolaan *e-Government* Pemerintah Daerah, dengan anggaran Rp.3.333.746.094,- dan realisasi sebesar Rp.3.186.387.184,- (95,58%), dengan output :
- Terlaksananya Implementasi *e-Government* Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui :
    - peningkatan implementasi e-Gov dilingkungan Pemprov.sumbar dengan skor G 2.6.
    - Bimtek pelajar sebagai enterpreneur muda dibidang penjualan digital sebanyak 50 orang, Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dan website pemerintah daerah.
    - Koordinasi pemanfaatan aplikasi generik dengan kab/kota.
    - penyelenggaraan 3 kali sosialisasi/bimbingan teknis implementasi e-Government.
    - pembayaran gaji tenaga ahli teknologi informasi Provinsi Sumatera Barat kepada 15 orang.
    - proses pembentukan peraturan daerah.
  - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah melalui :
    - Penerbitan sertifikat elektronik dan tanda tangan digital bagi 40 % OPD di Pemprov. Sumbar.
    - monitoring 8 kab/kota yang mempunyai peralatan sandi.

- Sosialisasi dan sinkronisasi persandian sebanyak 1 kali.
- Koordinasi Forum Komunikasi Sandi sebanyak 4 kali.
- Penyusunan 1 dokumen Naskah Akademis Penyelenggaraan Persandiaan Daerah.
- Pembinaan pelaksanaan persandian di kab/kota.
- Layanan Nama Domaian dan 46 Sub Domaian bagi Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Rangka Persandian untuk Pengamanan Informasi milik Pemerintah Daerah melalui :
  - Peningkatan dan pembinaan 2 orang SDM pengelolaan persandian.
  - FGD 3 kali.
  - Pendataan Fungsional Sandi Daerah di 4 kab/kota.
- Terlaksananya layanan infrastruktur dasar, *data centre*, *disaster recovery* dan TIK.
- Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan koordinasi infrastruktur/jaringan TIK selama 12 bulan.
- Layanan akses internet dan intranet pemerintah daerah selama 12 bulan.
- Terlaksananya pengendalian/ monitoring serta koordinasi infrastruktur TIK di OPD provinsi dan kab/kota.
- Terlaksananya pengendalian/monitoring serta Koordinasi Pengembangan dan Operasional *Community Access Point*.
- 11) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa, dengan alokasi anggaran Rp.1.599.067.614,- dan realisasi sebesar Rp.1.534.009.609,- (95,93%), dengan output :
  - Terlaksananya desiminasi informasi di 7 kab/kota, dialog khusus 8 kali, serta pengadaan 1 unit videotron (di Masjid Raya Sumbar) sekaligus mendukung HPN.
  - Terlaksananya pemilihan media tradisional terbaik Tingkat Sumbar, 17 Kab/Kota partisipasi pada sumbar expo 2018 di Makasar.

### c. Outcomes

- 1) Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan penerapan *e-government* pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dengan indikator :

- Indeks Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi pada tahun 2018 sebesar 82,17%, meningkat dibanding tahun 2017 yang hanya 64,18.
- Indeks *e-government* Pemerintah Provinsi (PeGi) pada tahun 2017 dengan skor 2,43%, sedangkan untuk tahun 2018 indeksnya baru keluar bulan Maret 2019.

Penilaian PeGi berpindah kewenangannya dari Kementerian Komunikasi dan Informatika ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Hasil penilaian terhadap PeGi tahun 2018 akan dikeluarkan bulan Maret 2019.

- 2) Untuk sarana komunikasi audio visual di Sumatera Barat adanya peningkatan pada tahun 2018 menjadi 27 siaran Televisi dibanding pada tahun 2017 jumlah sarana komunikasi audio visual sebanyak 23 siaran Televisi.
- 3) Berkurangnya jumlah sarana komunikasi audio di Sumatera Barat sebanyak 3 siaran radio, tahun 2018 sebanyak 59 siaran Radio, sedangkan tahun sebelumnya (2017) sebanyak 62 Siaran Radio. Hal tersebut dikarenakan berkurangnya minat masyarakat dan didukung perkembangan kemajuan ke arah digitalisasi, dimana masyarakat sudah banyak beralih untuk menonton televisi dari pada mendengar radio.
- 4) Tersedianya SDM di bidang Komunikasi dan informasi/*e-government* pemerintah provinsi yang berkualitas tahun 2018 sebanyak 17 orang, meningkat dibanding tahun 2017 yang berjumlah 14 orang.
- 5) Tersedianya data/informasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ([www.sumbarprov.go.id](http://www.sumbarprov.go.id)) yang dapat diakses masyarakat yang bersumber dari OPD Provinsi Sumatera Barat sebanyak 2.888 *content*. Jumlah akses tahun 2018 sebanyak 2.888 *content*, menurun dibanding tahun 2017 (3.691 *content*). Hal ini disebabkan jumlah operator OPD tahun 2018 berkurang (efisiensi).
- 6) Jumlah aplikasi permintaan OPD yang terselesaikan tahun 2018 sebanyak 46 Aplikasi/*website*, meningkat dibanding 2017 yang terselesaikan sebanyak 40 aplikasi/*website*.

#### **d. Permasalahan dan Solusi**

- 1) Permasalahan :
  - Perlunya ditingkatkan layanan ketersediaan data/informasi yang dapat diakses masyarakat yang bersumber dari OPD Provinsi Sumatera Barat.

- Jumlah SDM di bidang Komunikasi dan informasi/ *e-government* pemerintah provinsi yang berkualitas perlu ditambah, mengingat banyak banyaknya permintaan pembuatan aplikasi dari OPD.

2) Solusi :

- Menyediakan data/informasi *uptodate* Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui portal [www.sumbarprov.go.id](http://www.sumbarprov.go.id), yang dapat diakses masyarakat bersumber dan diperbaharui oleh OPD Provinsi Sumatera Barat sebanyak 2.888 konten.
- Telah dilakukan penambahan SDM di bidang Komunikasi dan Informasi/ *e-government* pemerintah provinsi yang berkualitas sebanyak 3 (tiga) orang. Sehingga jumlah SDM tahun 2018 sebanyak 17 orang, meningkat dibanding tahun 2017 yang berjumlah 14 orang.
- Mengupayakan semaksimal mungkin penyelesaian aplikasi permintaan OPD. Pada tahun 2018 terselesaikan sebanyak 46 Aplikasi/*website*, meningkat dibanding 2017 yang terselesaikan sebanyak 40 aplikasi/*website*.

## 17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mendapat dengan anggaran sebesar Rp.16.543.414.400,- dan realisasi Rp.14.888.686.043,- (90%), untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

### a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- 6) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, dengan 27 kegiatan :
  - Sosialisasi Perkoperasian di Lokasi TMMD/N.
  - Pembenahan koperasi Tidak Aktif.
  - Penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award.
  - Pelatihan Penataan Kelembagaan Koperasi Sektor Riil.
  - Pelatihan Perkoperasian Bagi Dai.
  - Pelatihan Perkoperasian Bagi Wartawan.



- Pelatihan Akuntansi Bagi Pengurus/Pengelola Koperasi Berbasis IT.
- Pengembangan dan Peningkatan Data dan Informasi.
- Pembinaan Kelembagaan Koperasi.
- Bimbingan Teknis Pengawasan Koperasi Bagi Pejabat Pengawas Koperasi.
- Pelatihan Pengembangan Kelembagaan Koperasi bagi Pengurus Koperasi.
- Pelatihan Perkoperasian Bagi Tenaga Penyuluhan Koperasi Lapangan (PPKL).
- Pembinaan, Pengawasan dan Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi.
- Pelatihan Pengawasan Koperasi bagi Pejabat Pengawas.
- Pembinaan dan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.
- Pembinaan, Pengawasan dan Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.
- Monitoring dan Evaluasi Penerapan dan Sanksi Bagi Koperasi.
- Peningkatan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi.
- Sosialisasi dan Peningkatan Peran Koperasi dalam Pengembangan Kelompok Usaha strategis.
- Familirization Trip Berbasis Koperasi.
- Penyusunan Naskah Akademis Perkembangan Koperasi dan UKM.
- Pelatihan Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT) bagi Pengurus/Pengelola Koperasi (DAK).
- Pelatihan Penguatan Kelembagaan Koperasi Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi (DAK).
- Pengembangan Sumber Daya Manusia Bagi Pengurus/Pengawas dan Pengelola KSP/KSPPS Provinsi Sumatera Barat (DAK).
- Pelatihan Akuntansi Keuangan Koperasi bagi Pengurus dan Pengawas (DAK).
- Pelatihan Sertifikasi Calon Dewan Syariah KSPPS/USPPS (DAK).
- Pelatihan Standar Operasional Prosedur (SOP) Koperasi (DAK).

- 7) Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Koperasi dengan kegiatan :
- Peningkata Usaha Ritail Koperasi.
  - Pembinaan Pelaksanaan Koperasi Pariwisata.
  - Pembinaan Peningkatan Daya Saing Koperasi/KUD Sektor Pertanian.
  - Pengembangan Produk Unggulan Daerah Dengan Pendekatan Dengan *One Vilagge One Product* Melalui Koperasi.
  - Pengembangan Usaha Koperasi Melalui Gerakan Masyarakat sadar Koperasi(GEMASKOP).
  - Peningkatan Peran Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pola Syariah.
  - Pembinaan dan Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.
  - Peningkatan dan Evaluasi Permodalan Koperasi.
  - Pelatihan Pengembangan Usaha Koperasi Sektor Riil (DAK).
- 8) Program Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing UMKM, dengan kegiatan :
- Peningkatan Gerakan Terpadu Pensejahteraan UMKM Sumatera Barat.
  - Pembekalan Keterampilan Bagi Wirausaha Baru.
  - Peningkatan akses pembiayaan UMKM ke Perbankan dan Lembaga Non Bank.
  - Pelatihan Teknis Penyusunan Proposal bagi Pelaku UMKM.
  - Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan.
  - Pelatihan Kewirausahaan Bagi UKM Kerajinan Sumatera Barat.
  - Pelatihan Pemasaran *Online* bagi UKM Kerajinan Sumatera Barat.
  - Pelatihan Manajemen Usaha bagi UKM Kerajinan Sumatera Barat.
  - Perkuatan produk UMKM.
  - Partisipasi Promosi Produk UMKM.
  - Pengembangan UMKM Kerajinan Sumatera Barat.
  - Sosialisasi dan Koordinasi Pendaftaran Merk dan Sertifikat Halal dan PIRT.

- Perkuatan dan Pengembangan Produk UKM Binaan Sumatera Barat.
- Pelatihan Pengembangan Usaha bagi UMKM.
- Pelatihan Kewirausahaan bagi Koperasi dan UKM.
- Pelatihan Teknik Pembangan Usaha bagi UMK di Kawasan Wisata (DAK).
- Pelatihan Pengembangan Pemasaran berbasis IT bagi UMKM (DAK).
- Pelatihan Pembukuan bagi Pelaku UKM (DAK).
- Pelatihan Pegolahan Pangan Berbasis Umbi-Umbian dan Pisang bagi UMKM (DAK).
- Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Tenaga Pendamping (DAK).

**b. Realisasi Program dan Kegiatan**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran Rp.2.429.719.450,- dan realisasi sebesar Rp. 2.077.045.868,- (85,49%).
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan anggaran Rp.1.536.966.000,- dan realisasi sebesar Rp.1.407.556.327,- (91,58%).
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan anggaran Rp.66.096.000,- dan realisasi sebesar Rp.57.350.000,- (86,77%).
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan anggaran Rp.71.364.000,- dan realisasi sebesar Rp.65.932.000,- (92,39%).
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan, dengan anggaran Rp.468.114.350,- dan realisasi sebesar Rp.421.740.373,- (90,09%).
6. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, dengan anggaran Rp.3.770.479.350,- dan realisasi sebesar Rp.3.390.847.913,- (89,93%), dengan output :
  - Jumlah peserta yang mendapat penyuluhan/sosialisasi perkoperasian di 4 lokasi TMMD/N (Kota Solok, Kab. Sijunjung, Kab. Tanah Datar dan Kab. Pesisir Selatan) sebanyak 120 orang.
  - Jumlah peserta pembenahan koperasi tidak aktif sebanyak 180 orang.
  - Jumlah koperasi ikut seleksi koperasi berprestasi sebanyak 20 koperasi.

- Jumlah peserta pelatihan penataan kelembagaan koperasi sektor riil sebanyak 160 orang ( 4 angkatan ) yang telah dilaksanakan di Hotel Campago Bukittinggi.
- Jumlah peserta pelatihan Perkoperasian bagi Da'i sebanyak 59 orang dari target 60 orang (2 Angkatan di UPTD Balatkop).
- Jumlah peserta pelatihan Perkoperasian bagi wartawan sebanyak 60 orang (2 Angkatan di UPTD Balatkop).
- Jumlah peserta Pelatihan Akuntansi bagi pengurus/pengelola koperasi berbasis IT sebanyak 30 orang pengurus/pengelola koperasi di 19 kab/kota.
- Tersusunnya Buku Database Koperasi Tahun 2018.
- Rapat koordinasi antara notaris dengan dinas yang membidangi koperasi dan UKM kabupaten/kota se-Sumatera Barat, Rapat revitalisasi kelembagaan koperasi, Sosialisasi revitalisasi kelembagaan koperasi di 8 Kab/Kota kepada pengurus dan pengawas koperasi, Monitoring dan tindak lanjut revitalisasi kelembagaan koperasi di 8 kab./kota.
- Jumlah peserta Bimtek pengawasan bagi pejabat pengawas koperasi 141 orang.
- Jumlah peserta pelatihan Pengembangan Kelembagaan Koperasi bagi Pengurus Koperasi sebanyak 30 orang.
- Jumlah peserta Pelatihan Perkoperasian bagi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) sebanyak 60 orang (2 angkatan).
- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kelembagaan Koperasi (LHP) dan Tindaklanjut pengawasan/uji petik pengawasan sebanyak 40 koperasi, Rapat Koordinasi Pengawasan sebanyak 1 kali.
- Jumlah peserta Pelatihan Pengawasan Koperasi bagi Pejabat Pengawas sebanyak 60 orang di UPTD Balatkop;
- Pembinaan dan pelaksanaan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam koperasi, dengan hasil data sehat dan cukup sehat di Sumbar sebanyak 649 koperasi.
- Jumlah LHP Pengawasan/Uji Petik Pengawasan Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Tindak lanjut sebanyak 36 koperasi, Rapat Koordinasi Pengawasan sebanyak 1 kali;
- Jumlah Laporan Uji petik Monitoring dan Evaluasi Penerapan Peraturan dan Sanksi Bagi Koperasi sebanyak 41 koperasi.

- Jumlah peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi sebanyak 260 pembina, pengurus/pengawas koperasi di 12 kabupaten/ kota.
  - Jumlah peserta sosialisasi perkoperasian pada kelompok UP2K di 17 Kab/Kota sebanyak 340 orang.
  - Jumlah media cetak/*online Familiarization Trip* untuk mengenalkan potensi koperasi dan UKM potensial sebanyak 5 media dengan mengunjungi 6 Kab/Kota (Kab. Solok, Kab. Dharmasraya, Kab. Agam, Kab. Lima Puluh Kota, Kota Sawahlunto, dan Kab. Pasaman Barat).
  - Terlaksananya Penyusunan Naskah Akademis Perkembangan Koperasi dan UKM sebanyak 1 buku.
  - Jumlah peserta Pelatihan Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT) bagi Pengurus/Pengelola Koperasi (DAK) sebanyak 60 orang ( 2 angkatan).
  - Jumlah peserta Pelatihan Penguatan Kelembagaan Koperasi bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi (DAK) sebanyak 60 orang (2 angkatan).
  - Jumlah peserta Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bagi Pengurus/Pengawas dan Pengelola KSP/KSPPS Provinsi Sumatera Barat (DAK) sebanyak 30 orang.
  - Jumlah peserta Pelatihan Akuntansi Keuangan Koperasi bagi Pengurus dan Pengawas (DAK) sebanyak 90 orang (3 angkatan).
  - Jumlah peserta Pelatihan Sertifikasi Calon Dewan Syariah KSPPS/USPPS (DAK) sebanyak 44 orang dari target 60 orang ( 2 angkatan).
  - Jumlah peserta Pelatihan Standar Operasional Prosedur (SOP) Koperasi (DAK) sebanyak 83 orang dari target 90 orang ( 3 angkatan) .
7. Program Peningkatan Dan Pengembangan Daya Saing Koperasi, dengan anggaran Rp.1.587.547.350,- dan realisasi sebesar Rp.1.504.547.928,- (94,77%), dengan output :
- Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Usaha Rital Koperasi dalam bentuk bimtek dengan 55 orang peserta selama 2 hari, rapat koordinasi sebanyak 60 orang peserta, dan pembinaan ke lapangan di 19 kab/kota.
  - Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Koperasi Pariwisata dalam bentuk : bimtek kepada 20 koperasi di

12 kabupaten/kota, Bimtek perkoperasian di lokasi wisata yang diikuti oleh 50 orang peserta.

- Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Daya Saing Koperasi/KUD Sektor Pertanian dalam bentuk bimbingan teknis (bimtek) sebanyak 51 orang peserta, dan pembinaan ke lapangan sebanyak 18 kab/kota.
- Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Pengelola Produk Unggulan Daerah (PUD) dengan Pendekatan *One Village One Product* OVOP di 19 kabupaten/kota.
- Terlaksananya Pengembangan Usaha Koperasi Melalui Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP) dalam bentuk : Seminar Perkoperasian yang diikuti oleh 160 orang peserta (Dekopinda Kab/Kota, OPD terkait, Dinas yang membidangi koperasi, UKM kab/Kota), Peringatan Hari Puncak Koperasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat di Pantai Padang (dibuka Gubernur Sumatera Barat).
- Terlaksananya Peningkatan Peran Usaha Simpan Pinjam Pola Syariah dalam bentuk :
  - Bimtek Peningkatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pola Syariah yang diikuti 64 peserta.
  - Bimtek Peningkatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pola Syariah Model dengan peserta 60 orang.
  - Rapat-rapat Koordinasi Percepatan Koperasi Syariah bertempat di kantor Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat.
  - Terlaksananya Kunjungan Lapangan terhadap koperasi yang potensial untuk mengembangkan koperasi pola syariah di 16 kab/kota.
  - Konsultasi dan Koordinasi ke Kementerian Koperasi dan UKM RI, Dewan Syariah Nasional MUI di Jakarta dan *study komparatif* ke Yogyakarta.
- Terlaksananya pembinaan usaha simpan pinjam koperasi melalui :
  - Rakor ( 78 orang peserta ).
  - Pembinaan ke 19 Kabupaten/Kota.
- Terlaksananya Peningkatan dan Evaluasi Permodalan Koperasi melalui :
  - Pembinaan ke 19 kabupaten/kota.

- Rakor Peningkatan dan Evaluasi Permodalan koperasi dengan jumlah peserta 80 orang.
  - Bimtek Gema Nagari dengan jumlah peserta 54 orang.
  - Rapat Evaluasi Permodalan Koperasi dengan jumlah peserta 80.
  - Pemasangan baliho sebanyak 8 unit selama 1 bulan.
  - Jumlah peserta Pelatihan Pengembangan Usaha Koperasi Sektor Riil sebanyak 60 orang (2 angkatan).
8. Program Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing UMKM, dengan anggaran Rp.6.613.127.900,- dan realisasi sebesar Rp.5.963.665.634,- (90,18%), dengan output :
- Terlaksananya Upaya Peningkatan Gerakan Terpadu Pensejahteraan UMKM Sumatera Barat melalui :
    - fasilitasi kemasan bagi 40 UKM.
    - Ditetapkannya 38 sentra/kawasan UMKM Kabupaten/Kota melalui SK Gubernur Sumatera Barat No. 516/754.2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Penetapan Kawasan Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Prov. Sumbar.
  - Jumlah peserta Bimbingan Teknis Pembekalan Keterampilan Bagi Wirausaha Baru sebanyak 245 orang di 7 kabupaten/ kota (Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok, Kab. Lima Puluh Kota, Kota Sawahlunto, Kota Payakumbuh, Kota Pariaman, dan Kota Solok); Terlaksananya Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM ke Perbankan dan Lembaga Non Bank melalui :
    - Sosialisasi Program Pola Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL-BUMN) di 2 Kab/Kota masing-masing 100 Orang UMKM.
    - Koordinasi dan Sosialisasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di 4 Kab/Kota) masing-masing 100 (Seratus) Orang UMKM.
  - Jumlah peserta Pelatihan Teknis Penyusunan Proposal bagi Pelaku UMKM sebanyak 60 orang (2 angkatan).
  - Jumlah peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan sebanyak 60 UMKM dan 110 mahasiswa.
  - Jumlah peserta pelatihan Kewirausahaan Bagi UKM Kerajinan Sumatera Barat sebanyak 30 orang.

- Jumlah peserta pelatihan pemasaran *online* bagi UKM Kerajinan Sumatera Barat dengan jumlah peserta sebanyak 27 orang.
- Jumlah peserta pelatihan manajemen usaha bagi UKM Kerajinan Sumatera Barat sebanyak 30 orang.
- Perkuatan produk UMKM melalui :
  - Bimbingan teknis kemasan, label dan paper bag yang diikuti 300 peserta di 9 kabupaten/kota.
  - Sosialisasi kredit ultra mikro yang diikuti 200 peserta di 2 kabupaten/kota (Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat).
- Partisipasi Promosi Produk UMKM melalui 6 event :
  - Sumbar Expo di Makasar diikuti oleh 2 UMKM.
  - Inacraft diikuti oleh 2 UMKM di Jakarta.
  - Bazar Ramadhan 100 UKM binaan.
  - Nusantara *Marandang* yang diikuti oleh 20 UKM.
  - Pameran dalam rangka Hari *Pers* Nasional yang diikuti oleh 2 UKM.
  - Gelar Karya Batik Tanah Liek yang diikuti oleh 2 UKM.
- Terlaksananya Pengembangan UMKM Kerajinan Unggulan Sumatera Barat melalui :
  - Temu Bisnis UMKM Pengrajin Sumbar (Jakarta, Makasar dan Brunei Darussalam) dengan 8 MoU.
  - Bimtek Desain Produk di 5 Kabupaten/kota ( Kota padang, Kota Sawahlunto, Kota Payakumbuh, Kab. Agam dan Kab. Padang Pariaman).
  - Terlaksananya pameran di Korea Selatan.
  - Tersusunnya Buku Data Base UMKM Unggulan Sumatera Barat.
- Sosialisasi dan Koordinasi Pendaftaran Merk dan Sertifikat Halal dan PIRT melalui :
  - Sosialisasi pendaftaran merk dan sertifikat halal yang diikuti 40 UKM (28 UKM untuk pendaftaran merk dan 12 UKM untuk pengusulan sertifikat halal).
  - Identifikasi UKM yang akan diusulkan pendaftaran merk dan halal di 19 kab/kota.
- Jumlah peserta Sosialisasi Peningkatan dan Pengembangan Produk UKM Binaan Sumatera Barat



sebanyak 100 orang UMKM (sektor makanan khusus Rendang dan Makanan Ringan).

- Jumlah peserta Pelatihan Pengembangan Usaha Bagi UMKM sebanyak 240 orang (6 angkatan).
- Jumlah peserta Pelatihan Kewirausahaan Bagi Koperasi dan UKM sebanyak 240 orang (6 angkatan).
- Jumlah peserta Pelatihan Teknik Pengembangan Usaha di Kawasan Wisata sebanyak 200 orang (5 angkatan).
- Jumlah peserta Pelatihan Pengembangan Pemasaran Berbasis IT sebanyak 90 orang (3 angkatan).
- Jumlah peserta Pelatihan Pembukuan Bagi Pelaku UKM sebanyak 60 orang (2 angkatan).
- Jumlah peserta Pelatihan Pengolahan Pangan Berbasis Ubi-Umbian dan Pisang Bagi UMKM sebanyak 105 orang (3 angkatan).
- Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Tenaga Pendamping (DAK) sebanyak 40 orang.

**c. Outcome :**

- 1) Meningkatnya kualitas koperasi dan UKM dalam peran menukung pertumbuhan ekonomi daerah, dengan indikator :

- Meningkatnya nilai asset koperasi Tahun 2017 dengan target 9%, realisasi 10,44% dengan capaian 116% (sangat baik). Pada tahun 2017 nilai asset koperasi di Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.4.277.051.470.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp.446.467.100.000,- (10,44%), sehingga pada tahun 2018 nilai asset koperasi menjadi Rp.4.723.518.570.000,-.

Lima daerah sebagai penyumbang asset koperasi tertinggi di Provinsi Sumatera Barat adalah Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam dan Kabupaten Dharmasray.

- Meningkatnya nilai omset koperasi Tahun 2018 dengan target 8%, realisasi 9,88% dengan capaian 123,5% (sangat baik). Pada tahun 2017 nilai omset koperasi di Sumatera Barat sebesar Rp.5.206.429.410.000,- mengalami peningkatan sebesar Rp.514.262.020.000 (9,88%), sehingga pada tahun 2018 nilai omset koperasi menjadi Rp.5,720.691.430.000,-.
- Meningkatnya persentase koperasi aktif dengan target sebesar 77,5% terealisasi tahun 2018 sebesar 77,67% dengan capaian 100,21% (sangat baik).

Jumlah koperasi di Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan dimana pada tahun 2017 jumlah koperasi sebanyak 3.549 unit meningkat sebanyak 75 unit pada tahun 2018 menjadi 3.624 unit. Peningkatan jumlah koperasi ini juga diikuti dengan jumlah koperasi aktif yaitu pada tahun 2017 jumlah koperasi aktif sebanyak 2.744 unit, tahun 2018 jumlah koperasi aktif sebanyak 2.815 unit.

- Meningkatnya persentase UKM binaan naik kelas dengan target sebesar 1,7% terealisasi sampai tahun ini sebesar 1,85% dengan capaian sebesar 108,82% (sangat baik).

Tahun 2017 jumlah UKM binaan adalah sebanyak 812 UKM dengan jumlah UKM yang meningkat skala usahanya dari Usaha Kecil (UK) menjadi Usaha Menengah (UM) adalah 30 UKM. Pada tahun 2018 jumlah UKM binaan yang meningkat skala usahanya dari Usaha Kecil (UK) ke Usaha Menengah (UM) adalah 45 UKM. UKM binaan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat yang meningkat skala usahanya pada umumnya yang bergerak pada bidang usaha makanan dan bordir.

- Meningkatnya laju pertumbuhan kredit dengan target sebesar 8% terealisasi sampai tahun ini sebesar 11,14% dengan capaian sebesar 139,25% (sangat baik).

Pencapaian indikator kinerja laju pertumbuhan kredit disebabkan karena meningkatnya realisasi kredit yang disalurkan oleh bank penyalur. Tahun 2017 realisasi kredit sebesar Rp. 15.997.940.000.000,- meningkat sebesar Rp.1.783.322.000.000,- sehingga realisasi kredit tahun 2018 menjadi sebesar Rp.17.781.262.000.000,-

#### **d. Permasalahan dan Solusi**

##### **1) Permasalahan :**

- Kelembagaan koperasi
  - Belum optimalnya iklim pembangunan koperasi.
  - Masih terbatasnya kemampuan SDM koperasi dalam mengelola usaha sesuai dengan kebutuhan anggotanya.
- Usaha koperasi
  - Masih banyak koperasi yang lemah dari sisi permodalan usaha, dan adanya kebijakan pemerintah yang membatasi bantuan hibah kepada koperasi.

- Masih banyaknya usaha Koperasi Unit Desa (KUD) yang kurang berkembang, karena lemahnya SDM pengurus (sudah banyak yang tua), kurangnya modal dan sarana usaha yang sudah usang.
- Koperasi Simpan Pinjam (KSP) / Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi yang ingin menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) / USPPS banyak terkendala dengan belum adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- Masih banyak warung serba ada (waserda)/ritel koperasi yang perlu ditingkatkan tampilan, dan penggunaan IT, agar usahanya dapat bersaing dengan kompetitor seperti mini market yang mulai menjamur.
- Koperasi pasar (koppas) masih banyak yang tidak aktif karena kalah bersaing dan kurangnya SDM pengelola yang mempunyai kompetensi yang memadai.
- Produk Unggulan Daerah (PUD) dan/atau koperasi masih perlu dikembangkan
- Usaha Mikro Kecil dan Menengah, permasalahannya adalah :
  - Masih banyak produk UMKM yang kurang kualitas dan desain kemasan.
  - Masih kurangnya pemanfaatan teknologi tepat guna.
  - Masih terbatasnya UMKM yang memiliki *branding product*.
  - Masih terbatasnya kemampuan UMKM dalam mendapatkan permodalan dan akses pemasaran.
  - Masih rendahnya kualitas SDM dan manajemen UMKM.
  - Masih kurangnya sosialisasi perkoperasian kepada UMKM sehingga mereka masih cenderung untuk berusaha secara sendiri-sendiri.

2) Solusi :

- Kelembagaan koperasi
  - Kerjasama dengan berbagai *stakeholder* (pemerintah, alim ulama, pendakwah, dan lain-lain).
  - Melakukan pengawasan terhadap koperasi agar meningkatnya kepercayaan anggota kepada pengurus, dan meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha

koperasi, melalui pemeriksaan, uji petik dan penilaian koperasi.

- Memberikan pelatihan, bimbingan teknis kepada pengurus/pegelola koperasi.
- Usaha koperasi
  - Memfasilitasi permodalan koperasi dengan akses ke LPDB-KUMKM, dan Sosialisasi Gerakan Lima Ribu Membangun Ekonomi Nagari (Gema Nagari), serta bimtek penggunaan aplikasi *online*-nya.
  - Memfasilitasi koperasi dalam bentuk bimtek pengembangan usaha, seperti jagung, sapi, dan lain-lain.
  - Mendorong koperasi untuk memanfaatkan IT dalam menunjang usahanya.
  - Memfasilitasi kerjasama koperasi ritel dengan distributor untuk bermitra, misalnya dengan PT. Ritel Minang Mart (RMM).
  - Mengembangkan Produk Unggulan Daerah (PUD) secara bersama-sama dengan pendekatan OVOP melalui koperasi.
- Usaha Mikro Kecil dan Menengah
  - Bantuan fasilitasi pendaftaran merk dan sertifikat halal.
  - *Branding product*.
  - Fasilitasi bantuan pemanfaatan IT dalam pemasaran produk *online*
  - Sosialisasi KUR kepada UMKM.
  - Memberikan pelatihan, bimbingan teknis/ sosialisasi kepada pelaku UMKM.

## 18. Penanaman Modal

Untuk Urusan Penanaman Modal pada Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan anggaran sebesar Rp.11.590.583.854,- dan realisasi Rp.11.438.209.370,- (98,69%). Alokasi dana tersebut untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

### a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- 6) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, dengan kegiatan:
  - Penyelesaian Permasalahan Investasi.
  - Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal.
  - Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal; Gelar Potensi dan Temu Usaha.
  - Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Sumatera Barat.
  - Koordinasi Promosi dan Misi Investasi; Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat.
  - Promosi Investasi.
  - Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal.
  - Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal.
  - Publikasi dan Sosialisasi Informasi Penanaman Modal.
  - Forum Komunikasi Usaha Daerah.
  - Penyusunan Buku Direktori Mitra Usaha.
  - Koordinasi Strategi Promosi Peluang Investasi.
  - Workshop Pola Pikir dan Budaya Kerja.
  - Bimbingan Teknis Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
  - Forum Investasi Sumatera Barat.
- 7) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu, dengan kegiatan:
  - Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
  - Forum PTSP.
  - Penyusunan Produk Hukum terkait Perizinan dan Non Perizinan.
  - Peningkatan Penyelesaian Masalah Pelayanan Perizinan Terpadu.
  - Sinkronisasi dan Harmonisasi tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan.
  - Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Yang Berbasis Teknologi Informasi.
  - Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan.
  - Pembinaan PTSP Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
  - Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan.

- Penilaian Standar Mutu Perizinan.

**b. Realisasi Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran Rp.1.135.494.329,- dengan realisasi sebesar Rp.1.123.043.0501,- (98,90%).
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan anggaran Rp.1.451.205.200,- dan realisasi sebesar Rp.1.413.909.346,- (97,43%).
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan anggaran Rp.44.400.000,- realisasi sebesar Rp.44.400.000,- (100%).
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan anggaran Rp.271.361.050,- dan realisasi sebesar Rp.268.344.904,- (98,89%).
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan anggaran Rp.398.736.850,- dan realisasi sebesar Rp.389.305.839,- (97,63%).
- 6) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, dengan anggaran Rp.3.797.846.700,- dan realisasi sebesar Rp.3.750.963.067,- (98,77%), dengan output :
  - Jumlah Perusahaan PMA/PMDN di Sumatera Barat yang difasilitasi permasalahannya dengan target sebanyak 9 perusahaan PMA/PMDN terealisasi 9 perusahaan (100%).
  - Jumlah peserta Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi terkait Penanaman Modal sebanyak 80 orang aparatur instansi teknis (tingkat provinsi, kabupaten / kota, akademisi, dunia usaha dan tokoh masyarakat).
  - Terlaksananya keikutsertaan Sumatera Barat dalam event promosi berupa forum dan business *meeting* :
    - Regional Investment Forum (RIF 2018) di Yogyakarta.
    - Undangan Misi Dagang di Jakarta.
    - Apkasi Otonomi Daerah Expo di Tangerang.
    - Technikal Meeting Trade Expo Indonesia 2018 di Tangerang.
    - Pameran Indonesia *Infrastructure week* (IIW) Tahun 2018 di Jakarta.
    - Sumatera Barat Expo 2018 di Makasar) dan luar negeri (KJRI di Chicago Amerika Serikat.
    - Nagoya Jepang, Fez Economic Forum (FEF) Maroko.
    - Festival Indonesia (FI) di Hermitage Garden Moscow.

- Resepsi Diplomatik dan Pameran Indonesia di Brunai Darusalam.
- CAEXPO Beijing.
- Indonesia-Australia *Business Summit* (IABS) 2018 di Melbourne.
- Forum (CMGF) ke-15 di Malaka Malaysia, Roma, Brazil).
- Peta Dan Database Serta Sistem Informasi Spasial sebanyak 1 sektor (sektor pariwisata).
- Terlaksananya Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Sumatera Barat berupa :
  - buku profil peluang investasi sebanyak 300 buku.
  - *Leaflet* peluang investasi sebanyak 2.000 exemplar.
  - buku direktori potensi investasi sebanyak 100 exemplar.
  - *Updating* data potensi dan peluang investasi.
- Jumlah Rumusan/Rekomendasi terkait Perencanaan dan Kebijakan, Promosi, Perizinan dan Pengendalian Penanaman Modal sebagai hasil rapat koordinasi sebanyak 4 rumusan.
- Tersusunnya Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat sebanyak 100 exemplar.
- Jumlah perusahaan PMA/PMDN yang dilakukan pengawasan dan pembinaan sebanyak 19 perusahaan (15 sudah produksi, 4 masih dalam masa konstruksi, dan 1 berganti nama dari PT. Surga Ombak menjadi PT. Hidden Bay Resort Mentawai).
- Terlaksananya Gelar Potensi dan Temu Usaha di Sumbar Expo di Makasar dengan calon investor yang berminat menanamkan modalnya sebanyak 5 calon.
- Publikasi dan Sosialisasi Informasi Penanaman Modal melalui :
  - pertemuan Investor di Auditorium Gubernur.
  - Pameran Minangkabau Summit 2018.
  - 4 media massa (koran nasional, majalah nasional, TV Nasional dan TV Lokal).
- Jumlah peserta Forum Komunikasi Usaha Daerah sebanyak 100 orang.

- Terlaksananya Koordinasi Promosi dan Misi Investasi dengan 6 Kabupaten/Kota dan 6 calon investor (untuk listrik, industri hilir nilam, gheothermal, cangkang sawit).
  - Penyusunan Buku “Direktori Mitra Usaha” dengan pengusaha besar yang ada di Sumatera Barat sebanyak 76 exemplar.
  - Terlaksananya Koordinasi Strategi Promosi Peluang Investasi dengan 7 DPM&PTS Kab/Kota.
  - Terlaksananya *Workshop* “Pola Pikir dan Budaya Kerja” Pelayanan Aparatur DPM & PTSP kepada masyarakat serta membangun citra positif pemerintah.
  - Jumlah peserta Bimbingan Teknis Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebanyak 80 orang.
  - Jumlah peserta Forum Investasi Sumatera Barat sebanyak 100 orang.
- 7) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu, dengan anggaran Rp.4.491.539.725,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.4.448.243.164,- (99,04%), dengan output :
- Jumlah peserta Forum PTSP dengan sebanyak 120 orang (Aparatur DPM & PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat).
  - Telah terealisasi sebanyak 3.125 izin/non izin (rekomendasi) dari target 1.400 (melebihi target).
  - Tersusunnya Produk Hukum terkait Perizinan dan Non Perizinan menjadi landasan dalam penyelesaian masalah-masalah pengaduan dalam pengurusan izin di PTSP.
  - Jumlah fasilitasi dan mediasi permasalahan pengurusan izin sebanyak 15 dari target 24 permasalahan.
  - Terlaksananya Sinkronisasi dan Harmonisasi tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan dengan Kab/Kota.
  - Terlaksananya Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan yang Berbasis Teknologi Informasi.
  - Jumlah peserta Sosialisasi Tata Cara Pelayanan Perizinan dan SOP bagi Aparatur, Pelaku Usaha, Tokoh Masyarakat, KAN, LKAAM, Wali Nagari, Camat sebanyak 660 orang.
  - Terlaksananya Pembinaan PTSP Kabupaten/ Kota Se Sumatera Barat.
  - Diperoleh hasil Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan terhadap kinerja unit pelayanan “Sangat Baik”



dengan nilai sebesar 81,98, setelah dikonversikan didapatkan nilai akumulasi IKM sebesar 3,27 dari target 3,30.

- Terlaksananya Penilaian Standar Mutu Perizinan.

**c. Outcomes**

- 1) Meningkatnya investasi di Sumatera Barat, dengan indikator kinerja Penambahan Realisasi investasi:
  - Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Tahun 2018 Rp.2.309.449,60 juta, naik dibanding Tahun 2017 (Rp.1.516.964,30 juta) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Tahun 2018 sebesar juta US\$ 180,8, turun dibanding Tahun 2017 (juta US\$ 194,4).
  - Realisasi investasi pada Tahun 2018 sebanyak 206 perusahaan, turun 60 perusahaan dibanding 2017 (266 perusahaan). Dari PMA Tahun 2018 sebanyak 74 perusahaan, turun 63 perusahaan dibanding 2017 (137 perusahaan), dan PMDN Tahun 2018 sebanyak 132 perusahaan, naik sebanyak 3 perusahaan dibanding 2017 (129 perusahaan).
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan satu pintu, dengan indikator: Persentase perizinan penanaman modal yang diterbitkan tepat waktu :
  - Target 80% terealisasi 84,10% dengan persentase capaian kinerja 105,13%.
  - Meningkatnya kualitas standar pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), ditandai dengan diperolehnya Sertifikat Manajemen Mutu ISO SNI 9001:2015 oleh DPM dan PTSP Provinsi Sumatera Barat tanggal 1 Agustus 2018, dari sebelumnya ISO SNI 9001:2008.
- 3) Meningkatnya keinginan investor untuk menanamkan modalnya di Sumatera Barat, dengan indikator : Jumlah investor yang berminat : 26 calon investor, lebih dari target 21 calon (kinerja 123,81%). Keinginan calon investor Tahun 2018 naik dibanding Tahun 2017 (yang hanya mencapai 24 perusahaan/calon investor).
- 4) Dari target 7 permasalahan PMDN/PMA yang akan difasilitasi, dapat terealisasi sebanyak 9 (melebihi target, dengan kinerja sebesar 128,57%). Berikut perusahaan PMDN/PMA di Provinsi Sumatera Barat yang dapat difasilitasi : PT. Bintang Paradiso Resort, PT. Energi Baru Terbarukan, PT. Energi Taratak Tampalih, dan CV. Putra Idola.

**d. Permasalahan dan Solusi**

**1) Permasalahan :**

- Pelayanan terhadap penanam modal (investor) masih belum optimal, karena masih kurangnya kuantitas dan kualitas aparatur terutama yang bersifat teknis agar dapat bekerja secara profesional dan masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan penanaman modal.
- Belum optimalnya promosi peluang investasi Sumatera Barat kepada calon investor baik dalam negeri maupun luar negeri.
- Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan PMA/PMDN serta masih banyaknya perusahaan PMA/PMDN yang belum menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
- Dokumen perencanaan pendukung investasi di daerah yang dibutuhkan oleh calon investor belum memadai.
- Keuangan negara dan keuangan daerah belum mampu mencukupi kebutuhan pembangunan infrastruktur publik, fasilitas kesehatan, sanitasi dan pendidikan yang memadai serta untuk pembiayaan upaya-upaya peningkatan penanaman modal.
- Belum ditempatkannya Tim Teknis dari OPD Teknis pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- Kurangnya Sarana dan Prasarana PTSP dalam pelayanan, seperti area parkir yang sempit, sehingga kepuasan masyarakat dalam perizinan dan non perizinan belum optimal.

**2) Solusi :**

- Peningkatan jumlah dan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugasnya terutama yang bersifat teknis dengan memberikan pelatihan teknis terkait sesuai dengan bidang tugasnya dan melengkapi sarana prasarana pendukung pelayanan investasi.
- Meningkatkan kualitas bahan materi promosi terhadap potensi dan peluang investasi dan berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota.
- Meningkatkan pengendalian seperti pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal terhadap PMA/PMDN yang terkendala didalam penyampaian LKPM dengan diupayakan langsung ke lokasi proyek.

- Memfasilitasi permasalahan investasi yang dialami oleh investor dengan melakukan pendekatan persuasif dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan investasi, serta meningkatkan ketertiban dan meningkatkan kinerja tim *task force* penanaman modal.
- Perlu peningkatan sarana prasarana seperti jalan, bandara, pelabuhan, air bersih, kelistrikan dan fasilitas umum lainnya.
- Untuk Pelayanan Terpadu Satu Plntu : perlunya menempatkan Tim Teknis OPD Teknis di PTSP, perlunya gedung baru untuk DPM & PTSP, perlunya kajian insentif utk petugas PTSP.

## **19. Kepemudaan dan Olah raga**

Urusan Kepemudaan dan Olahraga pada Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga dengan anggaran sebesar Rp.20.532.749.920,- dan realisasi Rp.20.011.850.628,- (97,46%), untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

### **a. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- 6) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, dengan kegiatan:
  - Pembinaan dan Pemilihan Pemuda Pelopor.
  - Bimbingan dan Pelatihan Kewirausahaan Enterpreneurship Pemuda.
  - Pendidikan Bela Negara.
  - Seleksi Pelatihan serta Karyawisata PASKIBRAKA.
  - Peningkatan Wawasan Kebangsaan Pemuda.
  - Jambore Pemuda Indonesia (JPI) .
  - Desiminasi Bahaya Narkoba HIV/AIDS bagi Pemuda.
  - Pelatihan Kepemimpinan Pemuda.
- 2) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, dengan kegiatan:
  - Pengiriman Kontingen POPWIL.

- Bonus POPNAS.
  - Fasilitas Kejurnas.
  - TC Pornas SOLna.
  - Pekan Olahraga Bela Diri Daerah.
  - Pekan Cabang Olahraga Permainan.
  - Festival Olahraga Rekreasi Daerah (FORDA) Prov. Sumbar dan Nasional.
  - Pemberangkatan Kontingen Pornas SOLna Tk. Nasional.
  - Pembinaan dan Fasilitas PPLP.
  - Kejurnas Antar PPLP/SKO Prov. Sumbar.
  - Pelaksanaan Uji Coba Luar Provinsi Atlet/Pelajar/PPLP/SKO Sumbar.
  - Kejuaraan Daerah Cabang Olahraga Perlombaan.
  - Kejuaraan Daerah SOLna Tingkat Sumatera Barat.
  - Penyelenggaraan Invitasi Olahraga Massal.
  - Penyelenggaraan Hari Olahraga Nasional Sumatera Barat (Haornas).
  - Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Sumatera Barat.
  - Pengadaan Makan Minum Atlet/Siswa PPLPD/SKO Sumatera Barat. dan
  - Pelaksanaan Hari Krida Olahraga ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- 3) Program Pengembangan Organisasi Pemuda dan Manajemen Olahraga, dengan kegiatan:
- Latihan Manajemen Organisasi Pemuda (LMOP). dan
  - TC POPWIL.
- 4) Program Peningkatan Penyadaran Kepemudaan, dengan kegiatan :
- Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN).
  - Pelatihan Tenaga Kepemudaan Berbasis IPTEK.
  - Peningkatan Kapasitas Pemuda di Bidang IPTEK dan IMTAQ.
  - Sosialisasi Berinternet Cerdas Bagi Pemuda.
  - Gelar Karya Organisasi Pemuda.
  - Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Politik Cerdas Berintegrasi bagi Pemuda.
- 5) Program Manajemen Layanan Teknis Lainnya, dengan kegiatan :

- Rapat Kerja Teknis Pemuda dan Olahraga.
- Validasi Data Base Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Barat.
- Monev Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBN dan APBD.

**b. Realisasi Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran Rp.2.678.823.977,- terealisasi sebesar Rp. 2.530.829.444,- (94,48%).
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan anggaran Rp.601.481.668,- dan realisasi sebesar Rp.564.128.649,- (93,79%).
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan anggaran Rp.69.052.500,- dan realisasi sebesar Rp.69.052.500,- (100%).
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan anggaran Rp.38.590.000,- dan realisasi sebesar Rp.37.955.900,- (98,36%).
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan anggaran Rp.470.002.815,- dan realisasi sebesar Rp.441.070.780,- (93,84%).
- 6) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, dengan anggaran Rp.3.124.036.150,- realisasi keuangan Rp.3.019.946.750,- (96,67%), dengan Output :
  - Terpilihnya Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Sumatera Barat untuk Tingkat Nasional sebanyak 15 orang di 5 bidang.
  - Jumlah peserta Bimbingan dan Pelatihan Kewirausahaan/ Entrepreneurship Pemuda sebanyak 100 Orang.
  - Jumlah peserta Pendidikan Bela Negara sebanyak 40 Orang.
  - Jumlah peserta Peningkatan Wawasan Kebangsaan Pemuda sebanyak 60 orang.
  - Jumlah peserta mengikuti Jambore Pemuda Indonesia (JPI) sebanyak 20 Orang.
  - Terlaksananya Seleksi Paskibraka sebanyak 100 orang, Pelatihan sebanyak 56 orang dan Karyawisata Paskibraka sebanyak 54 orang.
  - Jumlah peserta Deminasi Bahaya Narkoba HIV/AIDS bagi pemuda sebanyak 100 orang.

- Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pemuda sebanyak 80 orang.
- 7) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, dengan alokasi anggaran Rp.10.987.624.495,- realisasi sebesar Rp.10.860.918.331,- (98,85%), dengan output :
- Pengiriman Kontingen Sumbar ke POPWIL sebanyak 146 orang.
  - Jumlah penerima penghargaan atlet, pelatih dan official berprestasi Sumbar pada POPNAS 2017 di Semarang sebanyak 38 atlit, 20 pelatih, dan 7 orang official.
  - Terlaksananya fasilitasi Kejurnas.
  - Jumlah Peserta TC Pornas SOIna sebanyak 46 orang.
  - Telaksananya Pengadaan Makan Minum Atlet/Pelajar PPLP/D Sumatera Barat untuk 74 orang atlit.
  - Telaksananya Pekan Olahraga Bela Diri Daerah Sumatera Barat sebanyak 1 cabang.
  - Telaksananya Pekan Cabang Olahraga Permainan Daerah Sumatera Barat sebanyak 1 cabang.
  - Jumlah peserta Festival Olahraga Rekreasi Daerah (FORDA) Prov. Sumatera Barat dan Nasional sebanyak 27.
  - Pemberangkatan Kontingen PORNAS SOIna sebanyak 60 orang.
  - Terlaksananya Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Se-Sumatera Barat sebanyak 6 cabang.
  - Jumlah peserta Pembinaan dan Fasilitasi PPLP/D Sumatera Barat sebanyak 74 atlet.
  - Terlaksananya Kejurnas Antar PPLP/SKO Provinsi Sumatera Barat sebanyak 8 cabang olahraga.
  - Terlaksananya Uji Coba Luar Provinsi Atlet/Pelajar PPLP/SKO Sumbar sebanyak 74 orang dengan 8 cabang olah raga.
  - Terlaksananya kejuaraan daerah cabang olahraga perlombaan Sumatera Barat sebanyak 1 cabang (atletikt).
  - Jumlah Peserta Hari Olahraga Nasional Sumatera Barat (HAORNAS) sebanyak 1.000 orang.
  - Jumlah Peserta Kejuaraan Daerah SOIna Tingkat Sumatera Barat sebanyak 169 orang atlet.
  - Jumlah Peserta Invitasi Olahraga Massal/Rekreasi dalam Rangka Hari Pers Nasional (HPN) sebanyak 4 tim untuk

sepak bola eksekutif, 500 orang senam massal dan sepeda santai, 1.000 orang senam massal dan jalan santai.

- Terlaksananya Hari Krida Olahraga ASN di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 45 OPD.
- 8) Program Pengembangan Organisasi Pemuda dan Manajemen Olahraga, dengan alokasi anggaran Rp.489.958.600,- realisasi sebesar Rp.485.535.600,- (99,10%), dengan output :
- Jumlah peserta Latihan Manajemen Organisasi Pemuda (LMOP) sebanyak 40 orang.
  - Jumlah Peserta *Training Centre (TC)* Atlet Pelajar Daerah Sumbar Menuju POPWIL Tahun 2018 sebanyak 125 atlet dan 21 pelatih.
- 9) Program Peningkatan Penyadaran Kepemudaan, dengan alokasi anggaran Rp.1.769.061.810,- realisasi sebesar Rp.1.708.660.515,- (96,59%), dengan output :
- Terlaksananya Seleksi dan Penugasan Peserta Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) sebanyak 150 orang.
  - Jumlah Peserta Pelatihan Politik Cerdas Berintegritas bagi Pemuda sebanyak 130 orang.
  - Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Kepemudaan Berbasis IPTEK sebanyak 45 orang.
  - Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Pemuda di Bidang IPTEK dan IMTAQ sebanyak 70 orang.
  - Jumlah Peserta Sosialisasi Berinternet Cerdas Bagi Pemuda sebanyak 50 orang.
  - Terlaksananya Gelar Karya Organisasi Pemuda sebanyak 150 karya.
  - Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemuda sebanyak 70 orang.
- 10) Program Manajemen Teknis Lainnya, dengan alokasi anggaran Rp.304.117.905,- terealisasi sebesar Rp.293.752.159,- (96,59%), dengan output :
- Jumlah peserta Rapat Kerja Teknis Pemuda dan Olahraga sebanyak 100 orang.
  - Terlaksananya validasi Database Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 13 database dari 19 Kab/Kota. dan

- Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan APBN dan APBD sebanyak 8 kali.

**c. Outcome**

- 1) Prestasi Olahraga Tingkat Nasional Tahun 2018 :
  - Kejurnas PPLP :
  - Cabang Gulat : Juara Umum
  - Cabang Sepak Takraw : Peringkat 2
  - Cabang Balap Sepeda : Peringkat 2 sebelumnya 5
  - Cabang Senam : Peringkat 2 sebelumnya 5
  - Cabang Tinju : Peringkat 8 sebelumnya 6
  - Cabang Atletik : Peringkat 8
  - Cabang Pencak Silat : Peringkat 5 sebelumnya 8
  - Cabang Judo : Peringkat 5 sebelumnya 8
  - Cabang Sepak Bola : Peringkat 5 sebelumnya 13
  - Cabang Taekwondo : Peringkat 22 sebelumnya 13
  - Cabang Karate : Peringkat 14 sebelumnya 13
  - Cabang Panahan : Peringkat 9 sebelumnya 13
  - Pekan Olahraga Pelajar Nasional SOIna Tahun 2018
  - Kejuaraan Multi Event Pelajar Berkebutuhan Khusus Nasional Peringkat 3 Nasional meningkat dibanding tahun 2017 (peringkat 22 nasional).
- 2) Perkembangan kinerja yang dicapai dalam pembinaan pemuda Tingkat Sumatera Barat :
  - Meningkatkan jumlah pembinaan pemuda dari 201 orang pada tahun 2017 menjadi 885 orang pada tahun 2018.
  - Jumlah pemuda yang ikut dalam Program Pertukaran Pemuda antar Negara 5 orang tahun 2018, sama dengan tahun 2017.
  - Jumlah Pemuda Pelopor yang mewakili Sumatera Barat ditingkat Nasional Tahun 2018 sebanyak 5 orang, sama dengan tahun 2017.
  - Jumlah pemuda yang mewakili Sumatera Barat pada Jambore Pemuda Indonesia sebanyak 16 orang tahun 2018.

**d. Permasalahan dan Solusi**

- 1) Permasalahan :  
Permasalahan utama terkait pembinaan dan prestasi olahraga serta pembinaan Pemuda Sumatera Barat :
  - Masih minimnya sarana dan prasarana olah raga.



- Masih terbatasnya pelaksanaan peningkatan SDM pelatih.
- Minimnya uji coba yang dilakukan oleh masing-masing cabang olah raga.
- Anggaran untuk pembinaan dan prestasi olahraga relatif masih rendah.
- Kegiatan pelatihan bagi pemuda relatif masih sedikit.
- Anggaran untuk peningkatan pembinaan kepemudaan yang masih terbatas.
- Kapasitas lembaga kepemudaan belum optimal.
- Sarana dan prasarana kepemudaan sangat terbatas.
- Kualitas sumberdaya pemuda masih rendah.
- Banyak pemuda berperilaku menyimpang.

2) Solusi :

Solusi permasalahan utama terkait pembinaan dan prestasi olahraga serta pembinaan Pemuda Sumatera Barat :

- Peningkatan Sarana dan Pra Sarana Olahraga.
- Memperbanyak pelaksanaan peningkatan SDM pelatih.
- Memperbanyak uji coba bagi cabang-cabang olah raga sebelum mengikuti *event* Nasional.
- Memperbanyak pelaksanaan kegiatan pelatihan kepemudaan.
- Menyediakan sarana dan prasarana untuk aktivitas kepemudaan.
- Meningkatkan kualitas lembaga kepemudaan.
- Memberikan pendidikan integritas pemuda.
- Peningkatan SDM kepemudaan.
- Pencegahan perilaku menyimpang / beresiko bagi pemuda.

## 20. Kebudayaan

Urusan kebudayaan pada Tahun Anggaran 2018 mendapat alokasi APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.19.799.991.341,- dengan realisasi Rp.17.512.808.338,- (88,45 %), untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

### b. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- 4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

- 5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
- 6) Program Pemberdayaan dan Penguatan Eksistensi Lembaga-Lembaga Adat Seni dan Budaya, dengan Kegiatan:
  - Penguatan Adat Salingka Nagari.
  - Duduak Baropok Forum Tigo Tungku Sajarangan.
  - Peningkatan Wawasan Adat bagi Pengurus KAN, LKAAM dan Bundo Kandung.
- 7) Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Budaya, dengan Kegiatan : Pelestarian dan aktualisasi nilai-nilai matrilineal.
- 8) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, dengan Kegiatan :
  - Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Minangkabau.
  - Pelestarian Cagar Budaya Koleksi Museum di Museum Aditiawarman.
  - Pembinaan dan Fasilitasi Warisan Budaya.
- 9) Program Pengembangan dan Penguatan Nilai Budaya, dengan Kegiatan :
  - Penyusunan Pedoman Pengamalan ABS-SBK di Sumatera Barat.
  - Penyusunan Buku Sejarah Minangkabau.
- 10) Program Peningkatan Diplomasi Seni dan Budaya, dengan Kegiatan :
  - Pembinaan dan Pengembangan Kesenian dan kebudayaan Diplomasi Budaya.
  - Pelestarian dan Aktualisasi Seni dan Budaya.
- 11) Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya, dengan Kegiatan : Pengembangan dan Pembinaan Seni dan Budaya di Taman Budaya.

**c. Realisasi Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran Rp.3.895.334.429,- dan realisasi Rp.2.893.328.577,- (74,28 %).
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan anggaran Rp.1.846.171.321,- dan realisasi Rp.1.573.958.873,- (85,26 %).
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan anggaran Rp.76.220.000,- dan realisasi Rp.75.670.000,- (99,28 %).

- 4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dengan anggaran Rp.51.744.000,- dan realisasi Rp.51.700.000,- (99,91 %).
- 5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan anggaran Rp.652.201.607,- dan realisasi Rp.571.912.883,- (87,69 %).
- 6) Program Pemberdayaan dan Penguatan Eksistensi Lembaga-Lembaga Adat Seni dan Budaya, dengan anggaran Rp.1.314.040.160,- dan realisasi Rp.1.244.671.880,- (94,72 %). Serta Output :
  - Tersedianya Modul Penguatan Lembaga Adat di Nagari, TOT Penguatan Adat di Nagari dan Bimtek Penguatan Adat di Nagari.
  - Tersusunnya Instrumen Pengendalian kegiatan Penguatan adat di Nagari.
  - Terlaksananya Duduak Baropok.
  - Terlaksananya Bimtek Peningkatan Kapasitas LKAAM. Ketua KAN dan Bundo Kandung di Kab/Kota.
- 7) Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Budaya, dengan anggaran Rp.99.838.170,- dan realisasi Rp.89.337.950,- (89,48 %). Serta Output : Terlaksananya bimtek pelestarian dan aktualisasi nilai-nilai matrilineal.
- 8) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, dengan anggaran Rp.3.848.740.909,- dan realisasi Rp.3.777.496.465,- (98,15%). Serta Output :
  - Terlaksananya Bimtek Guru PAUD dalam Mendongeng.
  - Terlaksananya Kongres Bahasa Minang.
  - Terpublikasinya Kebudayaan melalui Media Cetak dan elektronik.
  - Terlaksananya Lomba Cerita Rakyat berbahasa Minangkabau.
  - Terlaksananya Cetak Buku Pantun.
  - Pelestarian Cagar Budaya.
  - Konservasi Koleksi Museum.
  - Peningkatan Fasilitas Museum.
  - Pameran Puspa IPTEK.
  - Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Monitoring Evaluasi Permuseuman di Sumatera Barat.
  - Terlaksananya Sosialisasi Standarisasi Pakaian Pengantin.

- Tersedianya Pakaian Tradisi Budaya Minangkabau dalam rangka HPN.
  - Terlaksananya Bimtek bagi Jupel Cagar Budaya dan Seleksi TACB di Sumatera Barat serta Monitoring Evaluasi.
  - Terlaksananya Pengadaan Pakaian Tradisi (Bahan Baju Basiba) dan Kajian Sejarah ke Negeri 9.
  - Terlaksananya Pembuatan Buku Inventarisasi Bersejarah dan Benda-benda Purbakala di Sumatera Barat.
  - Terlaksananya Sosialisasi dan Pendokumentasian Pakaian Adat jo Tradisi Perempuan Minangkabau di Sumatera Barat.
- 9) Program Pengembangan dan Penguatan Nilai Budaya, dengan anggaran Rp.359.238.530,- dan realisasi Rp.292.269.580,- (81,36 %). Serta Output :
- Dokumen tentang pedoman pengamalan ABS-SBK.
  - Tersedianya Rancangan Umum Penelitian Sejarah Minangkabau.
- 10) Program Peningkatan Diplomasi Seni dan Budaya, dengan anggaran Rp.4.503.481.210,- dan realisasi Rp.4.030.472.505,- (89,50 %). Serta Output :
- Terlaksananya Pemilihan Duta Budaya Minang Sumatera Barat.
  - Bimtek Pengelolaan Manajemen Sanggar; Terlaksananya Kegiatan Gita Bahana Nusantara.
  - Pemberian Anugerah Kepada Seniman.
  - Terlaksananya Diplomasi Budaya Tingkat Nasional & Internasional.
  - Terlaksananya Pantun Jurnalis dan SLTA.
  - Terlaksananya Inventarisasi Data Kesenian.
- 11) Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya, dengan anggaran Rp.3.152.981.005,- dan realisasi Rp.2.911.989.625,- (92,36 %). Serta Output :
- Terlaksananya keikutsertaan pada even Temu Karya tingkat Regional.
  - Terlaksananya keikutsertaan pada even Temu Karya Tingkat Nasional.
  - Terlaksananya Pameran Seni Rupa Binale Sumatera III (Tuan Rumah).

- Terlaksananya Pameran Seni Rupa Jurnalis dalam Rangka HPN.
- Terlaksananya pertunjukan silek di kota padang; Terlaksananya Festival Seni.
- Terlaksananya Pagelaran Apresiasi.
- Terlaksananya Pameran Apresiasi.
- Terlaksananya Festival Silek Internasional.
- Terlaksananya Festival Silat Tradisi Luhak Nan Tuo.
- Terlaksananya Festival Lagu Minang.
- Terlaksananya Festival Qasidah.

**d. Outcome Urusan**

- 1) Pemberdayaan dan Penguatan Eksistensi Lembaga-Lembaga Adat Seni dan Budaya, dengan meningkatnya Kompetensi Pemangku Adat pada 18 ka/kota se-Sumatera Barat.
- 2) Meningkatnya pembinaan dan pengembangan pendidikan budaya.
- 3) Tersedianya Pengelolaan Kekayaan Budaya.
- 4) Tersedianya Data Pengembangan Nilai-nilai Budaya.
- 5) Tercapainya Peningkatan Diplomasi Budaya.
- 6) Terlaksananya Pengembangan Nilai-Nilai Budaya.

**e. Permasalahan dan Solusi**

1) Permasalahan

Pelaksanaan program/kegiatan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 mengalami beberapa permasalahan, diantaranya :

- Serah terima Gedung Kebudayaan yang dilaksanakan pada bulan Desember 2018 menyebabkan penyerapan kegiatan pada program pelayanan administrasi perkantoran dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur tidak maksimal.
- Rendahnya harga pasar dari harga satuan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksana Anggaran menyebabkan terjadinya efisiensi belanja yang berakibat kepada kelebihan sisa anggaran. Pada kegiatan diplomasi budaya, dengan adanya dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat dan beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat mengakibatkan adanya efisiensi anggaran yang sudah disiapkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

2) Solusi

- Menganalisa kembali kebutuhan perkantoran dan menyesuaikan dengan Rencana Kerja Barang Milik Daerah (RKBMD).
- Menganalisa kembali kebutuhan perkantoran dan menyesuaikan dengan Rencana Kerja Barang Milik Daerah (RKBMD). Mengkoordinasikan intens dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait sharing anggaran agar tidak double penganggaran.

## 21. Kearsipan

Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, pada Tahun Anggaran 2018 mendapat alokasi APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.12.243.946.319,- realisasi Rp.10.942.226.014,- (89,37%), untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

### a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- 4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
- 5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
- 6) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan, dengan Kegiatan :
  - Simulasi Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Bencana.
  - Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip Statis.
  - Pelayanan Informasi Kearsipan.
  - Pemeliharaan dan Pelestarian Arsip Konvensional.
  - Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen dan Perawatan Arsip Media Baru.
  - Repro Arsip Masa Perjuangan.
- 7) Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelolaan Sistem Kearsipan, dengan Kegiatan :
  - Pembinaan Arsip Dinamis Aktif pada SKPD.
  - Penilaian Kinerja Arsiparis.
  - Pembinaan kualitas dan wawasan fungsional arsiparis.
  - Pengawasan Tata Kelola Kearsipan.
  - Penataan dan Pengelolaan Arsip In Aktif.

- Bimbingan Teknis Kearsipan SKPD Tingkat Provinsi.
  - Bimbingan Teknis Kearsipan Kab/Kota se-Sumatera Barat.
  - Penyusunan Pergub JRA.
- 8) Program Pengembangan Budaya Baca dan Promosi Perpustakaan, dengan Kegiatan :
- Layanan jasa perpustakaan umum.
  - Kelas Penulis Kreatif.
  - Layanan sahabat perpustakaan.
  - Pengembangan koleksi perpustakaan.
  - Pemeliharaan buku-buku dan pelestarian bahan pustaka.
  - Pemanfaatan dan pelestarian naskah kuno.
  - Otomasi perpustakaan; bengkel penulis muda.
  - Story telling.
  - Sosialisasi perpustakaan.
  - Electronic library.
  - Pengembangan koleksi budaya Sumatera Barat dan Etnis Minangkabau.
  - Perpustakaan Digital.
  - Orientasi Perpustakaan.
  - Kerjasama Perpustakaan.
  - Perluasan layanan perpustakaan.
  - Survey Kebutuhan Pemakai Bahan Bacaan dan Indeks Kepuasan Masyarakat.
  - Promosi Pengembangan Budaya Baca.
  - Perkampungan Literasi.
  - Penerbitan literatur skunder; Karya Cetak dan Karya Rekam ( KCKR ).
  - Pembekalan dan pengembangan sistem kelembagaan perpustakaan.
  - Pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM perpustakaan.

**b. Realisasi Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan alokasi anggaran Rp.3.483.494.622,- dan realisasi sebesar Rp.3.017.699.373,- (86,63%).
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan alokasi anggaran Rp.3.968.146.075,- dan realisasi sebesar Rp.3.582.931.775,- (90,29%).

- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan alokasi anggaran Rp.72.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.67.080.000,- (93,17%).
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan alokasi anggaran Rp.365.091.200,- dan realisasi sebesar Rp.363.934.900,- (99,68%).
- 5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan alokasi anggaran Rp.674.208.674,- dan realisasi sebesar Rp.587.683.224,- (87,17%).
- 6) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan, dengan alokasi anggaran Rp.268.580.826,- dan realisasi sebesar Rp.254.037.744,- (94,59%). Serta Output :
  - Terinformasinya Teknis dan Tata Cara Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Bencana.
  - Terkelolanya dan Terselamatkannya Arsip Strategis/Batas Wilayah Provinsi, Pilkada, Gubernur/Wagub dan Arsip Vital 45 SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
  - Tersedianya Event Publikasi dan Promosi Khasanah Arsip.
  - Terselamatkannya fisik, data dan informasi arsip statis.
  - Terpeliharanya dan Terlestarikannya Arsip Media Baru.
  - Terkelolanya dan Terselamatkannya arsip/dokumen masa perjuangan.
- 7) Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelolaan Sistem Kearsipan, dengan alokasi anggaran Rp.464.104.345,- dan realisasi sebesar Rp.445.317.802,- (95,95%). Serta Output :
  - Terselenggaranya pembinaan arsip dinamis pada SKPD Provinsi.
  - Terpantaunya Kinerja Arsiparis dan Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Arsiparis.
  - Penambahan Wawasan Fungsional Arsiparis.
  - Terlaksananya Pengawasan Tata Kelola Kearsipan SKPD Provinsi.
  - Terlaksananya Penataan dan Pengelolaan Arsip In Aktif Pada SLTA/SMK.
  - Terselenggaranya Bimbingan Teknis Kearsipan SKPD.
  - Terselenggaranya Bimbingan Kearsipan Bagi Lembaga Kearsipan Kab/Kota Se Sumatera Barat.



- Jadwal Retensi Arsip (JRA).
- 8) Program Pengembangan Budaya Baca dan Promosi Perpustakaan, dengan alokasi anggaran Rp.2.948.320.577,- dan realisasi sebesar Rp.2.623.541.196,- (88,98%). Serta Output :
  - Terlayannya Masyarakat Yang Berkunjung Ke Perpustakaan.
  - Mewujudkan Anak Gemar Membaca dan Pintar Menulis.
  - Terlaksananya Layanan Sahabat Perpustakaan dari Berbagai Kelompok Masyarakat Dalam Waktu Khusus.
  - Bertambahnya Jumlah Koleksi Perpustakaan Dalam Bentuk Buku dan Non Buku.
  - Terpeliharanya dan Terawatnya Buku dan Bahan Perpustakaan, Penjilidan Koran dan Majalah.
  - Terpeliharanya dan Terawatnya Buku dan Bahan Perpustakaan, Penjilidan Koran dan Majalah.
  - Terlestarikannya dan Dimanfaatkannya Naskah Kuno Oleh Masyarakat Sumatera Barat.
  - Bertambahnya Basis Data Koleksi Perpustakaan.
  - Meningkatnya Jumlah Penulis Muda Berbakat.
  - Terlaksananya Story Telling Pada Anak dan Ibu Mahir Mendongeng.
  - Terlaksananya Sosialisai Perpustakaan.
  - Tersedianya Perpustakaan Elektronik dan Jaringan.
  - Terlaksananya Pengembangan Koleksi Budaya Sumatera Barat dan Etnis Minangkabausiana.
  - Terlaksananya Supervisi Pengembangan Perpustakaan Digital di Kabupaten/Kota.
  - Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Tentang Perpustakaan.
  - Terjadinya Kerjasama Dengan Mitra Perpustakaan, Dewan Perpustakaan dan Komunitas Penulis Dalam Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan.
  - Mendekatkan Koleksi Perpustakaan Keliling Ke Masyarakat Terutama Masyarakat Yang Berada di Daerah Terpencil.
  - Didatanya Kebutuhan Bahan Bacaan dan Indeks Kepuasan Masyarakat.
  - Terlaksananya Promosi Pengembangan Budaya Baca.
  - Jumlah Kampung Literasi Yang Dikembangkan.

- Tersedianya BID dan KID.
- Tersusunnya Peraturan Gubernur Sumatera Barat Tentang Karya Cetak Karya Rekam (KCKR).
- Terlaksananya Pembekalan dan Pengembangan Sistem Kelembagaan Perpustakaan dan Kinerja Pustakawan.
- Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM Perpustakaan Se Sumatera Barat.

**c. Outcomes**

- 1) Terselenggaranya pelayanan kearsipan secara efektif dan efisien dengan meningkatnya Persentase Dokumen Daerah yang Terselamatkan.
- 2) Meningkatnya kualitas SDM Kearsipan dan Perpustakaan pada SKPD Provinsi dan Kabupaten /Kota dan Tertib Arsip pada SKPD Provinsi.
- 3) Meningkatnya layanan perpustakaan, pelestarian fisik dan keuangan dan kandungan naskah kuno dan budaya gemar membaca serta promosi dan budaya literasi di masyarakat.

**d. Permasalahan dan Solusi**

- 1) Permasalahan :
  - Tingkat kepedulian tentang perlindungan dan penyelamatan arsip bencana oleh pegawai dari lembaga kearsipan Kabupaten/Kota dan SKPD Provinsi Sumbar yang dikunjungi masih rendah.
  - Masih rendah / kurangnya kepedulian SKPD terhadap kegiatan pengelolaan arsip.
  - Masih kurang SDM, didalam menunjang kegiatan pemeliharaan arsip konvensional.
  - Peralatan yang dibutuhkan untuk pemeliharaan dan pelestarian arsip belum memadai dan SDM khusus di bidang pemeliharaan dan pelestarian arsip konvensional masih kurang.
  - Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan repro terutama sarana repro arsip photo yang pada saat ini belum sesuai dengan kebutuhan.
  - Kurangnya SDM pengelola Kearsipan di SKPD.
  - SDM pengelola kearsipan yang ada tidak/belum mengikuti diklat/bimbingan teknis kearsipan, baik yang dilaksanakan di daerah maupun ditingkat pusat.
  - Sering terjadi mutasi sehingga SDM yang telah dibina tidak dapat melanjutkan kegiatan yang telah diberikan binaan.

- Tidak tersedianya peralatan kearsipan sesuai standard yang dianjurkan ( Pergub Nomor 114 Tahun 2008, Tentang Pedoman Penggunaan Peralatan Kearsipan Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat).
- Tidak tersedianya dana penunjang kearsipan pada SKPD.
- Kurangnya perhatian pejabat/pimpinan terhadap arsip maupun terhadap pengelola kearsipan pada SKPD.
- Arsiparis yang ada belum fungsinya belum maksimal, Kurangnya wawasan arsiparis, Sering terjadi keterlambatan pengusulan DUPAK.
- Tidak adanya insentif bagi arsiparis.

## 2) Solusi

- Perlu dilakukan koordinasi lanjutan dengan pihak lembaga kearsipan kabupaten/kota dan SKPD guna meningkatkan antisipasi dan kesiagaan menghadapi bencana yang datangnya tanpa bisa di duga
- Perlu peningkatan jumlah dan kualitas SDM untuk diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan ataupun bimbingan teknis tentang materi perlindungan dan penyelamatan arsip bencana.
- Harus dilakukan pembinaan secara berkesinambungan / rutin.
- Perlunya penambahan SDM dan peningkatan wawasan SDM yang ada.
- Dana untuk pemeliharaan dan pelestarian arsip konvensional lebih diprioritaskan, Mengikutsertakan SDM dalam diklat, sosialisasi, konsultasi teknis terkait pemeliharaan dan pelestarian arsip konvensional yang bertempat di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat atau di pusdiklat Kearsipan Arsip Nasional RI di Bogor Jawa Barat.
- Belum tersedianya peralatan pengelolaan arsip media baru secara menyeluruh atau lengkap.
- Masih kurangnya SDM yang menguasai teknis pengelolaan arsip media baru dan sistem jaringan komputerisasi.
- Ketersediaan aplikasi yang mendukung pekerjaan arsip media baru masih minim.
- Pendanaan untuk pengelolaan arsip media baru masih kurang.

- Peningkatan sarana dan prasarana yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan repro.
- masing-masing SKPD yang telah dibina ini dapat melaksanakan pengelolaan dan penyimpanan arsipnya sesuai aturan yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Gubernur nomor 102 tahun 2014, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Dinamis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta memakai sarana dan prasarana kearsipan sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 114 Tahun 2008, Tentang Pedoman Penggunaan Peralatan Kearsipan Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Arsiparis yang ada agar dapat difungsikan secara maksimal sebagai pejabat fungsional Arsiparis.
- Memberikan tambahan ilmu pada Arsiparis yang ada dengan cara mengikutsertakan pada diklat kearsipan yang diadakan baik ditingkat Provinsi maupun ditingkat Pusat.

## **B. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN**

Urusan pilihan dilaksanakan dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan pemerataan pembangunan, membuka lapangan pekerjaan serta menurunkan jumlah penduduk miskin. Untuk itu, dialokasikan anggaran sebesar Rp.243.315.868.061,- pada tahun 2018 dengan realisasi sebesar Rp.223.292.925.317,- (91,77%), dengan rincian sebagai berikut:

### **1. Kelautan dan Perikanan**

Penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan pada Tahun Anggaran 2018 mendapat alokasi APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.46.415.016.654,- dengan realisasi Rp.44.058.128.175,- (94,92%), untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

#### **a. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- 6) Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis, dengan kegiatan :

- Pengembangan Ikan Kerapu pada kawasan sentra produksi.
  - Pengembangan Ikan Nila pada kawasan sentra produksi.
  - Pengembangan kawasan agroekowisata perikanan.
- 7) Program peningkatan produksi dan produktivitas, dengan kegiatan :
- Peningkatan Produksi Ikan Melalui Budidaya Mina Padi, Pengembangan daerah sumber benih ikan.
  - Peningkatan dan penguatan induk unggul.
  - Peningkatan produksi ikan gurami.
  - Pengembangan dan Penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik(CPIB) Pada Unit Pembenihan.
  - Gerakan pensejahteraan petani terpadu.
  - Peningkatan produksi induk ikan unggul, benih ikan air tawar, ikan hias dan teknologi budidaya ikan air tawar.
  - Pengolahan data dan informasi perikanan budidaya.
  - Pengendalian hama penyakit ikan.
  - Pengembangan budidaya ikan di kawasan TMMN.
  - Peningkatan Produksi Ikan Lele.
- 8) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, dengan kegiatan :
- Peningkatan sarana dan prasarana Balai Laboratorium.
  - Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan.
  - Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Air Payau.
- 9) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil, dengan kegiatan :
- Peningkatan Investasi dan Akses Permodalan.
  - Diversifikasi Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan.
  - Forum Koordinasi dan Pembinaan Kelompok perempuan Pesisir dalam rangka kasetaraan gender.
  - Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan bagi Pengolah di UPI.
  - Sosialisasi Peningkatan Daya saing dan Temu Usaha Pelaku Pemasaran Hasil Perikanan.
  - Pameran Promosi tingkat Provinsi dan Nasional.
  - Sosialisasi Pengembangan Pengolahan Produk Perikanan Non Konsumsi.
  - Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan.

- Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (forikan).
  - Penyusunan data dan Informasi Bidang peningkatan Daya Saing Hasil Kelautan dan Perikanan.
  - Peningkatan Akses Permodalan Bagi Pelaku Usaha Perikanan.
  - Peningkatan Pelayanan Informasi Pasar.
- 10) Program Pengembangan Ekonomi Maritim, dengan kegiatan:
- Peningkatan sarana Bantu Penangkapan Ikan.
  - Peningkatan Penggunaan alat tangkap Gillnet.
  - Peningkatan Penggunaan Alat Tangkap Trammel Net.
  - Peningkatan Sarana Kapal Latih Mini Long Line.
  - Pemilihan Putra Putri maritim.
  - Percepatan Pengembangan di kab. Kep. Mentawai.
  - Peningkatan sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sikakap.
  - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Carocok.
  - Penyusunan Data dan Informasi Perikanan Tangkap.
  - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan.
  - Pengembangan Budidaya Udang vaname.
  - Peningkatan sarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Perairan Umum.
  - Peningkatan sarana Mesin Long Tail Bagi Nelayan.
- 11) Program Rehabilitasi, Konservasi, Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, dengan kegiatan :
- Sosialisasi Penerbitan perizinan Kapal perikanan (SIUP, SIPI/SIKPI) dan peraturan Perizinan Kapal.
  - Gerakan Bersih Pantai; Pengelolaan Kawasan Kawasan Konservasi Daerah (KKKD).
  - Restocking Ikan di Perairan Umum.
  - Koordinasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap.
  - Pelayanan Terpadu Penerbitan SIUP, SIPI dan SIKPI Kapal Penangkap Ikan.
  - Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
  - Penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan.
  - Forum Koordinasi Tindak Pidana Perikanan dan Peningkatan Kerjasama Aparat Penegak Hukum.

- Rehabilitasi Terumbu karang; Rehabilitasi Mangrove.
  - Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Kelautan.
  - Penyediaan sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD).
  - Sosialisasi Perda Zonasi.
  - Rehabilitasi Vegetasi Pantai.
- 12) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM, dengan kegiatan :
- Coaching Clinic Petugas Cek Fisik Kapal Perikanan Provinsi Sumatera Barat.
  - Diseminasi Pengolahan Hasil produk kelautan dan Perikanan non konsumsi.
  - Penguatan Kelembagaan Kelompok Pengolah dan Pemasaran (POKLAHSAR).
  - Peningkatan Kapasitas Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB).
  - Peningkatan pelayanan dan Kualitas Pengujian Balai Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan.
  - Peningkatan Pelayanan Pelabuhan Perikanan.
  - Bimbingan Teknis Penanganan Ikan Pada Pelabuhan PPP dan PPI.
  - Pelatihan Penangkapan Ikan bagi Nelayan.
  - Sosialisasi Alat Tangkap Ramah Lingkungan.
  - Gerakan Pakan Ikan Mandiri.
  - Forum Koordinasi dan Pembinaan Pokmaswas Tingkat Provinsi Sumatera Barat.
  - Peningkatan Pelayanan Mutu dan SDM Laboratorium.
  - Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan.
  - Pelatihan Penerapan GMP/SSOP dalam Sistem HACCP.
  - Pemberdayaan Wanita Nelayan Pada Pelabuhan Perikanan.
  - Peningkatan SDM Petugas Pembina Mutu Pengolahan Hasil Perikanan.
  - Peningkatan Pelayanan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sikakap.
  - Peningkatan SDM aparat balai perikanan budidaya air laut dan payau dan pelaku usaha perikanan.

**b. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran Rp.4.994.136.471,- dan realisasi sebesar Rp.4.543.144.723,- (90,79%).
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan anggaran Rp.3.345.924.250,- dan realisasi sebesar Rp.3.207.889.518,- (95,87 %).
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan anggaran Rp.156,000,000,- dan realisasi sebesar Rp.156,000,000,- (100,00 %).
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, dengan anggaran Rp.119.692.000,- dan realisasi Rp.116.514,000,- (97,34 %).
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan anggaran Rp.1.090.765.000,- dan realisasi sebesar Rp.1.064.433.335,- (97.59 %).
- 6) Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis, dengan anggaran Rp.1.471.905.000,- dan realisasi sebesar Rp.1.463.845.172,- (99,45%), dengan output :
  - Telah terlaksana bantuan benih kerapu bebek sebanyak 5.000 ekor, kerapu hybrid 5.000 ekor, pakan kerapu sebanyak 4.000 kg.C-San 100 buah dan Biovit 100 buah kepada 7 kelompok tani ikan di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kepulauan Mentawai serta telah dilatihnya 70 petani ikan kerapu di 3 Kabupaten.
  - Telah diserahkan bantuan benih benih nila 644.000 ekor, pakan ikan nila 18.000 kg (788), pakan ikan nila 6.000 kg (788-2), pakan ikan nila halus 770 kg dan pengadaan obat-obatan kepada 46 kelompok tani ikan pada 13 Kabupaten/Kota serta telah dilatihnya 30 petani dalam teknis dan manajemen usaha budidaya ikan nila.
  - Telah diberikannya pakan ikan nila 200 kg, pakan lele 200 kg, pakan ikan mas 200 kg, pakan ikan terapi 14 kg, pakan keliling untuk kolam terapi 28 M, pemasangan paving block 40 M di lokasi agrowisata perikanan di Kota Padang.
- 7) Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas dengan anggaran Rp.4.152.823.400,- dan realisasi sebesar Rp.4.092.538.876,- (98,55%), dengan output :



- Telah diserahkannya bantuan benih benih ikan mas 96.000 ekor, benih ikan nila 96.000 dan pakan 3.520 kg kepada 13 kelompok pada 4 Kabupaten serta telah diberikan bimbingan teknis kepada 20 orang peserta dari 5 Kabupaten/Kota.
- Telah diserahkannya bantuan induk ikan lele 550 kg, induk ikan mas 550 kg, dan pakan 4.840 kg, hapa 56 buah dan C-San Aquatik 46 buah dan Biovit 58 buah kepada 13 kelompok serta telah dilatihnya 20 orang peserta dari UPR.
- Telah diserahkan calon induk nila nirwana sebanyak 4.400 ekor, induk lele 500 kg, induk gurami 250 kg, induk mas 200 kg, pakan nila 3.520 kg, pakan ikan lele 2.400 kg, pakan ikan gurami 1.200 kg, pakan ikan mas 800 kg kepada 30 UPR dan telah dilatihnya 30 orang petani ikan pada 10 Kabupaten/Kota.
- Telah diserahkan bantuan benih ikan gurami 43.000 ekor, pakan benih ikan gurami 1.110 kg kepada 11 kelompok serta telaksananya temu teknis ikan gurami dengan peserta sebanyak 20 orang dari 4 Kabupaten/Kota.
- Telah dilatihnya 20 orang petani tentang cara perbenihan ikan yang baik (CPIB).
- Telah diserahkan bantuan benih nila sebanyak 115.000 ekor, pakan nila 1.640 kg (788-2), pakan nila 3.360 kg (788) pada 4 kelompok dan terlaksananya temu lapang bagi 30 orang kelompok pembudidaya ikan.
- Telah ditebar pakan ikan pada 4 BBI; tervalidasinya data dan informasi produksi RTP, jumlah petani, dan luas lahan; terlaksananya temu lapang pengendalian hama penyakit ikan dengan peserta 30 orang dan tersedianya obat ikan dan vitamin sebanyak 1 paket.
- Telah diserahkan benih nila sebanyak 55.175 ekor, pakan 2.680 kg di lokasi TMN.
- Telah dilatihnya 30 pembudidaya ikan lele dari kelompok di 7 Kabupaten/Kota dan telah diserahkan benih ikan lele sebanyak 160.0000 ekor, pakan lele kasar sebanyak 12.400 kg, pakan lele halus 1.800 kg, vitamin Csan Aquatic 20 buah dan vitamin Biovit 20 buah kepada 9 kelompok pembudidaya.
- Telah dilaksanakannya temu lapang peningkatan produksi ikan mas dengan peserta 40 orang dari 7 Kabupaten/Kota dan telah diserahkan benih ikan mas sebanyak 350.000

ekor, pakan mas 24.500 kg, pakan mas halus 500 kg, vitamin C-San Aquatik 140 buah dan vitamin biovit 140 buah kepada 28 kelompok, benih ikan gurami sebanyak 24.000 ekor dan pakan benih ikan gurami 400 kg kepada 2 kelompok.

- Telah dilaksanakannya pelatihan cara budidaya ikan yang baik (CBIB) sebanyak 3 angkatan dengan peserta sebanyak 90 orang.
- Tersedianya makanan induk dan benih ikan, bibit ternak/ ikan, vitamin dan obat ikan, kelengkapan operasional pembenihan lainnya, tersedianya pompa celup, pompa isap air laut, hi blow, bak fiber bundar wadah, pemanas suhu air elektronik, mesin tempel boat, tangga aluminium dan AC Laboratorium.

8) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, dengan anggaran Rp.3.755.421.500,- dan realisasi sebesar Rp.3.359.551.710,- (89,46%), dengan output :

- Tersedianya lemari asam+blower, PH meter digital, heating kjedahl, cimarec, digital string, hot plat, timbangan analitik, tangki air, mesin dap, tiang tower penyimpanan air + tapak, suku cadang HPLC dan stabilizer laboratorium.
- tersedianya pagar keliling BPBALP Teluk Buo, bak pendederan (kolam/tambak ikan kerapu dan udang vaname), bak pakan alami Teluk Buo, bak tandon air laut Teluk Buo dan bak pengolah limbah BPBALP Teluk Buo dan Sungai Nipah.

9) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil, dengan anggaran Rp.2.858.535.000,- dan realisasi sebesar Rp.2.788.086.974,- (97,54%), dengan output :

- Terlaksananya pertemuan peningkatan investasi di Jakarta dengan peserta 150 orang.
- Terlaksananya diversifikasi dalam bentuk pie ikan, mantau, stik udang dan pastel rasa abon oleh 425 orang.
- Terlaksananya forum koordinasi dan pembinaan kelompok perempuan pesisir dalam rangka kesetaraan gender sebanyak 2 kali.
- Terlaksananya pertemuan pembinaan mutu dan keamanan pangan bagi pengolah ikan sebanyak 5 kali dengan peserta 150 orang.
- Terlaksananya sosialisasi dan temu usaha dengan peserta 50 orang.

- Telah terikutinya Pasar Murah di Halaman Kantor Gubernur, Sumbang Expo di Makasar, Bazar Hari Makan Ikan di Kantor Gubernur Sumatera Barat, Hari Pangan Sedunia di Dharmasraya, Pawai Alegoris, Pameran Seafood Expo, Pameran Teknologi dan Inovasi Produk Olahan Pangan Nusantara di Yogyakarta, Pameran Hari Pers Nasional di Padang, dan Kontes Ikan Hias di Padang.
- 10) Program Pengembangan Ekonomi Maritim, dengan anggaran Rp.10.051.282.500,- dan realisasi sebesar Rp.9.539.561.891,- (94.91 %), dengan output :
- Telah diserahkan bantuan 60 unit Fish box 50 Ltr dan 105 Fish Box 200 Ltr dan 3 unit GPS kepada nelayan.
  - Telah diserahkan 85 unit alat tangkap Gillnet kepada 3 koperasi nelayan.
  - Telah diserahkan 25 unit Alat tangkap trammelnet kepada 2 koperasi di Kabupaten Pesisir Selatan.
  - Tersedianya operasional kapal latih minilong line.
  - Terpilihnya pemenang dan runner up putra putri maritime tahun 2018.
  - Terlaksananya Bimtek Penangkapan Ikan bagi nelayan sebanyak 4 kali dan telah diserahkan bantuan Mesin Tempel Yamaha 5 Pk sebanyak 43 unit kepada 3 kelompok nelayan.
  - Terlaksananya rehabilitasi mesin pabrik es Pelabuhan Perikanan Wilayah III Sikakap.
  - Tersedianya Fish Box, Sarana system informasi pemantauan cuaca terintegrasi dengan BMKG, Kantor Syahbandar, Kedai Pesisir, Lampu Solar sel, Radio SSB, CCTV Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok.
  - terlaksananya pertemuan validasi data statistik perikanan tangkap tahun 2018, bertambahnya daya 23000 watt, becak motor roda 3, rehab lantai, drainase dan bak bio security PPI Aia Bangih.
  - Terlaksananya pelatihan teknis budidaya udang vaname dengan peserta 40 orang dan diserahkannya benur udang vaname 515.000 ekor, pakan 15.000 kg, terpal 8 unit, kincir 8 unit dan obat-obatan 8 unit, diserahkannya alat tangkap Jaring Langli dan mesin tempel 2,5 Pk kepada 5 kelompok.

- Telah diserahkan bantuan 40 Mesin Long Tail kepada 6 kelompok nelayan Kab. Padang Pariaman dan Pesisir Selatan.
- 11) Program Rehabilitasi Konservasi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dengan anggaran Rp.8.115.275.310,- dan realisasi sebesar Rp.7.832.206.148,- (96,51%), dengan output :
- Terlaksananya sosialisasi peraturan perizinan kapal perikanan sebanyak 6 kali pada 6 Kabupaten/Kota dengan total seluruh peserta 120 orang.
  - Terlaksananya gerakan bersih pantai sebanyak 1 kali di Pantai Gondorih Kota Pariaman dengan peserta 250 orang.
  - Terlaksananya pelepasan tukik (anak penyu) sebanyak 11.000 ekor ke laut dan pelestarian terumbu karang sebanyak 82 unit di perairan Pulau Panjang Kota Pariaman, 1 kali rapat koordinasi dan sosialisasi kawasan konservasi perairan daerah di 7 KKPD.
  - Telah diserahkan bantuan benih garin sebanyak 70.000 ekor pada 3 Kabupaten.
  - Terlaksananya 3 kali rapat koordinasi perizinan usaha perikanan.
  - Terlaksananya pelayanan terpadu penerbitan dokumen kapal penangkapan ikan di 7 Kabupaten/Kota.
  - Tersedianya hasil pemeriksaan 547 dokumen kapal dengan temuan 366 (66,91%) kapal mempunyai dokumen lengkap dan 181 (33,09%) kapal tidak lengkap.
  - Terlaksananya penyidikan tindak pidana perikanan 1 (satu) kasus.
  - Terlaksananya forum koordinasi tindak pidana perikanan di 3 Kabupaten/Kota.
  - Tersedianya transplantasi 103 unit terumbu karang di Kab. Pesisir Selatan.
  - Terlaksananya sosialisasi mangrove di Nagari Tiram Tapakih Kab. Padang Pariaman dengan peserta 30 orang, tersedianya 50 buku statistik kelautan dan perikanan.
  - Tersedianya sarana 5 KKPD, serta tersusunnya Pergub izin lokasi dan izin pengelolaan.
  - Terlaksananya 4 kali rapat Pergub Zonasi, 5 kali rapat TKPRD dan Sosialisasi Perda Zonasi di 7 Kabupaten/Kota.

- 12) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM, dengan anggaran Rp.6.303.256.223,- dan realisasi sebesar Rp.5.903.335.828,- (93.66%), dengan output:
- Terbinanya 20 orang petugas cek fisik kapal.
  - Terlaksananya diseminasi kepada 20 pengolah limbah ikan menjadi produk sampingan berupa sepatu, tas, topi, dan mainan kunci.
  - Terlaksananya penguatan kelembagaan 30 kelompok pengolah dan pemasaran (POKLAHSAR) ikan.
  - Terlaksananya pertemuan peningkatan kapasitas konsultan keuangan mitra bank (KKMB) dengan peserta 30 orang.
  - Terlaksananya peningkatan kompetensi 20 personil BLPPMHP untuk pengujian mikrobiologi, kimia dan organoleptik, terlaksananya pelayanan operasional pelabuhan pada 6 PPP/PPI dan 7 kali pertemuan kelompok nelayan dengan jumlah peserta 175 orang dan ditebitkannya 4.601 Surat Laik Operasi (SLO) secara online, diterbitkannya 2.130 Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan tersedianya data produksi hasil tangkapan nelayan pada tahun 2018 sebanyak 1.476.155 kg dengan nilai produksi sebesar Rp.24.255.176.000,-.
  - Terlaksananya 4 kali bimbingan teknis penanganan ikan dengan peserta 100 orang, telah dilatihnya 15 nelayan Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan.
  - Telah terlaksananya 4 kali sosialisasi alat tangkap ramah lingkungan dengan peserta 140 orang.
  - Telah terlaksananya 2 kali pelatihan pembuatan pakan ikan mandiri dengan peserta 70 orang.
  - Terlaksananya 5 kali forum koordinasi dan pembinaan Pokmaswas dengan peserta 120 orang.
  - Terlaksananya inspeksi /Survaileni UPI, fasilitasi dan pembinaan UPI, sanitasi kekerangan, pengawasan terpadu pemakaian bahan kimia terlarang.
  - Terlaksananya kegiatan Bimtek Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan peserta 30 orang, terlaksananya Inhouse Training ISO 17025 : 2017 dengan peserta 13 orang.
  - Telah dilatihnya 20 pengolah ikan dalam GMP/SSOP.
  - Telah dilaksanakannya pemberdayaan 105 wanita nelayan di 3 PPP/PPI.

- Telah terlatihnya 30 SDM petugas pembina mutu pengolahan hasil perikanan.
- Terlaksananya 1 kali pertemuan bagi 30 nelayan dan tangkap dan pedagang ikan.
- Terlaksananya pelatihan teknis bagi 30 pembudidaya ikan.
- Tersedianya sarana dan prasarana UPTD BPBALP Teluk Buo berupa makanan Induk dan benih ikan, bibit ternak/ikan, vitamin dan obat ikan serta kelengkapan operasional pembenihan lainnya, 100 pasang induk udang Vannamee, pagar keliling, bak pendederan, bak pakan alami, bak tandon air laut, bak pengolah limbah, mesin tempel, pompa isap air laut, pompa celup, pompa pengering air, mesin root blower, hi blow, heater, refrigerator, timbangan, tabung oksigen, grading benih, alat semprot jaring, fiber bundar udang, AC, dan tangga aluminium.
- Terlaksananya penerapan teknologi perbenihan dan operasional produksi benih, dan terlaksananya penyediaan benih bermutu, monitoring dan pembinaan KJA di 4 Kabupaten/ Kota.
- Terlaksananya inhouse training pembenihan ikan laut dan udang vannamee.

**c. Outcomes**

- 1) Dicapainya tingkat produksi perikanan tangkap tahun 2018 sebesar 218.084,1 ton dan perikanan budidaya sebesar 257.805 ton.
- 2) Dicapainya pendapatan nelayan sebesar Rp. 35Juta/bulan dan pembudidaya ikan sebesar Rp. 43,5 Juta/bulan.
- 3) Dicapainya tingkat konsumsi ikan Sumatera Barat sebesar 40,32 kg/kapita/tahun.
- 4) Dicapainya nilai ekspor komoditas perikanan tahun 2018 sebesar 2.893,95 ton dengan nilai sebesar Rp. 203,12 Milyar.
- 5) Tercapainya pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Barat dari sektor perikanan dan kelautan sebesar Rp.1.758.625.923,-
- 6) Selanjutnya, pada tahun 2018 diperoleh 3 (tiga) prestasi tingkat nasional, yakni:
  - Runner Up II untuk Putra Putri Maritim Tingkat Nasional, yakni Novita;

- Putera Maritim Lingkungan Tingkat Nasional, yakni Oktara Roberto;
- Putri Maritim Favorit Tingkat Nasional, yakni Dea Ayu Lestari.

**d. Permasalahan dan Solusi**

1) Permasalahan :

- Pada umumnya nelayan Sumatera Barat masih merupakan nelayan skala kecil.
- Masih rendahnya SDM Kelautan dan Perikanan dan Penyuluh Perikanan yang kompeten.
- Terbatasnya sarana penangkapan serta modal usaha khususnya bagi nelayan tradisional, sehingga kegiatan penangkapan ikan kurang optimal.
- Terbatasnya akses permodalan dalam pengembangan usaha perikanan tangkap, budidaya dan pengolah/pemasaran produk hasil perikanan.
- Terbatasnya ketersediaan jumlah induk unggul di Sumatera Barat, sehingga masih harus mendatangkan induk unggul dari luar Sumatera Barat.
- Tingginya harga pakan, sehingga kebutuhan pakan ikan dicukupi dengan makanan tambahan alami. Hal ini berpengaruh terhadap laju pertumbuhan, daya tahan dan perkembangan ikan, yang akhirnya mempengaruhi kualitas ikan yang dihasilkan.
- Belum optimalnya SDM pembudidaya ikan dalam penerapan cara budidaya ikan yang baik dan cara membuat formulasi pakan ikan yang tepat.
- Sebagian besar pembudidaya masih menerapkan teknologi konservasi dan belum menerapkan inovasi teknologi.
- Terbatasnya sarana dan tenaga pengawasan.
- Rendahnya nilai tambah dan daya saing produk olahan hasil perikanan dalam menghadapi era pasar bebas.
- Belum optimalnya pengolahan paska panen dan diversifikasi olahan.
- Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan perairan umum secara berkelanjutan.

## 2) Solusi

- Melakukan pemberdayaan nelayan tangkap dalam upaya peningkatan produksi perikanan dan pendapatan nelayan melalui fasilitasi sarana penangkapan ikan.
- Meningkatkan SDM kelautan dan perikanan dan penyuluh perikanan melalui bimbingan teknis bagi pembudidaya ikan dan nelayan serta bimbingan pengolah pemasaran hasil.
- Meningkatkan akses permodalan kepada lembaga keuangan bank dan non bank.
- Mendorong peningkatan kualitas produk hasil perikanan pasca panen sehingga bernilai tambah dan berdaya saing Internasional.
- Meningkatkan ketersediaan benih ikan bermutu melalui fasilitasi penyediaan induk unggul, pembinaan kepada BBI dan Unit Pembenihan Rakyat (UPR).
- Meningkatkan SDM pembudidaya melalui bimbingan teknis budidaya ikan dan mendorong para pembudidaya menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan mendorong Balai Benih Ikan dan Unit Pembenihan Rakyat yang ada di daerah untuk meningkatkan kualitas.
- Meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan.
- Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil di Perairan Umum secara berkelanjutan melalui rehabilitasi sumberdaya lingkungan (seperti terumbu karang, mangrove, penanaman pohon pelindung pantai dan restocking perairan umum).
- Memperkuat dan meningkatkan sentra pengawasan dalam pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan dengan meningkatkan operasional pengawasan dan penerapan sanksi bagi nelayan yang melakukan illegal fishing dan pengrusakan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dengan Kabupaten/Kota dan Instansi terkait dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran program kegiatan.



## **2. Pariwisata**

Penyelenggaraan Urusan Pariwisata pada Tahun Anggaran 2018 mendapat alokasi APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.34.560.848.947,- dengan realisasi Rp.31.119.757.354,- (90,04%), untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

### **a. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- 6) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dengan kegiatan:
  - Pengembangan Strategi Brand Pariwisata Sumatera Barat.
  - Penyelenggaraan Event Tour de Singkarak 2017.
  - Familirization Trip.
  - Penyusunan Data Kepariwisataaan Sumbar.
  - Penyediaan Sarana Promosi Pariwisata.
  - West Sumatera Travel Mart.
  - Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata.
  - Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata. dan
  - Promosi Pariwisata Sumbar Di Tingkat Nasional Dan Internasional.
- 7) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif, dengan kegiatan:
  - Gelar Karya Produk Ekonomi Kreatif.
  - Promosi Produk Ekonomi Kreatif Pada Pameran Produk Kerajinan Sumbar.
  - Aktivasi Pelaku Ekonomi Kreatif.
  - Pemilihan Dan Pemberdayaan Duta Wisata Sumatera Barat.
  - Sumbar Film Festival.
  - Minangkabau Fashion Festival; dan Pemetaan Dan
  - Inventarisasi Usaha Ekraf.

- 8) Program Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata, dengan kegiatan :
  - Penghargaan Pariwisata Sumatera Barat.
  - Pemetaan Potensi Geowisata Sumbar.
  - Finalisasi Ranperda Pariwisata Halal. dan
  - Penyediaan Sarana Dan Prasarana Destinasi Pariwisata Sumbar.
- 9) Program Pengembangan Kelembagaan, SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan kegiatan:
  - Achivement Motivation Training (AMT) Bagi Pelaku Usaha Kreatif.
  - Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Industri Pariwisata.
  - Peningkatan Dan Pengembangan Gerakan Sadar Wisata.
  - Koordinasi Dan Kerjasama Antar Lembaga Pariwisata.
  - Pemetaan Usaha Pariwisata.
  - Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Pariwisata.
  - Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Pariwisata.
  - Workshop Kapasitas Pelaku Ekraf.

**b. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran Rp.2.588.974.840,- dan realisasi sebesar Rp.2.303.958.412,- (88,99%).
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran Rp.1.783.367.500,- dan realisasi sebesar Rp.1.688.285.343,- (94,67%).
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan anggaran Rp.102.613.000,- dan realisasi sebesar Rp.42.398.400,- (41,32%).
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan anggaran Rp.126.166.000,- dan realisasi sebesar Rp.70.052.078,- (55,52%).
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan dengan anggaran Rp.534.177.000,- dan realisasi sebesar Rp.511.712.025,- (95,79%).
- 6) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dengan anggaran Rp.13.466.013.007,- dan realisasi sebesar Rp.12.518.583.234,- (92,96%), dengan output:
  - Terlaksananya penguatan brand pariwisata Sumbar melalui Sosialisasi Brand Pariwisata Sumatera Barat yang

diikuti 70 orang (Pemerintahan, Media, Akademisi, Komunitas dan Asosiasi).

- Terlaksananya Tour de Singkarak 2018 pada 16 Kabupaten/Kota, 8 etape dan diikuti 21 tim (16 tim Internasional dan 5 tim Nasional).
  - Terlaksananya Famtrip oleh 40 peserta (bloggers, maskapai penerbangan, jurnalis, public figure dan travel agent).
  - Tersedianya 100 eksemplar Data Statistik Kepariwisata Sumatera Barat.
  - Tersedianya 5 media sarana promosi kepariwisataan (leaflet, booklet, poster dan media online).
  - Terlaksananya West Sumatra Travel Mart yang diikuti 110 peserta.
  - Teroperasionalkannya 3 (tiga) media dan teknologi Informasi dalam pemasaran pariwisata Sumbar (media online, media elektronik dan media sosial).
  - Terlaksananya rangkaian kegiatan untuk mendukung peringatan Hari Pers Nasional di Sumatera Barat; dan terikutinya 6 event pariwisata Nasional dan Internasional.
- 7) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif, dengan anggaran Rp.11.219.587.350,- dan realisasi sebesar Rp.10.133.060.332,- (90,32%), dengan output :
- Terselenggaranya Gelar Karya Produk Kreatif di Sumatera Barat dan Nasional yang diikuti 6 (enam) sanggar kesenian pada kegiatan Sumarak Syawal, Event di Tingkat Nasional, dan kunjungan ke negara Cina dan India.
  - Terikutinya pagelaran seni pada Pagelaran Produk Kerajinan Minangkabau di Surabaya.
  - Terlaksananya pemberdayaan 38 pelaku ekonomi kreatif dan partisipasi pada 36 event.
  - Terpilihnya Duta Wisata Sumatera Barat tahun 2018; terlaksananya Sumbar Film Festival dalam bentuk roadshow, workshop, kompetisi dan pembuatan film Dokumentasi Video Tutorial Kuliner Randang.
  - Terlaksananya Minangkabau Fashion Festival dalam bentuk Lomba Kreasi Busana Pengantin Tradisional Minangkabau, Lomba Desain Batik Minang, Lomba Kreasi Baju Muslim (Pesta), Lomba Modifikasi Baju Kurung Basiba.

- Tersedianya 300 eksemplar buku Data Pemetaan dan Inventarisasi Pelaku Usaha Ekraf Tahun 2018.
- 8) Program Pengembangan Kelembagaan, SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan anggaran Rp.3.486.189.050,- dan realisasi sebesar Rp.2.900.517.835,- (83,20%), dengan output:
- Terlaksananya Achievement Motivation Training (AMT) bagi 50 Pelaku Usaha Ekraf.
  - Terlaksananya sosialisasi halal yang diikuti 100 peserta dan biaya sertifikat halal untuk 11 (sebelas) rumah makan/restoran hotel di Sumatera Barat.
  - Terlaksananya gerakan sadar wisata sebanyak dengan peserta 450 orang.
  - Terlaksananya Workshop Koordinasi dan Kerjasama dengan Industri Pariwisata dengan peserta sebanyak 50 orang.
  - Tersedianya 100 buku Pemetaan Usaha Pariwisata; terlaksananya 6 kali pelatihan dan sosialisasi kepariwisataan.
  - Terlaksananya diklat Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Pariwisata yang diikuti 30 peserta.
  - Dilaksanakan kegiatan workshop di kota Padang sebanyak 2 (dua) kali dengan masing-masing peserta 50 (lima puluh) orang.
  - Terlaksananya 2 kali workshop sektor radio dan pemasaran online dengan peserta 100 orang.
- 9) Program Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata, dengan anggaran Rp.1.253.761.200,- dan realisasi sebesar Rp.951.189.695,- (75,87%), dengan output:
- Terlaksananya Peduli Wisata Award.
  - Tersedianya 100 eksemplar buku Pemetaan Potensi Geowisata Sumatera Barat.
  - Terlaksananya seminar Geopark Ranah Minang dan terfasilitasinya 3 kawasan Geopark Sumatera Barat untuk menjadi kawasan Geopark Nasional, yaitu Kawasan Geopark Sianok Maninjau, Sawahlunto dan Silokek Sijunjung.
  - Tersedianya DED dan izin lingkungan di Rest Area Ulu Aie.

**c. Outcomes**

- 1) Terjadinya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (lewat pintu Imigrasi) sebesar 2.35%, dari 56.313 orang tahun 2017 menjadi 57.638 orang tahun 2018 (angka sementara). Sementara target yang diharapkan adalah 7,5 %.
- 2) Terjadinya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara sebesar 3.72%, dari 7.783.876 orang tahun 2017 menjadi 8.073.070 orang tahun 2018. Sementara target yang diharapkan adalah 5,00%.

**d. Permasalahan dan Solusi**

- 1) Permasalahan

Secara umum, tidak ada permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2018. Namun ada satu kegiatan yang tidak terlaksana, yakni fisiknya hanya dicapai 50%, yakni Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal. Hal ini disebabkan karena perubahan judul Ranperda dari Pariwisata Halal mejadi Penyelenggaraan Pariwisata Halal yang persetujuannya baru diterima tanggal 31 Oktober 2018.

- 2) Solusi

Pengusulan kembali penyusunan Ranperda Penyelenggaraan Pariwsata halal pada tahun anggaran 2019.

**3. Pertanian**

Penyelenggaraan Urusan Pertanian pada Tahun Anggaran 2018 mendapat alokasi APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.88.209.416.217,- dengan realisasi Rp.84.273.459.673,- (95,54%) untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

**a. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur.
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- 5) Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis, dengan kegiatan:
  - Pengembangan manggis.
  - Sekolah lapang pengembangan padi.

- Pengembangan jeruk.
  - Pengembangan tanaman hias.
  - Pengembangan tanaman karet rakyat.
  - Peningkatan penggunaan bibit kelapa sawit bersertifikat.
  - Perluasan tanaman cengkeh.
  - Pengembangan negeri model kakao, kopi dan kelapa.
  - Pengembangan kawasan sentra produksi peternakan.
  - Registrasi kandang usaha peternakan.
- 6) Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas, dengan kegiatan:
- Pengembangan buah-buahan untuk kesejahteraan petani.
  - Pengawasan mutu dan sertifikasi benih.
  - Pengembangan perbenihan/pembibitan.
  - Penyediaan sarana brigade dan pengendalian serangan OPT.
  - Bimbingan teknis pengelolaan lahan dan air.
  - Registrasi lahan/kebun hortikultura.
  - Pengembangan tanaman pada kawasan TMMN dan bakti sosial.
  - Verifikasi dan pengendalian penyusunan RDKK.
  - Penerapan GAP dan SOP buah.
  - Pengawasan peredaran benih unggul perkebunan.
  - Sertifikasi dan pengujian benih unggul perkebunan.
  - Pelatihan penerapan PHT pada pengendalian OPT tembakau (DBHCHT).
  - Revitalisasi kelembagaan petani tembakau (DBHCHT) .
  - Revitalisasi lahan kebun rakyat.
  - Gerakan sambung pucuk tanaman kakao.
  - Gerakan pemangkasan dan pemupukan tanaman kakao.
  - Penyediaan baby kelapa sawit bersertifikat.
  - Pengawasan mutu standar pestisida.
  - Pendampingan penyaluran pupuk bersubsidi.
  - Demplot pisang sehat.
  - Pembangunan kebun benih perkebunan (kopi robusta) .
  - Demplot PHT cabe.
  - Pembangunan Pertanian TPH dan Bun di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

- Pengembangan jagung.
  - Pemantauan dan pengawasan pupuk dan pestisida.
  - Penerapan GAP/SOP sayur.
  - Pengembangan partisipatif terpadu dan pengelolaan irigasi (IPDMIP).
  - Pengembangan dan pemasyarakatan agens hayati.
  - Penanganan dampak perubahan iklim komoditi tanaman pangan hortikultura dan perkebunan.
  - Gerakan pengendalian hama utama tanaman perkebunan.
  - Monev RADGRK (Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca).
  - Peningkatan populasi ternak.
  - Pembinaan dan pendataan penyebaran ternak.
  - Kontes ternak.
  - Pelayanan rumah potong hewan.
  - Pengolahan dan pengawasan mutu produk RPH.
  - Pengembangan bio teknologi reproduksi.
  - Embrio transfer (ET) .
  - Pengawasan mutu pakan ternak.
- 7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, dengan kegiatan :
- Pengembangan alsintan dan bengkel keliling.
  - Pengelolaan sarana dan prasarana agrowisata BBI Lubuk Minturun.
  - Penggunaan alat mesin pertanian pra panen.
  - Penerapan mutu fermentasi kakao.
  - Pengembangan sarana dan prasarana balai benih induk.
  - Pembangunan/perbaikan UPTD Balai Diklat Pertanian (DAK).
  - Pembangunan/perbaikan UPTD Balai Mekanisasi Pertanian (DAK).
  - Penyediaan Sarana Pendukung UPTD Balai Mekanisasi Pertanian.
  - Pengembangan agrowisata peternakan.
  - Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan.
  - Penyediaan sarana dan prasarana peternakan.

- 8) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM, dengan kegiatan :
- Pemurnian varietas dan adaptasi pelepasan varietas (varietas lokal).
  - Penyelenggaraan penas tani.
  - Penumbuhan dan pengembangan desa mandiri benih.
  - Penyusunan dan updating data perkembangan tanaman pangan.
  - hortikultura dan perkebunan.
  - Penyebarluasan informasi/bahan publik (jumpa pers, temu kehumasan, dialog interaktif dan advokasi di media cetak).
  - Koordinasi gerakan terpadu pensejahteraan petani.
  - Temu rembug petugas pengamat OPT.
  - Pengawasan perlindungan tanaman perkebunan dan pembinaan brigade proteksi.
  - Revitalisasi kelembagaan petani gambir.
  - Penyediaan benih sumber kentang bermutu.
  - Pengawasan perizinan usaha perkebunan.
  - Pemberdayaan SDM penyuluh pertanian.
  - Sosialisasi dan pendampingan asuransi usaha tani padi.
  - Pemberdayaan kelembagaan tani.
  - Pengembangan kelembagaan pelatihan petani swadaya.
  - Pelatihan lapangan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) tanaman perkebunan.
  - Sosialisasi tugas dan peran penyuluh swadaya.
  - Pengembangan Balai Penyuluhan Model.
  - Pengembangan kelembagaan tani.
  - Potensi pertanian dalam penyelenggaraan Hari Pers Nasional.
  - Peningkatan SDM dan operator alsintan.
  - Pembinaan dan pengembangan penangkar tanaman pangan dan hortikultura.
  - Pembinaan SDM petugas dan penangkar benih tanaman perkebunan.
  - Pembinaan dan peningkatan SDM tenaga pendamping POPT dan PMT.
  - Pembinaan dan penilaian petugas teknis dan kelompok agribisnis.
  - Pelatihan petugas diagnosa gangguan reproduksi ternak.



- Peningkatan kompetensi petugas teknis peternakan.
  - Pengawasan dana investasi non pemerintah.
  - Manajemen data base penyakit hewan menular.
  - Peningkatan SDM petugas tentang teknis peternakan.
  - Koordinasi dan sosialisasi pemotongan hewan qurban sesuai prinsip ASUH.
  - Penguatan kelembagaan usaha peternakan.
  - Peningkatan penerapan pengelolaan pakan ternak (Good Feeding Practice).
- 9) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil, dengan kegiatan :
- Jaminan mutu produk olahan Kelompok Unit Pelayanan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (UP3HP).
  - Pemasyarakatan pertanian organik; Sertifikasi pangan organik.
  - Promosi pemasaran hasil pertanian tanaman pangan hortikultura dan perkebunan serta penyebaran informasi pertanian.
  - Penilaian usaha perkebunan; Penetapan harga dan pengawalan stabilisasi harga buah segar kelapa sawit.
  - Pengembangan Unit Pengolah Hasil (UPH) komoditi perkebunan.
  - Promosi dan pameran pembangunan peternakan.
  - Penyebaran informasi pembangunan peternakan Sumatera Barat.
  - Operasi pasar komoditas peternakan.
  - Penyusunan dokumen sistem manajemen mutu pelayanan peternakan dan kesehatan hewan.
  - Peringatan Hari Besar Kenegaraan.
  - Pembinaan unit usaha pangan asal hewan untuk mendapatkan sertifikasi NKV.
- 10) Program Pemberdayaan Penyuluhan, dengan kegiatan :
- Penyusunan program penyuluhan.
  - Pengelolaan data dan informasi penyuluhan.
  - Sinergitas stakeholder penyuluhan.
  - Gerakan penyuluhan pada kawasan terintegrasi.
- 11) Program Pengamanan Sumber Daya Hewani, dengan kegiatan :
- Peningkatan pelayanan laboratorium kesmavet.

- Uji banding BPAH.
- Pengendalian dan pemberantasan penyakit rabies.
- Pengendalian dan penanggulangan PHMS.
- pelayanan labor Keswan.
- Pengawasan lalulintas hewan, BAH dan HBAH.
- Investigasi dan tanggap cepat pengendalian Avian Influenza (AI) dan penyakit hewan menular Provinsi.
- Pelayanan Rumah Sakit Hewan Padang.
- Pengawasan peredaran obat hewan.
- Peningkatan pelayanan laboratorium pakan.

**b. Realisasi Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran Rp.10.064.958.519,- dan realisasi sebesar Rp.9.604.492.991,- (95,43%).
- 2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, dengan anggaran Rp.4.790.723.720,- dan realisasi sebesar Rp.4.398.184.080,- (91,81%).
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan anggaran Rp.472.690.650,- dan realisasi sebesar Rp.472.690.650,- (100,00%).
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan anggaran Rp.2.622.233.85,- dan realisasi sebesar Rp.2.477.285.850,- (94,47 %).
- 5) Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis dengan anggaran Rp.7.445.002.545,- dan realisasi Rp.7.315.324.591,- (98,26%), dengan output:
  - Terlaksananya Identifikasi CPCL dan SL GAP manggis.
  - Terlaksananya identifikasi CPCL dan pelatihan penangkaran benih.
  - Terlaksananya pelatihan panen, pasca panen dan mutu padi serta percontohan pengembangan padi.
  - terlaksananya Identifikasi CPCL dan SL GAP jeruk.
  - Terlaksananya pelatihan lansekap, perbanyak tanaman hias dan tanaman.
  - Terlaksananya sosialisasi dan belanja hibah berupa bibit karet.
  - Tersalurkannya kecambah kelapa sawit bersertifikat, digunakannya bibit kelapa sawit rakyat.

- Tersalurkannya buku saku kelapa sawit serta terlaksananya sosialisasi aspek budidaya kelapa sawit.
  - Terlaksananya sosialisasi budidaya tanaman cengkeh, pengadaan bibit cengkeh siap salur, bahan kimia/obat-obatan, pupuk NPK dan pupuk kandang.
  - Terlaksananya Sekolah Lapang Kakao, RTL pada lokasi nagari model dan pengembangan NMK, NMKo dan NMKe.
  - Terlaksananya pertemuan teknis pengembangan kawasan peternakan sebanyak 6 kali dan tersusunya master plan kawasan peternakan.
  - Registrasi 100 kandang usaha peternakan.
- 6) Program Peningkatan Produksi dan Produktifitas dengan anggaran Rp.29.422.651.789,- dan realisasi sebesar Rp.28.171.087.235,- (95,75%), dengan output :
- Terlaksananya Identifikasi CPCL, koordinasi, temu teknis dan pengadaan bibit buah-buahan.
  - Terlaksananya pertemuan koordinasi, monitoring dan pengawasan pelayanan sertifikasi benih.
  - Terlaksananya perbanyak benih sumber padi, benih sumber palawija seluas 5 Ha, perbanyak dan pemeliharaan tanaman hias serta pengembangan batang bawah bibit buah-buahan.
  - Tersedianya bahan kimia untuk brigade, pakaian kerja lapangan, operasional brigade, dan Gerakan Pengendalian serta Pelatihan Pengendalian OPT.
  - Terlaksananya pertemuan petugas dan pelatihan petugas, Gerakan Pengendalian OPT, Posko Pengendalian OPT, pelatihan singkat petani dan penilaian petani dan POPT teladan; terlaksananya rapat koordinasi, pembinaan dan monev ke kabupaten/kota, dukungan pengelolaan lahan dan air, rapat teknis PLA, Lomba P3A tingkat provinsi serta Workshop Percepatan Peluang dan prospek agribisnis (penunjang WISMP).
  - Teridentifikasinya CPCL dan terlaksananya pertemuan koordinasi, pencetakan buku pencatatan, temu teknis GAP Hortikultura, pembuatan papan merk serta pembinaan dan monitoring.
  - Terlaksananya pengadaan bibit buah-buahan, bibit sayuran dan bibit tanaman hias.

- Terlaksananya pertemuan penyusunan RDKK dan Workshop Penyusunan RDKK tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota serta rekapitulasi RDKK Tingkat Provinsi.
- Terlaksananya pertemuan koordinasi, sosialisasi, demplot kebun contoh serta pembinaan kebun jeruk.
- Terawasinya sumber benih, penangkar, perusahaan ke sumber benih dan puslit.
- Terlaksananya sertifikasi dan keragaman benih pada produsen KI benih, taksasi produksi hasil benih pada sumber benih KE benih, serta uji labor dan sertifikasi penangkar bibit perkebunan.
- Terlaksananya Pelatihan Penerapan PHT pada pengendalian OPT Tanaman Tembakau (DBHCHT).
- Terlaksananya revitalisasi sarana produksi tanaman tembakau, penyaluran bahan obat-obatan dan bahan praktek lapangan.
- Tersosialisasikannya dan terdistribusikan bibit nilam dalam rangka kegiatan Revitalisasi Lahan Kebun Rakyat.
- Dilatihnya tenaga teknis kakao sistem sambung pucuk. Gerakan Sambung Pucuk Tanaman Kakao dan terlaksananya belanja bibit kakao sambung pucuk.
- Tersosiasiasinya pemangkasan dan pemupukan kakao dan terlaksananya belanja hibah berupa pupuk anorganik, gunting pangkas tarik dan gunting pangkas biasa.
- Terlaksananya sosialisasi calon kelompok tani penerima bibit kelapa sawit, penyaluran bibit kelapa sawit serta pemeliharaan bibit kelapa sawit pada penangkar.
- Terujinya sampel formulasi dan residu pestisida serta tersedianya bahan dan peralatan.
- Tersedianya laporan verifikasi penyaluran pupuk bersubsidi.
- Tersedianya demplot pisang sehat.
- Tersedianya bibit, pupuk, pestisida dan bahan kimia lainnya untuk kopi.
- Tersedianya demplot PHT.
- Dilatihnya petani dan petugas penerapan budidaya dan teknologi TPH Bun, Demplot padi, jagung, kebun contoh tanaman buah, demplot mangga.
- Terlaksananya pertemuan koordinasi tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, field day, tanam dan sekolah

lapang pengembangan jagung hibrida serta tersedianya bibit jagung.

- Terlaksananya pertemuan koordinasi pemantauan pupuk, pengawasan pupuk bersubsidi, pengujian sampel pupuk dan pestisida yang beredar.
- Terlaksananya sosialisasi dan identifikasi CPCL kelompok pelaksana kegiatan, pelatihan singkat budidaya bawang merah dan cabe merah, pembinaan dan monitoring kegiatan penerapan GAP/SOP sayuran di kawasan sentra dan kawasan penyangga sayuran, serta pelatihan singkat budidaya kentang dan tomat di kelompok tani.
- Terlaksananya sosialisasi, rapat persiapan, new staff training, pelatihan penangkar benih praktek pembuatan benih padi siap salur serta sertifikasi.
- Terlaksananya pelatihan perbanyak agens pengendalian hayati *Trichoderma sp.*
- Terlaksananya sosialisasi demplotantisipasi kekeringan dan sekolah lapang (SL) Iklim dan pemasangan alat penangkar curah hujan.
- Dilatihnya petani tentang OPT tanaman perkebunan dan pengendaliannya.
- Terlaksananya sosialisasi pengumpulan data mitigasi sektor pertanian, penyusunan dan kaji ulang data mitigasi;
- Tersedinya 90 ekor sapi, 80 ekor kambing dan 9.460 ekor unggas.
- Terlaksananya penyebaran 60 ternak sapi pada 4 kelompok di kawasan terpadu.
- Terlaksananya 4 kali rapat pendataan perkembangan ternak budidaya.
- Terlaksananya peningkatan mutu bibit 2 ternak unggas dan Pengisian 1 unit Perlengkapan di Close House Kompartemen B.
- Terpeliharanya 3 Ternak Bibit Ruminansia (Sapi Bibit Kambing dan Rusa).
- Kontes ternak sebanyak 1 kali.
- Terjaringnya 72 bibit ternak berkualitas.
- Terolah dan terawasinya mutu ternak siap potong di RPH;
- Tersedianya 93.000 semen beku yg berkualitas secara kontinyu, 10.000 liter N2 Cair.
- 200 straw semen beku import dan 10 straw semen beku import Galician.

- Terawasinya mutu 100 bibit ternak SNI dan terbinanya mutu bibit ternak di Kabupaten/Kota.
  - Terlaksananya 10 Transfer Embrio dan terjaringnya anak ET sebanyak 5 ekor.
  - Terawasinya mutu pakan ternak pabrik, PPSK, lumbung pakan, dan lain-lain sebanyak 40 sampel.
  - Serta tersedianya 5 macam bahan dan peralatan untuk penerapan teknologi produksi pada ternak ruminansia dan terpeliharanya 65 ekor ternak di UPTD.
- 7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, dengan anggaran Rp.15.754.362.404,- dan realisasi Rp.15.450.647.115,- (98,07%), dengan output :
- Tersedianya suku cadang alsintan bengkel keliling.
  - Tersedianya sarana bermain anak, terlaksananya pemeliharaan, pagar taman, bangunan outlet serta terpeliharanya sarana dan prasarana agrowisata.
  - Terlaksananya pertemuan/rapat koordinasi alsintan, belanja hibah hand traktor dan kultivator, dan workshop inventarisasi pemanfaatan alsintan.
  - Terlaksananya workshop fermentasi kakao.
  - Tersedianya AC dan tanaman agrowisata.
  - Terbangunnya gedung kantor dan asrama Instalasi Balai Diklat Pertanian.
  - Terbangunnya gedung kantor dan gudang BMP;
  - Tersedianya sarana pendukung UPTD Balai Mekanisasi Pertanian.
  - Tersedianya sarana dan prasarana di kawasan agrowisata peternakan dan tersedianya sarana dan prasarana pendukung UPTD ternak ruminansia.
- 8) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM, dengan anggaran Rp.8.767.917.815,- dan realisasi Rp.8.247.778.430,- (94,07%), dengan output :
- Terlaksananya pemurnian varietas dan adaptasi pelepasan varietas (varietas lokal).
  - Terikutinya Penas Tani.
  - Dilatihnya petani dalam penangkaran benih padi.
  - Tersedianya buku statistik TPH dan Bun serta terlaksananya workshop penyusunan ramalan produksi dan pelatihan statistik TPH dan Bun.

- Tersebarluaskannya informasi pembangunan pertanian kepada masyarakat.
- Terlaksananya pertemuan koordinasi dengan SKPD terkait dan Kabupaten/Kota.
- Terlaksananya temu rembuk Petugas Pengamat OPT.
- Terlaksananya pertemuan pengawasan perlindungan tanaman perkebunan dan pembinaan brigade proteksi.
- Terlaksananya pelatihan kelembagaan petani gambir.
- Terlaksananya perbanyakan benih sumber kentang G2 dan G3.
- Terlaksananya pengawasan perizinan usaha perkebunan pada 7 Kabupaten.
- Terlaksananya pertemuan penyuluh.
- Penilaian penyuluh dan petani berprestasi sebanyak 12 orang.
- Terlaksananya sosialisasi asuransi usaha tani padi.
- Terlaksananya pemberdayaan kelembagaan tani.
- Terlaksananya pembinaan dan pelatihan pengembangan kelembagaan petani swadaya.
- Terlaksananya pelatihan lapangan pengendalian OPT tanaman perkebunan.
- Terlaksananya pertemuan 300 petani dan pembinaan 30 penyuluh swadaya.
- Terlaksananya pembinaan dan koordinasi balai penyuluhan model.
- Terlaksananya pembinaan dalam rangka peningkatan kelas kelompok tani.
- Tersedianya informasi dan publikasi potensi pertanian pada Hari Pers Nasional.
- Dilatihnya operator Alsintan.
- Terbinanya administrasi dan teknis perlindungan bagi POPT dan PMT.
- Ternilainya 3 Petugas Teknis dan 3 Kelompok Agribisnis Berprestasi untuk dilombakan di Tingkat Nasional.
- Dilatihnya 20 Petugas Penanganan Gangguan Reproduksi Ternak (USG).
- Dilatihnya 15 Petugas Teknis Peternakan dan terlaksananya 1 kali seminar.

- Terbina dan terawasinya Dana Investasi Non Pemerintah dan terlaksananya Pertemuan Koordinasi Skim Kredit Program.
  - Tertibnya Manajemen Database Penyakit Hewan Menular oleh petugas pelayanan veteriner di daerah Kab/Kota se Sumatera Barat.
  - Terlaksananya peningkatan kompetensi 24 petugas teknis dan penyuluh di Kabupaten/Kota.
  - Terbinanya 4 kelembagaan usaha peternakan.
  - Terlaksananya TOT dan penerapan pengelolaan pakan ternak (good feeding practice) dengan peserta 40 orang.
- 9) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil dengan anggaran Rp.3.020.174.175,- dan realisasi Rp.2.750.848.661,- (91,08%), dengan output :
- Terlaksananya Workshop GHP & GMP produk olahan dan produk segar, pertemuan peningkatan SDM pengolahan hasil, gerakan pemakaian cabe bubuk, pelatihan peningkatan mutu beras serta tersedianya peralatan pengolahan cabe dan bawang merah.
  - Terlaksananya SLAPO, demplot sayuran organik, pusat studi pertanian organik, pelatihan lapangan persiapan sertifikasi pertanian organik, pelatihan lapangan ICS, temu teknis pertanian organik dan pameran pertanian organik.
  - Terlaksananya sosialisasi SNI 6729 2016 sistim pertanian organik untuk petani, petugas, pertemuan fasilitasi pertanian organik, pertemuan audit internal LSO Sumbar, pertemuan kaji ulang LSO Sumbar, evaluasi sertifikasi pertanian organik, surveillance terhadap LSO Sumbar oleh KAN, pertemuan penyusunan dokumen sistem mutu LS Pro dan proses akreditasi LS Pro.
  - Terlaksananya promosi, penyebaran informasi harga komoditi TPH, pertemuan koordinasi, pertemuan kemitraan, lomba tanaman hias.
  - Terlaksananya penilaian usaha perkebunan di 19 kabupaten/kota.
  - Terlaksananya penilaian usaha perkebunan di 19 kabupaten/kota.
  - Terlaksananya pelatihan petani, pengembangan UPH perkebunan, penyusunan dokumen komoditi perkebunan;
  - Terikutinya 4 pameran pembangunan.



- Terpublikasinya media massa sebanyak 92 kali dan 1 kali publikasi lomba ayam kukuak balengkek.
  - Terlaksananya operasi pasar 2 komoditi.
  - Diterapkannya sistem manajemen mutu pada DPKH.
  - Terikutinya pameran/promosi pawai alegoris Tahun 2017.
  - Terlaksananya sosialisasi penerapan NKV Unit Usaha PAH dengan peserta 54 orang dan pembinaan higienis sanitasi unit usaha PAH dengan peserta 54 orang.
- 10) Program Pemberdayaan Penyuluhan, dengan anggaran Rp.518.819.000,- dan realisasi sebesar Rp.459.413.709,- (88,55%), dengan output:
- Tersedianya Dokumen Program Penyuluhan.
  - Tersedianya data dan Informasi penyuluhan.
  - Terbinanya penyelenggaraan penyuluhan dengan stakeholder penyuluhan tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
  - Terlaksananya rapat koordinasi dan sinergisitas GOP, gelar penyuluhan, konsolidasi pendampingan penyuluhan (kerjasama PT).
- 11) Program Pengamanan Sumber Daya Hewani, dengan anggaran Rp.3.529.338.910,- dan realisasi sebesar Rp.3.347.837.405,- (94,86%), dengan output:
- Diperiksa dan diujinya 550 sampel produk hewan.
  - Terlaksananya uji banding 200 sampel bahan pangan asal hewan.
  - Terlaksananya pengendalian dan pemberantasan penyakit rabies dan penyakit PHMS di 18 Kabupaten/Kota.
  - Terperiksanya 1.900 sampel asal hewan dan ternak.
  - Terawasinya lalu lintas hewan dan produk asal hewan pada 4 entry point.
  - Terinvestigasi dan terkendalinya PHM lainnya oleh Tim PDSR.
  - Terlaksananya pelayanan kesehatan 3.000 ekor hewan kesayangan dan terbinanya pelayanan kesehatan hewan ternak pada 70 Puskesmas.
  - Teraawasinya 20 obat hewan pada 18 Kabupaten/Kota, surveillance obat hewan pada 12 Kabupaten/Kota dan terlaksananya pendataan buku profil obat hewan pada 18 Kabupaten/Kota.

- Serta diperiksa dan diujinya 100 sampel bahan dan produk pakan.

**c. Outcomes**

- 1) Meningkatnya produksi dan produktivitas hasil pertanian dan perkebunan.
- 2) Meningkatnya kualitas SDM Pertanian.
- 3) Terjadinya diversifikasi produksi hasil tanaman pangan dan perkebunan.
- 4) Terpantaunya dan terverifikasinya penyaluran pupuk bersubsidi.
- 5) Terawasanya dan meningkatnya pelayanan sertifikasi benih.
- 6) Lancarnya pelaksanaan kegiatan agrowisata Lubuk Minturun.
- 7) Meningkatnya kualitas bibit peternakan.
- 8) Meningkatkan produksi daging sebesar 1,38%.
- 9) Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan hewan.
- 10) Meningkatnya pangsa pasar produk peternakan dan hasil olahan produk peternakan.
- 11) Meningkatnya kualitas pelayanan laboratorium kesehatan hewan Padang.

**d. Permasalahan dan Solusi**

Secara umum, tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan, karena fisik kegiatan teralisasi dengan baik. Namun ada kegiatan yang keuangannya tidak dapat direalisasikan relatif kecil. Hal ini disebabkan efisiensi belanja transportasi, konsumsi, dan narasumber.

**4. Kehutanan**

Penyelenggaraan Urusan Kehutanan pada Tahun Anggaran 2018 mendapat alokasi APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.39.078.076.181,- dengan realisasi sebesar Rp.32.688.063.156,- (83,65%), untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

**a. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.

- 6) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, dengan kegiatan :
  - Pembinaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Kehutanan.
  - Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Industri Kehutanan.
  - Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Pada Wilayah KPH.
  - Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan.
  - Pengembangan Kemitraan Kehutanan; Pembangunan Sarana dan Prasarana Operasional KPH-Resort (DAK).
  - Pembangunan Sarana dan Prasarana Operasional KPH-Wisata (DAK).
  - Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Melalui Kelompok Tani Hutan Alat Ekonomi Produktif (DAK).
- 7) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dengan kegiatan:
  - Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Hutan.
  - Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan.
  - Konservasi Sumber Daya Genetik.
  - Pengembangan Kualitas Bibit dan Benih Tanaman Hutan.
- 8) Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan, dengan kegiatan:
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kehutanan.
  - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Rakyat Kemitraan.
  - Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Rakyat Kemitraan.
  - Pengembangan Hutan Mangrove.
  - Peningkatan Forum Komunikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Sumatera Barat.
  - Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan.
  - Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan.
  - Penyiapan Perhutanan Sosial; Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial.
  - Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha.

- Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan.
  - Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan.
  - Sosialisasi Kebijakan RHL Oleh Penyuluh Kehutanan..
- 9) Program Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan, dengan kegiatan:
- Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan.
  - Sosialisasi, Identifikasi Hutan Adat dan Penanganan Konflik Tenurial.
  - Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan.
  - Pengendalian Perencanaan dan Tata Hutan.
  - Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat.
- 10) Program Pengendalian Kebakaran Hutan, dengan kegiatan:
- Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
  - Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
  - Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.
  - Pelatihan/Pembekalan/In House Training/Pyengaran/Bintek Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
  - Pelatihan/Pembekalan/In-house Training/Pyengaran/Bintek Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
  - Monitoring dan Evaluasi Areal Bekas Kebakaran Hutan dan Lahan.
  - Ground Check Hotspot dan/atau Informasi Kebakaran.
  - Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan.
  - Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.
  - Peningkatan Koordinasi Melalui Rapat Kerja, Rapat Koordinasi, Kunjungan Kerja dan Lain-lain.
  - Patroli Terpadu Bersama Masyarakat dan Pihak/Instansi Terkait Lainnya.

**b. Realisasi Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran Rp.3.085.487.721,- dan realisasi sebesar Rp.2.441.678.477,- (79,13%).

- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan anggaran Rp.2.135.321.000,- dan realisasi sebesar Rp.1.935.169.625,- (90,63%).
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan anggaran Rp.310.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.271.781.700,- (87,67%).
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan anggaran Rp.283.142.000,- dan realisasi sebesar Rp.217.533.000,- (76,83%).
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan, dengan anggaran Rp.711.165.000,- dan realisasi sebesar Rp.691.508.560,- (97,24%).
- 6) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, dengan anggaran Rp.9.880.165.060,- dan realisasi sebesar Rp.7.721.186.131,- (78,15%), dengan output :
  - Termonitornya 6 komoditi produk hasil hutan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kehutanan pada 10 Kabupaten/Kota.
  - Termonitornya izin pemungutan hasil hutan bukan kayu (PHHBK) dan izin usaha industri pengolahan hasil hutan kayu (IUIPHHK) pada 13 Kabupaten/Kota.
  - Terencana dan termanfaatkannya 5 petak hutan pada wilayah KPH.
  - Dilaporkannya 1,9 ton getah pinus dan jasa lingkungan.
  - Terjadinya kemitraan oleh 4 Kelompok Perhutanan Sosial.
  - Beroperasionalnya 11 unit KPH dan TAHURA.
  - Tersedianya 6 unit alat ekonomi produktif kelompok tani hutan.
- 7) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dengan anggaran Rp.4.253.399.935,- dan realisasi sebesar Rp.3.228.916.700,- (75,91%), dengan output :
  - Tersedianya 250.000 batang bibit berkualitas dan terlaksananya pembinaan terhadap penangkar benih.
  - Sertifikasi mutu 7 benih/bibit tanaman hutan, informasi dan publikasi perbenihan tanaman hutan.
  - Terbangun dan terpeliharanya 4 unit sumber daya genetic.
  - Tersedianya 400.000 batang bibit berkualitas dan terlaksananya pembinaan penangkar bibit dan 3 sumber benih tanaman hutan.

- 8) Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan, dengan anggaran Rp.4.937.286.025,- dan realisasi sebesar Rp.4.419.001.921,- (89,50%), dengan output :
- Terlaksananya Musrenbanghutda, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan antar pusat, provinsi dan kabupaten/kota (10 UPTD/KPH).
  - Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM dan wawasan pengelola HKm, HN, HTR, dan HR Kemitraan (180 Orang).
  - Terbinanya 25 kelompok/lembaga masyarakat yang mengelola hutan (HN/HKm/HTR dan HR Kemitraan).
  - Terbinanya 25 lembaga/kelompok pengelola hutan (HN/HKm/HTR dan HR Kemitraan).
  - Terlaksananya pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove sebanyak 6 kali.
  - Terlaksananya komunikasi dan sharing wawasan antar pengelola hutan berbasis masyarakat (HN, HTR, HKm, dan HR Kemitraan) dengan peserta 110 orang.
  - Terlaksananya bimtek penyuluh kehutanan dengan peserta 75 orang.
  - Terbangunnya 5 unit percontohan penyuluh kehutanan.
  - Terlaksananya penguatan 10 kelompok pengelola hutan.
  - Dilatihnya 50 kelompok usaha perhutanan sosial.
  - Diberdayakannya 6 kelompok tani hutan dari pemula menjadi madya.
  - Terlaksananya temu teknis dengan peserta 160 orang dan workshop peningkatan kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha dengan peserta 80 orang.
  - Tersedianya draft programa penyuluhan di tingkat KPH tahun 2019.
  - Serta terlaksananya 2 kali bimbingan teknis bagi penyuluh kehutanan dan sosialisasi kebijakan RHL bagi masyarakat sekitar RHL dengan peserta 85 orang.
- 9) Program Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan, dengan anggaran Rp.1.184.109.440,- dan realisasi sebesar Rp.984.690.250,- (83,16%), dengan output:
- Terkendalinya pemanfaatan 23 unit kawasan hutan.
  - Terlaksananya 20 kali sosialisasi, identifikasi hutan adat dan penanganan konflik tenurial.
  - Terpeliharanya 70 KM batas kawasan hutan.

- Tersedianya 10 buku pengendalian perencanaan dan tata hutan.
  - Teridentifikasi dan terfasilitasi 15 konflik dan hutan adat melalui 20 kali pertemuan.
- 10) Program Pengendalian Kebakaran Hutan, dengan anggaran Rp.12.298.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.10.776.596.792,- (87,63%), dengan output:
- Terlaksananya 53 kali patrol pencegahan kebakaran hutan pada 6 kelompok masyarakat peduli api yang dibina.
  - Tersedianya 406 unit sarana dan prasarana kebakaran hutan dan lahan.
  - Terlaksananya sosialisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan peserta 450 orang.
  - Terlaksananya bimbingan teknis pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan peserta 375 orang.
  - Terlaksananya 40 kali monitoring dan evaluasi areal bekas kebakaran hutan dan lahan.
  - Terlaksananya 1 kali ground check hotspot.
  - Terlaksananya 1 kali pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
  - Terlaksananya 10 kali patrol pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
  - Terlaksananya 30 kali koordinasi melalui kunjungan kerja pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
  - Terlaksananya 25 kali patrol Terpadu Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.

**c. Outcomes**

- 1) Peningkatan kapasitas luas dan fungsi kawasan konservasi diluar kawasan pelestarian alam, sehingga keberadaan keanekaragaman hayati dan ekosistem yang terdapat di areal tersebut dapat terus dilestarikan.
- 2) Termanajemennya lahan kritis di daerah.
- 3) Menurunnya kasus illegal logging yang ditindaklanjuti.
- 4) Peningkatan kualitas dan akses informasi pembangunan kehutanan.
- 5) Peningkatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai fungsi dan peruntukannya.
- 6) Optimalisasi PNPB sektor kehutanan dari HHK dan HHBK;

- 7) Peningkatan produksi hasil hutan kayu (HHK) dan hasil hutan bukan kayu (HHBK).

**d. Permasalahan dan Solusi**

1) Permasalahan

- Ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan tidak mencapai output 100%, sebagai berikut:
  - Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana operasional KPH-Wisata (DAK) karena terkendala pada izin lingkungan yang belum dimiliki untuk pengembangan sarana dan prasarana wisata alam pada KPHL Bukit Barisan.
  - Kegiatan monitoring dan evaluasi areal bekas kebakaran hutan dan lahan, dengan target lokasi di Tapan Kabupaten Pesisir Selatan tidak bisa dilaksanakan seluruhnya karena sifatnya situasional dimana hanya terjadi 1 kali kebakaran hutan dan lahan di Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.
  - Kegiatan Ground Check Hotspot dan/atau Informasi Kebakaran karena sifatnya situasional dimana tidak termonitor adanya titik hotspot.
  - Kegiatan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan, karena hanya terjadi 1 kali kebakaran hutan dari target sebanyak 15 kali.
- Ada kegiatan yang telah dilaksanakan 100% namun atau hasil yang belum maksimal, yakni Kegiatan sosialisasi, identifikasi hutan adat dan penanganan konflik tenurial, khususnya di Nagari Malalo Tigo Jurai, karena adanya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari yang belum sesuai dengan KLHK. Perda memang telah menyebutkan masyarakat adat dan tata cara adat, namun belum secara jelas menyebutkan keberadaan masyarakat hukum adat yang mencakup suku, luas, asset suku dan lain sebagainya. Sementara KLHK dapat memproses pengusulan hutan adat jika dalam Perda menyebutkan masyarakat hukum adat, keberadaan mereka dalam wilayah administrasi pemerintah, luas wilayah adat, batas antara penguasaan wilayah adat.

2) Solusi

Telah disampaikan agar Pemda Kabupaten Tanah Datar dapat melakukan revisi terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari.



## **5. Energi dan Sumber Daya Mineral**

Penyelenggaraan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral pada Tahun Anggaran 2018 mendapat alokasi APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.12.780.923.184,- dengan realisasi Rp.12.138.832.381,99 (94,98%), untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

### **a. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- 6) Program Pengembangan Tenaga Kelistrikan, dengan kegiatan:
  - Inventarisasi rumah tangga sederhana (RTS) yang belum berlistrik.
  - Perencanaan DED pembangunan PLTMH.
  - Pembangunan PLTMH.
  - Pembangunan PLTS.
  - Inventarisasi dan evaluasi PLTMH di Sumatera Barat.
  - Inventarisasi dan evaluasi PLTS di Sumatera Barat.
  - Penerbitan usaha ketenagalistrikan oleh PPNS dan Inspektur Ketenagalistrikan.
  - Penyusunan dokumen RUED.
  - Penataan kelembagaan dan tarif listrik PLTMH.
  - Pembangunan PLTMH (DAK).
- 7) Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Energi, dengan kegiatan:
  - Evaluasi pelaksanaan penghematan energi pada gedung.
  - Penyusunan Evaluasi pelaporan rencana aksi daerah (RAD) – Gas Rumah Kaca (GRK).
  - Pemantauan perkembangan pembangunan pembangkit listrik dari energi baru terbarukan.
- 8) Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara, dengan kegiatan:
  - Evaluasi dan pendataan luas lahan terganggu dalam IUP.
  - Monitoring dan evaluasi tambang rakyat.
  - Monitoring dan evaluasi produksi dan penjualan.

- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban pemegang IUP.
  - Bimbingan teknis pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara.
  - Evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sekitar tambang.
  - Pengelolaan perizinan pertambangan.
  - Pengendalian terhadap usaha pertambangan.
  - Pengendalian lingkungan, reklamasi dan pasca tambang pada usaha pertambangan.
  - Monitoring dan evaluasi produksi, penjualan dan PNBP mineral logam dan batubara.
- 9) Program Pengelolaan, Pengembangan dan Konservasi Air Tanah, dengan kegiatan:
- Penelitian zonasi air tanah Sumatera Barat.
  - Inventarisasi pengguna air tanah di Sumatera Barat.
  - Penyelidikan air tanah dengan metode geolistrik Sumatera Barat.
  - Sosialisasi perizinan air tanah; Penelitian zona konservasi air tanah dalam cekungan air tanah (CAT) di Sumatera Barat.
  - Monitoring dan pengendalian izin dan pemanfaatan air tanah.
- 10) Program Perencanaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya dan Mineral, dengan kegiatan:
- Penyusunan perencanaan program pembangunan energi dan sumber daya mineral.
  - Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan OPD.
  - Sosialisasi peningkatan sumber daya manusia ASN.

**b. Realisasi Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran Rp.2.658.591.548,- dan realisasi sebesar Rp.2.380.818.208,- (89,55%).
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan anggaran Rp.1.427.931.850,- dan realisasi sebesar Rp.1.381.892.734,- (96,78%).
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan anggaran Rp.77.760.000,- dan realisasi sebesar Rp.72.897.000,- (93,75%).

- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan anggaran Rp.180.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.177.650.600,- (98,69%).
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan anggaran Rp.416.537.150,- dan realisasi sebesar Rp.369.734.700,- (88,76%).
- 6) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan, dengan anggaran Rp.4.387.779.020,- dan realisasi sebesar Rp.4.268.233.040,- (97,28%), dengan output :
  - Tersedianya data 65.784 KK RTS yang belum berlistrik pada 4 Kabupaten.
  - Tersedianya 2 DED Pembangunan PLTMH (di jorong Rotan Gotah, Nagari Muaro Sungai Lolo, Kec. Mapattunggul Selatan Kab. Pasaman dengan potensi kapasitas terbangkit sebesar 25 kVA dan Jorong Tanjung Balik, Nagari Simiso, Kec. Tigo Lurah, Kab. Solok, dengan potensi kapasitas terbangkit 20 kVA).
  - Terbangunnya PLTMH dengan kapasitas 20 kW untuk 34 KK di Kp. Baru, Nag. Silayang, Kec. Mapat T. Selatan, Kab. Pasaman.
  - Terpasangnya PLTS di Kp. Aia Manyuruak, Nagari Muaro Sungai Lolo, Kec. Mapattunggul Selatan, Kab. Pasaman 35 (tiga puluh lima) unit, Nagari Ampang Tareh Lumpo, Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan 4 (empat) unit, Nagari Sawah Laweh Pasar Baru, Kec. Bayang Kabupaten Pesisir Selatan 11 (sebelas) unit dan Nagari Garabak Data, Kec. Tigo Lurah Kab. Solok 20 unit.
  - Terlaksananya peninjauan 16 PLTMH, dimana 12 PLTMH beroperasi, 2 tidak beroperasi dan 2 rusak berat, 2 PLTMH masih baik tidak beroperasi.
  - Terinventarisasinya 18 PLTS dan lokasi SHS.
  - Terlaksananya penertiban 26 Perizinan Izin Operasi (IO) usaha ketenagalistrikan dan 18 Perizinan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL; dokumen RUED yang dituangkan kedalam Rancangan Peraturan Daerah.
  - Terlaksananya penataan kelembagaan 23 badan usaha pengelola PLTMH.
  - Tersedianya PLTMH berkapasitas 10 kW untuk 92 KK di Jorong Tambang, Nag. Surian, Kec. Pantai Cermin, Kabupaten Solok.

- 7) Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Energi, dengan anggaran sebesar Rp.394.598.000,- dan realisasi sebesar Rp.358.774.600,- (90,92), dengan output:
- Diketuinya angka efisiensi penggunaan listrik pada gedung SKPD Sumbar yakni 5,76%.
  - Diketuinya penurunan emisi GRK total di Provinsi Sumatera Barat yakni 5.426,52 ton CO<sub>2</sub>e.
  - Terpantau dan terawasinya pembangunan 13 pembangkit EBT.
- 8) Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara, dengan anggaran sebesar Rp.2.003.192.070,- dan realisasi sebesar Rp.1.960.373.200,- (97,86%), dengan output :
- IUP Mineral Logam dan Batubara dan IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan yang telah memulai pelaksanaan kegiatan reklamasi dari 126 IUP pada 12 Kabupaten/Kota.
  - Termonitornya aktivitas 67 tambang rakyat (47 bahan galian emas dengan 250 tenaga kerja dengan luas bukaan lahan ± 20 hektare dan 20 bahan galian batuan (sirtu, andesit, tras dan batugamping) dengan 470 tenaga kerja serta luas bukaan lahan ± 50 hektare.
  - Diketuinya produksi sirtu sebesar 44.520,81 m<sup>3</sup> dengan total penjualan 13.756,58 m<sup>3</sup>, produksi andesit 1.449.108,72 m<sup>3</sup> dengan total penjualan 3.011,66 m<sup>3</sup>, produksi gamping 5.283.448,24 m<sup>3</sup> dengan penjualan 28.372,66 m<sup>3</sup>, produksi trass 395.213,22 m<sup>3</sup>, produksi clay 50.239 m<sup>3</sup> dan total produksi obsidian 1.150 m<sup>3</sup>.
  - Termonitornya 55 IUP yang belum memenuhi kewajibannya baik sebagian maupun keseluruhan.
  - Terlaksananya 2 kali bimtek pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara di Sawahlunto dan Bukittinggi dengan peserta 50 orang.
  - Terlaksananya evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sektor wilayah tambang pada 34 IUP.
  - Diterbitkannya 216 izin mineral bukan logam dan batuan yang terdiri dari WIUP, IUP Eksplorasi dan IUP operasi produksi.
  - Terpantaunya 59 Izin Usaha Pertambangan (IUP).
  - Tersedianya data pengendalian lingkungan, reklamasi dan pasca tambang pada 59 Izin Usaha Pertambangan (IUP).
  - Termonitorinya produksi, penjualan dan PNBP mineral logam dan batubara dengan produksi batubara tahun

2018 sebesar 474.828,63 MT dan penjualan sebesar 499.900,12 MT, penjualan mineral logam (bijih besi) sebesar 53.819 MT dan penyetoran PNPB tahun 2018 sebesar Rp.40,098,882,626,-.

- 9) Program Pengelolaan, Pengembangan dan Konservasi Air Tanah, dengan anggaran sebesar Rp.905.855.746,- dan realisasi sebesar Rp.874.321.050,- (96,52%), dengan output:
  - Tersedianya informasi cakupan lokasi kajian zona resapan air tanah pada 2 kab. Kota.
  - Tersedianya data jumlah pengguna/pemakai air tanah pada 10 Kab/Kota (200 sumur).
  - Tersedianya data geolistrik di daerah yang sulit air tanah pada 2 Kabupaten/Kota (60 titik).
  - Terlaksananya sosialisasi perizinan air tanah kepada masyarakat pengguna air tanah.
  - Tersedianya cakupan lokasi kajian cekungan air tanah (CAT) pada 2 CAT.
  - Terawasi dan terkendalinya izin pemanfaatan air tanah.
- 10) Program Perencanaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan anggaran sebesar Rp.328.677.800,- dan realisasi sebesar Rp.294.137.250,- (89,49%), dengan output :
  - Tersedianya rencana program pembangunan energi dan sumber daya mineral untuk Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
  - Terpantaunya program dan Kegiatan DESDM.
  - Terlaksananya sosialisasi SPIP untuk ASN DESDM.

**c. Outcomes**

- 1) Tercapainya usaha ketenagalistrikan yang sesuai aturan.
- 2) Meningkatnya kapasitas/penyediaan arus listrik.
- 3) Meningkatnya jumlah rumah tangga berlistrik.
- 4) Terlaksananya penghematan energi dan air pada gedung pemerintah.
- 5) Meningkatnya perekonomian masyarakat sekitar tambang.
- 6) Terwujudnya pemanfaatan air tanah sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
- 7) Lebih terkendalinya kegiatan operasi usaha pertambangan.
- 8) Meningkatnya pengetahuan sumber daya manusia selaku aparatur sipil Negara.

#### **d. Permasalahan dan Solusi**

##### **1) Permasalahan**

- Terbatasnya akses jalan yang memadai untuk mencapai desa yang belum terlistrik.
- Minimnya pengetahuan masyarakat, terutama terhadap penambangan tanpa izin, sehingga masyarakat seringkali menghalangi upaya penertiban yang dilakukan aparat.
- Masih banyaknya pemegang IUP yang tidak memenuhi kewajiban seperti tidak adanya rambu peringatan (batas kecepatan, arah dan penggunaan perseneling) pada turunan, belum memiliki SOP pembongkaran bahan peledak, mengabaikan kewajiban melengkapi pekerja tambang dengan Alat Pelindung Diri (APD), masih terdapat IUP yang tidak memiliki Kepala Teknik Tambang (KTT) sehingga pengawasan kegiatan penambangan tidak sesuai aturan teknis pertambangan.
- Masih banyak pengguna air tanah komersil yang belum mengetahui kewajiban perizinan penggunaan air tanah

##### **2) Solusi**

- Kepada daerah diharapkan untuk dapat meningkatkan akses jalan kepada desa yang tidak berlistrik.
- Akan terus disosialisasikan kepada IUP, agar pengelolaan kegiatan pertambangan harus mempedomani ketentuan yang berlaku.
- Akan terus diupayakan untuk mensosialisasikan kepada pengguna air tanah untuk dapat memenuhi ketentuan yang berlaku.

#### **6. Perdagangan**

Penyelenggaraan Urusan Perdagangan pada Tahun Anggaran 2018 mendapat alokasi APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.9.832.730.394,- dengan realisasi Rp.7.723.540.651,- (78,55%), untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

##### **a. Program dan Kegiatan**

- ##### **1) Program Peningkatan Perlindungan Konsumen, dengan kegiatan:**
- Pengawasan barang beredar di pasaran (SNI wajib, label/MKG, AMDK dan garam beryodium).
  - Penguatan dan fasilitasi kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

- Pengawasan tertib niaga; serta Sosialisasi kebijakan dan regulasi perlindungan konsumen.
- 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, dengan kegiatan:
  - Temu usaha dan sosialisasi peraturan perdagangan luar negeri.
  - Pengawasan mutu komoditi.
  - Pembuatan buku data perdagangan luar negeri.
  - Pengujian mutu barang ekspor.
  - Pameran produk ekspor.
  - Reakreditasi laboratorium penguji dan kalibrasi.
- 3) Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, dengan kegiatan :
  - Monitoring distribusi pupuk bersubsidi.
  - Promosi produk industri kecil menengah daerah.
  - Sosialisasi peningkatan penggunaan produksi dalam negeri.
  - Forum dagang dalam negeri.
  - Monitoring distribusi barang di Kabupaten/Kota.
  - Pelaksanaan pasar murah.
  - Pengembangan pasar komoditi lokal melalui pasar lelang luar Provinsi.
  - Lomba pasar rakyat.
  - Promosi potensi industri kecil menengah pada penyelenggaraan Hari Pers Nasional.

**b. Realisasi Program dan Kegiatan.**

- 1) Program Peningkatan Perlindungan Konsumen, dengan anggaran Rp.1.012.631.764,- dan realisasi sebesar Rp.889.881.204,- (87,88%), dengan output :
  - Terlaksananya 4 kali pengawasan terhadap 7 produk di pasaran (SNI wajib, label/MKG, AMDK dan garam beryodium).
  - Terlaksananya 2 kali pembinaan dalam bentuk bimbingan teknis dengan peserta 95 orang dan 5 koordinasi kelembagaan BPSK di 11 Kabupaten/Kota.
  - Terlaksananya pengawasan distribusi, perizinan perdagangan dan barang K3L sebanyak 3 kali.
  - Terlaksananya 2 kali sosialisasi kebijakan dan regulasi perlindungan konsumen, jalan sehat dan lomba mewarnai.

- 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, dengan anggaran Rp.5.415.955.580,- dan realisasi sebesar Rp.3.984.583.281,- (73,57%), dengan output :
- Terlaksananya 1 kali pertemuan eksportir dan UKM dengan instansi terkait dengan peserta 60 orang dan sosialisasi peraturan perdagangan luar negeri bagi aparat, UKM dan eksportir dengan peserta 60 orang.
  - Tersedianya hasil uji mutu 7 komoditi ekspor di 12 Kabupaten/Kota.
  - Tersedianya 130 buku data dan 200 booklet perdagangan luar negeri.
  - Terlaksananya pengujian mutu barang ekspor terhadap 6 komoditi uji.
  - Terikutinya pameran produk ekspor sebanyak 11 kali.
  - Terlaksananya reakreditasi/surveilen UPTD BPMB di 2 laboratorium.
- 3) Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, dengan anggaran Rp.3.404.143.050,- dan terealisasi sebesar Rp.2.849.076.166,- (83,69%), dengan output :
- Terlaksananya monitoring distribusi pupuk bersubsidi di tingkat distributor dan pengecer di 18 Kab/Kota.
  - Terikutinya pameran dalam daerah sebanyak 3 kali dan pameran luar Sumatera Barat sebanyak 9 kali.
  - Terlaksananya sosialisasi peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dengan peserta 100 orang.
  - Terlaksananya forum dagang dalam negeri pada 2 lokasi (PT. Sari Ayu Indonesia dan Pusat Perbelanjaan Sarinah Jakarta) dengan peserta terdiri dari OPD Provinsi sebanyak 4 orang, Biro Perekonomian sebanyak 2 orang, OPD Kabupaten/Kota sebanyak 11 orang dan Pelaku Usaha sebanyak 8 orang.
  - Tersedianya data dan informasi distribusi barang di 15 kabupaten/kota.
  - Terlaksananya pasar murah bagi masyarakat di 5 lokasi.
  - Terikutinya pasar lelang luar provinsi sebanyak 3 kali (Lampung, Jawa Tengah, dan Jawa Barat) dengan pelaku usaha yang diikuti sebanyak 6 orang.
  - Terpilihnya pasar rakyat yang berkondisi baik di Sumatera Barat sebanyak 10 pasar rakyat.



- Terlaksananya promosi pada Hari Pers Nasional di Padang dengan mengikutsertakan 5 IKM.

**c. Outcomes**

- 1) Peningkatan omset pasar rakyat sebesar 6,15 persen dari target sebesar 6,3 persen.
- 2) Tercapainya persentase produk dan jasa yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan sebesar 6,15 persen dari target sebesar 8,33 persen.
- 3) Nilai ekspor yang diharapkan meningkat 2 persen, kenyatannya mengalami penurunan cukup signifikan, yakni turun 22,05 persen.

**d. Permasalahan dan Solusi**

1) Permasalahan

Secara umum, tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Kecilnya realisasi keuangan hanya disebabkan karena efisiensi penggunaan karena sebagai akibat realisasinya yang lebih kecil dari standar biaya yang ditetapkan. Namun demikian, hasil yang diharapkan belum optimal dicapai, antara lain disebabkan karena :

- Sebahagian masyarakat masih tidak ambil pusing terhadap perlindungan konsumen.
- Produksi produk ekspor tertentu mengalami penurunan, baik kuantitas maupun kualitas.
- Masih adanya kampanye negatif terhadap produk ekspor daerah di luar negeri, yakni CPO.

2) Solusi

- Secara terus menerus mengkampanyekan dan mensosialisasikan pentingnya konsumen cerdas untuk perlindungan konsumen.
- Berkoordinasi dengan OPD terkait untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ekspor daerah.

**7. Perindustrian**

Urusan Perindustrian pada Tahun Anggaran 2018 mendapat alokasi APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.11.517.730.084,- dengan realisasi sebesar Rp.10.380.851.564,- (90,13%), untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

**a. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- 6) Program Pengembangan Perwilayahan Industri, dengan kegiatan:
  - Pelatihan dan Lomba Desain Tenun Sumatera Barat.
  - Pelatihan dan Lomba Desain Produk Bordir/Sulaman Sumatera Barat.
  - Pelatihan Pengembangan Desain dan Diversifikasi Produk dari Kulit.
  - Pelatihan Diversifikasi Produk Berbahan Baku Ikan.
  - Sosialisasi Pengembangan Industri Melalui OVOP, Sentra dan Klaster.
  - Diversifikasi Produk Kerajinan dan Pembinaan Lanjutan.
  - Pelayanan Klinik Konsultasi Industri Kecil dan Menengah.
  - Pelayanan Klinik Konsultasi Industri Kecil dan Menengah.
- 7) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan kegiatan:
  - Sosialisasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk Industri Kecil Menengah.
  - Pelatihan Teknis Permesinan Pengolahan Rotan bagi IKM dan Aparat Pembina.
  - Pelatihan Teknis dan Diversifikasi Produk Kakao bagi Industri Kecil Menengah.
  - Pelatihan Pembuatan Produk dan Peralatan Logam.
  - Pelatihan Kompetensi Pengelasan bagi Industri Kecil Menengah Logam Mesin.
  - Pelatihan Penggunaan Teknologi Tepat Guna bagi Industri Kecil dan Menengah.
  - Bimbingan Teknis dan Pengawasan Teknis tentang Izin Usaha Industri.
  - Pelatihan Produksi Barang dari Bahan Baku Karet.
  - Sosialisasi Prototipe Teknologi Tepat Guna.
  - Pelatihan CPPOB bagi Industri Kecil dan Menengah Berbasis Ikan.
  - Sosialisasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Sumatera Barat.

**b. Realisasi Program dan Kegiatan.**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran Rp.3.608.588.818,- dan realisasi sebesar Rp.3.250.015.604,- (90,06%)
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan anggaran Rp.2.659.694.325,- dan realisasi sebesar Rp.2.526.614.750,- (95,00%).
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan anggaran Rp.101.088.000,- dan realisasi sebesar Rp.91.024.428,- (90,04%).
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan anggaran Rp.316.596.000,- dan realisasi sebesar Rp.196.437.312,- (62,05%).
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan anggaran Rp.551.816.000,- dan realisasi sebesar Rp.431.131.016,- (78,13%).
- 6) Program Pengembangan Kewilayahan Industri, dengan anggaran Rp.2.225.509.441,- dan realisasi sebesar Rp.1.971.728.145,- (88,60%), dengan output:
  - Dilatihnya 60 orang IKM di 4 sentra dalam desain tenun dan terlaksananya lomba desain busana tenun bagi 20 orang IKM.
  - Dilatihnya 20 IKM bordir dalam desain bordir/sulaman dan terlaksananya lomba desain bordir/sulaman.
  - Dilatihnya 30 IKM dalam pembuatan tas berbahan baku kulit kombinasi tenun.
  - Dilatihnya 50 IKM dalam diversifikasi produk berbahan baku ikan.
  - Terlaksananya sosialisasi pengembangan industri melalui OVOP, sentra dan klaster.
  - Terlaksananya diversifikasi produk kerajinan berbasis anyaman pandan dan bagi 20 orang IKM, pembinaan lanjutan, lomba kriya dan studi komparatif.
  - Terlaksananya pelatihan teknis pengolahan minyak atsiri bagi 45 orang IKM dan 19 hasil uji labor.
  - Terlaksananya pelayanan klinik konsultasi IKM dan bimbingan IKM dalam bentuk bimtek manajemen bisnis dan bimbingan label dan kemasan sebanyak 3 kali kepada 75 IKM.

- Terlaksananya bimbingan teknis pendataan bagi aparat dan tersedianya 40 buku data informasi IKM.
- 7) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan anggaran Rp.1.963.887.500,- dan realisasi sebesar Rp.1.823.350.309,- (92,84%), dengan output:
- Terlaksananya Sosialisasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk dan terfasilitasinya standarisasi serta sertifikasi produk IKM sebanyak 106 sertifikasi (50 sertifikat halal, 5 MD, 1 buah SNI dan 50 merk).
  - Dilatihnya 5 aparat pembina dan 10 IKM dalam teknis permesinan pengolahan rotan.
  - Dilatihnya 25 IKM kakao dalam teknis dan diversifikasi produk;
  - Dilatihnya 15 IKM dalam pembuatan alat pengiris ubi multiguna (slicer) dan 15 orang IKM pembuatan alat peniris minyak (spinner).
  - Dilatihnya 15 IKM dalam kompetensi pengelasan.
  - Dilatihnya 20 IKM dalam pengolahan komoditi dengan menggunakan teknologi tepat guna.
  - Terlaksananya pembinaan dan pengawasan kepada 57 aparat/petugas penerbitan izin usaha industri.
  - Dilatihnya 25 IKM dalam teknis dan diversifikasi produk bahan baku karet.
  - Tersosialisasinya prototipe teknologi tepat guna kepada 150 orang sebanyak 3 kali.
  - Dilatihnya 25 IKM berbasis ikan dari 11 Kab/Kota dalam CPPOB.
  - Tersosialisasikannya RPIP Sumatera Barat kepada 100 orang (aparatur dan stakeholder terkait).

**c. Outcomes**

- 1) Berkembangnya desain produk kerajinan bordir/tenun dan kulit di daerah.
- 2) Meningkatnya pengetahuan IKM tentang pengembangan OVOP, sentra dan klaster.
- 3) Meningkatnya kualitas mutu dan standard produk IKM di daerah, yakni atsiri, makanan, coklat, berbahan baku karet.
- 4) Meningkatnya kualitas IKM dan aparatur pembina IKM di daerah, sehingga dapat menerapkan produksi dengan cara berproduksi yang baik (CPPOB).

**d. Permasalahan dan Solusi**

1) Permasalahan

- Daya saing produk IKM yang masih rendah (kualitas, standarisasi, desain, harga, kemasan dan kontinuitas produksi).
- Masih terbatasnya kemampuan pemasaran sebagian besar industri kecil Sumatera Barat dan permodalan yang masih lemah.
- Keterbatasan kualitas SDM pelaku usaha industri kecil.
- Keakuratan data industri dari kab/kota masih lemah.

2) Solusi

- Dilakukan pelatihan dan pendampingan untuk mendapatkan sertifikasi produk.
- Memberikan pendampingan dan dukungan pemasaran dalam bentuk pelatihan dan promosi produk (promosi langsung dan secara online).
- Dilakukan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha guna meningkatkan kualitas dan keterampilannya.
- Meningkatkan dan mengintensifkan koordinasi dengan kabupaten/kota.

## 8. Transmigrasi

Urusan Transmigrasi pada Tahun Anggaran 2018 mendapat alokasi APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.921.126.400,- dengan realisasi sebesar Rp.910.292.362,- (98,82%), untuk melaksanakan program dan kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

### a. Program dan Kegiatan

Pada urusan ini hanya dilaksanakan 1 (satu) program, yakni Program Percepatan, Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur pada Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, dengan kegiatan:

- Pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya di Satuan Permukiman Transmigrasi.
- Pengelolaan, Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi.
- Pelatihan Keterampilan Warga Transmigrasi.
- Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi.
- Penataan persebaran Penduduk Warga Transmigrasi.

### b. Realisasi Program dan Kegiatan

Program Percepatan Pembangunan Dan Pengembangan Infrastruktur Pada Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal

mendapat alokasi dana sebesar Rp.921.126.400,- dengan realisasi sebesar Rp.910.292.362,- (98,82%), dengan output :

- Terbinanya 2 unit Satuan Pemukiman Transmigrasi.
- Terfasilitasinya 8 lembaga usaha di kawasan transmigrasi.
- Disepakatinya 2 MOU pengembangan transmigrasi.
- Diatuhnya 120 warga transmigrasi.

**c. Outcomes**

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan transmigrasi ini adalah meningkatnya pendapatan masyarakat di Kawasan Transmigrasi sebesar 25 persen dari target sebesar 40 persen.

**d. Permasalahan dan Solusi**

**1) Permasalahan**

Untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2018 pada prinsipnya tidak menghadapi permasalahan, akan tetapi target outcome berupa peningkatan pendapatan masyarakat di kawasan transmigrasi sebesar 40 persen, disebabkan karena belum optimalnya kualitas produksi yang dihasilkan, sehingga harga yang diperoleh juga belum maksimal.

**2) Solusi**

Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di kawasan transmigrasi akan terus diupayakan peningkatan kualitas produk yang dihasilkan oleh transmigran, dengan mengkoordinasikannya dengan SKPD terkait.

**C. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**

**1. Fungsi Sekretariat Daerah**

Fungsi Sekretariat Daerah pada Tahun Anggaran 2018 dengan anggaran sebesar Rp.137.309.699.422,- dan realisasi Rp.124.288.340.654,- (90.52%), untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

**a. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- 5) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.'
- 6) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan, dengan kegiatan :

- Penyediaan jasa pelayanan tamu pemerintah daerah.
  - peringatan hari-hari besar nasional.
- 7) Program Pengembangan Data dan Informasi dengan kegiatan : Pemanfaatan dan Pengelolaan Website Kerjasama Rantau.
  - 8) Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Provinsi dan SKPD Provinsi Sumatera Barat, dengan kegiatan :
    - Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
    - Monev Pencapaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Prov. Sumbar.
    - Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.
    - Bimbingan Teknis Sistem AKIP Provinsi dan Kab/Kota se-Sumbar
  - 9) Program Manajemen Perubahan, dengan kegiatan : Sosialisasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
  - 10) Program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur, dengan kegiatan :
    - Evaluasi Disiplin PNS Setda Prov. Sumbar.
    - Pengelolaan Personal Record dan Dokumentasi Kepegawaian.
    - Monitoring Pengembangan Karier PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
    - Rakornis Pembinaan Aparatur Daerah Provinsi Sumatera Barat.
    - Monitoring dan Evaluasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
    - Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.
  - 11) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan kegiatan :
    - Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Provinsi dan Kab/Kota.
    - Pengawasan dan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
    - Pembinaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
    - Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

- Rapat Koordinasi Teknis Pelayanan Publik Provinsi dan Kab/Kota.
- 12) Program Penataan Kelembagaan Daerah Pemerintah Daerah, dengan kegiatan :
- Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
  - Penyusunan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
  - Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota.
  - Rakornis Kelembagaan Kab/Kota se-Sumatera Barat.
  - Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota.
  - Bimbingan Teknis Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan.
  - Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan.
- 13) Program Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah, dengan kegiatan :
- Penguatan Ketatalaksanaan Provinsi dan Kab/Kota.
  - Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah (FORKOMPANDA) Tingkat Provinsi Sumatera Barat.
  - Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota.
  - Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik.
- 14) Program Kerjasama Pembangunan, dengan kegiatan :
- Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perantau Minang di Bidang Sosial Budaya dan Ekonomi.
  - Pendataan Perantau Minang di Nagari/Kelurahan.
  - Pembentukan dan Pembinaan Nagari/Kelurahan Binaan Kerjasama Rantau.
  - Peningkatan Jaringan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan Perantau Minang.
  - Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah.
  - Kerjasama Luar Negeri.
  - Kerjasama pihak ketiga.



- Kerjasama Antar Provinsi.
  - Kerjasama Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/ Kota.
  - Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Kementerian atau Lembaga.
  - Monitoring Kerjasama Dalam dan Luar Negeri.
- 15) Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan :
- Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah.
  - Kebijakan Penanggulangan HIV dan AIDS.
  - Rapat Kerja Daerah Tim Pembina UKS Tingkat Provinsi Sumatera Barat.
  - Kebijakan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB).
  - Kebijakan Penanganan Bencana dan Pasca Bencana.
  - Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial.
  - Kebijakan Penanganan Masalah Sosial.
- 16) Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan kegiatan :
- Liputan Kegiatan Pemerintah Daerah.
  - Pembuatan film dokumenter.
  - Koordinasi Kehumasan.
  - Penyusunan Kebijakan Komunikasi Informasi, Persandian dan Hubungan Masyarakat.
  - Penyebaran informasi pembangunan melalui media cetak.
  - Penyebaran informasi pembangunan melalui media elektronik.
  - Laporan khusus visualisasi pembangunan.
  - Penyaringan informasi dan penghimpunan pemberitaan media massa
- 17) Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik, dengan kegiatan :
- Peningkatan Pelayanan Keprotokolan.
  - Rakor Keprotokolan.
  - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
  - Penyusunan, Verifikasi dan Pengendalian Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) Provinsi Sumatera Barat.

- Peningkatan SDM Tim Pengelola LPSE Provinsi dan Kabupaten/Kota.
  - Koordinasi Nasional, Regional dan Pembinaan LPSE Provinsi dan Kabupaten/Kota.
  - Penyusunan Publikasi LPSE dan Implementasi Standarisasi LPSE Kabupaten/Kota.
  - Pelatihan Aplikasi SPSE.
  - Monitoring dan Evaluasi Implementasi LPSE Provinsi dan Kabupaten/Kota.
  - Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan Sistim Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
  - Penguatan Teknis Aplikasi Pendukung Sistim Pengadaan Secara Elektronik.
- 18) Program Pengelolaan Otonomi Daerah, dengan kegiatan :
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PATEN Pada 19 Kab/Kota Se Sumbar.
  - Penyusunan LPPD Provinsi dan Pembinaan LPPD Kab/Kota Se Sumbar.
  - Penyusunan LKPJ Kdh Provinsi dan Pembinaan LKPJ Kdh Kab/Kota.
  - Pembinaan Kecamatan pada Kab/Kota Se Sumbar.
  - Rapat Kerja antara Pemerintah Provinsi dengan Pemkab/Kota dan Camat se Sumbar.
  - Penilaian Kompetensi Camat Tingkat Prov. Sumatera Barat.
  - Pelaksanaan EKPPD Kab/Kota.
  - Pembinaan Daerah Otonom.
  - Rakor Pemprov dan Pem Kab/Kota Se Sumbar.
  - Pembinaan dan Fasilitasi Penataan Nagari/Desa di Sumatera Barat.
  - Rapat Koordinasi Aparat Pembina Pemerintahan Nagari/Desa dan Kelurahan se Sumatera Barat.
  - Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Daerah.
  - Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren.
  - Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Provinsi Sumatera Barat.
  - Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Administrasi Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga.

- Rapat Kerja Pemprov Sumbar dengan Wali Nagari/Kepala Desa se Sumatera Barat.
- 19) Program Administrasi Kewilayahan Pemerintahan Daerah, dengan kegiatan:
- Inventarisasi Unsur-Unsur Rupa Bumi Di Wilayah Provinsi.
  - Penegasan Batas Daerah Kab/Kota Di Prov. Sumbar.
  - Penegasan Batas Daerah Prov. Sumbar Dengan Prov. Tetangga.
  - Fasilitasi Pembinaan Penegasan Batas Nagari/Desa.
- 20) Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik, dengan kegiatan :
- Koordinasi Kebijakan Pengembangan Sarana Perekonomian.
  - Koordinasi dan Pengawasan Kebijakan Pupuk Bersubsidi.
  - Koordinasi Penyelenggaraan Pasar Rakyat.
  - Koordinasi Kebijakan Pengelolaan/pengendalian Inflasi Daerah.
  - Koordinasi Kebijakan Peningkatan Produksi dan pengembangan Agribisnis Daerah.
  - Koordinasi Kebijakan Pengembangan Pemasaran Produk Daerah.
  - Koordinasi , pemantauan dan evaluasi kebijakan Harga Sembilan Bahan Pokok.
  - Koordinasi kebijakan Perlindungan Konsumen.
  - Koordinasi Pelaksanaan Pameran Pesta Pulau Pinang.
  - Forum Pengembangan Ekonomi Daerah.
  - Koordinasi dan Pengawasan Pendistribusian Beras Keluarga Berpendapatan Rendah (RASTRA).
  - Koordinasi kebijakan pemanfaatan benih dan bibit bermutu.
  - Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kelembagaan Perekonomian Daerah.
  - Koordinasi Pemantauan dan evaluasi Pemanfaatan Kredit Bank Sektor Pertanian.
  - Koordinasi dan evaluasi kebijakan penyertaan modal daerah pada BUMD dan perseroan lainnya.
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pemantauan Dana CSR.

- Koordinasi kebijakan pengembangan kelembagaan perekonomian daerah.
  - Koordinasi kebijakan pengembangan industri kecil dan menengah (IKM)n.
  - Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Penyaluran KURn.
- 21) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan :
- Intensifikasi penerimaan retribusi pengelolaan Istana Bung Hatta.
  - Intensifikasi penerimaan retribusi pengelolaan Gedung Rohana Kudus.
- 22) Program Pembangunan Materi Hukum, dengan kegiatan :
- Penyusunan Propem Perda Provinsi.
  - Klarifikasi Produk Hukum Provinsi.
  - Penguatan Produk Hukum Daerah Sebagai Bagian Sistem Hukum Nasional.
  - Peningkatan Kelembagaan, Harmonisasi, Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dan Nasional.
- 23) Program Peningkatan Budaya Hukum, dengan kegiatan :  
Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Bidang Hukum.
- 24) Program Peningkatan Supremasi dan Perlindungan HAM, dengan kegiatan :
- Penanganan Perkara Pemerintah Provinsi.
  - Bantuan Advokasi Hukum bagi masyarakat miskin.
  - Rapat Koordinasi Permasalahan Hukum di Lingkup Prov dan Kab/Kota.
  - Sosialisasi dan Monev Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.
- 25) Program Sarana dan Informasi Hukum, dengan kegiatan :  
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- 26) Program Peningkatan Penataan Perundang-Undangan, dengan kegiatan :
- Klarifikasi Dalam Rangka Pengawasan Peraturan Daerah Kab/Kota.
  - Pembinaan Rancangan Produk Hukum Daerah Kab/Kota.
  - Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab/Kota.

- Klarifikasi Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kab./Kota.
- 27) Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan kegiatan:
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah.
  - Penyusunan Buku Standarisasi Barang dan Jasa.
  - Rekonsiliasi dan Inventarisasi Aset SKPD Provinsi Sumatera Barat.
  - Penilaian Aset Daerah.
  - Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah.
  - Pengembangan Sistem Informasi Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
  - Koordinasi pengendalian evaluasi pembangunan.
  - Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda Pengelolaan BMD.
- 28) Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah, dengan kegiatan :
- Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
  - Penerbitan Surat Izin Penghunian Rumah Dinas.
  - Administrasi Penghapusan dan Pelelangan Barang Inventaris Daerah.
  - Pengamanan dan Pemerliharaan Barang Milik Daerah.
  - Legalitas Kepemilikan Tanah Pemerintah Daerah / Pensertifikatan Tanah.
  - Administrasi Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.
  - Administrasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- 29) Program Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Pendidikan, dengan kegiatan : Kebijakan bidang pendidikan.
- 30) Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama, dengan kegiatan :
- Pembangunan Interior Masjid Raya Sumbar dan Penyelesaian Pembangunan Menara Mesjid Raya Sumbar.
  - Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Masjid Raya Sumatera Barat.
  - Koordinasi Pelayanan Terhadap Pemberangkatan dan Pemulangan Haji di Padang.
  - Dukungan Terhadap Pembangunan Mesjid Raya.

- 31) Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, dengan kegiatan :
  - Penilaian didikan subuh berprestasi provinsi Sumatera Barat.
  - Pencerahan agama dan silaturahmi bulan Ramadhan.
  - Wirid/Ceramah Agama Mingguan PNS di lingkungan Kantor Gubernur.
  - Pelaksanaan peringatan Hari Besar Islam di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
  - Pelatihan Qori/Qoriah, Mufasir/Mufasirah, Hafiz/Hafizah Sumatera Barat.
  - Pengiriman Kafilah Sumatera Barat Dalam Rangka MTQ Nasional.
  - Pelatihan Qiraatil Khutub Sumatera Barat.
  - Pengembangan Tilawatil Qur'an se Sumatera Barat"
- 32) Program Pengembangan Lembaga-Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan, dengan kegiatan :
  - Pelatihan Guru TPQ/MDTA se-Sumatera Barat.
  - Pembinaan Pondok Al-Qur'an se- Sumatera Barat.
  - Bimbingan dan Pelatihan Kegiatan Imam Masjid.
  - Rapat Koordinasi Bidang Keagamaan di Sumbar.
  - Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang/Uang Rumah Ibadah se-Sumatera Barat.

**b. Realisasi Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran Rp.34.638.873.546,- dan realisasi sebesar Rp.29.616.868.897,- (85,50 %).
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan anggaran Rp.21.811.681.785,- dan realisasi sebesar Rp.19.856.750.873,- (91,04 %).
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan anggaran Rp.846.546.500,- dan realisasi sebesar Rp.799.980.875,- (94,50 %).
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan anggaran Rp.723.044.149,- dan realisasi sebesar Rp.397.366.741,- (54,96 %).
- 5) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan anggaran

- Rp.1.987.561.027,- dan realisasi sebesar Rp.1.746.761.364,- (87,88 %).
- 6) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan, dengan anggaran Rp.13.407.418.586,- dan realisasi sebesar Rp.13.035.634.604,- (97,23 %). Serta Output :
    - Tersedianya jasa pelayanan tamu pemerintah daerah.
    - Terlaksananya peringatan hari-hari besar nasional.
  - 7) Program Pengembangan Data dan Informasi, dengan anggaran Rp.205.022.372,- dan realisasi sebesar Rp.197.579.399,- (96,37 %). Serta Output :
    - Terkelolanya website Biri Kerjasama, Pembangunan dan Rantau.
    - Terkelolanya system informasi pembangunan daerah.
    - Upgrade system informasi pembangunan daerah.
  - 8) Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Provinsi dan SKPD Provinsi Sumatera Barat, dengan anggaran Rp.521.052.825,- dan realisasi sebesar Rp.490.648.300,- (94,16 %). Serta Output :
    - Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
    - Terlaksananya Monev Pencapaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Prov. Sumbar.
    - Terlaksananya Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.
    - Terlaksananya Bimbingan Teknis Sistem AKIP Provinsi dan Kab/Kota se-Sumbar
  - 9) Program Manajemen Perubahan, dengan anggaran Rp.184.500.800,- dan realisasi sebesar Rp.181.574.600,- (98,41%). Serta Output : Terlaksananya Sosialisasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
  - 10) Program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur, dengan anggaran Rp.336.957.418,- dan realisasi sebesar Rp. 320.558.149,- (95,13%). Serta Output :
    - Terlaksananya Evaluasi Disiplin PNS Setda Prov. Sumbar.
    - Terlaksananya Pengelolaan Personal Record dan Dokumentasi Kepegawaian.
    - Terlaksananya Monitoring Pengembangan Karier PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

- Terlaksananya Rakornis Pembinaan Aparatur Daerah Provinsi Sumatera Barat.
  - Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
  - Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.
- 11) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan anggaran Rp. 384.879.728,- dan realisasi sebesar Rp. 349.989.383,- (90,93 %). Serta Output :
- Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Provinsi dan Kab/Kota.
  - Terlaksananya Pengawasan dan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
  - Terlaksananya Pembinaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
  - Terlaksananya Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
  - Terlaksananya Rapat Koordinasi Teknis Pelayanan Publik Provinsi dan Kab/Kota.
- 12) Program Penataan Kelembagaan Daerah Pemerintah Daerah, dengan anggaran Rp.1.446.340.048,- dan realisasi sebesar Rp.1.390.655.303,- (96,15 %). Serta Output :
- Terlaksananya Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
  - Terlaksananya Penyusunan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
  - Terlaksananya Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota.
  - Terlaksananya Rakornis Kelembagaan Kab/Kota se-Sumatera Barat.
  - Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota.
  - Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan.
  - Terlaksananya Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan.
- 13) Program Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah dengan anggaran Rp.432.417.447,- dan realisasi sebesar Rp.413.113.441,- (95,54 %). Serta Output :



- Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah (FORKOMPANDA) Tingkat Provinsi Sumatera Barat.
  - Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota.
  - Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik.
- 14) Program Kerjasama Pembangunan, dengan anggaran Rp.3.138.166.441,- dan realisasi sebesar Rp.2.925.697.597,- (93,23 %). Serta Output :
- Terlaksananya kerjasama pemerintah daerah dengan perantau minang di bidang social, budaya dan ekonomi.
  - Terlaksananya pertemuan jaringan komunikasi pemerintah daerah provinsi dengan perantau minang, rapat koordinasi jaringan komunikasi, rapat koordinasi pemerintah provinsi dengan kab/kota dan SKPD terkait.
  - Terlaksananya pembentukan dan pembinaan nagari/desa/kelurahan binaan Kerjasama dan Rantau.
  - Terlaksananya penguatan kelembagaan pengelolaan Kabupaten/Kota/kecamatan dan nagari/esa/kelurahan dalam pendataan perantau minang.
  - Terlaksananya pembinaan dan pengawasan kerjasama daerah.
  - Terlaksananya data potensi kerjasama luar negeri dengan pemerintah provinsi Sumatera Barat.
  - Terwujudnya fasilitasi kerjasama pihak ketiga, koordinasi kerjasama pihak ketiga dan pengendalian kerjasama pihak ketiga.
  - Terlaksananya kerjasama antar provinsi.
  - terlaksananya rapat konsultasi dan koordinasi ke pusat dan laporan kegiatan.
  - Terlaksananya pembinaan dan pengawasan kerjasama antar Kabupaten/Kota.
  - Terlaksananya rapat konsultasi dan koordinasi ke pusat dan laporan kegiatan.
  - Terlaksananya kerjasama Pemerintah Provinsi dengan Kementerian/Lembaga.
  - Terlaksananya rapat konsultasi dan koordinasi ke pusat dan laporan kegiatan.

- Terlaksananya data kerjasama dalam dan luar negeri Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- 15) Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial, dengan anggaran Rp.1.380.823.870,- dan realisasi sebesar Rp.1.219.389.580,- (88,31 %). Serta Output :
- Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tahun 2018.
  - Terlaksananya koordinasi penanggulangan HIV dan AIDS.
  - Terlaksananya Rapat Kerja Daerah Tim Pembina UKS tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.
  - Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi penanggulangan KLB.
  - Terlaksananya koordinasi penanganan bencana dan pasca bencana.
  - Terlaksananya koordinasi kebijakan bidang kesejahteraan sosial.
  - Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi penanganan masalah sosial.
- 16) Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan anggaran Rp.8.625.775.620,- dan realisasi sebesar Rp.7.766.137.101,- (90,03 %). Serta Output :
- Liputan Kegiatan Pemerintah Daerah.
  - Pembuatan film dokumenter.
  - Koordinasi Kehumasan.
  - Penyusunan Kebijakan Komunikasi Informasi, Persandian dan Hubungan Masyarakat.
  - Penyebaran informasi pembangunan melalui media cetak.
  - Penyebaran informasi pembangunan melalui media elektronik.
  - Laporan khusus visualisasi pembangunan.
  - Penyaringan informasi dan penghimpunan pemberitaan media massa
- 17) Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik, dengan anggaran Rp.2.800.801.316,- dan realisasi sebesar Rp.2.497.150.672,- (89,16 %). Serta Output :
- Terlaksananya kegiatan penagadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sumbar.
  - Pembahasan dokumen RUP OPD final 2018, Pembuatan dokumen RUP OPD final 2018, Rapat Koordinasi dan

Pengendalian dokumen RUP Kabupaten/Kota, Pembahasan Dokumen Draft RUP OPD Ta. 2019.

- Terlaksananya Peningkatan SDM Tim Pengelola LPSE Provinsi.
  - Terlaksananya Peningkatan SDM Tim Pengguna LPSE.
  - Terlaksananya koordinasi Nasional dan regional.
  - Pembinaan layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik di 19 Kab/Kota.
  - Terlaksananya Penilaian Standarisasi LPSE Kab/Kota.
  - Terlaksananya Survey Layanan LPSE (IKM) .
  - Terlaksananya Pelatihan Aplikasi LPSE untuk Pokja ULP/Pejabat Pengadaan/KPA/PA dan Penyedia.
  - Terlatihnya SDM Tim Pengelola LPSE Kab/Kota.
  - Terlatihnya Mahasiswa untuk proses pengadaan.
  - Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi e-Procurement OPD Provinsi.
  - Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi implementasi e-Procurement Kab/Kota.
  - Terlaksananya layanan LPSE dengan baik.
  - Penyediaan Inspratraktur penunjang lainnya.
  - Pemeliharaan server dan jaringan.
  - Pengadaan server.
  - Pengadaan chard fiber chanel.
  - Terlaksananya Pengentrian SIRUP Lingkup Prov. Sumatera Barat.
  - Terlatihnya SDM Admin. RUP/PA OPD Prov. Sumbar.
  - Terlatihnya Pejabat Pengadaan Lingkup Prov. Sumbar.
- 18) Program Pengelolaan Otonomi Daerah, dengan anggaran Rp.4.261.431.800,- dan realisasi sebesar Rp.3.964.862.049,- (93,04 %). Serta Output :
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PATEN Pada 19 Kab/Kota Se Sumbar.
  - Penyusunan LPPD Provinsi dan Pembinaan LPPD Kab/Kota Se Sumbar.
  - Penyusunan LKPJ Kdh Provinsi dan Pembinaan LKPJ Kdh Kab/Kota.
  - Pembinaan Kecamatan pada Kab/Kota Se Sumbar.
  - Rapat Kerja antara Pemerintah Provinsi dengan Pemkab/Kota dan Camat se Sumbar.

- Penilaian Kompetensi Camat Tingkat Prov. Sumatera Barat.
  - Pelaksanaan EKPPD Kab/Kota.
  - Pembinaan Daerah Otonom.
  - Rakor Pemprov dan Pem Kab/Kota Se Sumbar.
  - Pembinaan dan Fasilitasi Penataan Nagari/Desa di Sumatera Barat.
  - Rapat Koordinasi Aparat Pembina Pemerintahan Nagari/Desa dan Kelurahan se Sumatera Barat.
  - Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Daerah.
  - Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren.
  - Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Provinsi Sumatera Barat.
  - Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Administrasi Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga.
  - Rapat Kerja Pemprov Sumbar dengan Wali Nagari/Kepala Desa se Sumatera Barat.
- 19) Program Administrasi Kewilayahan Pemerintahan Daerah, dengan anggaran Rp.711.545.600,- dan realisasi sebesar Rp.626.937.618,- (88,11 %). Serta Output :
- Inventarisasi Unsur-Unsur Rupa Bumi Di Wilayah Provinsi.
  - Penegasan Batas Daerah Kab/Kota Di Prov. Sumbar.
  - Penegasan Batas Daerah Prov. Sumbar Dengan Prov. Tetangga.
  - Fasilitasi Pembinaan Penegasan Batas Nagari/Desa.
- 20) Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik, dengan anggaran Rp.2.009.468.741,- dan realisasi sebesar Rp.1.869.777.846,- (93,05 %). Serta Output :
- Terlaksananya rapat koordinasi dengan target 5 kali rapat dan rekomendasi kebijakan sebanyak 3 dokumen.
  - Terlaksananya rapat koordinasi dengan agenda tindaklanjut Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, hortikultura dan perkebunan.
  - Terlaksananya rapat koordinasi dengan agenda membicarakan permasalahan penyaluran pupuk tahun 2018.
  - Terlaksananya rapat koordinasi dengan agenda Realisasi penyaluran Pupuk Bersubsidi tahun 2018 dan permasalahan dala penyaluran pupuk tahun 2018.

- Terlaksananya rapat koordinasi dengan target 2 kali rapat dan terlaksananya pasar rakyat sebanyak 1 kali, surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di masing-masing Kabupaten/Kota, Kabupaten/Kota telah menindaklanjuti Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan perkebunan dengan surat keputusan kepala dinas pertanian di Kabupaten/Kota.
- Terlaksananya rapat koordinasi dengan agenda Rapat Evaluasi Perkembangan Inflasi Sumatera Barat 2017 dan Rencana Program Pengendalian Inflasi tahun 2018.
- Terlaksananya Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Provinsi Sumatera Barat dengan Tim TPID Kabupaten/Kota yang dilaksanakan di Istana Bung Hatta Bukittinggi pada tanggal 28 Februari 2018.
- Terlaksananya Rapat Kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penyusunan Program Kerja Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2018 pada tanggal 20 Maret 2018 di Ruang Rapat Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat.
- Terlaksananya High Level Meeting pada tanggal 15 Mei 2018 di ruang rapat Excellen Kantor Perwakilan Bank Indonesia dengan agenda rapat Upaya Pengendalian Inflasi Menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1439 H.
- Terlaksananya Rapat tanggal 23 Juli 2018 di ruang rapat Biro Perekonomian dengan 7 Kab/Kota di Sumatera Barat dalam rangka melakukan kerjasama antar daerah.
- Mengikuti/menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2018 dengan tema mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan stabilitas harga dan mendorong momentum pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkualitas.
- Terlaksananya High Level Meeting (HLM) tanggal 29 Agustus 2018 di ruang rapat Excellence Kantor Perwakilan Bank Indonesia.
- Terlaksananya Mengikuti capacity building ke TPID Jawa Tengah tanggal 25- 28 September 2018.
- Terlaksananya Rapat pada tanggal 7 Desember 2018 di ruang rapat Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat.
- Tersedianya laporan TPID sebanyak 10 (sepuluh) buku.

- Tersedianya data perkembangan produksi di sektor pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, pertenakan, pertambangan, kehutanan dan produk olahan selama satu tahun.
- Termonitornya kebijakan peningkatan produksi daerah sektor primer dan olahan.
- Terlaksananya rapat-rapat 4 kali dengan OPD terkait di Provinsi.
- Tersedianya notulen rapat koordinasi dengan OPD terkait di Kabupaten/Kota sebanyak 4 dokumen.
- Terlaksananya rapat sebanyak 6 (enam) kali dari 5 (lima) kali dari target kinerja dengan OPD/instansi terkait Provinsi (Pemerintah Kabupaten/Kota).
- Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sumatera Barat Expo 2018.
- Diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 500 - 35 - 2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Pembentukan Tim Monitoring Harga Sembako di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Tersedianya data perkembangan harga sembako dan harga kebutuhan masyarakat lainnya setiap minggu yang selanjutnya disampaikan melalui berupa surat telex tentang Daftar Harga Kebutuhan Bahan Pokok di Pasar Raya Padang, dan dikirimkan melalui fax yang dialamatkan ke Menteri Dalam Negeri, Sekretaris Kabinet Deputy Bidang Pemerintahan Biro Kesra, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Gubernur Sumatera Barat, Wakil Gubernur Sumatera Barat, yang tembusannya disampaikan kepada Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dan Bank Indonesia Cabang Padang.
- Terlaksananya rapat mingguan 52 kali dalam setahun dari indikator 52 kali.
- Terlaksananya rapat – rapat koordinasi sebanyak 3 (tiga) kali dari 2 (dua) kali target kinerja dengan OPD/ Instansi terkait baik ditingkat Provinsi.
- Terlaksananya keikutsertaan Sumatera Barat pada Pesta Pulau Pinang tahun 2018 dengan total omset UKM/perajin dari penjualan langsung sebesar Rp.743.831.137,- dan total kontak dagang UKM/perajin sebesar Rp.98.497.330,-

- Terlaksananya rapat – rapat koordinasi sebanyak 3 (tiga) kali dari 2 (dua) kali target kinerja dengan OPD/Instansi terkait ditingkat Provinsi dan UKM/pengrajin.
- Terlaksananya rapat sebanyak 3 (tiga) kali sesuai target kinerja dengan OPD/instansi terkait Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan stakeholders.
- Terjalannya koordinasi antara Tikor Bantuan Sosial Beras Bagi Keluarga Penerima Manfaat mulai dari Tikor di Pusat, Tikor Provinsi dan Tikor Kabupaten/Kota serta Tikor Kecamatan dalam upaya memperlancar dan mensukseskan pelaksanaan program nasional Bantuan Sosial beras bagi masyarakat berpendapatan rendah.
- Terlaksananya pengawasan pelaksanaan pendistribusian Bansos beras bagi Keluarga Penerima Manfaat dengan lancar dan baik di 19 Kabupaten/Kota.
- Terlaksananya Rapat Koordinasi Dan Evaluasi sebanyak 3 Kali bersama Tikor Provinsi, Tikor Kabupaten/Kota, dan Tim Independen Bansos Rastra, Setiap selesai pelaksanaan rapat koordinasi, ditindaklanjuti melalui surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan Kepada Bupati/Walikota dan ke Pihak Bulog serta Dinas Sosial Provinsi.
- Terawasinya pendistribusian Raskin untuk keluarga miskin.
- Terlaksananya rapat koordinasi sebanyak 4 kali bersama pelaksana Raskin Kabupaten/Kota dan tim koordinasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah.
- Tersedianya data-data tentang pemakaian benih benih bermutu ,sumber bibit dan benih bermutu yang telah digunakan dan kelompok penangkar yang ada di Kabupaten/Kota se-Sumbar.
- Termonitornya Kebijakan Peningkatan Pemakaian Bibit dan Benih Bermutu sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan di OPD di Provinsi maupun OPD di Kabupaten/Kota.
- Terlaksananya rapat-rapat koordinasi sebanyak 2 (dua) kali dengan OPD terkait di Provinsi.
- Tersedianya laporan kegiatan sebanyak 1 dokumen, terlaksananya rapat evaluasi dengan SKPD terkait dan Bank Perlaksana sebanyak dua kali dengan hasil yang

diharapkan dan meningkatnya implementasi kebijakan pemanfaatan kredit bank sektor pertanian.

- Terlaksananya monitoting dan evaluasi penyertaan modal pemerintah provinsi pada BUMD dan perseroan lainnya,
  - Terlaksananya koordinasi dan pembinaan, monitoring dan evaluasi kebijakan BUMD kabupaten/kota.
  - Meningkatnya pelaksanaan kebijakan pengembangan Lembaga Keuangan Mikro di Sumatera Barat, hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah data lembaga keuangan mikro yang belum berbadan hukum yang terhimpun dari Kabupaten/Kota (sebanyak 3.024 unit), Lembaga Keuangan Mikro yang berbadan hukum berbentuk Koperasi 162 Unit (5,36%) Terdapatnya 2 (dua ) unit LKM yang telah mendapatkan izin penuh serta 22 Unit LKM yang telah mendapatkan izin bersyarat dari OJK Sumbar.
  - Terlaksananya rapat koordinasi Pengembangan Kelembagaan Perekonomian Daerah 2 (dua) kali dengan peserta 100 orang.
  - Terlaksananya rapat – rapat teknis dengan SKPD terkait Kabupaten/Kota dan Provinsi 2 kali.
  - Terjalannya koordinasi antara OPD terkait di lingkungan Provinsi, Kabupaten / Kota dan Kementerian Perindustrian.
  - Terlaksananya Koordinasi, monitoring dan evaluasi IKM di 13 Kabupaten/Kota.
- 21) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan anggaran Rp.2.135.873.129,- dan realisasi sebesar Rp.1.716.036.729,- (80,34 %). Serta Output :
- Intensifikasi penerimaan retribusi pengelolaan Istana Bung Hatta.
  - Intensifikasi penerimaan retribusi pengelollan Gedung Rohana Kudus.
- 22) Program Pembangunan Materi Hukum, dengan anggaran Rp.1.193.913.128,- dan realisasi sebesar Rp.1.114.190.955,- (93,32 %). Serta Output :
- Terlaksananya Rapat-rapat pembahasan rancangan produk hukum daerah.
  - Pendampingan kunjungan kerja DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam pendalaman materi Ranperda.



- Telah ditetapkan produk hukum daerah sebanyak 21 Perda, 69 Peraturan Gubernur, dan 9 Instruksi Gubernur.
  - Terlaksananya rapat-rapat dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah provinsi dengan produk hukum nasional (produk hukum yang lebih tinggi), dan produk hukum daerah Kabupaten/Kota.
  - Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah ke Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian terkait.
  - Terlaksananya kegiatan Rakor Propem Perda tanggal 3 Mei 2018.
  - terlaksananya kegiatan konsultasi dan klarifikasi Peraturan Gubernur dan Peraturan Daerah serta penyampaian Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur ke Kementerian Dalam Negeri.
- 23) Program Peningkatan Budaya Hukum, dengan anggaran Rp.49.385.000,- dan realisasi sebesar Rp.30.037.210,- (60,82 %). Serta Output :
- Terselenggaranya perpustakaan khusus bidang hukum,
  - Terselenggaranya layanan perpustakaan Biro Hukum sesuai standar nasional perpustakaan.
- 24) Program Peningkatan Supremasi dan Perlindungan HAM, dengan anggaran Rp.336.527.500,- dan realisasi sebesar Rp.259.418.446,- (77,09 %). Serta Output :
- Terlaksananya penanganan perkara di Pengadilan Negeri sebanyak 10 perkara.
  - Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dalam mencari keadilan melalui Lembaga / Organisasi Bantuan Hukum yang ada di Provinsi Sumatera Barat.
  - Meningkatnya koordinasi dan komunikasi terkait permasalahan hukum di daerah sehingga dapat mengantisipasi dan memberikan solusi terhadap penyelenggaraannya.
- 25) Program Sarana dan Informasi Hukum, dengan anggaran Rp.125.484.800,- dan realisasi sebesar Rp.112.768.000,- (89,87 %). Serta Output : Terlaksananya pembuatan Lembaran Daerah Tahun 2018 sebanyak 100 buah buku, Lembaran Lepas 100 eksemplar, dan 100 buah buku Berita Daerah.

- 26) Program Peningkatan Penataan Perundang-Undangan, dengan anggaran Rp.783.753.400,- dan realisasi sebesar Rp.684.449.334,- (87,33 %). Serta Output :
- Terlaksananya Pembahasan dan pengkajian (evaluasi) rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota dalam rangka pembinaan sebanyak 84 rancangan perda Kabupaten/Kota.
  - Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke pemerintah pusat terkait permasalahan yang dihadapi terhadap produk hukum kabupaten/kota.
  - Terlaksananya pengawasan dan pembinaan berupa monitoring dan evaluasi ke kabupaten/kota se-Sumatera Barat.
  - Terlaksananya Pembahasan dan pengkajian Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka klarifikasi sebanyak 21 peraturan daerah.
  - Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke Kementerian dan Lembaga terkait dalam rangka pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota.
  - Terlaksananya pengawasan dan pembinaan berupa monitoring dan evaluasi ke Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
  - Terlaksananya kegiatan pembahasan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka klarifikasi sebanyak 94 Peraturan Kepala Daerah.
- 27) Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan anggaran Rp.3.213.398.567,- dan realisasi sebesar Rp.2.923.301.757,- (90,97 %). Serta Output :
- Meningkatnya ketertipan pengelolaan aset pada semua SKPD dilingkungan pemerintah Prov. Sumbar.
  - Tersediannya buku standarisasi harga barang dan jasa yang di pedomani oleh SKPD.
  - Tersediannya buku laopran BMD Prov Sumbar 2016/2017.
  - Akuratnya nilai aset dalam neraca.
  - Tersediannya data aset yang akurat tepat dan akuntabel.
  - Meningkatnya wawasan pengelolaan aset untuk pelaksanaan sensus.
  - Meningkatnya kelancaran Administrasi tentang pengelolaan BMD.

- 28) Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah, dengan anggaran Rp.1.256.172.935,- dan realisasi sebesar Rp.1.086.938.605,- (86,53 %). Serta Output :
- Peningkatan fungsi koordinasi pengelolaan aset dengan Kab/Kota dan Pemerintah Pusat.
  - Terlaksananya proses adminitrasi BMD oleh SKPD.
  - Terlaksananya proses Administrasi pemindahtanganan BMD.
  - Terbitnya pengelolaan BMD berupa penggunaan dan pemamfaatan BMD.
  - Terlaksananya proses administrasi.
- 29) Program Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Pendidikan, dengan anggaran Rp.141.090.000,- dan realisasi sebesar Rp.105.689.500,- (74,91 %). Serta Output : Terlaksananya rapat koordinasi bidang pendidikan.
- 30) Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama, dengan anggaran Rp.20.941.871.253,- dan realisasi sebesar Rp.20.002.885.683,- (95,52 %). Serta Output :
- Terselesaikannya pembangunan fisik Masjid Raya Sumatera Barat.
  - Terciptanya kenyamanan, keindahan dan ketertiban di Masjid Raya Sumatera Barat.
  - Terselenggaranya koordinasi dalam rangka pelayanan Embarkasi Haji di Padang.
  - Terselesaikannya pembangunan Menara Masjid Raya Sumatera Barat..
- 31) Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, dengan anggaran Rp.5.648.728.299,- dan realisasi sebesar Rp.5.067.844.769,- (89,72 %). Serta Output :
- Terbinanya 19 lembaga Didikan Subuh di Kabupaten/Kota dan tersalurkannya bantuan untuk lembaga Didikan Subuh.
  - Terselenggaranya kunjungan Tim Ramadhan ke 147 Mesjid yang ada di 19 Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.
  - Terselenggaranya wirid pengajian di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selama 48 minggu.

- Terselenggaranya acara peringatan hari besar Islam di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk 6 kali kegiatan.
  - Terselenggaranya pelatihan terhadap Kafilah potensial Sumatera Barat dengan 60 orang peserta.
  - Tersedianya persiapan dan pengiriman Kafilah Sumatera Barat ke ajang MTQ Nasional tahun 2018.
  - Terselenggaranya pelatihan terhadap kafilah potensial Sumatera Barat dengan 40 orang peserta.
  - Terselenggaranya pengembangan Tilawatil Qur'an di Sumatera Barat baik melalui MTQ Tingkat Provinsi Sumatera Barat maupun pembinaan Dewan Hakim di Sumatera Barat dengan 162 orang peserta.
- 32) Program Pengembangan Lembaga-Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan, dengan anggaran Rp. 1.629.191.792,- dan realisasi sebesar Rp.1.517.345.274,- (93,13 %). Serta Output :
- Terselenggaranya pelatihan terhadap Guru TPQ/MDTA se-Sumatera Barat dengan 50 orang peserta untuk di padang dan 40 orang peserta di Mentawai.
  - Terselenggaranya terbinanya tenaga pengajar pada Pondok Al-Qur'an di Kab/Kota.
  - Terselenggaranya pelatihan terhadap imam masjid se Sumatera Barat.
  - Terwujudnya sinergitas program kegiatan bidang keagamaan.
  - Terselenggaranya bimbingan teknis terhadap pengelola barang/uang se-Sumatera Barat dengan 174 orang 2 kali angkatan.

**c. Outcomes**

- 1) Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas program kepemudaan di Sumatera Barat.
- 2) Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi di Bidang Kesejahteraan Sosial.
- 3) Jumlah Kebijakan Gubernur di Bidang Pendidikan.
- 4) Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi pelayanan kehidupan beragama di Sumatera Barat.
- 5) Meningkatnya pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai keagamaan di Sumatera Barat.

- 6) Meningkatnya pengembangan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan di Sumatera Barat.
- 7) Meningkatnya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.
- 8) Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemberitaan Pemerintahan Daerah.
- 9) Meningkatnya tata kelola organisasi.
- 10) Tersedianya rumusan kebijakan dalam bentuk laporan pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kelembagaan Perekonomian Daerah 1 (satu) dokumen.
- 11) Meningkatnya sinkronisasi kebijakan pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan ekonomi daerah khususnya tentang pengembangan ekonomi kreatif di Sumatera Barat.
- 12) Meningkatnya implementasi kebijakan penyaluran BBM dan Gas.
- 13) Meningkatnya implementasi kebijakan pengembangan transportasi.
- 14) Meningkatnya implementasi kebijakan pengembangan investasi.
- 15) Meningkatnya implementasi kebijakan pengembangan pariwisata.
- 16) Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan target kinerja 100%.
- 17) Meningkatnya implementasi kebijakan pengendalian inflasi daerah.
- 18) Meningkatnya implementasi kebijakan pengendalian inflasi daerah.
- 19) Tersedianya rumusan kebijakan pengembangan dan peningkatan produksi primer (pertanian, peternakan, kehutanan, pertambangan, perikanan dan perkebunan) dan pengembangan produk olahan.
- 20) Ditetapkannya Keputusan Gubernur Sumatera Nomor : 500 - 56 – 2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang Tim Pelaksana Inventarisasi Data Encryption Standar Provinsi Sumatera Barat.
- 21) Tersedianya data-data hasil monitoring ke Kabupaten/Kota maupun koordinasi ke OPD terkait lainnya yang melingkupi

sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan dan perkebunan serta produk olahannya.

- 22) Terealisasinya pengembangan produk unggulan di kabupaten /Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.
- 23) Terlaksananya keikutsertaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Sumatera Barat Expo 2018
- 24) Terpublikasikannya perkembangan harga-harga sembilan bahan pokok di website Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara periodik sampai dengan kondisi akhir.
- 25) Meningkatkan dan sinergitasnya koordinasi dan pengawasan perlindungan konsumen dalam rangka melindungi konsumen dengan OPD/Instansi baik dilingkungan Provinsi, OPD terkait dilingkungan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
- 26) Terdistribusikannya subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah sesuai dengan alokasi pagu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat 100%.
- 27) Meningkatnya jumlah petani yang menggunakan benih dan bibit bermutu lebih kurang 69,017% untuk benih padi, sedangkan untuk benih perkebunan, peternakan, benih tanaman kehutanan dan benih perikanan antara 76 sampai 82 %.
- 28) Meningkatnya produksi dan produktifitas disektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan karena menggunakan benih dan bibit yang bermutu.
- 29) Terkoordinirnya kebijakan pengawasan pembinaan dan penggunaan benih dan bibit bermutu oleh OPD terkait di Provinsi dan Kab/Kota.
- 30) Terlaksananya rapat-rapat koordinasi 2 (dua) kali.
- 31) Tersedianya informasi yang lebih objektif tentang perkembangan penggunaan kredit perbankan di sektor pertanian.
- 32) Tersedianya daftar petani Sumatera Barat yang berpotensi untuk diberikan kredit perbankan sehingga menjadi lebih tepat sasaran.
- 33) Meningkatnya sinkronisasi pengeolaan program CSR bagi UKM.
- 34) Terhimpunnya data Realisasi Penyaluran KUR per sektor dan per Kab/Kota se-Sumatera Barat.
- 35) Adanya data Calon debitur KUR yang telah diinput kedalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

- 36) Adanya respon dari Kabupaten/Kota untuk pembentukan Tim Koordinasi dan evaluasi Penyaluran KUR Kab/Kota.
- 37) Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan ketatalaksanaan pemerintah daerah.
- 38) Terlaksananya proses pengadaan barang/jasa pada SKPD.
- 39) Meningkatnya kinerja perangkat pemerintah daerah.
- 40) Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD): 3,.. dengan kategori Sangat Tinggi.
- 41) Segmen Batas Daerah yang diusulkan penegasannya sebanyak 6 segmen Kabupaten/Kota dan 3 segmen batas provinsi.
- 42) Nama Rupa Bumi yang diusulkan pembakuannya sebanyak 19 Kabupaten/Kota.
- 43) Terwujudnya Kesamaan Pola Tindak dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari/Desa di Sumatera Barat.
- 44) Terwujudnya Perpaduan Program dan Kegiatan yang serasi dan selaras dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari/Desa/Kelurahan se Sumatera Barat.
- 45) Terwujudnya pembangunan materi hukum.
- 46) Terwujudnya Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM.
- 47) Terwujudnya Sarana dan Informasi Hukum.
- 48) Terwujudnya Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-undangan.
- 49) Tersebar nya informasi pembangunan melalui media luar ruang Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- 50) Meningkatnya pemerindah daerah dalam menerapkan prinsip pemerinrahan yang baik.
- 51) Meningkatnya Koordinasi Dan Fasilitasi di Bidang Kesejahteraan Sosial.
- 52) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama.
- 53) Meningkatnya Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan Dan Pengembangan Nilai-Nilai Agama.
- 54) Meningkatnya Pngembangan Lembaga-Lembaga Sosial Keagamaan Dan Lembaga Pendidikan Keagamaan.
- 55) Terlaksananya Kerjasama dan Pembangunan pada Provinsi Sumatera Barat.
- 56) Tersedianya Pengembangan data dan informasi pembangunan di Sumatera Barat.

- 57) Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintahan Daerah.
- 58) Terpenuhinya intensifikasi penerimaan retribusi pengelolaan Istana Bung Hatta.
- 59) Tingkat Pelayanan Keprotokolan.
- 60) Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan ketatalaksanaan pemerintah daerah.
- 61) Terlaksananya proses pengadaan barang/jasa pada SKPD.
- 62) Tersedianya informasi pembangunan.
- 63) Meningkatnya kerjasama pemerintah daerah dengan perantau minang di bidang sosial budaya dan ekonomi dan kontribusi perantau minang di nagari/desa/kelurahan.
- 64) Meningkatnya hubungan komunikasi antara pemerintah daerah provinsi dan kab/kota dengan perantau minang.
- 65) Terwujudnya 19 nagari/desa/kelurahan binaan Biro Kerjasama dan Rantau.
- 66) Tersedianya data organisasi dan perantau minang dari nagari/desa/kelurahan.
- 67) Terlaksananya pengawasan dan pembinaan kerjasama daerah.
- 68) Tercapainya program kerja pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka kerjasama dan implementasi kerjasama luar negeri.
- 69) Terwujudnya fasilitasi kerjasama pihak ketiga, koordinasi kerjasama pihak ketiga dan pengendalian kerjasama pihak ketiga.
- 70) Meningkatnya hubungan kerjasama antar provinsi.
- 71) Meningkatnya hubungan kerjasama antar daerah kab/kota.
- 72) Meningkatnya hubungan kerjasama antar daerah kab/kota dan Kementerian dan Lembaga.
- 73) Tercapainya program kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka kerjasama dan implementasi kerjasama alam dan luar negeri.
- 74) Meningkatnya capaian target IKU Pemerintah Daerah.

**d. Permasalahan dan Solusi**

1) Permasalahan :

- Kurang tersedianya SDM berkualitas yang mampu mendukung pencapaian kinerja Biro Humas.
- Kurang tersedianya sarana prasarana pendukung pelaksanaan tupoksi Biro Humas.



- Perancangan awal yang ada dalam DPA Biro Humas yang mana harga/ tarif awal suatu jasa dari calon rekanan tidak sesuai dengan keadaan yang terjadi pada saat akan dilaksanakan kegiatan, dan ada di kegiatan HPN beberapa item harga barang dan jasanya terlalu tinggi dianggarkan sehingga banyak Kegiatan yang anggaranya berlebih atau silva.
- Ada kegiatan yang tidak bisa direalisasikan karena perubahan rencana sehingga tidak memungkinkan dilaksanakan, contohnya pemeliharaan Baliho 5x10 meter di Istana Bunghatta Kota Bukittinggi, begitupun juga pada kegiatan ekspose Nusantara Marandang di TV pusat tidak bisa dilaksanakan karena harga TV pusat tidak mencukupi anggaran yang telah disediakan.
- Ada Objek yang sama penganggarannya pada kegiatan berbeda antar OPD pada kegiatan HPN menyebabkan kegiatan tidak terealisasi optimal sehingga banyak sisa anggaran.
- Banyak Narasumber pada kegiatan HPN yang tidak bersedia menerima honor yang telah dianggarkan.
- Penyesuaian dari jadwal pimpinan yang menyebabkan kegiatan tidak bisa dilaksanakan, contohnya Talk show dengan radio swasta di jakarta tidak bisa dilaksanakan.
- Efisiensi dari perjalanan dinas dalam dan luar daerah oleh pemerintah daerah.
- Proses pembangunan aplikasi Simbangda Based Evidence (SBE) menjadi perlu diupgrade secara stimulan sering berbenturan dengan pelaksanaan tugas monev pembangunan yang aplikasinya dibangun dengan build by running
- Aplikasi SBE memakai evidence dan proses validasi sedangkan Simbangda lama tidak sehingga membuat operator kewalahan
- Kapasitas server kurang memadai dan pengelolaan server tergantung kepada Bappeda karena server berada di Bappeda
- Basis data aplikasi Pemprov Sumbar tidak satu titik sehingga sulit menyediakan aplikasi SBE yang mudah dan gampang diakses.
- Masih kurangnya perantau yang potensial hadir dalam acara pertemuan pemerintah dan perantau

mengakibatkan lambatnya tindak lanjut dalam menyelesaikan kegiatan yang telah dirancang.

- Masih kurangnya partisipasi perantau dalam ikut serta melakukan pembinaan terhadap nagari Binaan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- Kurangnya Sumber Daya Manusia yang akan mengelola kerjasama daerah.
- Terbatasnya sumber daya manusia yang dapat mengelola hubungan kerjasama luar negeri.
- Sumber daya manusia yang belum tersedia secara memadai dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.
- Terbatasnya sumber daya manusia dalam mengelola kerjasama antar provinsi.
- Terbatasnya sumber daya manusia dalam mengelola kerjasama pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota.
- Masih kurangnya sumber daya manusia yang mengelola kerjasama pemerintah daerah dengan kementerian atau lembaga juga sangat minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan.
- Kurangnya sumber daya manusia yang membantu dalam memfasilitasi kegiatan.
- SKPD masih belum terbiasa berkoordinasi dengan Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau sehingga pengendalian permasalahan kegiatan terpencar-pencar dibeberapa SKPD.
- Sulitnya memberi pemahaman kepada KPA/PPTK terhadap pentingnya administrasi kegiatan yang akan mempengaruhi penyediaan evidence oleh operator SKPD dalam menginput ke aplikasi SBE.
- Lambatnya daya dorong investasi: tidak adanya kepastian hukum dan kondisi infrastruktur yang kurang memadai, serta perburuhan yang belum ditata secara baik dan profesional.
- Persoalan tenaga kerja, perizinan, konflik komunal dan sengketa tanah
- Masih banyaknya tempat makan/restoran dan hotel/penginapan yang belum memiliki sertifikasi halal.
- Kurangnya infrastruktur, sarana transportasi umum dan sejumlah layanan dan fasilitas yang masih minim. Lahirnya moda transportasi online juga ternyata malah mehirkan masalah baru yaitu konflik sosial yang terjadi

antara pengemudi transportasi konvensional dengan angkutan transportasi moderen yang berbasis aplikasi teknologi (online).

- Dalam pelaksanaan pennebusan pupuk bersubsidi oleh pengecer kepada Distributor adanya keharusan pengecer untuk menebus pupuk NPK Plus (non subsidi) sebanyak 5% dari besarnya pennebusan pupuk bersubsidi setiap melakukan pennebusan.
- Masih terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan program pupuk bersubsidi, seperti ketika pendataan RDKK, penjualan pupuk bersubsidi kepada yang tidak berhak, penghitungan volume penyaluran, pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, penghitungan subsidi pupuk, dan pengawasan program pupuk bersubsidi.
- Dalam pelaksanaan kebijakan program pupuk bersubsidi terjadi di tingkat pengecer, distributor dan produsen serta lemahnya mekanisme pengawasan pelaksanaan pupuk bersubsidi.
- Masih belum berjalan mekanisme pelaksanaan kebijakan pupuk sesuai regulasi yang telah ditentukan sehingga lemahnya pengawasan dari institusi yang berwenang, dan lemahnya kontrol masyarakat luas.
- Kurang disiplinnya peserta bazar.
- Jumlah peminat melebihi dari stand yang di sediakan panitia.
- Belum adanya kesamaan persepsi tentang skala prioritas dalam menyikapi inflasi, serta kurangnya koordinasi antar SKPD provinsi dan SKPD Kab/Kota pemasok komoditi penyumbang inflasi.
- Belum adanya pengaturan siklus penanaman komoditi penyumbang inflasi agar panen ada kesinambungan untuk mendukung ketersediaan pasokan, sehingga laju inflasi dapat ditekan.
- Permasalahan pokok yang dihadapi dalam peningkatan produksi daerah baik produksi primer maupun produksi olahan adalah sebagai berikut :
- Data produksi primer, terutama padi yang disampaikan oleh Kabupaten/Kota belum akurat yang menyebabkan data yang dihimpun oleh OPD terkait di Provinsi juga belum akurat.
- Ketidakakuratan data tersebut, banyak OPD terkait di Kab/Kota tidak memperhatikan pengaruh alih fungsi lahan,

bencana alam dan hama penyakit untuk tanaman padi, ketersediaan pupuk dan benih bibit bermutu.

- Belum berjalannya program peningkatan produksi dengan baik, seperti perbaikan irigasi belum sempurna.
- Terbatasnya modal usaha dalam pengembangan usahanya.
- Walaupun produksi pertanian selalu mengalami peningkatan (surplus), tapi kenyataan di lapangan (ketersediaannya masih sering terbatas) seperti cabe, dan beras. . Hal ini disebabkan oleh tanaman ini merupakan tanaman musiman dan persediaan bisa berkurang bila terjadi banjir, gagal panen atau permintaannya meningkat dari biasa.
- Daya saing produk masih rendah.
- Kapasitas produksi belum terjamin, terutama untuk produk kerajinan, produk sayuran dan buah – buahan.
- Kurangnya pengembangan produk kerajinan dari produsen.
- Disain produk belum memenuhi selera pembeli luar negeri, terutama untuk produk kerajinan dan makanan
- Masih rendahnya kemampuan SDM dan mempertahankan tradisi.
- Masih adanya promosi untuk produk daerah yang kurang gencar.
- Tata niaga, dan pengelolaan dampak dari harga yang diatur oleh Pemerintah Pusat seperti kenaikan harga BBM dan TTL (Tarif Tenaga Listrik).
- Terjadinya penimbunan stock kebutuhan bahan pokok serta terjadinya monopoli harga.
- Kurang lancarnya transportasi barang.
- Ancaman cuaca, gagal panen.
- Ekspektasi masyarakat terutama dalam hari-hari besar seperti bulan puasa dan lebaran sering membeli melebihi dari kebutuhan.
- masih rendahnya tingkat kesadaran, kepedulian dan rasa tanggung jawab pelaku usaha tentang perlindungan konsumen, baik didalam memproduksi, memperdagangkannya maupun didalam mengiklankannya, sehingga pada pelaksanaannya konsumen banyak yang dirugikan secara sepihak.

- Timbulnya kebijakan yang tumpang tindih seiring dengan keberadaan beberapa Forum bidang pengembangan ekonomi di Kabupaten/Kota, terutama dalam hal kebijakan yang dihasilkan;
- Dasar hukum yang mengatur tentang Pembentukan FPED ini masih berupa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, sehingga kekuatan dasar hukumnya belum kuat
- masih tidak validnya data KPM yang dikirim kementerian Sosial dengan KPM yang berada di Kabupaten/Kota.
- masih adanya kualitas beras tidak layak makan yang dikirim Bulog seperti di Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pesisir Selatan, namun berasnya cepat diganti oleh pihak Divre Bulog.
- masih terjadi adanya ketersediaan benih yang tidak tepat varietasnya, dimana varietas benih yang disubsidi pemerintah kurang sesuai dengan selera masyarakat dimasing-masing Kabupaten/Kota di Sumatera Barat,
- Penggunaan bibit bermutu untuk sebagian kecil tanaman perkebunan seperti tanaman karet dan kelapa sawit masih ada sebahagian yang menggunakan bibit asalan oleh masyarakat, karena kurangnya penyuluhan kepada masyarakat tentang bibit bermutu.
- Belum semua Balai Benih Ikan (BBI) mampu menghasilkan induk unggul karena keterbatasan anggaran, Sumber Daya Manusia dan kemauan masyarakat.
- Masih kurangnya jumlah tenaga penyuluh dan Sumber Daya Manusia di berbagai sektor untuk pembinaan terhadap petani dan peternak dalam pemakaian benih bermutu.
- Masih sulitnya memisahkan antara sub sektor industri kreatif dengan sektor lainnya yang selama ini digunakan. Definisi kreatif sendiri masih sulit dipahami oleh seluruh stakeholder. Hal ini berimbas pada penganggaran yang belum khusus bernama kegiatan ekonomi kreatif. Jika dikhususkan tentang industri kreatif maka dimungkinkan bisa double counting dengan sektor lain karena industri kreatif bisa masuk disektor manapun.
- Di Kabupaten/Kota, bidang ekonomi kreatif belum terstruktur dengan jelas karena terdapat beberapa OPD teknis terkait yang melaksanakan pembinaan terhadap pelaku industri kreatif seperti Dinas Pariwisata, Dinas

Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Budaya, sehingga dalam pembinaan terjadi tumpang tindih antara OPD terkait tersebut.

- Dalam mendukung tumbuhnya ekonomi kreatif diperlukan payung hukum (aturan) serta road map yang lebih jelas. Dasar hukum yang ada saat ini baru berupa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2009 terkait koordinasi pengembangan ekonomi kreatif antar kementerian dan lembaga dengan kementerian perdagangan yang menjadi sektor penggerakannya. Inpres itu sudah habis masa berlakunya pada 2014 dan belum diperpanjang. Oleh karena itu, diharapkan Tahun 2018 ini Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif sudah dibuat dan mulai dapat disosialisasikan kepada masyarakat.
- Belum adanya Road Map Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat yang bisa menjadi panduan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Belum maksimalnya kebijakan yang mendukung iklim kreatif (perizinan, investasi, insentif, dan perlindungan hak cipta).
- Kondisi pengembangan ekonomi kreatif sangat membutuhkan komitmen pimpinan daerah. Tataran kebijakan di Provinsi sudah dilaksanakan, tapi di Kabupaten/Kota belum sepenuhnya. Belum dirasakan adanya sinkronisasi program kreatif dari Provinsi dengan Kabupaten/Kota.
- Para pelaku ekonomi kreatif mengalami kesulitan dalam memperoleh modal usaha, karena untuk memperoleh permodalan mengharuskan persyaratan yang cukup banyak untuk mendapatkan bantuan baik dari perbankan, non perbankan, maupun dari Badan Ekonomi Kreatif itu sendiri. Terbatasnya akses pembiayaan ini juga karena pelaku usaha memiliki keterbatasan kemampuan dalam menyusun laporan keuangan dan terbatasnya pelatihan karyawan dalam manajemen keuangan.
- Tingkat kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang tepat sasaran bagi ekonomi kreatif Sumatera Barat perlu ditingkatkan.
- Daya dukung riset dan pengembangan terhadap ekonomi kreatif Sumatera Barat masih kurang, salah satu

dampaknya belum ada kajian rantai nilai yang utuh mulai kegiatan kreasi, produksi dan distribusi.

- Persoalan ketersediaan data dan informasi untuk mengembangkan usaha.
- Terdapatnya hambatan dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten/Kota terkait kualitas desain dan kemasan yang masih lemah, persoalan infrastruktur usaha fisik yang masih lemah, hak kekayaan intelektual serta akses permodalan yang masih lemah.
- Relatif banyak lembaga perbankan yang masih belum sepenuhnya dapat menyalurkan kreditnya kepada sektor pertanian sesuai dengan kebijakan yang diambil.
- Kurang tersedianya jaminan yang diberikan dan belum mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan
- Bank agak kesulitan dalam memilih debitur yang layak;
- Dalam pengajuan kredit, kebanyakan debitur kesulitan menyediakan agunan;
- Adanya batasan bahwa KKP-E hanya disalurkan melalui kelompok tani dan/atau koperasi;
- KKP-E tidak dapat digunakan untuk membiayai peralatan/mesin untuk penangkapan dan budidaya ikan.
- Serapan kredit masih rendah.
- Masih adanya BUMD yang sama sekali tidak dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah karena perusahaannya merugi.
- SDM dan Manajemen BUMD yang belum profesional dalam mengelola usahanya.
- Keterbatasan anggaran dalam mengikuti sosialisasi terkait regulasi terbaru dalam pembinaan dan pengembangan BUMD dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM yang mengelola BUMD.
- Belum tersedianya inventarisasi data yang konkrit tentang penyaluran dana SCR Perusahaan di Provinsi Sumatera Barat.
- Belum meratanya penyaluran CSR Perusahaan di Kabupaten/Kota, hal ini disebabkan karena masih kurangnya koordinasi antara Pemerintah dengan Perusahaan.
- Belum adanya sinergi program antara perusahaan dengan Pemerintah Daerah setempat dalam hal penyaluran CSR Perusahaan.

- Dalam penyaluran dana PKBL, BUMN yang bersangkutan secara umum meminta agunan atas pinjaman yang akan diberikan.
- Sumberdaya manusia yang relatif terbatas, terutama dari segi kualitas, kemampuan individu dari penerima dana PKBL–BUMN.
- Masih ada anggapan sebahagian pengusaha kecil mitra binaan yang memperoleh dana program kemitraan BUMN, bahwa bantuan modal yang diterimanya merupakan hibah, sehingga mereka enggan untuk membayar angsuran pinjamannya, atau merasa tidak terikat dengan perjanjian yang ditandatangani.
- Apabila terjadi tunggakan dari mitra binaan, maka akhirnya BUMN Penyalur tersebut meminta bantuan kepada Instansi terkait di daerah.
- Tidak tertutup kemungkinan terjadinya tumpang tindih dalam pemberian bantuan kepada pengusaha kecil dengan dana bergulir lainnya, baik yang bersumber dari APBN (dana Dekonsentrasi) maupun dari dan dana APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Kebijakan beberapa Direksi BUMN Penyalur dalam proses pembayaran angsuran pinjaman dari mitra binaan, disetor langsung ke rekening Kantor pusat BUMN Penyalur dan kantor Perwakilannya sebagai pelaksana di daerah tidak mengetahui tingkat kelancarannya.
- Kebanyakan setiap proposal pemberian bantuan kepada pengusaha kecil harus mendapat persetujuan dari kantor pusatnya dan proses tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama.
- Kesulitan UMKM dalam mendapatkan tambahan modal usaha.
- Belum optimalnya pembinaan dari SKPD terkait di Kabupaten/Kota yang disebabkan kurangnya SDM dan anggaran penunjang untuk melaksanakan pembinaan pada LKM.
- Kurang aktifnya beberapa Kab/Kota dalam menginput data calon debitur KUR kedalam Sistim Informasi Kredit Program (SIKP).
- Kurangnya informasi yang didapat Kab/Kota terhadap penyaluran KUR dari Perbankan .
- Proses Pelaksanaan input data calon debitur KUR melalui SIKP belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan di



Kab/Kota dikoordinir oleh Dinas yang membidangi Koperasi sedangkan calon debitur KUR berasal dari berbagai sub Sektor.

- Belum semua Kab/Kota membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penyaluran KUR.

## 2) Solusi

- OPD/Instansi terus berupaya melakukan kegiatan sosialisasi dan progress kegiatan untuk mengembangkan dan mewujudkan pariwisata halal di Provinsi Sumatera Barat.
- Terkait Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menindaklanjutinya melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus guna mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap angkutan sewa khusus berbasis teknologi informasi.
- KPPP perlu meningkatkan pengawasan, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan memberikan sanksi yang tegas pada yang melanggar aturan.
- Perlu diadakan pertemuan melalui rapat koordinasi antara KP3 Provinsi dan KP3 Kabupaten/Kota serta SKPD terkait di kabupaten/Kota guna mendorong percepatan penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten/Kota.
- Kebijakan pupuk bersubsidi perlu tetap dipertahankan karena masih diperlukan untuk peningkatan produktivitas pertanian.
- Perlu ketegasan pemerintah untuk mengenakan sanksi kepada produsen jika terbukti gagal melaksanakan kewajiban dalam pengadaan dan pendistribusian untuk mencukupi persediaan pupuk di kios pengecer sesuai ketentuan dengan mencabut haknya.
- Menyusun pedoman pelaksanaan bazar dan memberikan arahan kepada para pelaku usaha.
- Menyediakan stand-stand tambahan.
- Mengintensifkan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk mengawal penerapan kebijakan tentang Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

- Meningkatkan koordinasi dalam rangka mendorong kabupaten/kota agar mengatur siklus penanaman komoditi terkait inflasi dalam rangka untuk memenuhi ketersediaan pasokan pada bulan-bulan tertentu.
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi ke Kab/Kota.
- Melakukan koordinasi dan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan produksi primer dan olahan di Kabupaten/Kota.
- Melaksanakan rapat-rapat koordinasi dalam rangka mengevaluasi perkembangan produksi primer maupun olahan.
- Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota.
- Perlu peningkatan fasilitasi Pemerintah Provinsi bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengembangkan jaringan pasar produk unggulan daerah Kabupaten/Kota.
- Perlu peningkatan sinergitas kegiatan OPD terkait di Provinsi dengan OPD terkait di Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi pengembangan pemasaran produk unggulan daerah.
- Bila terjadi kenaikan harga secara signifikan terhadap suatu komoditi, Pemerintah setempat bersama dengan OPD terkait segera mengadakan pasar murah atau operasi pasar.
- Pemerintah setempat menghimbau kepada masyarakat untuk merubah pola konsumsinya.
- Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait dan satgas pangan yang melibatkan Reskridisus Polda Sumatera Barat terutama pada hari besar keagamaan, pelaku usaha, tentang pendistribusian dan ketersediaan sembako.
- perlunya peningkatan koordinasi dan evaluasi bersama secara berkelanjutan antara OPD/Instansi terkait di Provinsi, OPD terkait Kabupaten/Kota serta stakeholder yang bergerak di dalam Perlindungan Konsumen, agar tercapainya sasaran Kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka melindungi konsumen dari hal-hal yang merugikan.
- Perlu adanya sinergitas program dan sinkronisasi kegiatan OPD terkait di Provinsi dan OPD terkait di Kabupaten/Kota untuk perlindungan konsumen baik

melalui kegiatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 41 Tahun 2018

- Promosi langsung, sehingga pelaku UMKM mengetahui selera pasar dan karakteristik konsumen sehingga mutu dan design produk yang diproduksi akan mampu menembus pasar regional ASEAN dengan meningkatkan kualitas produk-produk dan kemasannya.
- Melaksanakan Focus Group Discussion sebagai salah satu media untuk menggali informasi, diskusi yang membahas isu-isu aktual dan pengembangan berbagai macam program yang berhubungan dengan pengembangan ekonomi daerah dan regional dengan melibatkan seluruh stakeholder.
- Melakukan monitoring, evaluasi dan koordinasi secara lisan dan tertulis kepada SKPD terkait Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
- Memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Kementerian Dalam Negeri RI untuk menerbitkan aturan yang lebih tinggi sebagai pedoman dalam pembentukan Forum Pengembangan Ekonomi Daerah.
- Biro Perekonomian Setda Prov. Sumbar telah menyurati Bupati/Walikota melalui surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 500/549/Perek-klbg/2018 tanggal 15 Oktober 2018 perihal Pembentukan Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FPED).
- Biro Perekonomian Setda Prov. Sumbar telah menyurati Kementerian Dalam Negeri RI melalui surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 500/154/Perek-klbg/2018 tanggal 28 Februari 2018 perihal Forum Pengembangan Ekonomi Daerah.
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pendistribusian Rastra dan BPNT ke Kabupaten/Kota.
- Melaksanakan rapat Koordinasi evaluasi Bansos Rastra dan BPNT dengan Tim Koordinasi, Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Pangan dilingkungan Provinsi, Pelaksana Rastra dan BPNT Kabupaten/Kota.
- Menyurati Bupati/Walikota agar pelaksana Rastra di Kabupaten/Kota melakukan validasi dan verifikasi data yang dilakukan 2 kali dalam setahun pada bulan mai dan

bulan Oktober dengan sistem SIKS-NG dan di kirim ke Kementerian Sosial dan Pusdatin.

- Menyurati Bulog terkait kualitas beras yang tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan Pedum Bansos Rastra.
- OPD terkait di Provinsi bersama dengan OPD terkait di Kabupaten/Kota meningkatkan sumber benih bermutu melalui program kegiatan Desa Mandiri Benih.
- Memberdayakan penangkar benih.
- Meningkatkan peran tenaga penyuluh dalam pengawasan pemakian benih dan bibit bermutu.
- Melaksanakan rapat-rapat koordinasi sebagai salah satu upaya untuk menggali informasi, diskusi yang membahas permasalahan pengembangan ekonomi kreatif yang terjadi di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, menghimpun data dan informasi terkait pengembangan ekonomi kreatif di masing-masing daerah persubsektor.
- Melakukan monitoring, evaluasi dan koordinasi secara lisan dan tertulis kepada SKPD terkait Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
- Memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Badan Ekonomi Kreatif RI untuk menerbitkan aturan yang lebih tinggi sebagai pedoman dalam pengembangan ekonomi kreatif.
- Mengoptimalkan peran Konsultan Keuangan Mitra Bank.
- Meningkatkan peran serta Lembaga Penjaminan Kredit.
- Meminta peran aktif Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi ketersediaan lahan dan penyelesaian masalah kepemilikan lahan serta penyediaan dan perbaikan sarana infrastruktur perkebunan sangat diharapkan.
- Merumuskan upaya untuk mempermudah dan mempercepat proses pengurusan sertifikat lahan bagi petani/pekebun/ peternak/nelayan calon peserta kredit sektor pertanian.
- Meminta kepada PT. Jamkrida mensosialisasikan pinjaman kredit dan mengajak Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pemegang saham.

- Bank pelaksana melakukan penilaian secara objektif terhadap rencana pengembangan usaha yang dilakukan oleh petani/debitur.
- Diminta transparansi dan komunikasi yang intens antara bank pelaksana dan SKPD terkait baik di Kabupaten/Kota maupun di SKPD Provinsi dalam penilaian debitur/petani.
- Diharapkan kiranya OPD teknis Provinsi maupun Kab/kota agar dapat meningkatkan Sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat kewajiban seorang debitur perbankan.
- Terhadap BUMD yang belum dapat memberikan kontribusi terhadap pemerintahan daerah sebagian sudah dilikuidasi seperti PT. ATS dan PT. Dinamika.
- Selalu berupaya agar SDM yang mengelola BUMD untuk dapat ikut pada sosialisasi regulasi terbaru dalam pembinaan BUMD.
- Sudah diupayakan untuk mengalokasikan dana untuk bimtek dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM yang mengelola BUMD.
- Menyiapkan beberapa kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mensinergikan pelaksanaan Program/kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau CSR Perusahaan.
- Kebijakan dimaksud berupa Peraturan Gubernur Sumatera Barat dan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi dan Forum Koordinasi .
- Dalam rangka mencapai sasaran penyaluran dana Perusahaan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat senantiasa melakukan koordinasi dan monitoring yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Koordinasi dengan SKPD dan pihak terkait lainnya tetap dilakukan tanpa mengurangi kewenangan dari BUMN pembina.
- Besaran penetapan alokasi dana PKBL yang ditetapkan oleh Menteri Negara BUMN (regulasinya) dikoordinasikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD terkait dengan tujuan untuk pemerataan penyaluran dana program kemitraan sesuai dengan potensi usaha kecil di masing-masing Kabupaten/Kota yang disesuaikan pula dengan program jenis usaha yang dibantu oleh masing-masing BUMN penyalur.

- Meningkatkan koordinasi antara SKPD terkait di Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan seluruh Perusahaan yang berada di Sumatera Barat, sebagai upaya mensinergikan pelaksanaan penyaluran dan penyamaan pandangan terhadap program pembangunan ekonomi kerakyatan Provinsi Sumatera Barat serta mengatasi permasalahan yang ditemui.
- Melaksanakan rapat koordinasi dengan Perusahaan dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta SKPD terkait.
- Menyurati seluruh Perusahaan dan Bupati/Walikota serta SKPD terkait Provinsi Sumatera barat melalui surat Gubernur Sumatera Barat perihal Data Penyaluran PKBL yang ditujukan kepada 30 Perusahaan.
- Melakukan monitoring dan evaluasi ke Dinas terkait Kabupaten/Kota tentang perkembangan penyaluran dana PKBL–BUMN.
- Untuk mengoptimalkan pelaksanaan undang-undang LKM, Pemerintah Prov Sumatera Barat telah menyurati Kab/Kota dengan surat Sekretaris Daerah Nomor 500/398./Perek-Klbg/2018 tanggal 5 Agustus 2018 , agar LKM yang telah mendapatkan izin bersyarat dari OJK (22 Unit LKM) untuk ditingkatkan menjadi izin penuh serta memfasilitasi pengurusan pengukuhan LKM.

## **2. Fungsi Sekretariat DPRD**

Fungsi Sekretariat DPRD pada Tahun Anggaran 2018 mendapat alokasi APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.101.999.304.723,- dengan realisasi Rp.94.732.356.997,- (92,88 %), untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

### **a. Program dan Kegiatan**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan.
6. Program Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, dengan kegiatan:
  - Pembahasan Rancangan Perda.
  - Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota dan Sekretaris DPRD.

- Reses.
- Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah.
- Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi Luar Daerah.
- Penyediaan Jasa Pelayanan tamu Pemda.
- Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan.
- Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, keserasian peranan per UU.
- Seminar dalam rangka pembahasan ranperda.
- Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah.
- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.

**b. Realisasi Program dan Kegiatan**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran Rp.15.645.833.365,- dan realisasi sebesar Rp.15.285.402.600,- (97,68 %).
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan anggaran Rp.19.867.100.021,- dan realisasi sebesar Rp.19.352.055.515,- (97,41 %).
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan anggaran Rp.1.049.863.000,- dan realisasi sebesar Rp.1.048.800.987,- (99,90 %).
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan anggaran Rp.153.532.400,- dan realisasi sebesar Rp.144.189.443,- (93,91 %).
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan anggaran Rp.844.714.572,- dan realisasi sebesar Rp.819.765.252,- (97,05 %).
6. Program Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan anggaran Rp.64.438.261.374,- dan realisasi sebesar Rp.58.084.193.200,- (90,14 %) dengan *output* :
  - Tersedianya payung hukum/pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.
  - Meningkatnya kualitas pemahaman Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang.
  - Terjaring aspirasi masyarakat Kabupaten/Kota untuk

perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.

- Terwujudnya peningkatan wawasan dan kinerja DPRD.
- Terwujudnya peningkatan wawasan dan kinerja DPRD.
- Terlaksananya pelayanan tamu-tamu pemerintah daerah.
- Terjalannya kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan.
- Terlaksananya kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Keserasian peraturan perundang-undangan.
- Terlaksananya legalitas rancangan peraturan perundang-undangan berupa rekomendasi.
- Terpublikasinya kegiatan kedewanan di media cetak dan media elektronik.
- Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap produk hukum Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

**c. Outcomes**

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

**3. Fungsi Pengawasan**

Fungsi Pengawasan pada Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah mendapat alokasi APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.12.124.851.900,- dengan realisasi Rp.11.844.045.411,- (97,68 %), untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

**a. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.
- 6) Program Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan kegiatan: Peningkatan Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- 7) Program Peningkatan Fungsi Pengawasan Dan Penegakan Hukum, dengan kegiatan :
  - Peningkatan Pemeriksaan, Reviu dan Evaluasi.
  - Peningkatan Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.



- Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Aparatur Pengawasan.
- Pemantapan Perencanaan, Koordinasi dan Administrasi Pengawasan.
- Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD).
- Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pencegahan Korupsi.
- Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB).
- Sosialisasi dan Pengendalian Gratifikasi.
- Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKASN).
- Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi.
- Operasional Sapu Bersih dan Pungutan Liar.

**b. Realisasi Program dan Kegiatan**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran Rp.2.088.719.318,- realisasi sebesar Rp.2.051.756.517,- (98,23 %).
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan anggaran Rp.2.115.537.300,- realisasi keuangan sebesar Rp.2.003.121.991,- (94,69%).
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan anggaran Rp.64.500.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.62.250.000,- (96,51 %).
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan anggaran Rp.87.108.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.85.583.891,- (98,25%).
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan, dengan anggaran Rp.137.898.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.137.677.000,- (99,84%).
6. Program Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan anggaran Rp.213.100.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.159.683.948,- (74,93%) dengan output: Persentase kasus yang ditangani dan diselesaikan 100%.
7. Program Peningkatan Fungsi Pengawasan Dan Penegakan Hukum, dengan anggaran Rp.7.417.989.282,- realisasi keuangan sebesar Rp. 7.343.972.064,- (99,00%) dengan output :
  - Jumlah temuan hasil pemeriksaan sebanyak 1002 temuan dengan 2189 saran terdapat/berupa temuan kerugian

Negara/Daerah dan kewajiban penyetoran kepada Negara/ Daerah) senilai Rp 704.648.079,- .

- Jumlah obrik pemeriksaan reguler 78 OP, dan telah diperiksa semuanya.
- Terlaksananya Pra Reviu, Reviu SKPD, dan Reviu LKPD sebanyak 3 kali (3 Laporan).
- Terlaksananya Evaluasi LAKIP sebanyak 50 SKPD Provinsi.
- Terlaksananya evaluasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan: Inspektorat Daerah Provinsi dari 2189 saran telah ditindaklanjuti sebanyak 1332 atau (60.84%), BPK dari 39 saran telah ditindaklanjuti sebanyak 36 atau (92,30%), Itjen Kementerian Dalam Negeri dari 22 saran telah ditindaklanjuti sebanyak 20 atau (90,90%).
- Terlaksananya monitoring/ pemantauan TLHP hasil pemeriksaan.
- Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengawasan Pembahasan Tindak Lanjut.
- Terlaksananya Rapat Pemutakhiran Data.
- Terlaksananya Rapat Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
- Terkirimnya peserta untuk mengikuti Bimtek, Sosialisasi dan diklat teknis.
- Terlaksananya program kerja pengawasan tahunan (PKPT) tahun 2018 dan terkoordinasinya/tersusunnya PKPT 2018.
- Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/kota yang lebih baik.
- Terlaksananya Implementasi SPIP di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Nilai Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat : 56.
- Terselenggaranya Sosialisasi dan Pengendalian Gratifikasi pada 48 SKPD dan Pengguna / Penyedia barang jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 170 orang.
- Terselenggaranya Penyusunan Laporan Harta Kekayaan bagi Wajib Lapo LHKPN dan LHKASN.
- Terselenggaranya Pembinaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi 2 SKPD.

### **c. Outcomes**

- 1) Meningkatnya fungsi Lembaga Pengawas dan Aparatur Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi.
- 2) Penanganan Pengaduan Masyarakat yang Dapat ditangani.

**d. Permasalahan dan Solusi**

- 1) Permasalahan  
Masih kurangnya ketersediaan jumlah Sumber Daya Manusia untuk jabatan fungsional auditor/P2UPD/auditor kepegawaian.
- 2) Solusi  
Perlu kiranya dilakukan penambahan Sumber Daya Manusia untuk jabatan fungsional tersebut baik dari PNS Pindah maupun penerimaan CPNS.

**4. Fungsi Perencanaan**

Fungsi Perencanaan pada Tahun Anggaran 2018 mendapat alokasi APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.18.232.907.472,- dengan realisasi Rp.16.603.589.774,- (91,06%), untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

**a. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- 6) Program Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan, dengan kegiatan:
  - Pengelolaan website .
  - Koordinasi Forum Data Provinsi Sumatera Barat.
  - Pengelolaan Sistem Database Perencanaan Pembangunan Daerah (SDP2D).
  - Pengelolaan Data dan Informasi Spasial Berbasis GIS untuk Perencanaan Pembangunan.
- 7) Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan:
  - Penyusunan KUA PPAS APBD.
  - Penyusunan KUA PPAS Perubahan APBD.
  - Penyelenggaraan Musrenbang Penyusunan Dokumen Perencanaan.
  - Penyusunan Buku Kerjasama Pemerintah dan Swasta.

- Implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
  - Penyusunan RKPD.
  - Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 8) Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan :
- Harmonisasi Perencanaan dan Kerjasama Pembangunan Bidang Ekonomi.
  - Harmonisasi Progress Pelaksanaan Pencapaian Tujuan SDGs.
  - Harmonisasi Program/Kegiatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
  - Harmonisasi Program/Kegiatan Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
  - Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP) .
  - Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah.
  - Pemantauan dan Pelaporan Program/Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006.
  - Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
  - Akselerasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pertanian dan Perikanan.
  - Akselerasi dan Sinkronisasi Perdagangan, Industri, Koperasi dan Dunia Usaha.
  - Akselerasi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan SDA, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
  - Akselerasi dan Harmonisasi Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.
  - Akselerasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan.
  - Akselerasi dan Sinkronisasi Pembangunan Sanitasi Pemukiman.
  - Akselerasi dan Sinkronisasi Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air.
  - Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Sosial dan Budaya dan Pemerintahan.
  - Akselerasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Sub Bidang Sosial Budaya;

- Akselerasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur.
- Akselerasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Manusia.
- Pelaksanaan Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL).
- Harmonisasi Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan.
- Harmonisasi Program/Kegiatan Pangan dan Gizi.
- Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Sumatera Barat.
- Kerjasama Ekonomi Regional dan Internasional.
- Pelaksanaan Rakortek Pembangunan Daerah.
- Peningkatan Kapasitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah.

**b. Realisasi Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran Rp.3.609.915.284,- dan realisasi sebesar Rp.3.407.385.076,- (94,39 %).
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan anggaran Rp.1.791.446.550,- dan realisasi sebesar Rp.1.600.534.100 ,- (89,34 %).
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan anggaran Rp.75.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.75.000.000,- (100 %).
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan anggaran Rp.220.827.000,- dan realisasi sebesar Rp.203.070.976,- (91,96 %).
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan, dengan anggaran Rp.458.447.450,- dan realisasi sebesar Rp.435.858.079 ,- (95,07 %).
- 6) Program Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan, dengan anggaran Rp.734.287.650,- dan realisasi sebesar Rp.714.393.574,- (97,29 %) dengan *output* :
  - Terlaksananya updating berita dan data pembangunan melalui website [www.bappeda.sumbarprov.go.id](http://www.bappeda.sumbarprov.go.id).

- Terlaksananya koordinasi pengelola website [www.bappeda.sumbar-prov.go.id](http://www.bappeda.sumbar-prov.go.id).
  - Tersajinya Data dan Informasi ter update database, serta data Informasi Pembangunan Sumatera Barat sebanyak 5 kali.
  - Terlaksananya Rapat Koordinasi dengan OPD Provinsi sebanyak 4 kali.
  - Tersedianya data perencanaan pembangunan Sumatera Barat sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan sebanyak 50 buku.
  - Terkelolanya data dan informasi geospasial berbasis GIS untuk perencanaan pembangunan Sumatera Barat.
- 7) Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan anggaran Rp.1.531.661.863,- dan realisasi sebesar Rp.1.494.731.953,- (97,59 %) dengan *output* :
- Tersedianya Pedoman Penyusunan RAPBD tahun 2020.
  - Tersedianya dokumen perencanaan dalam penyusunan RAPBD Perubahan tahun 2019.
  - Tersedianya dokumen koodinasi dan sinkronisasi program RKPD tahun 2020 antara stake holders dan kab/kota serta Pusat.
  - Terlaksananya penyusunan buku Kerjasama Pemerintah dan Swasta(*Public Private Partnership Book*).
  - Tersedianya sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.
  - Tersedianya buku RKPD 2020 sebagai acuan dalam penyusunan KUA PPAS 2020 dan buku RKPD Perubahan 2019 sebagai acuan dalam penyusunan KUA PPAS Perubahan 2019.
  - Meningkatnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah di Sumatera Barat.
- 8) Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan anggaran Rp.9.811.321.675,- dan realisasi sebesar Rp.8.668.863.516,- (88,36 %) dengan *output* :
- Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas serta kerjasama dengan rumusan program perencanaan pembangunan lingkup bidang ekonomi yang bersifat sinergis antar berbagai instansi antara pusat dan daerah.

- Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan dokumen SDGs di Sumatera Barat.
- Tersedianya buku laporan pelaksanaan kegiatan PDT.
- Terlaksananya koordinasi perencanaan program penanggulangan kemiskinan daerah.
- Meningkatnya kinerja kelembagaan pengelola irigasi pertanian yang berkelanjutan.
- Terlaksananya Perencanaan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Secara Partisipatif.
- Meningkatnya sistem, kapasitas dan manajemen irigasi serta pendapatan irigasi pertanian.
- Sinkronnya kegiatan Program IPDMIP antara Pusat, OPD Provinsi (Bappeda, Dinas PSDA dan Dinas Pertanian), dan 5 Kabupaten/Kota.
- Buku Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 sebanyak 100 buku.
- Pemantauan dan Evaluasi Laporan Manajerial Konsolidasi Triwulanan Program kegiatan pembangunan Dana APBN/DIPA Tahun Anggaran 2017 melalui Aplikasi PP 39/2006 (Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV) sebanyak 4 kali.
- Terlaksananya Rapat Pengendalian capaian kinerja program/ kegiatan APBD Provinsi Sumatera Barat (T1, T2, T3, T4) sebanyak 4 kali.
- Rapat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan sebanyak 75 kali.
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.
- Monitoring dan evaluasi ke kabupaten/kota sebanyak 19 kab/kota.
- Koordinasi pengendalian dan evaluasi ke pusat.
- Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RPJMD.
- Terlaksananya koordinasi dan Sinkronisasi percepatan Pembangunan Pertanian dan Perikanan di Provinsi Sumatera Barat.
- Laporan pelaksanaan kegiatan untuk bahan penyusunan perencanaan pembangunan bidang pertanian dan perikanan.
- Tercapainya percepatan pembangunan sektor Perdagangan, Industri, Koperasi dan Dunia Usaha di Sumatera Barat.

- Laporan pelaksanaan kegiatan untuk bahan penyusunan perencanaan pembangunan bidang ekonomi daerah berikutnya.
- Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan Pembangunan SDA, Tata ruang dan LH antar SKPD dan Koordinasi Kab/Kota.
- Buku laporan Koordinasi RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebagai pedoman bagi SKPD terkait untuk penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).
- Terlaksananya tahapan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai mekanisme perencanaan yang ditetapkan.
- Terlaksananya Rapat Koordinasi terkait isu strategis lingkup infrastruktur dan pengembangan wilayah.
- Tersedianya data dan informasi perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah.
- Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan sektor infrastruktur dan pengembangan wilayah dengan pelaksanaan pembangunan serta terkoordinirnya pembangunan lingkup sektor infrastruktur dan pengembangan wilayah.
- Terfasilitasi dan terlaksananya Sinkronisasi Rencana, Pelaksanaan dan Pembinaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Provinsi Sumatera Barat antara Pusat, Provinsi dan 19 Kabupaten/Kota terutama dibidang perencanaan.
- Sinkronnya kegiatan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman antara Pusat, OPD Provinsi dan 19 Kabupaten/Kota.
- Terlaksananya dukungan daerah pasca berakhirnya Program WISMP.
- Terlaksananya dukungan daerah terhadap Program IPDMIP.
- Terfasilitasi dan terlaksananya Koordinasi kegiatan pembinaan perkuatan kelembagaan sumberdaya air pada Kabupaten/Kota.
- Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan terpenuhinya undangan baik lintas SKPD terkait di Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun luar Provinsi.
- Tersusunnya laporan dalam bentuk kumpulan hasil pelaksanaan kegiatan Harmonisasi Perencanaan



Pembangunan Lingkup Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Tahun 2018.

- Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan terpenuhinya undangan baik lintas SKPD terkait di Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun luar Provinsi serta pengumpulan data data dan informasi untuk pencapaian target sasaran pembangunan sub bidang sosial budaya.
- Tersusunnya laporan dalam bentuk kumpulan hasil pelaksanaan kegiatan Akselerasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Sub Bidang Sosial Budaya Tahun 2018.
- Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan terpenuhinya undangan baik lintas SKPD terkait di Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun luar Provinsi serta pengumpulan data data dan informasi untuk pencapaian target sasaran pembangunan Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur.
- Tersusunnya laporan dalam bentuk kumpulan hasil pelaksanaan kegiatan Akselerasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur Tahun 2018.
- Percepatan sasaran pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Manusia, dalam bentuk rapat-rapat koordinasi dan terpenuhinya undangan dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta pengumpulan dan dan informasi untuk pencapaian target sasaran pembangunan sub bidang sumber daya manusia.
- Tersusunnya Laporan dalam bentuk kumpulan hasil pelaksanaan rapat-rapat, dan hasil pertemuan (Notulen dan laporan perjalanan dinas) dari Kegiatan Akselerasi Pencapaian sasaran Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Manusia Tahun 2018.
- Tersusunnya Aplikasi Swastisaba dalam mendukung penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat di Sumatera Barat.
- Terlaksananya pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat tingkat Provinsi Sumatera Barat.
- Terlaksananya Pelaksanaan Manajemen Pengelolaan data di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota dan advokasi kepada Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Barat.
- Meningkatnya kapasitas Pokja AMPL Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- Terlaksananya Pemantauan pelaksanaan Program Pamsimas III pada 12 kabupaten di Sumatera Barat.
- Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi perencanaan pelaksanaan program PAMSIMAS III di Provinsi Sumatera Barat.
- Buku Laporan Koordinasi Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan.
- Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi.
- Terlaksananya FGD.
- Terlaksananya Workshop.
- Terlaksananya penyusunan laporan Rencana Aksi Pangan dan Gizi.
- Rapat koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan RKPD, Renstra, Renja OPD Provinsi sebanyak 4 kali.
- Rapat koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan evaluasi hasil terhadap RKPD Kabupaten/Kota sebanyak 4 kali.
- Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota (RPJPD dan RPJMD) sebanyak 5 kab/kota.
- Koordinasi dan konsolidasi ke Pusat tentang evaluasi dokumen perencanaan Kabupaten/Kota.
- Verifikasi Renja T2 OPD Provinsi Sumatera Barat.
- Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Pokja PUG Provinsi Sumatera Barat.
- Terverifikasinya Dokumen GAP dan GBS SKPD Tahun 2019.
- Verifikasi Laporan RANDA PUG Kabupaten/Kota.
- Pembinaan dan Pemantauan RANDA PUG Kabupaten/Kota.
- Laporan Kerjasama Ekonomi Regional dan Internasional.
- Terlaksananya rapat teknis persiapan Rakortek.
- Terlaksananya Rakortek Tingkat Provinsi.
- Terlaksananya Rakortek Tingkat Pusat.
- Sinergitas dan integrasi pelaksanaan koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat.

**c. Outcomes**

- 1) Persentase Kelengkapan Data Pendukung untuk Pengukuran Kinerja Sasaran Pembangunan yang tercapaian pada RPJMD Provinsi.

- 2) Persentase Pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi.

**d. Permasalahan dan Solusi**

1) Permasalahan

- Beberapa rencana kegiatan perjalanan dinas luar negeri dalam rangka kerjasama pembangunan regional dan internasional tidak direalisasikan karena tidak diperolehnya rekomendasi izin dari Kementerian Dalam Negeri.
- Beberapa kegiatan yang diKoordinasikan ke pusat masih kurang diikuti.
- Meningkatnya pengelolaan data spasial berbasis GIS untuk perencanaan pembangunan.
- Belum adanya pedoman secara nasional untuk kaji ulang RAD GRK Provinsi Sumatera Barat dan masih belum optimalnya penghitungan tiap-tiap sektor.
- Peserta yang hadir pada 5 kegiatan yang diadakan di hotel tidak memenuhi target. Perubahan anggaran tidak bisa dilakukan karena rencana awal cosing date WISMP bulan Oktober 2017.

2) Solusi

- Untuk kedepannya akan diidentifikasi dan dipastikan kehadiran peserta sebelum kegiatan dilaksanakan Agar menghindari munculnya paket pekerjaan pada APBD-Perubahan.

**5. Fungsi Penelitian dan Pengembangan**

Fungsi Penelitian dan Pengembangan pada Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan mendapat alokasi APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.8.911.082.485,- dengan realisasi Rp.8.529.207.387,- (95,71 %), untuk melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

**a. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

6) Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK untuk Menunjang Pemerintahan dan Pembangunan, dengan kegiatan:

- Kajian Faktor Determinan kematian Ibu di Provinsi Sumatera Barat.
- Penguatan Kapasitas Inovator.
- Koordinasi Kelitbangan.
- Kajian Efisiensi dan Efektifitas Penganggaran serta Pelaksanaan kegiatan di Pemerintah Daerah Sumatera Barat.
- Kajian Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat.
- Inovasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Elektronik Jurnal Pembangunan Nagari.
- Diseminasi Inovasi Daerah.
- Penelitian Revitalisasi Pendidikan Vokasi di Sekolah Menengah Kejuruan di Sumatera Barat.
- Penguatan Peran Pelaku Kelitbangan dan Dewan Riset Daerah.
- Penumbuhan dan Pengembangan Inovasi Masyarakat.
- Survey, Pemetaan dan Perumusan Kebijakan Strategis.
- Elektronik Riset (e-riset).
- Penguatan Sistem dan jejaring Inovasi Daerah.
- Peningkatan Kapasitas Peneliti.

**a. Realisasi Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran Rp.861.056.253,- dan realisasi sebesar Rp.827.594.311,- (96,11 %).
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan anggaran Rp.797.268.040,- dan realisasi sebesar Rp.787.886.810 ,- (98,82%).
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan anggaran Rp.24.883.200,- dan realisasi sebesar Rp.24.000.000,- (96,45 %).
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan anggaran Rp.65.222.000,- dan realisasi sebesar Rp.63.764.540,- (97,77%).
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan anggaran

Rp.263.435.100,- dan realisasi sebesar Rp.263.026.000,- (99,84 %).

- 6) Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK untuk Menunjang Pemerintahan Daerah dan Pembangunan, dengan anggaran Rp.6.900.007.692,- dan realisasi sebesar Rp.6.562.935.726,- (95,11 %), dengan *output* :
- Terlaksananya Kompetisi Karya Inovasi dengan 2 kategori, yakni kategori : Teknologi Tingkat Menengah dan Teknologi Tepat Guna.
  - Terlaksananya Koordinasi Kelitbangan dan Seminar serta FGD peringatan HPN, Rakor Forum OPD Kelitbangan 2018, Rakor Lembaga Litbang PT dan Instansi Vertikal 2018, Rakor Kelitbangan 2018, Seminar Lembaga Litbang 2018.
  - Tersedianya rekomendasi efisiensi dan efektivitas penganggaran serta pelaksanaan kegiatan di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
  - Tersedianya dokumen hasil pendampingan penyusunan program perencanaan dana desa di 7 Kabupaten/Kota.
  - Terlaksananya rapat – rapat sebanyak 4 kali rapat dalam rangka pembahasan proposal, koesiner/panduan penelitian, persiapan seminar hasil, penyempurnaan laporan hasil dengan Tim peneliti dan Tim pengendali Mutu.
  - Terlaksananya pembinaan dan penilaian/pengukuran indeks inovasi daerah.
  - Terlaksananya Sosialisasi dan Penjaringan artikel Penelitian dari Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian lainnya.
  - Terlaksananya Diseminasi Inovasi Daerah sebanyak 22 kali pertemuan dengan jumlah peserta sebanyak > 2.875 orang.
  - Terlaksananya launching Pusat Peragaan IPTEK Sumbar pada tanggal 27 November 2018.
  - Tersedianya 3 unit alat peraga tambahan untuk Pusat Peragaan IPTEK Sumbar.
  - Terlaksananya pertemuan dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan inovasi masyarakat di 4 kabupaten/kota (Kab. Sijunjung, Kab. Tanah Datar, Kota Padang dan Kota Padang Panjang) untuk inovasi teknologi.

- Terlaksananya empat kajian yaitu LGBT, Geopark, Tanjungan Daerah, dan Ketahanan Keluarga.
- Terlaksananya rapat – rapat sebanyak 8 (delapan) kali dalam rangka pembahasan proposal, kuesioner/panduan penelitian, tim pengumpul data. (4 kajian).
- Terlaksananya pengumpulan, pengonalan dan analisa data (4 kajian).
- Terlaksananya Konsultasi dan Sharing Informasi ke BKD Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia terkait Kajian Analisa Optimalisasi Tunjangan Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sumatera Barat.
- Terlaksananya Sharing informasi untuk penyusunan Laporan Akhir Kajian Kawasan Geopark Silokek ke Provinsi Jawa Barat.
- Terlaksananya FGD 2 (dua), 1 kali FGD tentang LGBT, 1 (kali) FGD Geopark dalam rangka penyempurnaan data hasil penelitian (2 kajian).
- Terlaksananya 2 (tiga) kali konsinyir, 1 (satu) kali kajian Tunjangan Kinerja, 1(satu) geopark, 1 (satu) tentang ketahanan keluarga dalam rangka penyamaan persepsi dalam penyusunan laporan hasil penelitian (2 kajian).
- Terlaksananya seminar hasil/Workshop dalam rangka penyempurnaan draft laporan dan rekomendasi hasil penelitian sebanyak 60 buah buku (4 kajian).
- Terlaksananya Sosialisasi dan pengumpulan data hasil penelitian dari berbagai Perguruan Tinggi dan Lembaga/ instansi yang membidangi penelitian lainnya.
- Terkumpulnya data hasil penelitian kedalam sistem aplikasi elektronik riset sebanyak lebih dari 700 data penelitian.
- Terlaksananya Sosialisasi dan pengumpulan data hasil penelitian dari berbagai Perguruan Tinggi dan Lembaga/ instansi yang membidangi penelitian lainnya.
- Terkumpulnya data hasil penelitian kedalam sistem aplikasi elektronik riset sebanyak lebih dari 700 data penelitian.

### **c. Outcomes**

- 1) Meningkatnya fungsi penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- 2) Terlaksananya kajian efisiensi dan efektifitas penganggaran serta pelaksanaan kegiatan di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- 3) Tumbuh dan berkembangnya inovasi masyarakat tentang :
  - Inovasi teknologi hydram pump untuk lahan sawah tadah hujan di Kabupaten Sijunjung sebanyak 11 unit pada 11 lokasi di Kabupaten Sijunjung yang mampu mengairi lahan kering  $\pm$  3 ha/unit.
  - Inovasi teknologi alat pemipil jagung di Kabupaten Sijunjung sebanyak 1 unit pada 1 lokasi yang memicu minat  $\pm$  40 % dari jumlah peserta untuk menanam tanaman jagung dan mendorong petani mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur .
  - Inovasi pemanfaatan pelepah sawit sebagai pakan ternak (alat pencacah pelepah sawit) sebanyak 1 unit pada 1 lokasi dan pemanfaatan limbah ternak sebagai biogas sebanyak 3 unit oleh 3 orang petani.
  - Petani yang telah menggunakan biogas mampu menghemat pengeluaran untuk pembelian gas dari Rp. 90.000,-/bulan.
  - Dengan menggunakan APPO, petani dapat menyimpan cadangan makanan untuk ternak sapi selama 3 (tiga) hari dan menghemat biaya untuk mencari rumput untuk sapi + Rp 50.000,-/hari.
  - Inovasi teknologi penangkaran bibit kelapa sawit di Kabupaten Sijunjung sebanyak 5.000 batang pada 3 lokasi.
  - Inovasi pemanfaatan limbah serbuk gergaji untuk budidaya jamur di Kabupaten Sijunjung sebanyak 12.000 baglog pada 2 kelompok tani.
  - Inovasi teknologi diversifikasi produk bambu sebagai di Kabupaten Sijunjung sebanyak 5 jenis produk kerajinan.
  - Inovasi pemanfaatan lahan pekarangan dengan teknologi hidroponik di Kota Padang sebanyak 9 modul pada 5 lokasi dan pada 4 lokasi telah panen sebanyak 4 musim tanam sayuran daun dan setiap modul telah menghasilkan tambahan keuangan pengelola + Rp. 60.000,-/minggu.
  - Inovasi pemanfaatan lahan pekarangan dengan teknologi aquaponik di Kota Padang sebanyak 1 unit pada 1 kelompok masyarakat.

- Inovasi keterampilan design grafis di Kota Padang sehingga peserta telah mampu membuat design baliho, spanduk, leaflet dan brosur.
  - Inovasi keterampilan fotografi di Kota Padang sehingga peserta telah mampu membuat pas foto dan food fotografi untuk dimanfaatkan oleh cafe dengan menggabungkan keterampilan fotografi dengan digital imaging.
  - Inovasi pembuatan pakan ikan bergizi berbahan baku lokal di Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang sebanyak 2 jenis formula per kab/kota.
- 4) Tindaklanjutan pemanfaatan hasil kajian melalui pertemuan ilmiah dan diseminasi hasil – hasil penelitian.
  - 5) Bahan masukan untuk pengambilan kebijakan penanggulangan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgenders (LGBT) di Sumatera Barat dalam penyusunan Perda.
  - 6) Rekomendasi penelitian sudah menjadi bahan untuk percepatan penetapan Geopark Nasional dan sudah menjadi Geopark Nasional Ranah Minang Silokek dan menjadi rujukan Geopark UNESCO.
  - 7) Bahan masukan untuk pengambilan kebijakan ketahanan keluarga di Sumatera Barat dalam penyusunan Perda.
  - 8) Data penelitian yang terkumpul dapat terpublikasikan ke pengguna sebagai bahan masukan untuk pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan yang berbasis penelitian di Sumatera Barat.

## 6. Fungsi Keuangan Daerah

Fungsi Keuangan Daerah pada Tahun Anggaran 2018 Dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah mendapat alokasi APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.44.184.215.197,- dengan realisasi Rp.41.441.913.580,- (93,79 %), untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

### a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.



- 6) Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan, dengan kegiatan:
- Penyusunan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
  - Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah/Negara.
  - Bimbingan Teknis dan Pelatihan Peningkatan SDM Berbasis Teknologi Informasi.
  - Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD.
  - Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
  - Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD.
  - Verifikasi DPA-OPD, DPPA-OPD Dan Pergeseran DPA-OPD.
  - Pembinaan Teknis Penyusunan perencanaan penganggaran SKPD di Lingkungan Provinsi.
  - Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
  - Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).
  - Penetapan Pengelola Keuangan, Penerima Hibah, Bantuan Keuangan dan Bantuan Operasional Sekolah.
  - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang penatausahaan keuangan kepada OPD lingkup Provinsi Sumbar.
  - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
  - Rekonsiliasi Dana Tranfer, belanja pegawai dan daftar transaksi harian dan rekapitulasi harian.
  - Penyusunan peraturan terkait perencanaan dan penganggaran.
  - Sosialisasi peraturan terkait perencanaan dan penganggaran keuangan daerah kepada OPD dilingkup provinsi sumbar.
  - Pembahasan RKA-OPD dan DPPA-OPD/RKA-OPD kegiatan tahun 2018.
- 7) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:
- Rapat Koordinasi Pengelola Keuangan Daerah Se-Sumatera Barat.

- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kab/Kota.
  - Evaluasi APBD, Perubahan APBD dan Pertanggung jawaban APBD Kab/Kota.
  - Rekapitulasi dan Rekonsiliasi Data APBD Kab/Kota.
- 8) Program Peningkatan Pendapatan Daerah, dengan kegiatan:
- Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB.
  - Sosialisai Peraturan perundang-undangan di Bidang Cukai dan retribusi dan Penerimaan lain-lain.
  - Peningkatan Pendapatan Dana PERimbangan.
  - Penyusunan Ranperda Retribusi Daerah dan PLL.
  - Peningkatan dan Penyusunan Rencana Penerimaan Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain.
  - Intensifikasi Peningkatan Pajak Daerah.
- 9) Program Peningkatan Pelayanan Publik, dengan Kegiatan: Penilaian Pelayanan Publik dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Samsat Link.

**b. Realisasi Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran Rp.8.718.175.572,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.8.373.867.297,- (96,05%).
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan anggaran Rp.16.702.049.078,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.15.973.895.058,- (95,64%).
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan anggaran sebesar Rp.202.070.530,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.201.038.400,- (99,49%).
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan anggaran sebesar Rp.40.864.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.34.687.001,- (84,88%).
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan, dengan anggaran Rp.1.797.790.328,- dan realisasi sebesar Rp.1.635.262.646,- (90,96%).
- 6) Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan, dengan anggaran Rp.5.617.670.709,- dan realisasi sebesar Rp.5.173.286.458,- (92,09 %), dengan output :

- Terlaksananya penyusunan pergub tentang penjabaran APBD tahun 2018, penyusunan buku penjabaran tahun 2019 sebanyak 245 buku (I,II,III,IV) tahun 2018.
  - Terlaksananya penyelesaian proses tuntutan penyelesaian kerugian daerah/negara.
  - Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman aparatur tentang operasional aplikasi pengelolaan keuangan daerah.
  - Tersusunnya peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2018 beserta kelengkapannya (penantar nota keuangan, nota keuangan dan nota jawaban).
  - Tersedianya peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2018 beserta lampiran dan kelengkapannya.
  - Tersusunnya peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
  - Tersedianya dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan anggaran SKPD.
  - Terpenuhinya pemberian pemahaman terhadap penyusunan perencanaan dan penganggaran.
  - Terlaksananya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
  - Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah.
  - Terlaksananya penatausahaan belanja langsung dan tidak langsung APBD.
  - Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah.
  - Terwujudnya pelaksanaan belanja pegawai sesuai peraturan berlaku.
  - Terpenuhinya data dan informasi berkaitan dengan kebijakan implementasi pengelolaan keuangan daerah menurut dan petunjuk peraturan serta pedoman bagi OPD untuk pelaksanaan OPD.
  - Terlaksananya sosialisasi peraturan terkait dengan perencanaan dan penganggaran sebanyak 130 peserta.
  - Terlaksananya pembahasan RKA-OPD tahun 2018 sesuai dengan peraturan dll sebanyak 42 OPD, 9 BIRO dan PPKD.
- 7) Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp.611.956.026,- dan realisasi sebesar Rp.537.714.171,- (87,87%), dengan output:

- Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Kab/Kota.
  - Meningkatnya Pemahaman Anggota Tim TAPD terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - Ditetapkannya perda tentang APBD dan perbup/wako tentang penjabaran APBD kab/kota tahun 2018 berdasarkan hasil evaluasi Gubernur.
  - Terpenuhinya permintaan data dari Kementerian Dalam Negeri.
- 8) Program Peningkatan Pendapatan Daerah, dengan anggaran Rp.8.064.058.030,- dan realisasi sebesar Rp.7.245.722.294,- (89,73 %), dengan output :
- Tersedianya 1 buah Peraturan Gubernur tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
  - Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang retribusi dan PII sebanyak 2 angkatan Dengan hasil.
  - Laporan realisasi Penerimaan dana Perimbangan sebanyak 4 exp.
  - Terlaksananya penyusunan Ranperda Retribusi & PII dan Peraturan Pelaksanaan sebanyak 2 perda dan 3 Pergub.
  - Laporan koordinasi, evaluasi Rencana Penerimaan Retribusi 2019 sebanyak 12 laporan.
  - Terlaksananya pemungutan pajak daerah dengan target tercapainya target pajak daerah.
- 9) Program Peningkatan Pelayanan Publik, dengan anggaran Rp.2.395.800.924,- dan realisasi sebesar Rp.2.245.740.255,- (93,74%), dengan output :
- Terlaksananya survey indeks kepuasan masyarakat pada 3 UPT P3 selama 1 tahun.
  - Meningkatnya pelayanan kepada wajib pajak dan efisiensi penggunaan data dan informasi pajak kendaraan bermotor.

**c. Outcomes**

- 1) Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah.
- 2) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 3) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan APBD Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan.
- 4) Adanya pedoman bagi setiap UPT tentang perhitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB;

- 5) Meningkatnya wawasan aparatur pemungut retribusi dan pengelola DBHCHT,
- 6) Optimalnya koordinasi dana perimbangan;
- 7) Meningkatnya wawasan aparatur;
- 8) Optimalnya rencana penerimaan 2019 dan perubahan 2018;
- 9) Meningkatnya pendapatan daerah.
- 10) Terpenuhinya peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

## **7. Fungsi Kepegawaian Daerah**

Fungsi Kepegawaian Daerah pada Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Badan Kepegawaian Daerah mendapat alokasi APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.12.744.943.314,- dengan realisasi Rp.11.301.975.186,98 (88,68%), sementara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mendapat alokasi APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.12.612.674.216,- dengan realisasi Rp. 4.618.868.516,- (36,62%). Untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

### **a. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistim Capaian Kinerja dan pengelolaan Keuangan.
- 6) Program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur, dengan kegiatan:
  - Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS.
  - Pengelolaan Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian PNS.
  - Pengelolaan Mutasi Jabatan.
  - Pemetaan Potensi Pegawai.
  - Pemindahan dan Penempatan PNS.
  - Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi.
  - Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II.
  - Seleksi Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat PNS.
  - Pembekalan PNS yang akan Purna Tugas.

- Pemberian Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya.
  - Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS.
  - Penataan dan Pengelolaan Dokumen/peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.
  - Pengelolaan Kartu Identitas Pegawai.
  - Pengelolaan administrasi status kepegawaian.
  - Pengelolaan Tata Naskah PNS.
  - Penyusunan rencana kebutuhan pegawai.
  - Rapat Koordinasi Kepegawaian.
  - Pembinaan Kenaikan Pangkat PNS Kab/kota.
  - Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja.
  - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian (SIMPEG) .
  - Survey Kepuasan Masyarakat.
  - Pendampingan seleksi penerimaan Calon Praja IPDN.
  - Workshop penanganan kasus-kasus kepegawaian.
  - Pengelolaan Jabatan Fungsional PNS.
  - Rekrutmen CPNS Prov. Sumbar.
  - Pelaksanaan Penilaian Kinerja PNS.
  - Penataan pegawai pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
  - Indeks Profesionalitas ASN.
  - Implementasi tambahan penghasilan dengan SKP online.
  - Rapat teknis Pengurus Korps Organisasi Profesi ASN.
  - Seleksi ASN untuk MTQ korps Organisasi Profesi ASN tingkat Nasional.
  - Peringatan HUT Korps Organisasi Profesi ASN.
  - ASN Preneurship bagi anggota KORPS Organisasi Profesi ASN.
  - Diseminasi info dan layanan kepegawaian.
  - Workshop Bimbingan Konseling PNS.
  - Bimtek Pelayanan Prima Bidang Kepegawaian.
  - Workshop Pengembangan Potensi Diri Bagi Aparatur.
  - Workshop Penguatan Kerjasama Tim.
- 7) Program Pendidikan Kedinasan, dengan kegiatan :
- Diklat Kepemimpinan Tingkat III.
  - Diklat Kepemimpinan Tingkat IV (1 angkatan).

- Diklat Fungsional Pengawas Sekolah.
- Diklat Kepemimpinan Tk II/Reform Leader Academy (RLA).
- Diklat Teknis Perencanaan dan penganggaran Berbasis Kinerja.
- Diklat Teknis manajemen bencana.
- Peningkatan Standar Penyelenggaraan Diklat Manajerial.
- Peningkatan Standar Penyelenggaraan Diklat Fungsional.
- Peningkatan Standar Penyelenggaraan Diklat Teknis.
- Pengiriman Peserta Diklat Pendidikan Dasar Bagi CPNS Gol III dan II.
- Diklat Kepemimpinan Tk IV Pola Kontribusi.
- Diklat Kepemimpinan Tk III Pola Kontribusi.
- Diklat Pengembangan Kompetensi Anggota DPRD Kab/Kota pola kontribusi.
- Diklat Pengelolaan Keuangan Nagari/desa bagi wali nagari/kepala desa pola kontribusi.
- Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Nagari bagi wali nagari/kepala desa pola kontribusi.
- Diklat Pengelolaan Perencanaan pembangunan nagari/desa bagi wali nagari/ kepala desa pola kontribusi.
- Diklat Pengelolaan Administrasi pemerintahan nagari/desa bagi wali nagari/ kepala desa pola kontribusi.
- Diklat Pengelolaan Aset nagari/Desa bagi wali nagari/kepala desa pola kontribusi.
- Diklat legal drafting bagi wali nagari/kepala desa pola kontribusi.
- Diklat Teknis Pengelola Aset Untuk Perangkat Nagari (Kontribusi).
- Diklat Peningkatan Kompetensi Bagi Lurah pola kontribusi.
- Diklat Teknis standar akuntansi pelaporan berbasis akrual (kontribusi).
- Diklat Fungsional Penghitungan Angka Kredit Guru (Kontribusi).
- Diklat Fungsional Analisis Kepegawaian (Kontribusi).
- Diklat Calon Pengawas Sekolah (Kontribusi).
- Diklat Fungsional Pengelola Barang dan Jasa (Kontribusi).
- Diklat Teknis Penyusunan LAKIP (Kontribusi).

- Diklat Teknis Training of Course (Kontribusi).
- Pengelolaan Peningkatan Pendidikan aparatur dan IPDN.
- Diklat Pendidikan Dasar Bagi CPNS Gol II Pola Kontribusi.
- Diklat Pendidikan Dasar Bagi CPNS Gol III Pola Kontribusi.
- Diklat Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah (Kontribusi).
- Diklat Fungsional Calon Widyaiwara(CAWID) Kontribusi.
- Diklat Fungsional Pengendalian Lingkungan Hidup (Kontribusi).
- Diklat Prajabatan Kategori 1 dan Kategori 2 (2 angkatan)

**b. Realisasi Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran Rp.2.415.454.132,- dan realisasi sebesar Rp.2.314.738.944,98 (95,83 %).
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan anggaran Rp.1.391.297.280,- dan realisasi sebesar Rp.1.143.209.735,- (82,17 %).
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan anggaran Rp.74.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.65.029.000,- (87,88 %).
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan anggaran Rp.66.205.934,- dan realisasi sebesar Rp.57.842.875,- (87,37 %).
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistim Capaian Kinerja dan pengelolaan Keuangan, dengan anggaran Rp.416.367.600,- dan realisasi sebesar Rp.375.256.000,- (90,13%).
- 6) Program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur, dengan anggaran Rp.8.381.618.368,- dan realisasi sebesar Rp.7.345.898.632,- (87,64%), dengan *output* :
  - Terwujudnya pelayanan kenaikan pangkat PNS direncanakan sebanyak 6000 SK, dan terealisasi sebanyak 6242 SK.
  - Diterbitkannya Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil direncanakan sebanyak 400 Surat Keputusan terealisasi sebanyak 665 Surat Keputusan (meningkat karena bertambah jumlah guru-guru SMA).
  - Terwujudnya pengisian jabatan sesuai kompetensi yakni 14 Jabatan Pimpinan Tinggi (1 Jabatan Pimpinan Tinggi



Madya dan 13 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama) dan 519 Jabatan Administrasi.

- Tersedianya informasi mengenai potensi pegawai melalui pemetaan potensi dengan target untuk 3000 orang, realisasi 3000 orang.
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang dipindahkan dan ditempatkan direncanakan sebanyak 1600 orang dan dapat direalisasi sebanyak 1835 orang.
- Pemberian penghargaan untuk PNS berprestasi sebanyak 8 orang.
- Jumlah PNS Provinsi Sumatera Barat yang mengikuti Ujian Dinas Tk.1 sebanyak 58 orang dan lulus 57 orang sedangkan yang mengikuti Ujian Dinas Tk.II sebanyak 13 orang dan lulus 10 orang, jadi dari 50 PNS yang ditargetkan lulus Ujian Dinas adalah 67 orang.
- Lulus seleksi sebanyak 49 orang, dan memenuhi persyaratan untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan PNS yang akan memasuki purna tugas sebanyak 25 orang.
- Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya pada 2018 sebanyak 1.292 orang (target 500 orang).
- Terlaksananya Sidang Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP) dalam rangka penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS.
- Tersedianya aturan yang jelas dan tepat tentang kepegawaian.
- Terfasilitasinya pembuatan kartu identitas pegawai sebanyak 585 PNS (dari target 400 PNS) yaitu berupa Karpeg 20 PNS, Karis 206 PNS, Karsu 359 PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Tersedianya SK CPNS dan Tenaga Honorer Provinsi Sumatera Barat dengan target 284 SK, realisasi SK CPNS 3 SK, SK PNS 8 SK dan tenaga honorer 78 SK.
- Terkelolanya tata naskah Kepegawaian sebanyak 22000 file (target 22000 file, dengan capaian kinerja 100%) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat.
- Tersedianya formasi Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang

akan menyediakan informasi kebutuhan pegawai yang akurat.

- Diperolehnya kesepakatan antara Provinsi dengan kabupaten/kota dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian.
- Terwujud penetapan kenaikan pangkat PNS secara tepat waktu.
- Tersedianya laporan evaluasi pelaksanaan penilaian prestasi kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Terwujudnya data dan profil Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dapat digunakan untuk pengelolaan SDM aparatur dalam upaya memberikan pelayanan publik yang optimal.
- Tingkat kepuasan penerima layanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat atas pelayanan yang diberikan.
- Peserta yang lulus 74 orang (jumlah penerimaan melebihi kuota dari pusat yaitu 69).
- Terlaksananya Workshop penanganan kasus-kasus kepegawaian bertujuan untuk membahas dan menangani kasus-kasus Pegawai Negeri Sipil yang terjadi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Terlaksananya penetapan angka kredit yang akurat direncanakan sebanyak 800 orang, dan dapat direalisasi sebanyak 1.021.
- Terlaksananya Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sumatera Barat.
- Tersedianya laporan penilaian kinerja pejabat struktural dan staf di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan target 1000 orang, realisasinya 1000 orang.
- Terlaksananya penataan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Tersedianya indikator kualitas PNS yang lebih terukur, memiliki kredibilitas dan reliabilitas ketersediaan data.
- Terlaksananya Rapat Teknis Pengurus Korps Organisasi Profesi ASN.
- Terlaksananya pemilihan ASN yang punya daya saing di bidang MTQ untuk ditingkat Nasional.
- Terlaksananya Peringatan HUT Korps organisasi profesi ASN.

- Terlaksananya peningkatan minat dan memberikan pengetahuan kewirausahaan bagi Anggota Korps ASN.
  - Terlaksananya sosialisasi tentang layanan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, output kegiatan ini seperti leaflet.
  - Terlaksananya pengenalan terhadap aspek-aspek yang berpengaruh dalam proses konseling seperti sikap, tipe bawahan dan gaya kepemimpinan.
  - Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
  - Menciptakan Pegawai Negeri Sipil yang mampu memahami potensi diri dan bagaimana memanfaatkan potensi diri tersebut untuk pencapaian kinerja yang berprestasi.
  - Terciptanya sinkronisasi dari setiap Pegawai Negeri Sipil yang memiliki perbedaan, namun memiliki satu tujuan yang sama dengan kata lain ingin mengelola perbedaan yang ada menjadi kekuatan organisasi.
- 7) Program Pendidikan Kedinasan, dengan anggaran Rp.12.612.674.216,- dan realisasi sebesar Rp.4.618.868.516,- (36,62 %), dengan *output* :
- Terlaksananya Diklat Kepemimpinan Tingkat III, Terlaksananya Diklat Kepemimpinan Tingkat IV (1 angkatan).
  - Terlaksananya Diklat Kepemimpinan TK II/Reform Leader Academy.
  - Terlaksananya Pengiriman Peserta Diklat Pendidikan Dasar Bagi CPNS Gol III dan II.
  - Terlaksananya Diklat Prajabatan Kategori 1 dan Kategori 2.
  - Terlaksananya Diklat Kepemimpinan Tk IV Pola Kontribusi.
  - Terlaksananya Diklat Kepemimpinan Tk III Pola Kontribusi.
  - Terlaksananya Diklat Pengembangan Kompetensi Anggota DPRD Kab/Kota pola kontribusi.
  - Terlaksananya Diklat Pengelolaan Keuangan Nagari/desa bagi wali nagari/kepala desa pola kontribusi.
  - Terlaksananya Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Nagari bagi wali nagari/kepala desa pola kontribusi.

- Terlaksananya Diklat Pengelolaan Perencanaan pembangunan nagari/desa bagi wali nagari/ kepala desa pola kontribusi.
- Terlaksananya Diklat Pengelolaan Administrasi pemerintahan nagari/desa bagi wali nagari/ kepala desa pola kontribusi.
- Terlaksananya Diklat Pengelolaan Aset nagari/Desa bagi wali nagari/kepala desa pola kontribusi.
- Terlaksananya Diklat legal drafting bagi wali nagari/kepala desa pola kontribusi.
- Terlaksananya Diklat Peningkatan Kompetensi Bagi Lurah pola kontribusi.
- Terlaksananya Diklat Pendidikan Dasar Bagi CPNS Gol II Pola Kontribusi.
- Terlaksananya Diklat Pendidikan Dasar Bagi CPNS Gol III Pola Kontribusi.
- Terlaksananya Diklat Teknis Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja.
- Terlaksananya Diklat Teknis Manajemen Bencana.
- Terlaksananya Peningkatan Standar Penyelenggaraan Diklat Teknis.
- Terlaksananya Diklat Teknis Pengelola Aset Untuk Perangkat Nagari.
- Terlaksananya Diklat Teknis Standar Akuntansi Pelaporan Berbasis Akrua.
- Terlaksananya Diklat Teknis Penyusunan LAKIP.
- Terlaksananya Diklat Teknis Training of Course.
- Terlaksananya Diklat Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah.
- Terlaksananya Diklat Fungsional Pengawas Sekolah.
- Terlaksananya Peningkatan.
- Standar Penyelenggaraan Diklat Fungsional.
- Terlaksananya Diklat Fungsional Penghitungan Angka Kredit Guru.
- Terlaksananya Diklat Fungsional Analisis Kepegawaian.
- Terlaksananya Diklat Calon Pengawas Sekolah.
- Terlaksananya Diklat Fungsional Pengelola Barang dan Jasa.
- Terlaksananya Diklat Fungsional Calon Widyaiwara.

- Terlaksananya Diklat Fungsional Pengendalian Lingkungan Hidup.
- Terlaksananya Pengelolaan Peningkatan Pendidikan Aparatur dan IPDN.

**c. Outcomes**

- 1) Persentase Administrasi layanan kepegawaian yang dikelola dengan baik.
- 2) Persentase database kepegawaian yang mutakhir.
- 3) Persentase PNS yang ditempatkan sesuai kompetensi.
- 4) Persentase kesesuaian formasi dengan Ketersediaan ASN.
- 5) Persentase Administrasi layanan kepegawaian yang dikelola dengan baik.
- 6) Persentase database kepegawaian yang mutakhir.
- 7) Persentase PNS yang ditempatkan sesuai kompetensi.
- 8) Persentase kesesuaian formasi dengan Ketersediaan ASN.

**8. Fungsi Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Fungsi Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumatera Barat Daya Manusia mendapat alokasi APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.6.073.633.314,- dan realisasi Rp.4.863.142.737,70 (80,07 %), untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

**a. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistim Capaian Kinerja dan pengelolaan Keuangan.
- 6) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dengan kegiatan :
  - Peningkatan dan Pengembangan Sumber Belajar.
  - Sertifikasi Kompetensi Aparatur.
  - Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
  - Peningkatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
  - Pengendalian dan Penjaminan Mutu Diklat.
  - Penyusunan Statistik Diklat, Kalender dan Buletin Diklat.

- Akreditasi Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan; Penelitian Widyaiswara.
- Pengelolaan Angka Kredit Widyaiswara.
- Rapat koordinasi perencanaan dan forum OPD kediklatan.
- Uji Kompetensi Sertifikasi (Pola Kontribusi).

**b. Realisasi Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran Rp.3.415.085.469,- dan realisasi sebesar Rp.2.956.215.811,70 (86,56 %).
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan anggaran Rp.541.109.900,- dan realisasi sebesar Rp.493.201.263,- (91,15 %).
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan anggaran Rp.68.456.000,- dan realisasi sebesar Rp.68.456.000,- (100 %).
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan anggaran Rp.112.672.600,- dan realisasi sebesar Rp.110.064.300,- (97,69 %).
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistim Capaian Kinerja dan pengelolaan Keuangan, dengan anggaran Rp.324.764.275,- dan realisasi sebesar Rp.304.378.122,- (93,72 %).
- 6) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dengan anggaran Rp.1.168.545.070,- dan realisasi sebesar Rp.930.827.241,- (57,76 %), dengan *output* :
  - Terlaksananya pengembangan sumber belajar (pengelolaan kepustakaan, modul kurikulum/silabi, laboratorium) .
  - Terlaksananya Uji Kompetensi kepada 48 orang Aparatur dalam jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan 12 orang Penyuluh Pertanian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
  - Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
  - Terlaksananya pengendalian internal di lingkungan BPSPDM provinsi Sumatera Barat dengan melaksanakan SPIP dan menyediakan 10 dokumen SPIP.
  - Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat aparatur agar terjaminnya mutu diklat.
  - Terlaksananya Penyusunan Buku Statistik Diklat, Kalender Diklat dan Buletin Informasi Diklat.

- Terlaksananya reakreditasi pelaksanaan Diklat Pimipinan dan Prajabatan di BPSDM Provinsi Sumatera Barat.
- Terlaksananya fasilitasi penelitian widyaiswara di BPSDM Provinsi Sumatera Barat.
- Terlaksananya pelayanan perhitungan angka kredit widyaiswara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Hasil kesepakatan Rakor dengan OPD di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.
- Terlaksananya melaksanakan uji kompetensi dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kapasitas aparatur fungsional tertentu dilingkungan pemerintah provinsi, kab/kota se-Sumatera Barat.

**c. Permasalahan dan Solusi**

1) Permasalahan :

- Pada Program Pendidikan Kedinasan terdapat 19 kegiatan diklat pola kontribusi dengan total anggaran sebesar Rp.6.667.374.000,- yang batal dilaksanakan karena tidak terpenuhinya jumlah kouta peserta. Anggaran tersebut sebenarnya sudah diusulkan untuk dilakukan penghapusan pada proses perubahan anggaran tahun 2018. Namun karena terdapat beberapa permasalahan dalam sistem penganggaran dan koordinasi antar OPD pembuat kebijakan terkait anggaran perubahan, maka 19 kegiatan yang telah diusulkan untuk dihapuskan tersebut tetap muncul dalam APBD Perubahan tahun 2018. Hal ini mengakibatkan rendahnya capaian kinerja BPSDM Provinsi Sumatera Barat baik dari segi realisasi keuangan maupun fisik kegiatan.
- Pada Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur terdapat 1 kegiatan Uji Kompetensi Sertifikasi Pola Kontribusi dengan anggaran sebesar Rp.433.000.000,- yang juga batal dilaksanakan. Dana untuk kegiatan yang sama ternyata sudah tertampung pada anggaran Dana Dekonsentrasi APBN, akibatnya banyak peserta yang lebih memilih untuk ikut dalam kegiatan Sertifikasi Kompetensi Aparatur dimana untuk mengikuti kegiatan tersebut peserta tidak dibebankan dengan kewajiban membayar biaya kontribusi. Hal ini menyebabkan kegiatan Uji Kompetensi Sertifikasi Pola Kontribusi dengan anggaran sebesar Rp.433.000.000,- harus dibatalkan. Terhadap kegiatan yang batal ini sebenarnya sudah

diusulkan untuk dilakukan penghapusan anggaran kegiatannya pada proses perubahan anggaran tahun 2018. Namun karena terdapat beberapa permasalahan dalam sistem penganggaran dan koordinasi antar OPD pembuat kebijakan terkait anggaran perubahan, maka kegiatan ini tetap muncul dalam APBD Perubahan tahun 2018. Hal ini mengakibatkan rendahnya capaian kinerja BPSDM Provinsi Sumatera Barat baik dari segi realisasi keuangan maupun fisik kegiatan.

- Disamping permasalahan-permasalahan diatas terdapat hal yang tidak terantisipasi sebelumnya yaitu tidak diprediksinya pembatalan pengiriman peserta dari kabupaten/kota dan tidak adanya aturan yang mengikat bagi Instansi yang mengikutsertakan aparaturnya untuk mengikuti diklat. Apabila kurangnya jumlah peserta diketahui pada saat perencanaan kegiatan dan penganggaran sampai dengan penetapan APBD Provinsi Sumatera Barat, maka masih bisa diantisipasi dengan membatalkannya di Perubahan APBD, namun jika kurangnya peserta pada saat sudah melewati jadwal perubahan APBD hal ini tentu berakibat kepada capaian kinerja akhir tahun yang rendah.
- Estimasi anggaran saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan akan pelaksanaan diklat yang cukup *urgent*. Hal ini disebabkan karena tidak terrekomendasinya penambahan anggaran untuk penyelenggaraan diklat dengan sumber dana APBD murni.
- Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pasca Diklat, masih ditemui hal-hal sebagai berikut :
  - Pemberdayaan alumni diklat belum ditempatkan pada pelaksanaan tugas yang sesuai dengan kompetensi yang telah dimilikinya.
  - Pengiriman peserta Diklat oleh Instansi pengirim masih berorientasi kepada aparatur yang tidak produktif (aparatur yang tidak memiliki uraian tugas yang jelas).
  - Rekomendasi yang telah disampaikan kepada instansi pengirim untuk pemberdayaan alumni diklat belum ditanggapi secara serius, sehingga masih bersifat penyelenggaraan (proses) belum melihat kualitas secara keseluruhan seperti pemanfaatan alumni, kesesuaian alumni diklat dengan tempat penugasan.



- Masih ditemui permasalahan pelaksanaan Diklat melalui Pola Kontribusi, yaitu dengan menetapkan target pendapatan yang telah ditetapkan akan menjadi capaian target kinerja OPD, dan apabila target tidak tercapai akan mempengaruhi capaian target kinerja OPD. Hal ini terjadi apabila kabupaten/kota tidak mengirimkan peserta, maka akan terjadi pula pengurangan pendapatan, sementara untuk pengurangan kegiatan belanja tidak dapat dilakukan karena sudah menjadi target APBD murni.

## 2) Solusi

- Adanya regulasi yang menyatakan dengan tegas, bahwa pengiriman peserta diklat harus sesuai dengan uraian tugas yang diberikan kepada calon peserta sehingga akan dapat menghasilkan alumni diklat yang siap pakai, hasilnya mereka akan mampu berkinerja sesuai tupoksi dan pencapaian tujuan visi dan misi organisasi.
- Kuantitas dan kualitas Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan dan Pasca Diklat perlu ditingkatkan (Perlu dianggarkan). Diharapkan jika anggaran monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dan Pasca Diklat lebih memadai sehingga pelaksanaan Monev dapat dilaksanakan secara proporsional. Dan pada akhirnya visi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat Profesional Dalam Pendidikan dan Pelatihan Aparatur benar-benar tercapai baik dari sisi SDM, sarana dan prasarana, serta Kurikulum. Hal ini juga dimaksudkan agar hasil dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat benar-benar dimanfaatkan dalam efektivitas perencanaan kebutuhan diklat dimasa yang akan datang.
- Pelaksanaan Diklat melalui Pola Kontribusi sangat erat kaitannya dengan capaian kinerja OPD, agar tidak menimbulkan permasalahan capaian kinerja sebagaimana dimaksud. Solusinya adalah percepatan Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan salah satu solusi yang perlu menjadi pertimbangan.

## 9. Fungsi Penunjang Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Dengan Pemerintah Pusat

Fungsi Penunjang Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Dengan Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan oleh Badan Penghubung mendapat alokasi APBD

Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.10.418.193.698,- dengan realisasi Rp.9.343.143.766,- (89,68%), untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

**a. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistim Capaian Kinerja dan pengelolaan Keuangan.
- 6) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan, dengan kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu.
- 7) Program Pengembangan Data dan Informasi dengan Kegiatan: Pembuatan buku agenda Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- 8) Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah, dengan kegiatan:
  - Akselerasi pengurusan kepentingan ke pemerintah pusat.
  - Sumatera Barat Expo.
  - Partisipasi dan promosi potensi daerah pada event promosi.
  - Peningkatan kualitas kerohanian dan ceramah agama bagi Bakor masyarakat minang.
  - Dialog interaktif pejabat provinsi, kabupaten/kota dengan tokoh masyarakat minang perantau melalui media.
  - Sosialisasi program pembangunan Sumatera Barat kepada tokoh masyarakat minang Jabodetabek.
  - Peningkatan Kualitas Promosi Anjungan Sumatera Barat TMII.
  - Penampilan Anjungan Sumatera Barat pada Even TMII.
  - Pagelaran Ekonomi Kreatif Kabupaten/Kota/BAKO IKM di Anjungan.
  - Pagelaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Anjungan Sumatera Barat TMII.
- 9) Program Peningkatan Pelayanan Publik, dengan kegiatan :
  - Pengelola asrama mahasiswa putra dan putri minang yogyakarta dan bogor
  - Pembinaan dan Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan

**b. Realisasi Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran Rp.4.003.547.998,- dan realisasi sebesar Rp.3.534.991.365,- (88,30 %).
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,dengan anggaran Rp.1.010.757.500,- dan realisasi sebesar Rp.889.407.785,- (87,99 %).
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan anggaran Rp.52.360.000,- dan realisasi sebesar Rp.52.344.000,- (99,97 %).
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan anggaran Rp.78.406.000,- dan realisasi sebesar Rp.65.733.328,- (83,84 %).
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistim Capaian Kinerja dan pengelolaan Keuangan, dengan anggaran Rp.126.835.088,- dan realisasi sebesar Rp.106.906.550,- (84,29 %).
- 6) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan, dengan anggaran Rp.1.135.120.300,- dan realisasi sebesar Rp.974.627.441,- (85,86 %), dengan Output : Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan tamu pada kantor penghubung selama 1 (satu) tahun.
- 7) Program Pengembangan Data dan Informasi, dengan anggaran Rp.37.880.000,- dan realisasi sebesar Rp.24.359.700,- (64,31 %), dengan Output : Terlaksananya Pembuatan buku agenda Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- 8) Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah, dengan anggaran Rp.3.720.962.212,- dan realisasi sebesar Rp.3.449.492.147,- (92,70 %), dengan *Output* :
  - Terlaksananya kegiatan ceramah dibidang kerohanian/agama serta silaturahmi antar sesama perantau minang 1 kali;
  - Terselenggaranya dialog interaktif antara pejabat 3 kali dialog interaktif;
  - Terlaksananya kegiatan sosialisasi hasil-hasil pembangunan Sumatera Barat kepada masyarakat minang se-Jabodetabek 1 kali;
  - Terselenggaranya Sumatera Barat Expo 2018 1 kali;

- Terselenggaranya Koordinasi dan pengurusan kepentingan daerah ke kementerian, instansi/ lembaga pusat 1 tahun;
  - Kerjasama promosi potensi daerah pada kegiatan promosi di Jakarta 1 kali;
- 9) Program Peningkatan Pelayanan Publik, dengan anggaran Rp.252.324.600,- dan realisasi sebesar Rp.245.281.450,- (97.20%), dengan *Output* : Terlaksananya pengelolaan asrama mahasiswa minang di Yogyakarta dan Bogor.

**c. Outcomes**

- 1) Meningkatnya pelayanan Kedinasan.
- 2) Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan ketatalaksanaan pemerintah daerah.
- 3) Meningkatnya pelayanan publik.